



Semua “Dihandle” Google Tugas Sekolah Apa?

Muchlas Samani



Universitas Negeri Surabaya
UNIVERSITY PRESS

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Semua 'Dihandle' Google, Tugas Sekolah Apa?, Muchlas Samani – Surabaya; Unesa University Press, 2016.

340 + 18 halaman + daftar pustaka + lampiran: 14,5 X 21

ISBN :

SEMUA 'DIHANDLE' GOOGLE, TUGAS SEKOLAH APA?

Penulis:

Muchlas Samani

Penyunting:

Adriono

Desain Sampul:

Martadi

Layout :

Sulistiyorini

Ilustrasi:

Unduhan internet

Penerbit :

Unesa University Press
Kampus Ketintang, Gayungan, Surabaya

Cetakan Pertama:

Desember 2016

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
Copyright 2016
All Rights Reserved

Kata Pengantar Rektor

Sungguh menarik membaca buku yang ditulis oleh Prof. Muchlas Samani, Rektor ke-9 Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Buku ini merupakan hasil pemikiran Pak Muchlas sejak tahun 2011 sampai tahun 2016. Sejak saya mengenal beliau dari dekat, ketika saya sebagai Pembantu Rektor di bidang kemahasiswaan, Pak Muchlas memiliki kebiasaan menulis.

Bisa dikatakan bahwa beliau hampir tidak pernah berhenti berpikir baik dalam bentuk gagasan yang bersifat visioner, maupun gagasan untuk merespon berbagai persoalan khususnya dalam bidang pendidikan. Gagasan-gagasan besarnya juga sudah ditulis dan diterbitkan dalam buku, diantaranya buku “*Menggagas Pendidikan Bermakna.*” Bahkan selama Pak Muchlas menjadi rektor ada tradisi dalam majalah Unesa yaitu “*Kolom Rektor*” sebagai ruang bagi rektor untuk menuangkan gagasannya sesuai dengan

tema yang telah ditentukan oleh redaksi.

Memang tidak semua orang memiliki kemampuan dan kebiasaan menulis. Meskipun menulis sebenarnya merupakan hasil dialog intelektual seseorang dengan diri sendiri, ternyata tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Untuk bisa menulis, dibutuhkan kepekaan intelektual si penulis, yang ditandai dengan kegelisahan atas suatu fenomena. Kegelisahan tersebut diwujudkan dalam bentuk pertanyaan, yang kemudian merangsang intelektual penulis untuk mencari jawaban. Jawaban-jawaban atas berbagai pertanyaan sebagai bentuk dialog intelektual tersebut, jika dituliskan menghasilkan suatu tulisan.

Banyak orang bisa berbicara, namun hanya sedikit orang yang bisa berbicara dengan baik (jelas dan runtut). Dan diantara orang yang bisa berbicara dengan baik tersebut, hanya sedikit yang bisa menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan yang baik (jelas, runtut, dan mudah dibaca). Sudah tentu jumlah orang yang bisa menulis sebaik ketika berbicara jumlahnya semakin sedikit. Diantara rektor Unesa yang bisa menulis sebaik dia berbicara adalah Budi Dharma dan Muchlas Samani.

Untuk menghasilkan tulisan yang baik, dibutuhkan modal pengetahuan (*stock of knowledge*), kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemampuan reflektif dan abstraktif, serta kepekaan intelektual. Ini berarti seorang penulis memiliki kebiasaan membaca sebagai sumber pengetahuan. Sumber bacaan yang dibaca penulis akan berpengaruh terhadap bidang dan kualitas tulisan. Selain sumber bacaan, kualitas tulisan seseorang juga dipengaruhi oleh kemampuan berpikirnya. Daya kritis dan abstraksi, serta refleksi penulis akan menentukan bobot tulisan seseorang. Oleh karena itu, suatu tulisan bisa dikategorikan sebagai reportase, il-

miah, dan filosofis.

Tulisan-tulisan Pak Muchlas, bukan hanya sekedar reportase, bahkan juga lebih dari tulisan ilmiah, tetapi bisa dikategorikan sebagai tulisan filosofis, karena bukan hanya sebagai analisis kritis, tetapi juga berpandangan jauh ke depan. Hal ini terlihat dari salah satu tulisan beliau yang kemudian dijadikan judul buku ini, yaitu: “*Semua “Dihandle” Google, Tugas Sekolah Apa?*” Judul ini jelas mengabarkan kegelisahan dan sekaligus pandangan jauh ke depan. Perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang informasi tentu akan berdampak dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga perkembangan teknologi informasi juga akan berdampak kepada dunia pendidikan. Asumsi inilah yang menyebabkan kegelisahan Pak Muchlas sebagai ilmuwan dan sekaligus sebagai pendidik.

Kegelisahan tersebut terus mengalir dalam berbagai bentuk pertanyaan, yang diawali dengan tantangan yang akan dihadapi bagi dunia pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kebijakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi untuk menghadapi tantangan, sampai kepada apa yang harus dilakukan oleh guru.

Secara keseluruhan tulisan dalam buku ini menggambarkan suatu alur pemikiran yang runtut, dan konsisten dalam bidang pendidikan, sebagian dunia yang selama ini digeluti oleh Pak Muchlas. Pengalaman beliau dalam bidang akademis, birokrasi (ketika menjadi Direktur Kelembagaan, Kemendikbud), dan manajerial (ketika menjadi rektor) semakin menambah ketajaman dan kekomprehensifan dari buku ini.

Meskipun demikian, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang menjadi judul buku ini, atau sekedar menegaskan kembali dari apa yang sebenarnya sudah ditulis oleh Pak Muchlas dalam buku ini. Meskipun semua telah



'*dihandle*' oleh google, sekolah masih sangat penting dan diperlukan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan suatu tempat belajar, suatu komunitas, dan sekaligus sebagai tempat untuk menyemai budaya. Sekolah merupakan tempat untuk membangun karakter anak melalui metode pembiasaan dan keteladanan oleh para guru.

Dengan semakin berkurangnya fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan, karena kesibukan para orang tua, dan semakin berkurangnya kepedulian masyarakat terhadap perilaku anak, sekolah menjadi lembaga yang secara terstruktur dirancang untuk tujuan pendidikan. Kemampuan berpikir anak dikembangkan dan dibentuk karakternya sehingga menjadi insan yang cerdas, berakhlak mulia, dan mandiri.

Secara sosiologis sekolah merupakan "jembatan" untuk mengantarkan anak (generasi muda) memasuki kehidupan masyarakat. Di sekolah anak-anak dikenalkan nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dan norma tersebut juga ditanamkan kepada para siswa melalui suatu kurikulum yang telah ditetapkan. Di sekolah anak dididik dan dipersiapkan untuk memasuki hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan harapan tidak terjadi perilaku menyimpang.

Di sekolah anak-anak berinteraksi secara langsung dengan teman-temannya untuk saling mengenal, dan memahami budayanya masing-masing. Melalui bimbingan para guru dan budaya yang dibangun sekolah, anak-anak dilatih untuk menerima, menghargai, dan menghormati sehingga tumbuh sikap toleransi diantara mereka.

Prof. Dr. Warsono, MS.

Rektor Universitas Negeri Surabaya

Saya Sendiri Semula Ragu

Ketika Mas Adriono mengatakan bahwa banyak catatan di blog saya layak dijadikan buku, saya sendiri semula ragu. Saya memang biasa mengisi blog, tetapi sekadar menuangkan apa yang saya lihat, apa yang saya alami, dan apa yang saya pikir.

Isinyapun ringan-ringan, misalnya tentang ditangkap polisi di Roma, juga Pak Min si penjual bunga yang ternyata sangat pandai. Memang ada yang agak serius, misalnya tentang tantangan pendidikan di era *cyber*. Namun itupun ditulis dengan candaan. Sama sekali tidak terlintas pikiran untuk mengumpulkan menjadi buku. Saya agak “pede” setelah melihat tulisan itu dipilih dan dipilah, sesuai dengan topiknya.

Saya sudah lama mengenal Mas Adriono, bahkan beliau yang mengedit buku saya *Menggagas Pendidikan Bermakna*, pada tahun 2007. Beliau mantan wartawan dan pernah

juga menggeluti dunia pertelevisian. Beliau juga penulis dan pengedit buku. Seingat saya sudah puluhan buku yang diedit. Jadi, ya saya percaya saja kepada beliau.

Pernah ada mahasiswa bertanya, kok Bapak masih sempat mengisi blog? Saya jawab, itu sekadar menuangkan pikiran. Mau bercerita kepada orang lain, seringkali tidak punya waktu. Dari pada membebani otak ya ditulis saja. Syukur kalau ada yang membaca, kalau tidak ya tidak apa-apa. Itulah, sebabnya saya hampir tidak pernah memberi tanggapan balik, jika tulisan blog itu ditanggapi orang.

Saat ini pendidikan memang mengalami tantangan yang luar biasa. Dunia di luar tembok sekolah dan universitas telah berubah sangat besar. Kita bandingkan perlengkapan dapur kita sekarang dengan dapur kita 30 tahun lalu. Sangat berbeda. Sekarang ada mesin cuci, kompor gas atau kompor listrik, seterika listrik, *microwave* dan sebagainya. Tiga puluh tahun lalu, apa isinya? Mungkin kita sudah lupa. Mungkin ada kompor minyak tanah, seterika dengan arang dan papan untuk menyikat saat mencuci pakaian. Kantor kita sekarang ber-AC, setiap pegawai menghadapi komputer atau laptop, gaji lewat bank, presensi pakai *finger print* dan sebagainya. Tentu itu jauh dengan 30 tahun lalu, yang saat itu mesin ketik dianggap barang mewah. Pada hal menurut Eric Schmidt dan Jared Cohen kemajuan teknologi akan terus menyuplai rumah tangga dan kantor dengan perlengkapan yang semakin canggih. Jujur saya tidak dapat membayangkan jika 3D printer sudah menjadi perlengkapan sehari-hari di kantor, seperti apa pola kerja besuk.

Tetapi apa yang terjadi di dalam sekolah dan universitas? Tidak banyak berbeda dengan 30 tahun lalu. Siswa/mahasiswa masih belajar di kelas dengan duduk manis, men-

dengarkan penjelasan guru/dosen. Diskusipun membahas bahan dari buku atau informasi dari guru/dosen. Guru dan dosen masih menjadi “dewa” sumber ilmu sekaligus penentu nasib siswa dan mahasiswa. Apa yang dipelajari? Coba kita tengok kurikulumnya. Juga tidak jauh berbeda dengan 30 tahun lalu.

Pada hal, “*Mbah Google*” sudah menjadi “dukun” bagi semua orang. *Google* dan *search engine* lainnya sanggup menyuguhkan informasi apa saja yang kita perlukan. Itu-pun dapat dilakukan dalam waktu sekejap. Ensiklopedia yang di masa lalu menjadi simbol intelektual dan banyak dipajang di kantor atau rumah orang sebagai simbol gengsi, sekarang sudah tidak laku karena dikalahkan wikipedia yang dapat diakses lewat gadget. Sekarang kita dapat melakukan diskusi virtual walapun pesertanya berada di berbagai benua. Banyak eksperimen yang kini dapat dilakukan melalui komputer. Kini mulai muncul Robinhood baru dengan menyediakan perpustakaan digital dan semua orang dapat mengakses dan bahkan mengunduh buku dan jurnal secara gratis.

Oleh karena itu dapat dipahami jika orang seperti Tony Wagner dkk. menggugat dunia pendidikan, karena dianggap tidak mampu memberikan bekal apa yang diperlukan oleh anak didik supaya hidup sukses setelah dewasa. Wajar jika Jorgen Moller mengatakan, yang penting bagi pendidikan ke depan, bukan “berapa lama orang sekolah/kuliah” tetapi “kalau lulus bisa apa?” Apakah kalau lulus orang mampu menghadapi problema nyata di kehidupan? Wajar jika John Naisbitt mengatakan, besuk para doktor bukan lahir dari kampus tetapi dari perusahaan semacam IBM. Wajar jika Bernie Trilling dan Thomas Fadel bereksperimen membuat SMA tanpa matapelajaran.

Nah, pertanyaannya kapan sekolah/universitas berubah? Apakah struktur persekolahan seperti saat ini masih cocok? Apakah kurikulum seperti saat ini masih relevan? Apakah pola pembelajaran yang saat ini diterapkan masih dapat dipertahankan? Apakah pola penilaian yang saat ini kita gunakan masih valid? Bagaimana dengan peran guru dan dosen yang sudah disaingi oleh *Mbah Google*? Sederet pertanyaan yang jujur saya sendiri tidak tahu jawabnya. Saya hanya ingin mengajak, siapapun yang merasa ahli pendidikan, pemerhati pendidikan, dan punya kepentingan pendidikan, untuk memikirkannya.

Tenggilis Utara-Desember 2016
Muchlas Samani

Kata Pengantar Editor

Tidak banyak orang yang memiliki ketekunan untuk menulis secara rutin. Apalagi jika orang tersebut memiliki kesibukan yang padat. Prof. Muchlas Samani adalah sosok yang masuk dalam kelompok yang sedikit itu.

Di sela aktivitas dan mobilitasnya yang tinggi, toh beliau mampu menyempatkan diri duduk sejenak menghadap laptop. Lalu lahirlah catatan-catatan dalam aneka tema dan kemudian tulisan itupun diunggah ke dunia maya lewat blog pribadinya: muchlassamani.blogspot.com.

Meskipun sudah beredar di dunia maya, dan bisa ditegnok setiap saat dari *smartphone* yang berada pada setiap genggam tangan, tetap saja tidak semua pembaca familiar dengan dunia *online*. Bahkan mereka yang sudah terbiasa berselancar di internet tetap ada yang mengaku lebih nyaman membaca edisi cetak ketimbang tulisan digital.

Maka kepada merekalah buku ini dipersembahkan. Kiranya kehadiran kumpulan tulisan masih tetaplah berguna.

Ya, tulisan-tulisan yang hadir di dalam buku ini memang berasal dari kumpulan catatan penulis yang rutin muncul di blog pribadi dalam kurun tahun 2011 hingga 2016. Tentu tidak semua karya dapat dirangkum di buku ini, sebab jika hal itu dilakukan maka akan membuat buku menjadi terlalu tebal. Apalagi di dalam blog juga terdapat tulisan-tulisan yang sekadar respon sesaat, candaan ringan, maupun status pendek yang tidak terlalu relevan bila diabadikan ke dalam buku.

Maka terpaksa dilakukan pemilihan dan pemilahan naskah. Dilakukan pengelompokan, meski secara longgar, berdasar tema tertentu agar lebih mudah diikuti pembaca. Pada sebagian naskah juga dilakukan *up date* data agar sesuai dengan keadaan dan kontekstual dengan kekinian. Namun pada beberapa tulisan lain sengaja dipertahankan keasliannya untuk memberikan gambaran sesuai dengan kondisi saat karya tersebut dibuat.

Aneka tema muncul dalam buku ini. Pak Muchlas tampaknya suka mencatat apa saja secara spontan setelah melihat kejadian maupun usai mengikuti sebuah kegiatan. Responnya muncul begitu melihat wajah-wajah wisudawan Bidik Misi yang sumringah, ketika menjadi narasumber dalam sebuah forum, atau saat berkunjung ke luar negeri.

Melihat responnya dalam karya tulis tersebut segera tampak kedalaman pemikiran dan wawasan, serta besarnya kepedulian terhadap problem konkret yang ada di masyarakat, terutama bidang pendidikan yang amat dicintainya.

Dipersoalkan, tes baca tulis yang diberlakukan bagi calon siswa SD, maraknya ketidakjujuran dalam UN, hingga hasil

UKG yang kurang menggembirakan. Beliau juga rajin mencatat tentang gairah anak-anak muda yang rela menjadi guru di daerah terpencil, termasuk menulis sisi positif para publik figur yang layak diteladani.

Ada juga esai yang lebih serius terkait dengan tantangan ke depan dan kebijakan di dunia pendidikan kita. Ambil contoh: tantangan berat para pendidik di zaman cyber (*Semua Dihandle Google, Tugas Sekolah Apa?*), tentang perencanaan pendidikan di Indonesia yang menyimpan sejumlah masalah (*Man Power Planning Vs Human Development*), dan banyak lagi topik menarik lainnya.

Pak Muchlas memang pencatat yang aktif. Ibarat wartawan, beliau sukses menghadirkan karya-karya “reportase” yang apik dan inspiratif. Gaya bahasanya mengalir ringan tapi tidak mereduksi bobot substansi yang disampaikan. Menulis problem kompleks dalam uraian yang sederhana bukanlah hal gampang bagi kaum akademisi.

Karena buku ini merupakan kumpulan bunga rampai, maka tidak terhindarkan akan terjadi semacam repetisi maupun irisan ulasan di sana-sini. Itu bukan duplikasi, tetapi justru menunjukkan perhatian dan komitmen penulis yang cukup intens kepada topik tertentu. Malah dari pengulangan pembahasan dapat makin memperdalam pemahaman pembaca.

Akhirnya, semoga buku ini membawa manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kehadirannya segera akan disusul dengan kelahiran buku baru berikutnya. Kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan penerbitan di masa mendatang.

Surabaya, Desember 2016
Editor

KATA PENGANTAR
EDITOR

xiii

SEMUA 'DIHANDLE' GOOGLE,
TUGAS SEKOLAH APA?

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar Rektor.....	iii
Kata Pengantar Penulis	vii
Kata Pengantar Editor.....	xi
BAGIAN 1: TANTANGAN KE DEPAN.....	1
1. Perlu Paradigma Baru dalam Merancang Pendidikan.....	3
2. Man Power Planning Vs Human Development	7
3. Bersiap Menyongsong Era Pasifik	13
4. Menjadi Pembelajar di Era Cyber	19
5. Pendidikan Formal: Siapkan Praktisi atau Periset?	23
6. Discontinuity	27
7. Semua 'Dihandle' Google, Tugas Sekolah Apa?	31
8. Mengarusutamakan Pendidikan Karakter	35

BAGIAN 2: KEBIJAKAN PENDIDIKAN 47

1. Desentralisasi yang Tergesa49
2. Desentralisasi Pendidikan, Pembagian Tugas Harus Jelas ...55
3. Pasal Penting yang Terlupakan61
4. Komite Nasional Reformasi Tata Kelola Guru65
5. Merespon Analisis Wapres71
6. Guru, MBS, dan Kurikulum77
7. Masih Perlukah Pendidikan Formal,81
Nonformal, dan Informal Dipisahkan?
8. Menyoal TPA Untuk Seleksi Masuk SMA85
9. Bos Itu untuk Apa dan untuk Siapa?89
10. Angka Drop Out Masih Menyedihkan93
11. Menyemai Budi Pekerti, Jangan Seperti P497
12. Ironi Pengangguran Lulusan SMK101
13. 'Tepakna Awakmu Dhewe'105

BAGIAN 3: PENDIDIKAN TINGGI..... 109

1. Merger Universitas Besar, Why Not?111
2. Mengelola Universitas: Antara Ilmu dan Bisnis115
3. Mengadopsi Teori "Mobil Kijang"119
4. Tri Darma sebagai Akselarator Mutu123
5. Dosen Muda Harus Studi Ke Luar Negeri127
6. Waspadai 'Over Supply' LPTK131
7. Kendalikan Pendidikan Profesi Guru137
8. Kuliah Bilingual di PTN, Harus143
9. Lulusan IPA Banyak yang Pilih Soshum147
10. Hasil UKG adalah Cermin151
11. 8 Dari 11 Lulusan Bidik Misi 'Cum Laude'155

BAGIAN 4: GURU DAN PEMBELAJARAN 161

1. Guru Hebat, Guru Inspiratif163
2. Guru Sekolah Terpencil, Itu Pahlawan169

3. Pendidikan Guru di Era Digital, Seperti Apa?	173
4. Bibit Calon Guru Makin Bagus	177
5. Jangan Selalu Menyalahkan Guru	181
6. Masuk SD Tes Baca Tulis, Perlukah?	185
7. Membangun Karakter Lewat Inkulturasi	189
8. Kurikulum Penting, Tapi	193
9. Siswa Kita Jeblok di PISA, Mengapa?	199
10. Merisaukan Perilaku Anak-Anak	205
11. Hitam Putih Tim Sukses UN	209
12. Yang UN Siswa, yang Cemas Guru dan Orangtua.....	213

BAGIAN 5: KECAKAPAN HIDUP 217

1. Menulis Itu Menata Nalar	219
2. Mengapa Kemampuan Menulis Mahasiswa..... Kita Sangat Rendah?	223
3. Imbangkan Budaya Tutar dengan Budaya Tulis.....	229
4. Generic Skills Sebagai Ruh, Specific Skills Sebagai Wadag	233
5. Kreativitas, Bagaimana Mengembangkannya?	239
6. Kreativitas Itu Ternyata Tidak Instan	243
7. Inside The Box: Kreatif Dapat Disistematisasikan?	247
8. Inovasi dan Daya Juang Mbah Kung	253
9. Haruskah Kita Bisa Berbahasa Inggris	257
10. What Winners are Made	263

BAGIAN 6: PRIBADI INSPIRATIF 269

1. Defi Ingin Majukan Anak Talaud	271
2. Lorentino Guterres Berpikir ke Depan	277
3. Kadir Baraja, Infoglobal, dan Pesawat Tempur.....	283
4. Kuliah Inspiratif Ismai Nachu	289
5. Iqra dan Kesederhanaan Prof Budi Darma	293
6. Yudi Latif dan Kisah Karakter	297
7. Mbak Yos, Mantan TKW yang Eksis.....	301

8. Bu Sarce Mendidik Anak TKI	307
9. Pak Suwarsono dan Mesin Faks KPK	311
10. Bagus Adimas Tunanetra yang Istimewa.....	315
11. Refleksi Diri Cara Gus Mus	319

Lampiran

Catatan Akhir	323
Tentang Penulis	337



Bagian 1

TANTANGAN KE DEPAN

1

Perlu Paradigma Baru dalam Merancang Pendidikan

*Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya,
karena mereka hidup bukan di zamanmu.*

(Ali Bin Abi Thalib)

Mengapa isi pendidikan sering tertinggal jauh dari tuntutan kehidupan? Pertanyaan ini merisaukan banyak orang, termasuk Tony Wagner. Lalu dia mengadakan serangkaian riset dan hasilnya dituangkan dalam buku bagus berjudul *The Global Achievement Gap* (2008). Dalam buku itu Wagner mengajukan statemen betapa pentingnya *the survival skills* (meliputi *critical thinking and problem solving, collaboration across network and leading by influence, agility and adaptability, initiative and entrepreneurialism, effective oral and written communication, accessing and analyzing information* dan *curiosity and imagination*).

Dua tahun berikutnya muncul lagi buku *21st Century Skills* karya Bernie Trilling & Charles Fadel, yang nadanya

”

Tidak ada fenomena dalam kehidupan yang dapat dijelaskan melalui satu bidang ilmu secara tuntas. Selalu butuh beberapa bidang ilmu untuk menganalisisnya. Oleh karena itu, siswa perlu berlatih membedah suatu fenomena yang terjadi di sekitar sekolah dengan menggunakan referensi berbagai mata pelajaran secara komprehensif.”

and life skills yang mencakup flexibility and adaptability, initiative and self direction, social and cross cultural skills, productivity and accountability, leadership and responsibility.

Mengapa pendidikan saat ini dianggap usang dan digugat tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan di masyarakat? Bukankah pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didik, sehingga siap menghadapi tantangan dalam kehidupan nyata? Apakah kita salah dalam merancang pendidikan, sebagaimana diungkap oleh Charles Handy dalam artikelnya *Finding Sense in Uncertainty?*

Sebenarnya hal diatas sudah pernah didiskusikan secara intens pada tahun 2002an dan bahkan di era Mendiknas Pak Malik Fajar pernah diterbitkan naskah berjudul *Kecakapan Hidup (Life Skills)*. Naskah itu intinya menjelaskan bahwa kita harus melakukan perubahan paradigma dalam merancang pendidikan. Pendidikan bukan diarahkan untuk mengumpulkan pengetahuan/informasi semata, tetapi

sangat mirip yaitu menggugat bahwa pendidikan saat ini sudah usang dan harus diubah. Trilling dan Fadel mengajukan tiga *skills* yang harus ditumbuhkan di sekolah, yaitu *learning and innovation skill* yang terdiri dari *creativity and inovation, critical thinking and problem solving, communication and collaboration, digital literacy skills* yang mencakup *information literacy, media literacy, ICT literacy, dan career*

harus diarahkan untuk mengembangkan *life skills*. Dengan *life skills* diharapkan anak didik mampu menghadapi dan mengarungi kehidupan dengan baik.

Di era informasi sekarang ini, informasi dapat diperoleh dengan mudah lewat berbagai sumber. Kini berkembang kelakar, kalau ingin dapat informasi tanya saja kepada Mbah Google. Artinya internet dapat memberi segala informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, aspek *life skills* yang perlu dikembangkan adalah kecakapan menggali informasi dari berbagai sumber, menganalisisnya secara kritis untuk memecahkan masalah secara kreatif dan bijak. Iptek berkembang secara cepat, sehingga sangat mungkin apa yang dipelajari sekarang akan segera usang, oleh karena itu belajar secara mandiri (*selflearning, selfdirection* dan *initiative*) harus dikembangkan dalam pendidikan.

Dalam praktik kehidupan, tidak ada fenomena yang dapat dijelaskan melalui satu bidang ilmu secara tuntas. Selalu diperlukan beberapa bidang ilmu untuk menjelaskan atau menganalisisnya. Oleh karena itu, siswa perlu berlatih membedah suatu fenomena yang terjadi di sekitar sekolah dengan menggunakan referensi berbagai mata pelajaran secara komprehensif. Pola ini merupakan hal baru tetapi perlu dimulai. Selama ini siswa belajar mata pelajaran secara terpisah, seakan tidak ada hubungan satu dengan yang lain.

Dalam kehidupan, di dunia kerja maupun dalam kehidupan keseharian, seseorang selalu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Bahkan ke depan bekerja dalam tim merupakan pola kerja yang semakin kental. Oleh karena itu pendidikan harus mengembangkan aspek *social skills*, yang intinya kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Semoga. ◆

2

Man Power Planning Vs Human Development

Ketika menempuh S2 tahun 1985-1987 saya mempelajari dengan sungguh-sungguh perdebatan dua mazab perencanaan pendidikan (kalau boleh disebut begitu), yang biasa disebut dengan *Man Power Planning* dan *Human Development Approach*. Perdebatan yang tidak berujung, karena keduanya memiliki asumsi dan titik tolak yang berbeda. Setelah 30 tahun kemudian, ketika saya mengikuti *International Vocational Education and Training (VET) Conference* di Bremen Jerman, 2-4 September 2015, dua aliran itu masih terasa sangat kental.

Menurut aliran *man power planning*, pendidikan diarahkan untuk mendukung pembangunan suatu bangsa, dengan asumsi dasar, orang (individu) itu bagian dari suatu

masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu pendidikan harus membekali anak-anak muda agar pada saatnya nanti dapat berperan aktif dalam proses pembangunan masyarakat dan bangsanya. Jabaran selanjutnya, jenis pendidikan dan tingkatannya harus didasarkan atas prediksi atau arah pembangunan bangsanya. Negara-negara Eropa kontinental merupakan negara-negara yang menganut paham itu, walaupun ada yang sangat ketat ada pula yang longgar.

Untuk mendukung pola itu dan sekaligus untuk mengupayakan agar seseorang dapat menempuh pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, maka bimbingan dan konseling menjadi sangat penting. Sejak awal anak-anak sudah diarahkan untuk mengikuti alur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jalur pendidikan juga sudah disesuaikan dengan lapangan kerja yang tersedia. Harapannya, setiap orang akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, dan pekerjaan itu memang merupakan bagian dari pembangunan negara.

Negara yang menganut paham ini biasanya memiliki pendidikan kejuruan (lebih luas dari sekolah kejuruan) atau yang biasa disebut dengan VET atau TVET (*Technical and Vocational Education and Training*) yang kokoh. Jerman dan Swiss merupakan dua negara contoh. Lebih longgar sedikit, misalnya Belanda dan negara-negara sekitarnya.

Di lain pihak, *human development approach* bertolak dari pandangan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi seseorang dan tidak terkait langsung dengan pekerjaan. Sementara setiap orang memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri dan tidak ada orang lain yang memaksanya. Oleh karena itu, jenis dan tingkatan pendidikan tidak dikaitkan dengan pembangunan suatu bangsa, katakanlah perkembangan industri,

tetapi dengan ilmu pengetahuan yang diyakini menjadi bekal utama seseorang dalam mengembangkan diri.

Derivasi dari paham itu, setiap orang boleh memilih jenis dan jenjang pendidikan apa saja, sesuai dengan keinginannya. Orang juga boleh zig-zag dalam menempuh pendidikan, misalnya S1 Biologi tetapi melanjutkan ke S2 Teknik. Yang membatasi hanyalah kemampuan untuk menempuh pendidikan itu. Dengan pembatasan itu, orang akan ditanya apakah Anda mampu secara akademik dan secara finansial menempuh suatu jalur dan jenjang pendidikan?

Negara yang paling mencolok mengikuti aliran itu adalah Amerika Serikat yang sebenarnya diwarisi dari Inggris. Demikian pula Australia. Oleh karena itu, di Amerika Serikat dan Australia istilah VET atau TVET tidak banyak dikenal. Amerika menggunakan istilah CTE (*Career and Technical Education*) dan Australia menggunakan istilah TAFE (*Technical and Further Education*).

Amerika Serikat tidak memiliki SMK, namun setiap siswa SMA akan menempuh CTE sebagai matapelajaran yang dapat ditempuh di sekolahnya sendiri atau di *Training Center*. Di tingkat universitas juga dikenal *Community College* yang seringkali menyediakan program pelatihan keterampilan untuk bekerja.

Setahu saya TAFE di Australia merupakan “warung pandang” pendidikan, karena menyediakan pelatihan pendek yang hanya untuk beberapa bulan, misalnya untuk *hair dresser* (potong rambut) sampai setara S1 atau bahkan beberapa TAFE punya S2. Tentu S1 dan S2-nya mirip dengan politeknik di Indonesia.

Yang mengherankan dan sekaligus perlu kita pelajari, orang-orang di negara yang menganut paham *man*

power planning maupun *human development approach*, menghargai pekerjaan yang sifatnya keterampilan dan juga menghargai pendidikan kejuruan (TVET/VET/CTE/TAFE). Mereka tidak merasa rendah diri jika menempuh pendidikan di jalur itu dan juga tidak merasa rendah diri jika bekerja di sektor keterampilan atau sering disebut dengan *blue collar worker*.

Mungkin karena gaji pekerja seperti itu cukup tinggi dan konon lebih tinggi dibanding *white collar worker* yang rendahan. Juga karena untuk mengerjakan suatu pekerjaan keterampilan seseorang harus memiliki sertifikat. Misalnya tukang batu, tukang pasang pipa air, tukang cat harus memiliki sertifikat. Tanpa sertifikat, seseorang tidak boleh mengerjakan, walupun untuk rumahnya sendiri. Konon jika memaksa mengerjakan dan tidak ketahuan aparat, nanti akan menjadi masalah jika kebakaran atau sejenisnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Seingat saya, sampai tahun 1970-an Indonesia lebih dekat dengan *man power planning*. Mungkin mewarisi dari era penjajahan Belanda. Waktu itu, kita punya STN, SMEP, SKKP, SKN dan seterusnya. Saya tidak tahu, bagaimana penghargaan masyarakat terhadap sekolah kejuruan dibandingkan dengan sekolah umum (SMP/SMA). Saya juga tidak tahu apakah sertifikat keterampilan dipersyaratkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu.

Sejak tahun 1970-an akhir, tampaknya kita mulai bergeser ke *human development approach*. Konon waktu itu banyak ahli pendidikan/cendekiawan yang menempuh pendidikan lanjut di Amerika Serikat dan ketika pulang membawa paham baru. Saya lupa kapan pastinya, tetapi sekolah kejuruan pada jenjang SMP dihapus dan di SMA dirintis program A dan B. Dirintis Proyek Perintis Sekolah

Pembangunan (PPSP) mirip dengan *comprehensive school* di Amerika Serikat. Pada jenjang SMA di PPSP, dibuka program A1, A2, A3, dan B. Program B sebenarnya mirip program vokasi. Oleh karena itu di PPSP disediakan bengkel yang cukup lengkap. Sayangnya program B di PPSP tidak diminati. Konon siswa PPSP kelas 9 yang naik ke kelas 10 Program B, keluar dan pindah ke SMA umum.

Tampaknya saat itu, dan masih terasa sampai saat ini, SMK itu dianggap “kelas rendah”. Bahkan ada *joke* SMA itu sekolah menengah untuk anak, sementara SMK itu sekolah

menengah untuk keponakan. Konon tidak banyak putra-putri guru SMK yang masuk SMK, dan memilih masuk SMA.

Mengapa SMK kurang dihargai? Jujur saya tidak tahu, mungkin teman-teman sosiologi yang lebih mengerti. Apa karena lapangan pekerjaan terbatas, sehingga banyak lulusan SMK menganggur yang proporsinya konon lebih ba-

nyak lulusan SMA? Atau karena untuk memasuki jenis pekerjaan tertentu tidak dipersyaratkan sertifikat, sehingga lulusan SMK harus bersaing secara bebas dan kemudian banyak yang kalah? Atau karena pola pendidikan di SMK serta fasilitasnya sangat minimal, sehingga kompetensi lulusannya tidak bagus? Atau karena industri di Indonesia tidak memerlukan tenaga kerja dengan *skill* tinggi, sehingga tidak perlu pelatihan setingkat SMK? Atau? Atau?

Serangkaian pertanyaan yang memerlukan perenungan, pemikiran, bahkan riset yang cukup dalam. Hal itu diperlu-



Dulu ada joke SMA itu sekolah menengah untuk anak, sementara SMK itu sekolah menengah untuk keponakan. Konon tidak banyak putra-putri guru SMK yang masuk SMK, dan memilih masuk SMA.”

kan agar kita memiliki desain pendidikan yang jelas, efektif ,dan efisien. Lebih dari itu, pemegang kebijakan pendidikan sebaiknya tidak latah mengubah ini dan itu tanpa argumen yang kokoh. Laporan penelitian Daniel Suryadarma yang kemudian menjadi laporan Bank Dunia dengan judul *The Value of Vocational Education: An Indonesia Case*, layak untuk dibaca. Semoga. ◆



3

Bersiap Menyongsong Era Pasifik

Banyak ahli yang meyakini bahwa saat ini sedang terjadi pergeseran era. Dari era Atlantik ke era Pasifik. Di masa lalu negara-negara di sekitar lautan Atlantik menjadi pusat dunia, yang berpusat di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara. Kini, secara perlahan tetapi pasti dominasi negara-negara tersebut akan segera berakhir. Perannya digantikan oleh negara-negara di sekitar Lautan Pasifik dan Asia yang akan menjadi motor penggerak utamanya. Itulah yang disebut Era Pasifik dengan pusatnya di Asia.

Jorgen Moller dalam bukunya *How Asia Can Shape The World* (2011) secara jelas menggambarkan pergeseran tersebut. Moller juga menyebut secara spesifik bahwa Indonesia akan menjadi salah satu pemain penting di era itu.

Namun jauh-jauh Moller mengingatkan akan pentingnya pendidikan untuk mewujudkan impian itu. Peringatan itu dimuat dalam satu bab khusus dengan judul *Aces or Duds* (Kartu As atau Kartu Mati). Ibarat bermain remi, pada pergeseran tersebut pendidikan dapat menjadi kartu As untuk memenangkan pertandingan, atau sebaliknya menjadi kartu mati yang justru menjadi beban yang merepotkan. Kita semua harus siap menjadi kartu As dalam proses pergeseran tersebut.

Untuk itu apa yang diuraikan oleh Dave Ramsey dalam buku *Entreleadership* (2011) sangat cocok untuk diterapkan. Beberapa catatan Ramsey yang menurut saya cocok untuk mereka yang baru diwisuda antara lain apa yang dia sebut dengan (1) *Start with a dream end with a goal*, (2) *Flavor your day with steak sauce*, dan (3) *No magic, no mystery*.

Ramsey menjelaskan, orang muda harus berani bercita-cita tinggi. Namun sesudah mencanangkan cita-cita, harus memikirkan dan dapat menemukan apa syarat untuk mencapai cita-cita itu. Juga bagaimana tahapan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Setelah itu harus berani mulai melangkah dan bekerja keras untuk memenuhi persyaratan dan pada akhirnya menggapai cita-cita itu.

Dalam *Flavor Your Day with Steak Sauce*, Ramsey menjelaskan kita harus mampu membedakan masalah menjadi empat kategori, yaitu (a) penting dan mendesak, (b) penting tetapi tidak mendesak, (3) tidak penting walaupun mendesak, dan (4) tidak penting dan tidak mendesak. Berdasarkan kategori itu kita harus pandai membagi energi kita, agar jangan sampai terkuras untuk mengerjakan sesuatu yang tidak penting walupun mendesak. Sebaliknya jangan sampai kita tidak berani melangkah menangani sesuatu

yang penting dan mendesak. Walaupun itu penuh tantangan. Kita tidak boleh lari dari tantangan. Setiap tantangan harus kita hadapi dan kita pecahkan dengan baik. Bukankah ada kata bijak bahwa nahkoda yang hebat adalah yang terbiasa mengarungi lautan yang ganas. Tantangan akan menempa kita menjadi orang yang hebat.

Kalau menggunakan istilah Charles Handy yang memperkenalkan teori kue donat terbalik (*inverted doughnut theory*), jangan sampai kita terjebak memperdebatkan sesuatu yang tidak penting, yang *peripheral* dan justru melupakan yang pokok, yang inti. Dalam bahasa lain, jangan sampai kita berdebat dan bahkan bersengketa untuk hal-hal yang *carangan*, yang kecil-kecil dan justru melupakan persamaan yang besar-besar dan wajib. Jangan kita melupakan yang wajib dan justru mengejar yang sunah dan bahkan mubah.

Ramsey juga dapat menjelaskan dengan baik bahwa hampir tidak ada misteri dalam tahapan mencapai cita-cita. Semua dapat dirancang dengan baik. Tidak ada *magic*, semua dapat dijelaskan bagaimana tahapan mencapai cita-cita yang telah dipancangkan. Jika tahapan dan persyaratan telah ditemukan, maka kita harus mulai bekerja keras untuk melakukannya.

Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas rasanya cocok untuk melengkapi uraian Ramsey tersebut. Di era teknologi modern keras saja tidak cukup. Oleh karena itu harus disertai kerja cerdas untuk menemukan cara kerja efektif dan efisien. Kadang-kadang ada kelakar “*you do not need to work so hard, what you need is to work a little bit smarter.*” Walau terkesan menyederhanakan, kelakar itu ada digunakan untuk direnungkan.

Kerja ikhlas diperlukan, agar kita dapat menikmati apa

”

Kita sedang memasuki era kompetisi yang semakin ketat. Kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan kreativitas menjadi kunci keberhasilan dalam era tersebut. Kini banyak sekolah di negara maju yang mencanangkan lulusan dengan ungkapan *be critical thinker, be problem solver, and be creative.*”

yang kita kerjakan. Kita dapat memastikan dan meyakini bahwa apa yang kita kerjakan merupakan bagian dari ibadah. Bukankah Tuhan memastikan bahwa “*Tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah*”. Dan bekerja dengan baik untuk tujuan mulia, *insya Allah* bagian dari ibadah.

Kita sedang memasuki era kompetisi yang semakin ketat. Kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan kreativitas menjadi kunci keberhasilan dalam era tersebut. Kini banyak sekolah di negara maju yang mencanangkan lulusan dengan ungkapan *be critical thinker, be problem solver and be creative*. Artinya, sekolah itu ingin menghasilkan lulusan yang punya kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah dan kreatif. Saya ingin menambahkan jadilah orang yang mampu memecahkan masalah dengan kreatif tetapi juga arif.

Untuk mendukung pengembangan kreativitas, apa yang dijelaskan oleh Boyd dan Goldenberg (2013) dalam bukunya

Inside The Box tampaknya cocok untuk dibaca. Mereka telah melakukan riset panjang dan menyimpulkan bahwa untuk menjadi kreatif tidak selalu harus berpikir *out of the box*. Mereka menemukan banyak temuan kreatif yang berasal dari berpikir *inside the box*, yaitu *subtraction*, *division*, *multiplication*, *task unification*, dan *attribute dependency*.

Pola tiket pesawat murah (*low cost carrier*) yang dimotori oleh *Air Asia* adalah inovasi yang menggunakan pola *subtraction*, yaitu mengurangi beberapa fungsi yang tidak penting dan mendesak agar lebih efisien dan akhirnya murah. Remote control untuk TV dan AC adalah inovasi berdasarkan prinsip *division*, yaitu memisahkan TV dan AC dengan alat pengontrolnya, sehingga lebih nyaman pemakainya. Inovasi sepeda beroda tiga adalah contoh sederhana penerapan prinsip *multiplication*, yaitu membuat roda tambahan untuk fungsi lainnya. Tas punggung (*back pack*) adalah contoh inovasi dengan prinsip *task unification*. Otomatis AC dan *wipers* mobil yang dapat menyesuaikan dengan suhu dan hujan adalah contoh inovasi dengan prinsip *attribute dependency*.

Yang sangat menarik, Boyd dan Goldenberg membuktikan bahwa kreativitas dapat diajarkan dan dikembangkan dengan pola yang mereka sebut dengan *systematic inventive thinking*. Setiap orang, baik secara mandiri maupun melalui pelatihan dapat mengembangkan daya kreativitas tersebut. Saya menyarankan Anda membaca buku baru tersebut. ◆

*Catatan: Disampaikan pada acara
Wisuda ke-78 Unesa, 13 Oktober 2013.*

4

Menjadi Pembelajar di Era Cyber

Perubahan apa yang terjadi terhadap pendidikan ketika era *cyber* datang? Apa yang seharusnya dilakukan dunia pendidikan untuk mengantisipasi dan memanfaatkannya? Ini cetusan pertanyaan-pertanyaan yang layak direnungi saat ini.

Beruntung saya bertemu dengan forum guru-guru Blogger, orang-orang dunia maya yang saya yakin selalu haus informasi dan tahu bagaimana caranya mencari informasi. Saya, yang kebetulan diundang sebagai *keynote speaker* dalam pertemuan yang diadakan Universitas Airlangga (23 Oktober 2013) itu, mencoba memanfaatkan momen tersebut untuk berbagi kerisauan tentang bagaimana seharusnya dunia pendidikan menata diri di era *cyber*.

Dalam beberapa kali kesempatan saya menyampaikan, “kalau kita ingin tahu berapa penduduk Kota Surabaya, kemana kita mencari?” Dulu mungkin di Buku *Surabaya dalam Angka* atau di Buku Pelajaran Geografi. Sekarang jauh lebih cepat dengan cara membuka *Google* dan ketik kata “jumlah penduduk Surabaya”. Keluarlah data itu dan bahkan beserta uraiannya. Hal yang sama, kalau kita ingin tahu hal lain. Misalnya kita dapat obat dari dokter. Sebut saja namanya “X”. Ketik nama obat itu di *Google*, akan keluar banyak informasi. Paling tidak, keluar *Wikipedia* yaitu semacam ensklopedia pada masa lalu. Intinya saat ini segala macam informasi tersedia di internet.

Beberapa perguruan tinggi besar, misalnya Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat, sudah mengunggah semua materi kuliah di *web*-nya. Semua orang dapat melihat dan mengunduh dengan gratis. Tentu tidak dapat melakukan interaksi dengan dosen dan juga tidak dapat mengikuti ujian. Kecuali mahasiswa yang terdaftar di sana. Bahkan MIT juga mengembangkan BLOS-SOMS (*Blended Learning Open Source Science or Math Studies*). Bahannya dikembangkan bersama dengan orang dari berbagai penjuru dunia. Dan hasilnya dapat diunduh oleh siapa saja tanpa membayar. *E-book* saat ini juga sudah mewabah. Harganya jauh lebih murah. Bahkan banyak “orang dermawan” yang mengunggah *e-book* dan semua orang dapat mengunduhnya secara gratis.

Kalau sudah seperti itu, maka lantas apa tugas guru? Sampai saat ini pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh guru adalah menerangkan suatu teori, konsep, dan fenomena. Kalau penjelasan semacam itu sudah tersedia di internet lantas apa yang harus dikerjakan oleh guru dan dosen? Membantu menjelaskan karena siswa/mahasiswa

tidak dapat belajar sendiri? Tanpa penjelasan guru/dosen, siswa/mahasiswa tidak dapat memahami? Apa itu betul? Apa itu berlaku untuk siswa SD, SMP, SMA. Mahasiswa S1, S2, dan S3?

Mungkin pola pembelajaran akan mengalami perubahan fundamental dalam waktu mendatang. Mungkin tugas guru adalah mendampingi dan memandu siswa dalam belajar. Bukan memberikan informasi, karena informasi sudah ada di internet. Bukan menerangkan, karena wikipedia sudah menerangkan itu. Pekerjaan guru/dosen adalah “mengatur situasi belajar”, agar siswa/mahasiswa mempelajari informasi yang diperoleh. Untuk apa? Apakah sekadar biar paham? Atau untuk cadangan pengetahuan? Itulah hal kedua yang perlu kita renungkan bersama. Sebenarnya untuk apa anak sekolah atau kuliah? Apakah sekadar untuk memperoleh kumpulan pengetahuan?

Dua pertanyaan terakhir sering saya ajukan, kalau saya mendapat kesempatan bertemu guru atau orang tua siswa. Umumnya mereka menjawab, tidak. Tujuan bersekolah atau kuliah adalah untuk mencari bekal hidup agar besuk dapat sukses. Nah, pertanyaan apa bekal agar anak-anak dapat sukses di era cyber. Itulah yang perlu didiskusikan.

Sekarang muncul istilah *The 21st Century Skills*. Kirakira kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi era Abad Ke-21. Salah satu buku yang dapat dibaca karangan Bernie Triling dan Charles Fadel dengan judul *21st Century Skills: Learning for Life in Our Time*. Melalui serangkaian riset dua orang itu mengajukan tiga kemampuan yang diperlukan di abad 21, yaitu: *learning and innovation skills*, *media and technology skills*, dan *life and career skills*. Kita tidak harus menerima gagasan mereka. Yang penting kita mencari yang tepat untuk kondisi Indonesia.

”

Dulu, orang yang masuk Fakultas Hukum hampir pasti menjadi hakim, jaksa, dan pengacara. Orang yang masuk IKIP hampir pasti menjadi guru. Saat ini korelasi seperti itu semakin longgar. Banyak lulusan IKIP bekerja di perusahaan, menjadi pedagang, bahkan menjadi politisi.”

Hal lain yang ingin saya ajukan untuk menambah semangat “mencari”, adalah: (1) *gap* antara pencari kerja dan pencari karyawan, dan (2) makin renggangnya hubungan antara latar belakang pendidikan dengan profesi yang ditekuni orang. Setiap hari Sabtu koran memuat begitu banyak lowongan pekerjaan. Di lain pihak, jika ada *job fair* ribuan anak muda antre mencari pekerjaan. Apa yang terjadi? Yang mencari karyawan susah mendapatkan, yang mencari pekerjaan sudah mendapatkan. Seakan ada ketidakcocokan antara yang dicari oleh perusahaan dan yang melamar pekerjaan.

Di masa lalu, orang yang masuk Fakultas Hukum hampir pasti menjadi hakim, jaksa, dan pengacara. Orang yang masuk IKIP hampir pasti menjadi guru. Orang yang masuk Teknik Sipil, hampir pasti bekerja di PU, menjadi konsultan bangunan atau bekerja diperusahaan kontraktor. Saat ini korelasi seperti itu semakin longgar. Banyak lulusan IKIP bekerja di perusahaan, menjadi pedagang, bahkan menjadi politisi. Mari kita kaji apa yang harus ditata agar pendidikan sesuai dengan era *cyber*. Semoga fenomena koran hari Sabtu dan antrean di *jobfair* tidak terus berlangsung. Semoga kita menjadi pembelajar yang baik. ◆

5

Pendidikan Formal: Siapkan Praktisi atau Periset?

Masih melanjutkan diskusi forum Guru-guru Blogger di Unair. Sebagai *keynote speaker* saya lebih banyak memberikan rangsangan, seperti apa seharusnya pendidikan ketika bertemu dengan era *cyber*. Jika semua informasi sudah dapat diperoleh dari internet, terus apa yang dipelajari anak-anak di sekolah?

Jikalau segala info sudah ada di *Google*, maka model-model pembelajaran yang menjelaskan informasi dan konsep-konsep dasar sudah tidak relevan lagi. Jadi yang diperlukan adalah guru memandu siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah secara arif dan kreatif. Dalam bahasa lain disebut *high order thinking*. Pertanyaan yang sifatnya *what*, *where* dan *when* sudah tidak cocok lagi.

Yang diperlukan adalah pertanyaan yang terkait dengan ungkapan *why* dan *how*.

Yang menarik dan ingin saya *sharing* kepada pembaca kali ini adalah dialog yang terjadi pada saat sesi tanya jawab. Ada seorang penanya, saya yakin guru IPA yang pandai, dengan penuh semangat menyampaikan pentingnya menciptakan ilmuwan. Guru SMP itu menyampaikan Indonesia memerlukan banyak saintis yang nanti akan membawa kemajuan negara ini. Saat ini Indonesia kalah dalam persaingan industri karena minimnya ilmuwan.

Sebagai guru yang sudah mengajar lebih dari 35 tahun, saya memahami kerisauan rekan guru tersebut. Saya juga yakin beliau adalah guru muda lulusan Universitas Airlangga yang pandai dan idealis. Dugaan saya beliau adalah orang muda yang idealis dan ingin meningkatkan kuliatas pendidikan di Indonesia. Karena bidangnya IPA (mungkin Fisika, Biologi, atau Kimia, saya tidak sempat menanyakan), maka guru itu membimbing siswanya dengan serius agar menjadi saintis. Keinginan untuk menjadikan anak-anak Indonesia sejajar dengan rekannya di negara maju, mendorong teman guru muda itu menjadi ilmuwan yang tangguh.

Memang salah satu kecenderungan guru adalah “menganggap” matapelajaran yang diampu merupakan mata pelajaran penting. Oleh karena itu, ingin sekali memberikan bekal yang sangat banyak kepada siswanya. Akibatnya seringkali guru menambah jam pelajaran, karena merasa tidak cukup. Guru Matematika ingin siswanya menjadi matematikawan. Guru Sejarah ingin siswanya menjadi sejarawan. Guru ekonomi ingin siswanya menjadi ekonom.

Pertanyaannya, betulkah demikian? Betulkah siswa harus menjadi ahli berbagai bidang ilmu tersebut? Bahkan kita dapat bertanya berapa orang ahli Fisika yang diperlukan

oleh Indonesia? Berapa orang lulusan universitas yang menjadi ahli ekonomi? Berapa orang lulusan SMA yang benar-benar berbakat menjadi ahli sejarah? Berapa orang ahli matematika yang diperlukan oleh dunia industri dan atau lembaga riset?

Rasanya, baik di negara maju apalagi negara berkembang, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai praktisi. Praktisi di bidang perdagangan, praktisi pertanian, industri berat, praktisi di bidang kesehatan, dan sebagainya. Tidak banyak yang bekerja sebagai saintis di lembaga riset dan dosen di perguruan tinggi.

Saya tidak mengatakan bahwa saintis itu tidak penting. Saintis di berbagai bidang itu sangat penting. Namun tidak harus semua orang menjadi saintis. Kalau semua menjadi saintis, siapa yang menerapkan temuan-temuan saintis tersebut? Jika semua menjadi ekonom, siapa yang menjadi pengusaha dan pedagang? Jika semua menjadi ilmuwan pertanian, siapa yang menjadi petani dan menangani industri yang

”

Saya tidak mengatakan bahwa saintis itu tidak penting. Saintis di berbagai bidang itu sangat penting. Namun tidak harus semua orang menjadi saintis. Kalau semua menjadi saintis, siapa yang menerapkan temuan-temuan saintis itu?”

terkait dengan pertanian? Jika semua menjadi periset dalam energi terbarukan, siapa yang bekerja di industri mobil?

Ilmuwan haruslah orang-orang idealis. Sosok yang bekerja sepenuh hati di laboratorium atau perpustakaan dan seringkali tanpa mengenal lelah. Padahal biasanya gaji mereka tidak terlalu tinggi. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, gaji peneliti tidak besar. Jauh lebih kecil dibanding para birokrat dan praktisi di lapangan.

Oleh karena itu sebaiknya dari awal dicari calon-calon ilmuwan itu. Jumlahnya tidak perlu terlalu banyak. Namun mereka adalah anak-anak cerdas, tekun, dan idealis. Seringkali anak-anak yang agak individualis, karena biasanya peneliti memang cenderung begitu. Semoga teman guru muda hebat tadi menemukan anak bimbing yang nantinya benar-benar menjadi ilmuwan hebat.

Nah, kemudian pertanyaannya: pendidikan itu untuk siapa? Jika untuk siswa dan sebagian besar nanti akan menjadi praktisi, sebaiknya pendidikan tidak diarahkan menjadi periset. Hanya mereka yang memiliki minat dan potensi yang cocok saja yang didorong menjadi periset. Dan dapat dilakukan melalui kelompok ilmiah remaja (KIR) dan sejenisnya. Apalagi dalam Kurikulum 2013 ada peminatan yang salah satunya dapat diarahkan ke bidang penelitian. Semoga. ◆

6

‘Discontinuity’

Saya mendengar pertamakali istilah *discontinuity* dari Dr. Boediono pada awal tahun 1990-an, saat itu beliau sebagai Kepala Balitbang Dikbud. Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia susunan John Echols, *discontinuity* diartikan sebagai keadaan yang terputus, keadaan yang tidak bersambung. Kalau menggunakan istilah sekarang, mungkin, ketidaksinambungan.

Pada waktu itu beliau menjelaskan ketidaksinambungan iptek atau konsep karena ada temuan baru yang memiliki *nature* dengan teknologi sebelumnya. Karena beliau ekonom, tentu memberi contoh dalam bidang ekonomi. Waktu itu saya mencoba memahami dengan cara menganalogikan contoh yang beliau berikan dengan

”

Seringkali perkembangan organisasi/lembaga hanya melingkar-lingkar tanpa banyak bergerak, karena pemimpin yang baru selalu memulai hal yang baru dan meninggalkan apa yang telah dimulai oleh pemimpin sebelumnya.”

bidang saya. Misalnya penemuan mesin pembakaran dalam (*internal combustion engine*) yang kemudian menghilangkan mesin uap. Pompa sentrifugal, yang walaupun fungsinya sama tetapi sangat berbeda dan menggusur pompa plunyer.

Akhir-akhir ini saya mengamati *discontinuity* juga terjadi pada program pemerintah, instansi, organisasi ketika pergantian pimpinan. Istilah yang sering muncul di lapangan adalah “ganti pimpinan ganti kebijakan”. Sebenarnya tidak ada yang salah, karena seiring dengan perjalanan waktu sangat mungkin terjadi perubahan tantangan, sehingga pemimpin yang baru perlu mengubah kebijakan yang mungkin sudah tidak sesuai lagi.

Namun yang kadang-kadang terjadi dan merisaukan adalah perubahan kebijakan itu terasa tanpa dilandasi kajian yang memadai. Meminjam referensi pada Policy Analysis, perubahan kebijakan itu tidak dilandasi *agenda setting* dan *policy research* yang memadai. Ada kesan, policy itu muncul dari keinginan pemimpin dan bukan kebutuhan lapangan. Bahkan terasa, adanya pemimpin yang kalau me-

minjam istilah yang digunakan oleh Robin Sarma yaitu yang “*link leadership to legacy*”, keinginan untuk meninggalkan warisan sebagai penciri setelah lengser. Seringkali program belum tuntas ditinggal dan berpindah ke program baru tanpa adanya kesinambungan.

Dalam referensi tentang organisasi, memang disebutkan manakala sebuah sistem di organisasi sudah mapan, maka pergantian pemimpin tidak akan mengubah kebijakan secara drastis, sehingga pemimpin tidak tampak menonjol. Sebaliknya jika sistem di organisasi itu belum mapan, pergantian pemimpin akan menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan yang menonjol. Dengan bahasa lain, jika organisasinya mapan, yang menonjol adalah sistemnya, bukan pemimpinnya. Sebaliknya jika organisasinya belum mapan, yang menonjol pemimpinnya dan bukan sistemnya.

Apakah organisasi di Indonesia banyak yang belum mapan sistemnya? Itulah pertanyaan yang menggajal di benak saya beberapa hari ini. Bukankah kita sudah merdeka 71 tahun? Bukankah banyak lembaga yang dipimpin para cerdik cendikia? Bukankah banyak ahli manajemen organisasi yang kita miliki? Bukankah para pemimpin di pemerintahan pada umumnya sudah mengikuti kursus kepemimpinan?

Apakah fenomena *discontinuity* hanya terjadi di organisasi kecil? Ternyata tidak. Bahkan di organisasi pemerintahan juga banyak terjadi. Saya kira munculnya gagasan untuk menghidupkan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga tidak terlepas adanya fenomena *discontinuity*. GBHN dianggap mampu sebagai pengikat, siapapun pemimpinannya harus menggunakannya dan diharapkan itu merupakan program jangka panjang yang saling sinam-

bung.

Fenomena *discontinuity* perlu segera dicarikan jalan keluar, karena dampaknya cukup serius. Seringkali perkembangan organisasi/lembaga hanya melingkar-lingkar tanpa banyak bergerak, karena pemimpin yang baru selalu memulai hal yang baru dan meninggalkan apa yang telah dimulai oleh pemimpin sebelumnya. Nah, karena masa jabatan pemimpin yang pada umumnya tidak lama, maka semua inovasi atau program tidak selesai dengan tuntas. Jadinya semua menjadi setengah-setengah. ◆

7

Semua 'Dihandle' Google, Tugas Sekolah Apa?

Saya “*ketiban sampur*” diminta mengisi acara rapat koordinasi kepala sekolah/madrasah di lingkungan Lembaga Ma’arif Gresik. Sedianya yang akan mengisi acara pada 6 Maret 2013 Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Musliar Kasim. Ketika beliau tidak dapat hadir, dilimpahkan kepada Mas Sukemi, Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media. Ketika ternyata Mas Kemi juga tidak dapat hadir, lantas saya diminta mewakili. Jadi saya datang sebagai “pemain pengganti yang kedua”.

Topik yang harus saya sampaikan tentang Kurikulum 2013 dan Mas Kemi sudah meng-email paparan yang harus saya sampaikan. Tentang materi yang saya sampaikan, rasanya tidak penting saya bagi di tulisan ini. Materinya

standar dan sudah sering dibahas dalam berbagai forum. Namun ada dua hal penting yang muncul dalam sesi tanya jawab, yang rasanya penting untuk dibagi melalui tulisan pendek ini.

Pertama, salah seorang peserta bertanya: “Kurikulum diubah untuk memenuhi tantangan zaman. Apakah Kurikulum 2013 ini sudah memenuhi tantangan zaman? Apa sebenarnya tantangan zaman yang paling besar dihadapi oleh sekolah?” Menurut saya kepala sekolah yang bertanya itu cerdas dan mau berpikir ke depan. Oleh karena itu, saya berusaha menjawab dengan metafora dengan harapan memicu dia dan peserta lainnya berpikir keras.

Saya bertanya kepada peserta: “Kalau saya ingin tahu berapa penduduk Kabupaten Gresik, ke mana informasi itu dicari?”. Banyak yang menjawab dan yang paling banyak menyebut “ke Kantor Statistik”. Saya jawab: “*Kesuwen* (terlalu lama)”. Saya sambung dengan komentar: “Tadi waktu mau mulai acara, moderator minta saya menuliskan curriculum vitae”. Dalam hati saya bilang, ini cara kuno. Lantas saya tanya lagi: “Jadi kemana mencari informasi jumlah penduduk Kabupaten Gresik?” Ada yang menjawab: “Buka *Google*.”

Walaupun hanya satu atau dua orang yang menjawab itu, tetapi saya gembira. Artinya guru sudah mulai tahu bahwa *Google* dapat memberi informasi tentang berbagai hal. Oleh karena itu, saya mengacungkan jempol ke arah peserta yang menjawab tadi. Saya sambung dengan komentar: “Kalau *panjenengan* (Anda) membuka *Google* dan mengetik nama saya, akan muncul informasi tentang saya.” Bahkan ada fotonya dalam berbagai acara. Jadi dari pada minta saya menulis CV, lebih baik buka *Google* akan dapat CV lebih lengkap.

“Kalau segala informasi dapat diperoleh di *Google*, lantas apa ya tugas guru?” Mendapat pertanyaan seperti itu para peserta justru tertawa. Itulah sebenarnya tantangan pendidikan, khususnya sekolah di era mendatang. Pola pembelajaran yang terfokus kepada memberikan dan menjelaskan informasi sudah tidak relevan, karena tugas itu sudah diambil alih internet. Jadi tugas mengajarkan kognitif level 1 (*knowledge-remembering*-mengetahui-mengingat) dan bahkan level 2 (*comprehension-understanding*-memahami) dari taksonomi Bloom sudah diambil alih internet. Oleh karena itu, tugas guru adalah kognitif level berikutnya.

Sekitar tahun 2002-an saya pernah menulis artikel yang intinya, pada akhirnya tugas manusia dalam kehidupan adalah memecahkan masalah. Untuk itu, tahapan yang perlu dilakukan adalah menggali informasi, mengolah informasi sehingga menjadi masalah yang utuh, merancang berbagai alternatif solusi dan terakhir mengambil keputusan mana yang paling tepat untuk dilakukan. Jadi itulah yang perlu diajarkan atau dikembangkan kepada siswa. Bukankah pada akhirnya setelah lulus siswa akan memasuki kehidupan di masyarakat yang isinya seperti itu?

Jika internet saat ini sudah menyediakan berbagai informasi, maka tugas sekolah/guru adalah memandu menggali informasi. Nah, mengolah informasi yang berasal dari berbagai sumber itu tidak dapat dilakukan oleh internet. Itulah menurut saya yang menjadi tugas sekolah/guru. Juga tahapan berikutnya, yaitu memandu siswa merancang berbagai alternatif solusi serta memilih mana yang paling tepat.

Jika itu dikaitkan dengan pertanyaan pemandu berpikir, pertanyaan “apa”, “berapa”, “dimana” dan “kapan”

sudah dijawab oleh internet. Yang harus dipandu guru adalah mencari jawaban dari pertanyaan “bagaimana”, “mengapa”, dan “apa yang akan terjadi kalau....”. Dalam bahasa psikologi belajar, mungkin disebut berpikir tingkat tinggi (*high order thinking*).

Uraian di atas bukan dimaksudkan bahwa pendidikan hanya mencakup domain kognitif saja. Tentu mencakup kompetensi secara utuh mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor. Mencakup pikiran, hati, dan tangan. Tugas sekolah/guru adalah mengintegrasikan ketiga domain dalam satu kesatuan yang utuh, misalnya dalam suatu tugas kelompok.

Pertanyaan atau komentar *kedua* yang juga penting untuk dibagi, adalah: “Jika silabus, buku guru dan buku siswa dibuat oleh pemerintah, apakah itu tidak memasung kreativitas guru?” Menurut saya, ini juga pertanyaan yang bagus. Tampaknya saat ini, si penanya berkreasi untuk menyusun model Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, dan buku yang cocok dengan siswa dan sekolahnya. Nah, dia kemudian khawatir kreativitas itu terpasung dengan adanya RPP, silabus dan buku dari pemerintah.

Kekhawatiran yang wajar dan bahkan positif. Namun tampaknya yang bersangkutan belum paham bahwa RPP, silabus dan buku yang disusun pemerintah itu adalah pedoman dasar. Setiap guru boleh memodifikasi sesuai dengan kondisi sekolah dan siswanya. Namun, bagi yang belum atau tidak mampu memodifikasi, silahkan digunakan yang ada itu. Guru kita beragam kapasitasnya. Bagi yang belum mampu, ya gunakan saja buatan Pemerintah. Bagi yang mampu, ya silakan menyusun sendiri. Semoga. ♦

8

Mengarusutamakan Pendidikan Karakter

Saya sangat terkejut ketika membaca berita bahwa pada acara National Summit di Hotel Bidakara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan pentingnya pendidikan karakter dan reformasi pembelajaran di sekolah. Sepengetahuan saya, Presiden SBY tidak memiliki anak kandung yang sedang sekolah di SD, SMP, SMA atau kuliah di jenjang S1 dan saat itu cucu satu-satunya masih kecil yang tentunya belum sekolah. Artinya Presiden SBY tidak memiliki anak atau cucu yang mungkin bercerita bagaimana pembelajaran di sekolah. Jadi sangat mungkin ada faktor lain atau informasi lain yang masuk ke Presiden tentang pentingnya pendidikan karakter.

Kemungkinannya tentu sangat banyak, tetapi kalau sam-

pai hal itu disebutkan secara eksplisit dalam pidato resmi di National Summit, tentu ada pihak yang dapat meyakinkan Presiden, sehingga hal itu dianggap sangat penting oleh Presiden dan mendesak untuk dilakukan.

Saya jadi teringat suatu peristiwa makan siang pada hari Jumat beberapa hari sesudah Idul Fitri tahun 2009. Saat itu saya diajak makan siang bersama oleh Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA (saat itu sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika). Makan siang sederhana dan diikuti oleh beberapa staf di Kementerian Kominfo.

Yang pokok bukan makan siangnya, tetapi diskusi sesudah makan siang. Setelah selesai makan siang, P Nuh mengajak diskusi santai dan seingat saya waktu itu hadir Prof. Dr. Abdullah Alkaf dan Dr. Son Kuswadi (keduanya saat itu sebagai staf khusus Menkominfo). Nah saat itu dibahas masalah pendidikan dan salah satunya pendidikan akhlak dan perilaku anak-anak kita yang cukup mengkhawatirkan.

Seingat saya, saya bercerita tentang masalah nyontek yang sangat serius di sekolah. Dalam beberapa kesempatan bertemu dengan guru, saya bertanya: "Jika waktu ulangan dan bapak/ibu guru harus meninggalkan kelas untuk ke kamar kecil, berapa persen kira-kira anak-anak yang *nyontek*?" . Sedihnya, para guru pada umumnya menyebutkan hampir seluruhnya, 90%, 80% dan seterusnya.

Tidak pernah dijumpai guru yang berani mengatakan, tidak ada yang menyontek atau katakanlah yang menyontek di bawah 50%. Bukankah menyontek itu awal dari kebiasaan hidup menerabas, hidup yang inginnya punya hasil baik tetapi dengan tidak jujur? Bukankah itu indikator kita tidak berhasil atau katakanlah belum berhasil menanamkan kejujuran kepada anak-anak kita? Cerita itu

kemudian menjadi diskusi yang panjang. Intinya kami yang saat itu ikut diskusi, sepakat betapa pentingnya pendidikan akhlak untuk memperbaiki perilaku anak bangsa.

Saya tidak tahu apakah saat diskusi itu Pak Nuh sudah tahu akan ditunjuk menjadi Mendiknas atau hanya karena sesama pendidik, kemudian mengajak diskusi tentang pendidikan. Yang pasti, dalam diskusi itu kami yang hadir merasa prihatin terhadap perilaku anak-anak kita. Waktu itu muncul seloroh: “orang tidak jujur sebaiknya tidak perlu pintar, agar tidak pandai berbuat jahat”, dan seterusnya. Intinya semua yang hadir dalam diskusi itu prihatin atas perilaku anak-anak kita, yang menunjukkan bahwa akhlaknya kurang baik.

Berangkat dari ingatan itu, saya berpikiran mungkin Pak Nuh yang saat menjadi Mendiknas berhasil meyakinkan Presiden SBY akan pentingnya pendidikan karakter. Mungkin juga dugaan saya salah, mungkin juga benar atau mungkin juga banyak masukan ke Presiden dan masukan dari Mendiknas hanya salah satu di antaranya.

Yang penting adalah bahwa Presiden sudah menyatakan pentingnya pendidikan karakter dan itu dapat dimaknai, Kemendiknas harus melaksanakannya sebagai kebijakan penting. Dan betul juga, pendidikan karakter menjadi salah satu program 100 hari Kemdiknas.

Ketika tahu bahwa Pendidikan Karakter menjadi program 100 hari Kemdiknas, saya berseloroh: Itu *timing*-nya pas dan orangnya juga pas. Waktunya pas, karena semua orang sedang risau tentang perilaku bangsa ini, sehingga pendidikan karakter dapat menjadi salah satu jawaban yang tepat. Orangnya pas, karena Pak Nuh sangat tepat sebagai figur berkarakter. Selama ini Pak Nuh dikenal sebagai orang yang pandai, santun, sederhana, pekerja

keras, selalu menghargai orang lain, dan dapat diterima oleh berbagai kalangan.

Dalam rapat pimpinan di Kemdiknas ditetapkan bahwa yang menjadi penanggung jawab Pendidikan Karakter dalam program 100 hari Kemendiknas adalah Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) dan unit utama lainnya menjadi mitra kerja pendukung. Oleh karena itu, Prof. Dr. Mansyur Ramli (Kepala Balitbang) segera bergerak cepat mengambil langkah melindungi pendidikan karakter.

Sebagai Pembina perguruan tinggi, Ditjen Dikti tentu lebih tepat mendukung dari sisi konsep dan pengembangan serta pelaksanaan di perguruan tinggi. Namun, mungkin karena ingat pembicaraan saat makan malam di Kominfo itu, Pak Nuh secara khusus berpesan agar saya membantu pengembangan pendidikan karakter. Sebagai anak buah tentu saya siap melaksanakan perintah itu, apalagi jika mengingat dalam diskusi sesudah makan siang di Kominfo, kita yang hadir sepakat betapa penting dan mendesaknya pendidikan karakter di sekolah kita.

Buka Komunikasi

Kami segera mengadakan komunikasi dengan berbagai pihak, baik para ahli pendidikan, budayawan, praktisi, dan para pemerhati pendidikan. Bak gayung bersambut, hampir semua pihak yang kami hubungi menyatakan sepakat dan mendukung pendidikan karakter. Dan yang lebih menggembirakan ternyata sudah banyak orang, sekolah, lembaga pelatihan dan sejenisnya yang sudah merintis pendidikan karakter dengan berbagai variasi nama dan pendekatannya.

Oleh karena itu perlu dihimpun pemikiran dan penga-

laman berbagai pakar, praktisi dan pemerhati pendidikan karakter. Itulah salah satu alasan dilakukannya Sarasehan Nasional Pendidikan Karakter di Hotel Bidakara, tanggal 14 Januari 2010. Saat itu hadir lebih 200 orang peserta terdiri dari pakar, praktisi dan pemerhati dengan latar belakang yang sangat beragam.

Guru, kepala sekolah, pengawas, dosen, ahli pendidikan, pemerhati pendidikan, budayawan, agamawan, ilmuwan dan sebagainya. Walaupun semula peserta dirancang 200 orang, ternyata yang berminat sangat banyak. Bahkan, pada malam sebelum sarasehan dilaksanakan, masih ada yang menelepon dan setengah “memaksa” untuk ikut. “Tidak usah undangan Mas, kalau sampeyan izinkan saya besok akan datang”, begitu permintaan teman tersebut.

Tampil sebagai pembicara utama, Prof Yahya Muhaimin, Prof Magnis Suseno, dan KH Syukri Zarkasyi (Pimpinan Pondok Gontor). Juga hadir figur ternama antara lain, Brigjen (pur) Soemarno Soedarsono dari Yayasan Jati Diri Bangsa, Mario Teguh dan sebagainya.

Sarasehan dirancang sedemikian rupa, sehingga semua peserta mendapat kesempatan menyampaikan gagasan dan pengalamannya. Oleh karena itu, sesudah penyampaian pemikiran tiga orang pembicara utama, sarasehan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan peserta sekitar 25 orang. Ternyata diskusi berjalan baik, semua peserta menyampaikan pendapatnya dengan antusias. Bahkan secara spontan muncul deklarasi tentang Pentingnya Pendidikan Karakter Bangsa yang dibacakan oleh wakil peserta yaitu Pak Irsyad Sudiro (seingat saya beliau juga anggota DPR RI) didampingi Ibu Femy dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Dari dokumen yang kita pelajari, baik berupa acuan

hukum yang merupakan landasan yuridis maupun teori dan konsep dari berbagai literatur, pendidikan karakter bukankah hal baru. Jauh sebelum kemerdekaan, Bapak Pendidikan Indonesia (Ki Hajar Dewantara) menyebutkan bahwa pendidikan adalah daya upaya memajukan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak kita.

Jadi jauh-jauh Ki Hajar Dewantara sudah mengingatkan bahwa salah satu potensi yang harus dikembangkan pada anak-anak adalah karakter. Bahkan jika kita empat pilar pendidikan yang dikenalkan oleh UNESCO, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*, maka pilar ketiga dan pilar ke empat identik dengan karakter.

Jika kita telusur pola pendidikan di awal peradaban, yang pada saat itu banyak dilakukan di padepokan, pondok pesantren dan institusi seperti itu, pendidikan yang menyangkut nilai-nilai kehidupan, watak, budi pekerti dan hal-hal yang seperti itu merupakan bagian pokok. Bahkan kata “guru” yang berasal dari bahasa Sansekerta bermakna pendidik spiritual, yang di samping mengajarkan hal-hal yang bersifat pengetahuan dan keterampilan juga mengajarkan nilai-nilai kebajikan.

Bagaimana dengan landasan hukum dalam pendidikan? Pasal 3 Undang-undang Sisdiknas menyebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tampak sekali bahwa secara yuridis sebagaimana disebutkan pada

UU Sisdiknas pendidikan di Indonesia seharusnya menekankan aspek karakter.

Dari delapan aspek yang disebut sebagai tujuan pendidikan, ternyata hampir semua terkait erat dengan karakter. Permendiknas nomor 23 Tahun 2003 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) ternyata mendukung pikiran tersebut. Pencermatan kami, dari 22 butir kompetensi lulusan SMA/MA/SMK, ternyata 11 butir sangat dekat dengan karakter.

Dengan demikian program Pendidikan Karakter yang menjadi salah program utama Kemendiknas bukankah hal baru, karena sudah diamanatkan UU Sisdiknas, Permendiknas 23/2003 dan didukung oleh teori/konsep pendidikan. Yang perlu dilakukan adalah mengarusutamakan pendidikan karakter dalam pelaksanaan pendidikan kita. Harus diupayakan agar pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam pendidikan, baik dalam proses pembelajaran sampai pada penilaian hasil belajar.

Menyadari bahwa istilah karakter memiliki cakupan yang luas dan juga menyadari untuk memulai hal baru dalam pendidikan dikenal prinsip “dimulai dari yang mudah, yang murah dan yang menyenangkan”, maka langkah selanjutnya kami bekerja keras menjabarkan apa itu cakup karakter yang harus dikembangkan dan bagaimana cara mengembangkannya.

Topik itu juga yang sudah digali dalam Sarasehan Nasional Pendidikan tanggal 14 Januari 2010 dan juga dari sekolah/lembaga pendidikan yang telah merintisnya. Pak Nuh selalu menyebutkan, karakter tidak hanya tentang berbuat santun tetapi juga memiliki kepenasaranan intelektual (*intellectual curiosity*), sehingga pemikiran tersebut juga menjadi salah satu pegangan.

Kajian terhadap berbagai literatur menghasilkan pemahaman bahwa karakter dapat dirujuk dari teori pendidikan, psikologi, sosiologi, dan sosial budaya, serta dari prinsip-prinsip kehidupan menurut ajaran agama. Yang sangat menarik, kajian dari berbagai teori itu ternyata bermuara pada hasil yang hampir sama dan dapat digambarkan dalam bentuk empat lingkaran yang memiliki bagian interseksi. Dari satu sisi, karakter dapat bersumber dari hal-hal yang berasal dari hati dan bersumber dari pikiran/nalar. Di sisi lain, karakter terkait dengan hal-hal yang bersifat intrapersonal dan yang terkait dengan interpersonal.

Mengingat sudah banyak sekolah dan lembaga pendidikan/pelatihan yang melaksanakan pendidikan karakter dengan berbagai variasi nama maupun pendekatannya, maka kami bersepakat mengambil beberapa sekolah dijadikan contoh pengalaman bagi yang lain. Akhirnya dibuatlah buku berjudul *Pendidikan Karakter: Pengalaman Inspiratif dari Sekolah*, yang bersisi 10 pengalaman, 2 TK, 2 SD, 2 SMP, 2 SMA dan 2 SMK. Masing-masing sekolah disertai film pendek (sekitar 8 menit) yang berisi rekaman apa saja dilakukan masing-masing sekolah dalam mengembangkan pendidikan karakter.

Ketika buku kecil dan film pendek tersebut selesai dibuat dan ditunjukkan dan atau diputar dalam beberapa kesempatan rapat, ternyata banyak pihak yang ingin memiliki. Akhirnya diputuskan, sementara Kemdiknas belum dapat menggandakan, *soft copy* buku dan film tersebut diunggah dalam web Kemdiknas dan atau Dikti dan juga diberikan kepada beberapa lembaga/pihak yang memerlukan. Sangat menggembirakan, ternyata ada pihak yang baik hati dengan menggandakan *soft copy* tersebut dalam bentuk CD dan membagikan secara gratis ke sekolah-sekolah.

Tak Perlu Khusus

Sungguh menarik, ternyata melaksanakan pendidikan karakter tidak memerlukan fasilitas khusus apalagi istimewa. Yang diperlukan adalah: (1) teladan dari guru, karyawan dan pimpinan sekolah, (2) dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, disertai dengan (3) penanaman nilai-nilai kehidupan sebagai acuan mengapa kita melakukan itu.

Semua sekolah yang sudah melaksanakan menyatakan bahwa: “semua guru adalah guru pendidikan dan oleh karena itu harus memasukkan/menyelipkan dalam kegiatan pembelajarannya (intervensi), dan karakter ditumbuhkan lewat kebiasaan kehidupan keseharian di sekolah (habitulasi)”. Budaya sekolah (*school culture*) merupakan kunci cari keberhasilan pendidikan karakter. Dengan demikian makin yakin bahwa semua sekolah dan lembaga pendidikan akan melaksanakannya.

Yang sangat mengejutkan, ternyata pendidikan karakter merupakan kepedulian banyak



Jauh-jauh
Ki Hajar Dewantara
sudah mengingat-
kan bahwa salah
satu potensi yang
harus dikembangkan
pada anak-anak
adalah karakter.

UNESCO
memperkenalkan empat pilar pendidikan yaitu *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*. Pilar ketiga dan pilar ke empat itu identik dengan karakter.”

kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta lembaga swasta. Suatu saat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengundang rapat tentang pendidikan karakter yang dihadiri oleh kementerian di bawah koordinasinya. Ternyata semua yang hadir menyatakan punya program yang terkait dengan pendidikan karakter dan Kementerian Budaya dan Pariwisata (Budpar) punya direktorat khusus untuk menanganinya.

Bahkan menurut informasi, kementerian lain seperti Dalam Negeri, Luar Negeri juga punya program serupa. Akhirnya diadakan rapat dengan mengundang berbagai kementerian dan bahkan juga mengundang Kwarnas Pramuka dan Yayasan Jatidiri Bangsa yang ternyata sudah lama mengembangkan pendidikan karakter.

Setelah beberapa kali rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga, disusun program Pembangunan Karakter Bangsa yang merupakan program nasional lintas kementerian dan lembaga. Mungkin karena yang sudah memiliki *draft* adalah Kemdiknas, maka akhirnya *draft* desain induk Pendidikan Karakter Kemdiknas yang dijadikan bahan awal menyusun desain induk Pembangunan Karakter Bangsa. Tim inti Kemdiknas juga yang menjadi Tim Inti antar kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Walaupun sampai saya mengakhiri tugas sebagai Direktur Ketenagaan program Pengarusutamaan Pendidikan Karakter masih dalam taraf awal, tetapi saya yakin akan berjalan dengan baik, karena didukung oleh semua pihak. Bahkan dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, sebagian besar mereka mendukung program tersebut dan mengusulkan agar mendapat dukungan alokasi dana yang memadai.

Yang tampaknya perlu segera dikerjakan (di samping

kegiatan lain) adalah bagaimana agar pendidikan karakter masuk dalam pengembangan sekolah secara utuh. Dua hal yang rasanya penting: *Pertama*, secara periodik guru dan sekolah perlu membuat laporan evaluasi diri (*self evaluation*) tentang karakter siswa yang diajar/dibimbingnya dalam kehidupan keseharian di sekolah.

Laporan dibuat setiap semester dan secara sederhana. Misalnya seberapa kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kebersihan, kepedulian, dan kreativitas siswa. Laporan dibuat dengan jujur dan yang menjadi perhatian adalah perkembangan dari waktu ke waktu. Bukankah itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik?

Kedua, bagaimana agar budaya sekolah yang menunjukkan karakter semua warga sekolah dapat menjadi komponen penting dalam akreditasi sekolah. Jika kita yakin bahwa pendidikan karakter itu penting, maka strategi pokok dalam pendidikan karakter adalah budaya sekolah. Logikanya, budaya sekolah men-



Melaksanakan pendidikan karakter tidak memerlukan fasilitas khusus. Yang diperlukan adalah:

Teladan dari guru, karyawan, dan pimpinan sekolah.

Dilakukan secara konsisten dan terus-menerus.

Penanaman nilai-nilai kehidupan sebagai acuan bertindak.

jadi salah satu komponen penting dan pembinaan sekolah dan itu tentunya perlu masuk dalam akreditasi sekolah.

Di samping masalah konten tersebut, koordinasi akan menjadi masalah penting sekaligus krusial dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Mengapa? Semua atau paling tidak sebagian besar unit kerja di Kemdiknas, khususnya “unit kerja operasional” akan memiliki program yang terkait dengan pendidikan karakter. Oleh karena itu penyelarasan antar unit kerja akan sangat penting. ◆

*Diambil dari buku Tiga Setengah
Tahun Bersama Ditnaga*



Bagian 2

KEBIJAKAN PENDIDIKAN



1

Desentralisasi Pendidikan yang Tergesa

Saya kembali diundang untuk ikut diskusi tentang pendidikan di SBO TV. Sudah beberapa kali saya diundang untuk forum itu, tapi selalu tidak dapat hadir karena waktunya bersamaan dengan acara lain. Kali ini saya berusaha hadir, walau harus berkejaran waktu karena sebelumnya ada agenda pertemuan dengan rombongan KONI Jatim.

Tema program yang tayang pada 14 Mei 2013 itu adalah *Perluakah Desentralisasi untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan?* Pesertanya cukup banyak, sekitar 25 orang, antara lain ada Ketua DPRD Sidoarjo, ada Pak Sahudi-mantan Kadiknas Surabaya, Mas Satria Darma-Ketua IGI, Pak Lis dari Dewan Pendidikan Jawa Timur, Mas Isa Ansyori dari Dewan Pendidikan Surabaya, Pak Rosario Sudiro mantan

Rektor Unsuri, Mas Totok Aktivistis KIP, pengacara, mahasiswa Unair, dan para aktivis pendidikan.

Pemandunya anak muda tampan dan sering memandu acara di SBO. Katanya juga sering menjadi trainer untuk *public speaking*, sehingga dia juga merasa sebagai praktisi pendidikan. Diskusi berlangsung sangat hidup. Hampir semua yang diundang menyampaikan pendapat dengan antusias. Bahkan di sesi akhir, ketika pemandu menawarkan siapa yang masih ingin menyampaikan unek-unek, masih banyak yang mengangkat tangan. Menurut saya antusiasme peserta itu sangat menggembirakan, karena menunjukkan bahwa pendidikan menjadi kepedulian banyak pihak.

Tetapi yang agak merisaukan adalah pemahaman peserta diskusi terhadap desentralisasi pendidikan ternyata sangat beragam dan bahkan terkesan rancu. Desentralisasi pendidikan dicampuradukan dengan kurikulum, dengan standar pendidikan, ujian nasional, kesejahteraan guru, kualitas guru, dengan transparansi anggaran sekolah, dan sebagainya.

Melihat kenyataan itu, saya jadi teringat sebuah studi yang menyimpulkan kebanyakan desentralisasi pendidikan gagal kerana ketidaksamaan pemahaman dari para *stakeholder*. Akibatnya masing-masing memaknai desentralisasi pendidikan secara berbeda dan kemudian mengambil langkah pelaksanaan yang berbeda. Nah, langkah tersebut sering saling bertentangan atau paling tidak saling tarik-menarik.

Karena masing-masing menyampaikan gagasan dengan pemahaman yang beragam, saya jadi teringat cerita orang buta yang berdiskusi tentang gajah. Ada yang memegang telinganya, sehingga dengan menggebu mengatakan gajah itu seperti kipas yang terbuat dari kulit tebal dan

selalu bergerak. Ada yang memegang ekornya, sehingga mengatakan gajah itu pengusir lalat yang digunakan anak berkhitan di zaman dahulu. Ada yang memegang kakinya, sehingga dengan antusias menjelaskan bahwa gajah itu seperti batang bambu besar.

Begitulah kira-kira gambaran diskusi tentang desentralisasi pendidikan di SBO TV. Sang pemandu juga tampak bingung, karena sangat beragamnya pemahaman peserta dan semuanya antusias menyampaikan pendapat. Saya membayangkan, kalau peserta diskusi yang sebagian besar adalah orang-orang yang memiliki peran mengambil kebijakan dan melaksanakan kebijakan pendidikan, pemahamannya seperti itu, pantas saja pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia seperti pusaran air bah. Tampak berjalan cepat dan ramai, tetapi tidak pindah tempat karena hanya berputar-putar. Ya di situ-situ saja, tanpa ada kemajuan.

Desentralisasi pendidikan kita memang sangat tergesa-gesa. Begitu Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dikeluarkan saat itu juga desentralisasi dilaksanakan. Sejauh yang saya ketahui, tidak ada tahapan-tahapan dalam implementasinya. Sosialisasi sepertinya juga tidak menjangkau semua *stakeholder*. Itu terbukti tajamnya perbedaan penafsiran di antara mereka. Akibatnya terjadi tarik-menarik antar pemangku kepentingan.

Perbedaan itu tidak hanya antara level lembaga, misalnya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan sekolah, tetapi juga antara stakeholder dalam satu level. Sebagai contoh adalah adanya perbedaan antara Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan UUSPN. Dalam UU Pemerintahan Daerah, pendidikan termasuk urusan yang didesentralisasikan. Karena desentralisasi Indonesia

”

Desentralisasi pendidikan kita memang sangat tergesa-gesa.

Begitu UU dan PP dikeluarkan saat itu juga desentralisasi dilaksanakan.

Tidak ada tahapan-tahapan dalam implementasinya. Sosialisasinya juga tidak menjangkau semua *stakeholder*.”

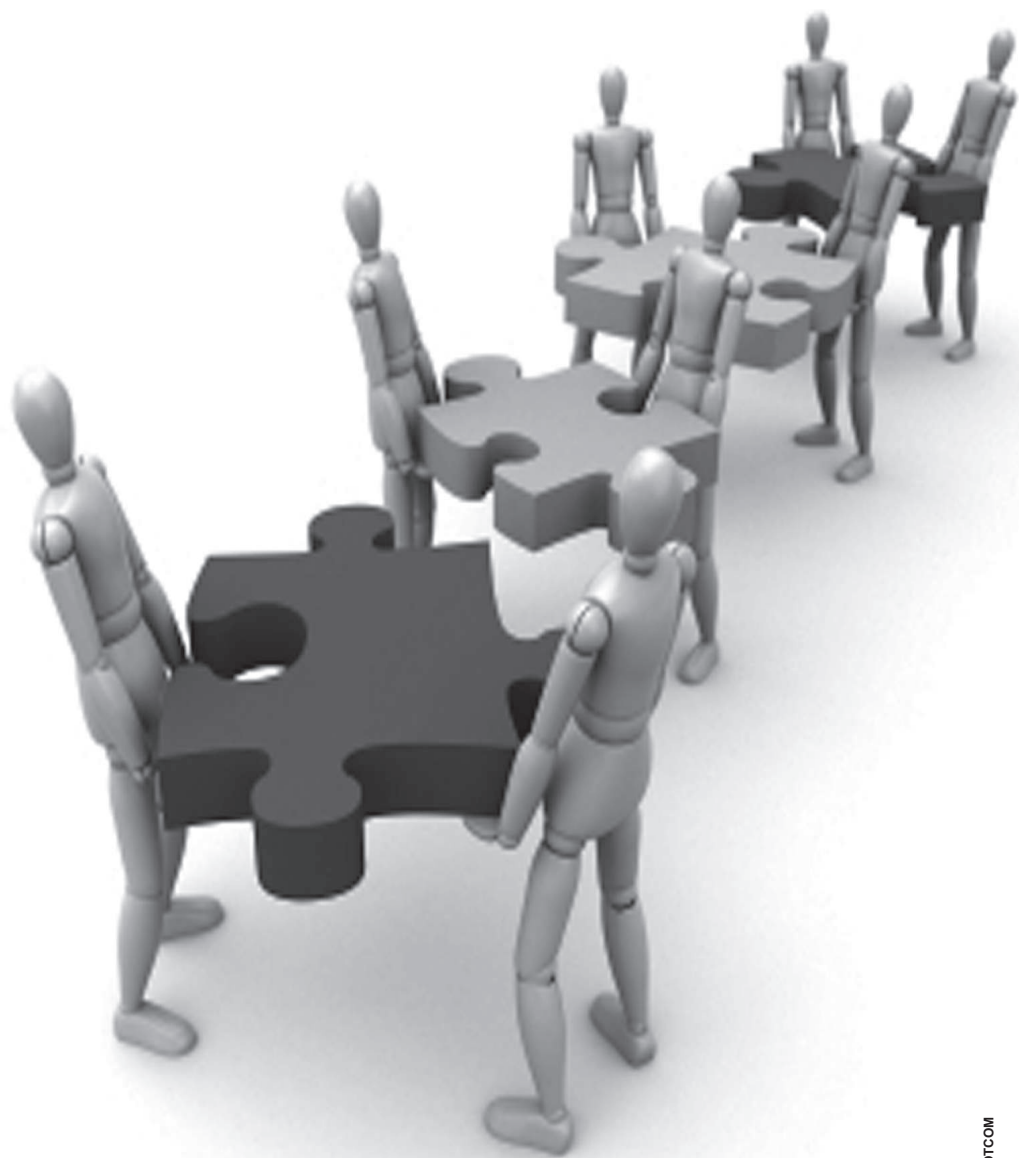
diletakkan di kabupaten/kota, maka dalam PP-nya pendidikan diurus oleh kabupaten/kota. Sementara itu dalam UUSPN disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan menggunakan pola Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Perbedaan mendasar inilah yang menjadi penyebab “perselisihan” antara dinas pendidikan kab/kota dengan sekolah dalam pengambilan kebijakan. Biasanya yang kalah sekolah, karena sekolah merupakan bawahan dinas kab/kota.

Ibarat orang tua dan anaknya yang beranjak remaja, itulah fenomena pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Orang tua (analog dengan unit level lebih tinggi) belum percaya kalau anaknya (analog dengan unit level lebih rendah) mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu orangtua (unit lebih tinggi) ingin membantu/mengajari, sementara anak remaja (unit lebih rendah) merasa sudah mampu dan tidak ingin dicampuri. Tarik menarik dan saling kurang percaya mewarnai pelaksanaan

desentralisasi, persis fenomena orang tua yang anaknya sedang beranjak remaja.

Studi terhadap pelaksanaan desentralisasi di berbagai negara menyimpulkan bahwa negara yang sukses, menjalani masa transisi sampai 10 tahun sebelum menerapkan desentralisasi secara penuh. Pada periode itu pemahaman terhadap pembagian tugas-kewenangan-tanggung jawab dilakukan dengan intensif dan dilaksanakan secara bertahap. Juga dibuat secara jelas pembagian tugas-kewenangan-tanggung jawab antar level lembaga. Apa peran pemerintah pusat, peran provinsi, peran kabupaten/kota, dan apa peran sekolah. Pembagian tidak hanya secara umum, tetapi juga dalam setiap komponen pendidikan. Misalnya untuk komponen guru, apa peran lembaga-lembaga tersebut. Demikian pula, untuk proses pembelajaran, sarana-prasarana dan sebagainya. Nah, dalam periode transisi pembagian peran tersebut semua dicobakan.

Bahkan ada negara yang “pernah gagal” melaksanakan desentralisasi pendidikan. Setelah merasa gagal, urusan pendidikan disentralisasi lagi untuk beberapa tahun. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan pentahapan. Ternyata desentralisasi “versi baru” itu membawa hasil yang bagus. Semoga kita dapat belajar dari negara lain yang telah melakukan desentralisasi pendidikan dengan sukses. ◆



2

Desentralisasi, Pembagian Tugas Harus Jelas

Salah satu masalah yang mengganggu pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia adalah pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang kurang jelas. Bahkan pengertian desentralisasi pendidikan yang diterapkan juga belum dirumuskan dengan jelas. Akibatnya setiap orang menafsirkan sendiri-sendiri. Manakala mereka dalam posisi penentu kebijakan, maka akan menentukan kebijakan sesuai dengan tafsirnya. Demikian pula mereka yang dalam posisi eksekutor, akan melaksanakan desentralisasi sesuai dengan pemahamannya sendiri.

Pada awal era reformasi, ketika Indonesia memutuskan untuk melakukan desentralisasi berbagai urusan, pendidikan termasuk urusan yang didesentralisasikan. Saat itu ba-

nyak orang, termasuk saya, membayangkan Depdiknas akan menjadi semacam “Badan Litbang + Inspektorat”, yang tugasnya merumuskan kebijakan, membuat standar, melakukan inovasi, dan melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa pendidikan berjalan sesuai yang diharapkan. Sedangkan pelaksanaan pendidikan diserahkan kepada lembaga di bawahnya. Pemikiran itu didasarkan pada pengalaman negara maju yang sudah lebih dahulu menerapkan desentralisasi pendidikan.

Maka waktu itu mulai muncul kasak-kusuk seperti apa bentuk organisasi Depdiknas dan berapa staf yang diperlukan. Mulai banyak staf Depdiknas yang *mikir-mikir* akan pindah ke mana. Dan benar, pada tahun 2000 ada beberapa staf Depdiknas yang meminta pindah ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Kab/Kota. Bahkan kemudian beberapa di antara mereka menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Ketika PP No 25 Tahun 2000 terbit, ternyata dugaan tadi tidak jauh meleset. Dalam PP 25/200, pasal 2 ayat (3) butir 11, disebutkan kewenangan pemerintah pusat adalah: (1) penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya, (2) penetapan standar materi pelajaran pokok, (3) penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik, (4) penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, (5) penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa, (6) penetapan persyaratan zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi, (7) pemanfaatan hasil

penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional, (8) penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar biasa, (9) pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional, dan (10) pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Kewenangan provinsi dimuat pada pasal 3 ayat (5) butir 10 yaitu: (1) penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu, (2) penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah, (3) mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis, (4) pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi, (5) penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan atau penataran guru, dan (6) penyelenggaraan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.

Apa tugas dan kewenangan kabupaten/kota? Dalam PP No 25/2000 tidak disebutkan. Namun kita dapat memaknai, semua tugas dan kewenangan yang tidak tercakup di pemerintah pusat dan provinsi tentunya menjadi tugas dan kewenangan kabupaten/kota. Itulah yang mengukuhkan pendapat bahwa desentralisasi pendidikan diletakkan di kabupaten/kota. Dan itulah salah satu yang mengagetkan banyak ahli pendidikan, karena pada umum-

”

Tampaknya pemerintah pusat belum siap untuk melepaskan tugas pelaksanaan pendidikan.

Sementara itu, aparat di dinas pendidikan kabupaten/kota juga belum punya pengalaman untuk melaksanakan tugas yang begitu besar, sehingga sering kedodoran.”

nya desentralisasi pendidikan diletakkan di negara bagian atau setingkat provinsi. Tampaknya di Indonesia, disamakan dengan urusan lain yang diletakkan di kabupaten/kota.

Kalau kita cermati isi PP 25/2000, sebenarnya tugas dan kewenangan pemerintah pusat “hanya menetapkan standar”, kewenangan provinsi “membantu pemerintah pusat”, sedangkan pelaksanaan urusan pendidikan sepenuhnya dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Namun, mengapa sampai sekarang sepertinya pemerintah pusat begitu dominan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan? Ada gedung sekolah rusak pemerintah pusat yang sibuk. Pelatihan guru pemerintah pusat yang sibuk. Dan banyak lagi contoh lainnya.

Dugaan saya itu semua disebabkan kurang jelasnya pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Deskripsi yang dimuat dalam PP 25/2000 tampaknya belum jelas bagi ketiga level pemerintahan kita. Tumpang tindih kegiatan juga sering terjadi, mi-

salnya dalam pelatihan guru. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sama-sama melakukan pelatihan yang kadang-kadang isinya hampir sama.

Mengapa begitu? Tampaknya pemerintah pusat belum siap untuk melepaskan tugas pelaksanaan pendidikan. Hal itu disebabkan sudah menjadi kebiasaan, sehingga sulit diubah, dan juga belum percaya kepada aparat pada level provinsi/kabupaten/kota. Sementara itu, aparat di dinas pendidikan kabupaten/kota juga belum punya pengalaman untuk melaksanakan tugas yang begitu besar, sehingga sering kedodoran.

Akibat dari situasi tersebut struktur organisasi Depdiknas (sekarang menjadi Kemdibud) yang dahulu dibayangkan akan “menyusut” tidak terjadi dan bahkan malah membesar. Demikian pula struktur dinas pendidikan di provinsi yang secara undang-undang “hanya” bertugas membantu pemerintah pusat juga tidak berubah strukturnya. Sementara itu struktur dinas pendidikan kabupaten/kota membesar. Saya belum punya data, tetapi dapat diduga jumlah pegawai yang mengurus pendidikan, kini meningkat dibanding sebelum era desentralisasi.

Mungkin kita bertanya, bagaimana untuk mengatasi situasi tersebut? Rasanya pembagian tugas perlu dilihat kembali. Pembagian tugas sebaiknya lebih jelas dan mudah dilihat, sehingga masyarakat mudah memahami. Kita juga perlu melihat substansi persekolahan agar pembagian tugas/kewenangan tidak menimbulkan masalah di lapangan.

Terkait dengan hal di atas, sebaiknya pembagian tugas dalam pembinaan persekolahan dibagi dalam jenjang. Pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi tugas dan kewenangan kabupaten/kota. Pendidikan menengah (SMA dan SMK) menjadi tugas dan kewenangan provinsi. Sedangkan

perguruan tinggi menjadi tugas dan kewenangan pemerintah pusat. Tentu pemerintah pusat masih punya tugas menentukan kebijakan umum, standar, mengembangkan inovasi, dan melakukan pemantauan.

Dengan cara itu setiap level pemerintahan punya tugas/kewenangan yang distingtif dan mudah dilihat oleh masyarakat. Jika ada permasalahan dengan SD dan SMP tinggal menunjuk pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi serta pemerintah pusat tidak perlu ikut-ikut. Jika ada permasalahan dengan SMA dan SMK tinggal menunjuk pemerintah provinsi, sehingga kabupaten/kota dan pemerintah pusat tidak perlu ikut-ikut. Jika ada permasalahan perguruan tinggi tinggal menunjuk pemerintah pusat, sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak perlu ikut-ikut. Semoga. ♦



3

Pasal Penting yang Terlupakan

Surabaya dan Jawa Timur defisit guru, karena banyaknya guru yang pensiun. Begitu berita yang termuat dalam *Jawa Pos* edisi 3 dan 4 Januari 2016 lalu. Kejadian itu tidak hanya di Jawa Timur tetapi di seluruh Indonesia, karena datangnya gelombang pensiun guru SD yang diangkat akhir tahun 1970-an, ketika pendirian SD Inpres secara besar-besaran.

Seingat saya, tahun 2006 data itu sudah diungkap oleh Dirjen PMPTK Pak Fasli Jalal berdasar hasil studi Bank Dunia. Sayangnya antisipasi terhadap itu tidak dilakukan, sehingga saat ini banyak SD yang kekurangan guru.

Kejadian serius itu tidak akan terjadi kalau kita tidak melupakan pasal penting dalam Undang-undang Guru dan

Dosen (UUGD). UUGD diundangkan tanggal 30 Desember 2005, jadi sudah berumur 10 tahun. Namun demikian pasal sangat penting, terkait dengan jaminan pemenuhan kebutuhan guru, sepertinya tidak mendapat perhatian.

Saya dapat mengatakan demikian, karena ketika pasal itu saya sampaikan kepada beberapa pejabat yang menangani pendidikan, hampir semua belum membaca. Agak aneh UUGD sudah berusia 10 tahun tetapi ada pejabat terkait yang belum membaca. Semoga itu bukan berarti mereka tidak punya perhatian atau bahkan melempar tanggung jawab.

Pasal yang dimaksud adalah pasal 24 yang secara lengkap berbunyi: (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah; (2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan; (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan; (4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifi-

fikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Menurut seorang kawan yang dahulu ikut menyusun UUGD, pasal tersebut sengaja dibuat untuk membagi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan guru. Ayat (1) mengamanatkan agar pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk memenuhi kebutuhan guru di madrasah negeri, karena madrasah tidak termasuk urusan yang didesentralisasikan. Ayat (2) mengamanatkan agar pemerintah provinsi memenuhi kebutuhan guru SMA/SMK/SLB negeri. Ayat (3) mengamanatkan agar pemerintah kabupaten/kota memenuhi kebutuhan guru TK/SD/SMP negeri. Ayat (4) mengamanatkan agar yayasan penyelenggara pendidikan memenuhi kebutuhan guru di TK/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA yang dikelolanya.

Menurut saya pembagian kewajiban pada pasal 24 tersebut sangat rasional, karena memang itulah tanggung jawabnya. Dengan begitu jika ada madrasah negeri yang kekurangan guru, Kementerian Agama yang harus bertanggung jawab. Jika ada TK/SD/SMP negeri yang kekurangan guru pemerintah kabupaten/kota yang harus bertanggung jawab dan seterusnya.

Perancang pasal itu sangat jeli, karena ayat (4) secara jelas menyebut untuk sekolah swasta yang harus disediakan oleh yayasan adalah guru tetap dan bukan guru honorer, karena berdasarkan pengalaman banyak yayasan yang lebih senang mempekerjakan guru honorer dibanding guru tetap, dengan alasan agar tidak terlalu membebani keuangan yayasan. Padahal kita tahu guru honorer hanya datang saat mengajar, sehingga tidak dapat membina kegiatan sekolah lainnya.

Jaminan akan adanya guru seperti diamanatkan pasal

”

Banyak yayasan lebih senang memaknai guru honorer dibanding guru tetap, dengan alasan agar tidak membebani keuangan yayasan. Padahal guru honorer hanya datang saat mengajar, tidak dapat membina kegiatan sekolah lainnya.”

24 tersebut sangat penting, karena berbagai studi membuktikan bahwa kontribusi guru terhadap hasil belajar siswa melebihi 50%. Studi John Hattie (2008) di New Zeland menyimpulkan 58% hasil belajar siswa tergantung pada gurunya. Studi serupa di Amerika menunjukkan pengaruh tersebut sebesar 53% (Mourshed and Barber, 2010), sedangkan di Indonesia pengaruh itu sebesar 54,5% (Pujiastuti, Widodo, dan Raharjo, 2012). Berdasarkan tiga studi tersebut, jika semua sekolah memiliki guru dalam jumlah cukup dengan mutu yang bagus, maka peluang siswa untuk mendapatkan nilai bagus lebih dari 50%.

Dengan pikiran terbalik kita dapat mengatakan, jika sekolah tidak memiliki guru yang cukup dengan mutu yang baik, maka peluang hasil belajar siswa jelek juga lebih dari 50%. Tampaknya itulah yang kita hadapi saat ini. Apalagi jika defisit guru tidak segera kita atasi. ◆

4

Komite Nasional Reformasi Tata Kelola Guru

Pada 25 Juni 2015 saya diundang Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud untuk diskusi tentang tata kelola guru. Saya sangat gembira dengan diskusi yang menunjukkan Kemdikbud memiliki kemauan untuk menata guru secara komprehensif. Kemauan itu ditandai dengan banyaknya undangan yang terdiri dari eselon satu berbagai kementerian yang terkait dengan guru, misalnya Kemdikbud, Kemristek-Dikti, Kemkeu, Kemenag, Kemenpan-RB, Bappenas, dan sebagainya. Paling tidak itu menunjukkan kesadaran bahwa menata guru melibatkan berbagai instansi.

Saya menjadi lebih gembira ketika Mendikbud, saat memberi arahan, berharap agar forum itu diawali dengan

brainstorming untuk menggali dan mengembangkan gagasan, termasuk yang agak liar dan keluar dari aturan yang ada. Juga tidak perlu memikirkan dapat-tidaknya dilaksanakan. Tampaknya Pak Mendikbud ingin peserta melakukan eksplorasi gagasan bagaimana tata kelola guru yang ideal, tidak hanya untuk saat ini tetapi justru diarahkan untuk jangka panjang. Jika ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada, aturannya yang disesuaikan agar gagasan ideal itu dapat terlaksana.

Saya juga gembira, ketika Dirjen GTK mengutip hasil penelitian John Hattie dan Sander and Rivers. Keduanya menunjukkan peran guru yang sangat besar dalam menentukan hasil belajar siswa. Dua studi itu menyimpulkan, di luar potensi dasar siswa, kontribusi guru terhadap hasil belajar siswa lebih dari 50%. Saat mendapat kesempatan berbicara, saya menambahkan untuk konteks Indonesia, juga ada penelitian Pujiastuti, Widodo dan Raharjo yang menyimpulkan kontribusi guru sebesar 54,5%. Artinya jika kita dapat memastikan di setiap sekolah terdapat guru dalam jumlah yang cukup, kompetensi yang baik dan mereka bekerja dengan baik, maka 50% masalah pendidikan dapat terselesaikan.

Oleh karena itu wajar jika Undang-undang Guru dan Dosen, pasal 24 mengamanatkan agar pemerintah (pusat), provinsi, kabupaten/kota memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah.

Dalam *brainstorming* yang hanya sekitar tiga jam terungkap betapa rumitnya masalah guru. Dari sisi jum-

lah, memang secara nasional jumlah guru sudah cukup, tetapi fakta juga menunjukkan banyak sekolah, khususnya di daerah perdesaan atau daerah terpencil, kekurangan guru. Jadi masalahnya terletak pada distribusi guru yang tidak merata. Tidak hanya antar daerah, tetapi juga antar sekolah dalam satu daerah, antar jenjang dan juga antar matapelajaran.

Walaupun secara teori memindah guru antar sekolah dalam satu kabupaten/kota itu mudah, ternyata praktiknya tidak seperti itu. Memindah guru dari sekolah dalam kota ke pinggiran atau dari sekolah favorit ke sekolah tidak favorit dapat dimaknai sebagai hukuman. Pada hal data menunjukkan sekolah yang kelebihan guru biasanya sekolah di kota dan sekolah favorit.

Belum lagi perpindahan guru juga menyangkut transportasi kerja. Untuk kabupaten yang wilayahnya luas, pemindahan guru ke sekolah yang jarak dari rumahnya jauh juga menimbulkan dampak transportasi. Belum lagi jika kabupaten merupakan kepulauan dan yang biasanya kekurangan guru adalah sekolah yang di daerah terpencil.

Kasus di beberapa daerah ternyata yang banyak kekurangan guru adalah SD, sementara yang kelebihan guru adalah SMA. Memindah guru SMA untuk menjadi guru SD juga tidak mudah. Bukan sekadar kemampuan atau latar belakang studinya, tetapi juga gengsinya. Guru SMA merasa lebih bergengsi dibanding guru SD, sehingga jika guru SMA dimutasi menjadi guru SD, juga dapat menimbulkan masalah psikologis.

Perpindahan guru antar kabupaten/kota dan antar provinsi tentu lebih sulit. Tentu tidak semua kabupaten/kota rela jika gurunya dipindah. Apalagi jika yang dipindah itu guru yang baik atau jenis guru yang dibutuhkan. Bah-

”

Begitu ruwetnya masalah guru, tampaknya tepat gagasan membentuk Komite Reformasi Tata kelola Guru untuk mencari solusi yang komprehensif.”

kan ketika terbit UU no 23 yang mengamatkan agar SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi, ada sinyalemen ada kabupaten/kota yang mendorong guru yang kurang baik mutasi ke provinsi, sementara guru yang baik dipertahankan.

Ketimpangan *suplly-demand* guru ternyata serius. Konon jumlah LPTK saat ini sudah lebih dari 400 buah. Ketika minat menjadi guru meningkat sebagai dampak dari pemberian tunjangan profesi, ternyata membuat LPTK menambah daya tampung. Juga tumbuh LPTK baru, baik perluasan mandat dari “universitas umum” yang kemudian membuka prodi kependidikan dan juga LPTK baru. Diperkirakan jumlah mahasiswa LPTK saat ini sudah mendekati 1,8 juta dengan lulusan sekitar 400 ribu orang per tahun. Padahal kebutuhan guru baru hanya sekitar 50 ribu orang.

Mutu guru yang kurang baik dan kinerja guru yang tidak berubah setelah menerima tunjangan profesi ternyata juga tidak sederhana. Banyak guru kita yang

senior itu hasil rekrutmen akhir 1970-an saat pemerintah secara besar-besaran membuka SD Inpres dan untuk mengisi guru dibuat *crash program* yang disebut SPG-C, yaitu program 1 tahun sesudah SMP. Lulusan SPG-C itu ditempatkan di SD Inpres di pedesaan sambil sore hari menempuh Kursus Pendidikan Guru (KPG) selama 2 tahun dan lulusannya disetarakan dengan SPG. Mereka itu banyak yang tidak berkesempatan melanjutkan studi dan juga tidak banyak tersentuh pelatihan. Jadi dapat dibayangkan seperti apa mutunya, jika itu diukur dengan tes yang menggunakan standar S1 Kurikulum saat ini.

Begitu ruwetnya masalah guru, tampaknya tepat gagasan membentuk Komite Reformasi Tata kelola Guru untuk mencari solusi yang komprehensif. Dengan kegiatan rutin yang begitu menumpuk rasanya kasihan jika Ditjen GTK harus memikirkan masalah yang begitu rumit dan menyangkut berbagai instansi. Namun demikian, menurut saya ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius.

Pertama, Komite tersebut harus bekerja ekstrakeras dan berkoordinasi dengan berbagai instansi. Konsep yang disusun harus didukung dengan pemikiran akademik yang jernih, punya terobosan ke depan, tetapi tetap melihat kemungkinan pelaksanaannya, termasuk tahapannya.

Kedua, pemikiran kita terhadap guru yang sudah ada di lapangan harus jernih. Mereka itu ibarat sudah menjadi bagian keluarga yang sudah berjasa panjang. Mungkin saja mereka banyak yang tidak mampu mengikuti perkembangan, karena berbagai sebab. Namun mereka tidak boleh begitu saja dilupakan, bahkan “dibuang”. Yang perlu ditemukan adalah bagaimana meningkatkan kinerja mereka.

Ketiga, untuk dapat mengirimkan guru ke sekolah di pelosok, amanat pasal 23 ayat (1) UUGD perlu dipertim-

bankan. Selama ini kabupaten di daerah terpencil selalu kesulitan guru baru yang memenuhi persyaratan pendidikan minimal. Tampaknya lulusan LPTK (S1 atau PPG) tidak tertarik melamar menjadi guru di daerah terpencil. Jika ikatan dinas sebagaimana diamanatkan oleh pasal 23 ayat (1) UUGD itu dilaksanakan, pemerintah akan punya stok guru baru yang siap ditugaskan ke daerah terpencil.

Keempat, perlu dikembangkan pola pembinaan karier guru yang komprehensif. Tidak hanya karier dalam arti penjurangan dari guru muda ke selanjutnya, tetapi juga apa saja posisi yang disediakan bagi guru, apa syaratnya, termasuk mobilitas antar lembaga dan antar daerah. Tentu tidak bijak “mengurung” guru berdinis di daerah terpencil sepanjang dinasnya. Tentu akan bijak, jika berdinis di sekolah terpencil itu bagian dari penugasan dan bagian dari persyaratan karier.

Kelima, *continous professional development* (CPD) perlu dicarikan bentuk yang luwes dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT). Jika MGMP/KKG dapat dioptimalkan sebagai wahana CPD yang didukung oleh lembaga lain yang kredibel, misalnya universitas dan difasilitasi dengan ICT, maka setiap minggu guru dapat belajar di MGMP/KKG dengan dukungan universitas atau lembaga lain. ◆

5

Merespons Analisis Pendidikan Wapres

Di hadapan peserta kuliah umum di Universitas Monash Melbourne, Australia, Wakil Presiden Boediono mengakui bahwa pendidikan di Indonesia tertinggal (*Kompas 16/11/2013*). Menurut Wapres ada tiga tantangan mendasar untuk mengejar ketertinggalan. *Pertama*, Indonesia kekurangan guru bermutu sedangkan guru bermutu yang ada tidak terdistribusi dengan baik. *Kedua*, fasilitas pendidikan sangat kurang khususnya di daerah yang jauh dari kota. *Ketiga*, isi dan penyampaian materi ajar tidak sesuai dengan standar.

Kalau dicermati, analisis Wapres akhirnya terfokus kepada guru. Isi dan penyampaian materi ajar yang tidak sesuai dengan standar karena gurunya kurang bagus.

Apapun kebijakan mutu pendidikan, pada akhirnya guru yang melaksanakan di lapangan. Jadi wajar kalau mantan Perdana Menteri China Li Lanqing (2003) menyatakan semua pejabat pemerintah, apapun tingkatannya, harus menghormati guru.

Analisis Wapres sejalan dengan simpulan Thomas Friedman terhadap kemajuan pendidikan di Shanghai. Menurut Friedman, rahasia peningkatkan mutu pendidikan di Shanghai terletak pada: (1) *a deep commitment to teacher training*, (2) *peer-to-peer learning and constant professional development*, (3) *a deep involvement of parents in their children's learning*, (4) *an insistence by the school's leadership on the highest standards*, and (5) *a culture that prizes education and respects teachers* (*The New York Times*, 22 October 2013).

Untuk mendapatkan guru bermutu tentu diperlukan calon yang pandai, proses pendidikan di lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) yang bermutu, dan pembinaan yang bagus setelah mereka mengajar. Studi Wang dkk. (2003) berjudul *Preparing Teachers Around the World* mengonfirmasi argumen tersebut. Belanda, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura adalah negara yang dinilai bagus dalam menyiapkan calon guru dan juga membinanya setelah bekerja di sekolah. Terbukti pendidikan di negara-negara tersebut bermutu baik.

Sesuai dengan kajian Friedman dan Wang dkk, analisis Wapres Boediono memang valid. Pertanyaannya, bagaimana langkah untuk menggunakan analisis itu untuk mengejar ketertinggalan pendidikan kita? Data SNMPTN dua tahun terakhir memberikan harapan untuk memperoleh calon guru yang bagus. 69,4% pendaftar SBMPTN 2013 ingin menjadi guru dan masuk ke LPTK. Dengan

peminat yang banyak, seleksi menjadi ketat dan akhirnya mendapat calon mahasiswa yang bagus.

Jika mahasiswa baru pandai-pandai, pertanyaan berikutnya apakah proses pendidikan di LPTK cukup bagus. Belum ada studi yang menggambarkan kualitas pendidikan di LPTK. Yang pasti mutu LPTK sangat bervariasi. Dan yang mencemaskan, ketika minat menjadi guru naik, jumlah LPTK juga naik tajam. Tahun 2008 jumlahnya sekitar 270-an, kini sudah mencapai 415 buah dengan mahasiswa sekitar 1,8 juta orang, dengan lulusan sekitar 400 ribu orang per tahun. Peningkatan jumlah LPTK tersebut sangat mengkhawatirkan, karena menyebabkan mutu pendidikan tidak terjaga.

Pendidikan di LPTK sebenarnya semi kedinasan, karena lulusannya dipersiapkan menjadi guru. Jika kebutuhan guru setiap tahun hanya sekitar 50 ribu orang, sudah saatnya dilakukan pengaturan agar jumlah LPTK dan jumlah mahasiswanya dikendalikan. Sekaligus diberdayakan agar mampu menghasilkan guru yang bermutu.

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mewajibkan guru berpendidikan S1 plus pendidikan profesi guru (PPG), dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian jumlah LPTK. Hanya LPTK yang memenuhi syarat tertentu yang boleh membuka PPG dan jumlah mahasiswanya juga ditentukan. Lebih baik kalau mahasiswa PPG diberikan ikatan dinas, sebagaimana diamanatkan pasal 23 ayat (1) UU Guru dan Dosen. Pola pendidikan guru di China yang merekrut calon dari berbagai daerah, diasramakan dan diberi beasiswa, merupakan contoh baik bagi Indonesia. Diambil dari daerah dan diberi beasiswa akan memudahkan penempatan mereka setelah lulus. Dengan diasrama proses pendidikan dapat dilakukan



PLC dan MGMP dan KKG merupakan wahana bagus bagi guru untuk berbagai pengalaman dan gagasan. Bahkan juga wahana untuk mendatangkan ahli untuk memberikan pencerahan.”

24 jam, sehingga efektif untuk pembinaan karakter.

Distribusi guru merupakan masalah yang pelik. Secara agregat jumlah guru kita sangat cukup. Rasio guru kita lebih baik dibanding Singapura dan Thailand, namun banyak sekolah di pedesaan yang kekurangan guru (Jalal, 2010). Guru baru enggan ke daerah terpencil, sedangkan guru yang sudah ada di daerah cenderung ingin pindah ke kota.

Tahun 1999 pernah ada program redistribusi guru dengan bantuan Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*). Namun program tersebut tidak berhasil, karena kepindahan guru ke sekolah di pedesaan dimaknai sebagai hukuman. Oleh karena itu, diperlukan pola karier guru yang mengaitkan perpindahan mengajar di daerah terpencil merupakan bagian dari pembinaan karier.

Ketidaksesuaikan isi dan metoda pembelajaran tampak juga terkait dengan pembinaan profesionalisme guru. Secara jujur harus diakui kita belum punya

pola yang mapan. Di negara maju, guru wajib mengikuti pelatihan setiap tahun. Mereka juga punya *Professional Learning Community (PLC)* sebagai wahana berdiskusi tentang problem-problem yang dihadapi.

Kita punya MGMP (Musyawarah Guru Matapelajaran) dan KKG (Kelompok Kerja Guru) yang mirip dengan PLC. Hanya saja kegiatan MGMP dan KKG biasanya terbatas pada menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Pada hal PLC dan MGMP dan KKG merupakan wahana bagus bagi guru untuk berbagai pengalaman dan gagasan. Bahkan juga wahana untuk mendatangkan ahli untuk memberikan pencerahan.

Kita juga pernah punya sanggar MGMP dan KKG yang dikembangkan melalui proyek Bank Dunia. Sayang sanggar tersebut sekarang tidak ada lagi. MGMP, KKG, dan sanggar tersebut perlu diaktifkan kembali. Dengan teknologi modern, kegiatan MGMP/KKG/sanggar tersebut dapat dihubungkan dengan Pusat Sumber Belajar (PSB) di universitas, sehingga dapat saling berbagi pengalaman dan keahlian. Apalagi sekarang guru sudah mendapatkan tunjangan profesi yang di dalamnya ada bagian dana untuk pengembangan profesionalime. ◆

6

Guru, MBS, dan Kurikulum

Ketika terjadi silang pendapat tentang penghentian Kurikulum 2013, tulisan Thomas Friedman di *The New York Times* edisi 22 Oktober 2013 menarik untuk dibaca. Penulis buku *best seller The World is Flat* itu, tertarik terhadap perkembangan mutu pendidikan di Shanghai yang meningkat dalam waktu relatif singkat. Setelah mengunjungi sekolah-sekolah di sana, Friedman menulis artikel berjudul *The Shanghai Secret*. Dia menyimpulkan pendidikan di Shanghai meningkat cepat karena: (1) komitmen yang tinggi terhadap pendidikan calon guru, (2) pengembangan profesional bagi guru dengan menekankan *peer to peer learning*, (3) pelibatan orangtua dalam pembelajaran anak, (4) adanya kepemimpinan



Memastikan sekolah memiliki guru yang baik serta menerapkan prinsip MBS jauh lebih penting, dibanding kita bersilang pendapat tentang implementasi kurikulum baru.”

kepala sekolah yang mendorong pencapaian standar pendidikan yang tinggi, dan (5) adanya budaya untuk menghargai guru dan inovasi pendidikan yang dilakukan.

Apa itu hal baru? Sebenarnya tidak. Penelitian Abu-Duhou (1999) menemukan hal yang serupa, bahkan dengan penjelasan lebih baik. Menurut Abu-Duhou peningkatan mutu pendidikan dihasilkan oleh inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Namun guru baru dapat melaksanakan inovasi, jika (1) memiliki kompetensi yang bagus, (2) memiliki otonomi dalam melakukan inovasi, (3) iklim kerja yang mendorong guru melakukan inovasi.

Jadi guru yang baik merupakan syarat vital bagi peningkatan mutu pendidikan. Tanpa guru yang baik, apapun kebijakan pendidikan tidak akan berjalan mulus di sekolah. Barber dan Mourshed (2007) menyebutkan bahwa 53% hasil belajar siswa ditentukan oleh guru. Bahkan studi John Hattie (2011) menyebutkan pengaruh tersebut sebe-

sar 58,8%.

Namun guru yang baik tidak otomatis dapat meningkatkan mutu pendidikan. Diperlukan otonomi yang cukup bagi sekolah, agar para guru punya ruang gerak melakukan inovasi dan kepala dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi gurunya. Itulah yang dimaksud sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada pada 41 ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selama ini pemahaman kita terhadap pengelolaan pendidikan kurang tepat. Sekolah dianggap sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), sehingga semuanya dikendalikan secara kaku oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan bahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah tidak sama dengan pabrik yang masukan dan proses kerjanya seragam. Setiap siswa berbeda dengan lainnya, sehingga mereka memerlukan proses pendidikan yang berbeda pula. Guru dituntut kreatif menemukan proses pendidikan yang tepat bagi siswanya. Mengajar PPKn bagi anak yang pandai memerlukan metoda yang berbeda dibanding siswa yang kurang pandai. Mengajar Matematika di siang hari ketika siswa sudah capek, memerlukan cara yang berbeda dibanding dengan ketika pagi hari dan siswa masih segar. Itulah yang salah satu bentuk inovasi sebagaimana disebutkan oleh Abu-Dohou (1999).

Memastikan sekolah memiliki guru yang baik serta menerapkan prinsip MBS jauh lebih penting, dibanding kita bersilang pendapat tentang implementasi K-13. Sesuai dengan prinsip MBS, apakah K-13 dilanjutkan atau dihentikan sementara, lebih baik diserahkan kepada sekolah. Sekolah yang lebih tahu apakah sudah siap atau belum, apakah melanjutkan K-13 sambil disempurnakan atau

dihentikan lebih dahulu.

Lebih dari itu, sesuai dengan UU No 23/2014 pengelolaan pendidikan SD, SMP dan PNF merupakan tugas dan kewenangan Kabupaten/Kota dan untuk SMA, SMK dan Pendidikan Khusus merupakan tugas dan kewenangan Provinsi. Karena yang diperselisihkan itu implementasi dan bukan konsep kurikulum, berarti itu wilayah pengelolaan.

Memang menjadi tugas Pemerintah Pusat menetapkan kurikulum, tetapi kapan dan bagaimana implementasinya merupakan tugas dan kewenangan kabupaten/kota untuk SD, SMP dan PNF, dan Provinsi untuk SMA, SMK dan Pendidikan Khusus. Duduk bersama untuk mendiskusikan jalan terbaik akan lebih bijaksana dibanding bersilang pendapat yang membuat sekolah menjadi bingung. ♦



7

Masih Perlukah Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal Dipisahkan?

John Seely Brown yang memberi kata pengantar buku *Rethinking Education in the Age of Technology*, tulisan Allan Collins dan Richard Halverson (*Teachers College Press, 2009*) menulis: “*I am not saying that this kind of learning will replace schooling, but it does allow new forms of both formal and informal learning to emerge around the edges of formal schooling.*” Ungkapan tersebut ternyata merupakan rangkuman dan bahkan salah satu poin penting dari buku tersebut. Bagi kita yang menekuni dunia pendidikan, ungkapan tersebut perlu direnungkan, karena gejalanya juga kita rasakan di Indonesia.

Dengan mengambil contoh di Amerika Serikat, buku tersebut membeberkan fenomena yang sangat menarik.

”

Pemisahan kelembagaan antara pendidikan formal, nonformal, dan informal harus ditinjau kembali. Perlu dipikirkan pola pendidikan yang lebih luwes yang dapat memberi “pintu integrasi” antara ketiga jalur pendidikan tersebut.”

Jamal dari Bermuda sangat antusias saat mengikuti matapelajaran Computer Science di sekolah menengah dan kemudian membaca beberapa buku tentang web design dan berkorespondensi dengan beberapa pengarang via internet. Selesai mengikuti matapelajaran tersebut, Jamal merasa sudah memiliki kemampuan merancang web, kemudian dia memulai bisnis Web Design dan berhasil.

Contoh lain yang ditunjukkan adalah dari Seymour Papert terhadap cucunya yang berusia tiga tahun yang senang dinosaurus. Orangtuanya membelikan banyak video tentang dinosaurus dan ternyata anak balita itu sangat tahu banyak tentang dinosaurus ketimbang kakeknya, walau dia belum dapat membaca. Masih banyak contoh lain dan sebenarnya juga banyak fenomena seperti itu di Indonesia dan bahkan di sekitar kita.

Apa inti dari fenomena itu? Sekolah bukan satu-satunya tempat untuk belajar. Orang dapat belajar di banyak tempat di luar sekolah. Misalnya melalui kursus, seminar, membaca buku, internet, belajar secara informal kepada orang lain

dan sebagainya.

Saya pernah bertanya kepada beberapa teman yang bekerja di perusahaan, pengusaha, dan kantor pemerintah: “Berapa persen matapelajaran atau matakuliah, yang dulu dipelajari saat sekolah atau kuliah, cocok dengan apa yang dikerjakan saat ini?” Hampir tidak ada yang menjawab lebih dari 50%, walaupun profesi mereka berbeda-beda. Lantas ketika ditanya: “Dari mana didapat bekal untuk menangani pekerjaan sekarang ini?”. Jawabannya yang muncul, “ya belajar sendiri dan bertanya kepada orang yang lebih ahli.” Artinya, mereka itu mendapatkan pengetahuan dan kemampuan tambahan di luar sekolah.

Nah, bagaimanakah di masa depan? Apakah di era teknologi informasi fenomena tersebut akan berlanjut? Akan semakin kuat atau melemah? Di era teknologi digital seperti sekarang ini, informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Internet kini merupakan salah satu sumber informasi yang nyaris tidak terbatas. Kata anak muda sekarang: *pengin* tahu sesuatu? Tanya saja ke *Google* yang mampu memberikan jawaban yang sangat banyak, kadang-kadang ribuan sumber informasi yang sedang kita cari.

Dari internet kita juga dengan mudah mendapatkan panduan untuk mengerjakan sesuatu. Jika kucing kita sakit, kita dapat memperoleh petunjuk untuk mengetahui sakitnya apa dan apa obatnya dan ke mana mendapatkan obat tersebut. Jika ingin pergi ke suatu tempat, kita dapat memperoleh panduan beberapa jalur alternatif yang dilewati dan kendaraan umum yang digunakan. Sepertinya internet dapat menjadi sumber informasi dalam berbagai hal. Dan, semakin canggih teknologi diduga jenis dan kedalaman informasi seperti itu juga akan semakin baik.

Nah, jika informasi dapat diperoleh dengan mudah di

luar sekolah, apakah sekolah masih diperlukan? Saya yakin, sekolah tetap diperlukan karena sekolah bukan sekadar tempat mencari informasi. Sekolah adalah tempat anak memperoleh pendidikan secara utuh. Namun, ke depan persekolahan harus melakukan perubahan mendasar.

Pemisahan kelembagaan antara pendidikan formal, nonformal, dan informal harus ditinjau kembali. Perlu dipikirkan pola pendidikan yang lebih luwes yang dapat memberi “pintu integrasi” antara ketiga jalur pendidikan tersebut. Pengetahuan dan kompetensi yang diperoleh di pendidikan informal dan nonformal seharusnya dapat “diakui” pada jalur pendidikan formal. Siswa di sekolah (pendidikan formal) juga perlu diberi peluang untuk mengambil “sebagian kurikulum” melalui jalur pendidikan nonformal atau informal. Tentu dengan bukti sudah menguasai kompetensi yang ditentukan. ♦



8

Menyoal Tes Potensi Akademik Untuk Seleksi Masuk SMA

Seorang dosen Unair mengirim pesan pendek ke telepon seluler saya. Dosen Fakultas Ilmu Budaya itu meminta pendapat saya tentang langkah Dinas Pendidikan Surabaya yang menerapkan Tes Potensi Akademik (TPA) untuk seleksi masuk sekolah kawasan. Sepertinya dia kurang setuju dengan kebijakan tersebut. *Apa gunanya ikut pelajaran di SMP kalau ternyata untuk masuk SMA harus ikut TPA? Apa tidak buang waktu dan biaya? Toh nilai UN mestinya sudah menggambarkan kemampuan siswa.* Begitu antara lain komentarnya.

Pada 8 Juni 2013 *Jawa Pos* bersiap mengadakan diskusi untuk membicarakan hal itu. Kebetulan saya juga diundang. Hanya saja batal karena Kepala Dinas Pendidikan

(Pak Ikhsan) tidak dapat hadir karena sedang menangani masalah hasil UN SD. Pak Suko Widodo, dosen Jurusan Komunikasi Unair juga mengundang saya dalam acara di TVRI Jawa Timur bersama dengan para guru untuk topik yang sama. Tampaknya, penggunaan TPA untuk masuk SMA menjadi topik hot di masyarakat.

Melalui tulisan singkat ini saya ingin melihat masalah itu dengan kacamata yang jernih. Untuk itu mari kita lihat perbedaan mendasar antara UN dan TPA. UN pada dasarnya *achievement test*, yang mengukur penguasaan materi kurikulum satuan pendidikan. Jadi UN SMP pada dasarnya untuk mengetahui tingkat penguasaan kurikulum SMP oleh siswa. Oleh karena itu yang diujikan, isi kurikulum SMP. Bahwa kemudian tidak semua kompetensi dasar (KD) dimasukkan dalam soal UN, itu soal teknis karena keterbatasan waktu. Akhirnya dipilih KD-KD yang dapat mewakili KD-KD yang lain. Skor atau nilai UN sebenarnya merupakan gambaran pencapaian peserta. Jika seorang siswa mendapatkan nilai 75 untuk Matematika, dapat dimaknai bahwa yang bersangkutan menguasai 75% dari kurikulum yang ditempuh.

Karena menguji penguasaan materi ajar (kurikulum) maka hasil UN akan dipengaruhi oleh mutu pembelajaran di sekolah. Siswa yang bersekolah di sekolah yang baik, maksudnya pembelajarannya bagus, maka tingkat penguasaannya terhadap kurikulum juga baik. Sebaliknya siswa yang bersekolah di sekolah yang kurang baik, maka penguasaan terhadap kurikulum juga akan kurang baik. Jika ada dua siswa yang memiliki “kecerdasan sama”, yang satu bersekolah di sekolah yang baik dan satunya bersekolah di sekolah yang kurang baik, maka tingkat penguasaan terhadap kurikulum akan berbeda. Yang bersekolah di

sekolah yang baik akan lebih tinggi penguasaannya terhadap kurikulum.

Sedangkan TPA merupakan tes psikologi yang bertujuan untuk mengukur potensi akademik peserta. Dalam bahasa sederhana mengukur kemampuan bernalar. Oleh karena itu TPA tidak dikaitkan dengan materi kurikulum sekolah, melainkan dengan tingkat perkembangan kognitif anak, yang itu terkait dengan usia. Soal TPA untuk anak SMP berbeda dengan untuk calon mahasiswa S2. Namun anak SMA dan SMK yang mengikuti TPA akan mengerjakan soal yang sama.

Karena tidak terkait dengan kurikulum, maka TPA tidak dipengaruhi oleh di mana peserta bersekolah. Secara prinsip, anak yang bersekolah di SMP yang bagus dan anak yang bersekolah di SMP yang kurang bagus, akan memperoleh skor TPA sama, asal kemampuan bernalarnya sama. Anak SMA dan SMK akan memperoleh skor TPA yang sama, kalau kemampuan bernalarnya sama.

Ibarat pisau, TPA mengukur kualitas besi yang digunakan untuk membuat pisau. Sedangkan UN mengukur ketajaman pisau, yang disamping dipengaruhi oleh besi bahannya juga dipengaruhi apakah pisau tersebut sering diasah atau tidak.

Tes TPA banyak digunakan untuk masuk ke program S2/S3, masuk ke Akabri (AMN, AAL, AAU), masuk sekolah penerbang dan seterusnya. Penggunaan TPA didasarkan pada pertimbangan mereka berasal dari lulusan sekolah/perguruan tinggi yang berbeda-beda dan juga jurusan yang berbeda-beda. Oleh karena itu sulit mendapatkan satu jenis tes yang adil diberlakukan untuk mereka. Jika kepada mereka diberikan tes yang sesuai dengan asal sekolah/jurusan, juga akan kesulitan untuk membandingkan satu dengan



lainnya. Dengan menggunakan TPA akan adil, namun seakan-akan apa yang dipelajari di sekolah/perguruan tinggi tidak “dihargai”.

Bagaimana dengan penggunaan TPA untuk masuk ke SMA? Tergantung bagaimana kita melihatnya dan dari sudut pandang mana kita menilainya. Dengan analogi pisau tadi, kalau kita mengutamakan pisau yang bahannya bagus, dengan asumsi nanti akan diasah lebih lanjut, maka TPA akan lebih prediktif. Namun jika kita berasumsi, toh kondisi sekolah tidak jauh berbeda, maka kecerdasan sudah dapat diwakili oleh nilai UN. Kita juga harus menghargai anak-anak yang sudah kerja keras, walaupun “besinya” kurang bagus, maka penggunaan UN lebih tepat. Jika memang keduanya dipertimbangkan, maka gabungan TPA dan UN secara proporsional juga dapat diterapkan.

Namun ada juga sisi lain yang harus dipertimbangkan, yaitu biaya dan kesiapan anak. Walaupun secara teoritik TPA tidak perlu dipelajari, namun dalam praktiknya anak yang sudah latihan akan lebih baik hasilnya dibanding yang tidak pernah latihan. Mengapa? Paling tidak mereka yang sering latihan sudah mengenal bentuk-bentuk soalnya, sehingga tidak grogi dan lebih cepat menyesuaikan diri. Dari sisi biaya TPA memerlukan biaya yang lumayan besar, karena merupakan tes standar yang biasanya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berkompeten, biasanya para psikolog.

Semoga kita arif menyikapinya. ◆

9

BOS Itu untuk Apa dan untuk Siapa?

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah menjadi dewa penolong bagi sekolah miskin yang selama ini kembang kempis dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Biasanya sekolah semacam itu adalah sekolah swasta yang berada di komunitas masyarakat bawah, siswanya berasal dari orangtua kurang mampu, SPP-nya kecil, akhirnya keuangan sekolah minim dan susah untuk memutar roda sekolah dengan baik. Ketika ada BOS, sekolah dapat “bernafas” karena BOS dapat menopang biaya operasional sekolah.

Tampaknya BOS bertolak dari amanat pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: “Pemerintah dan pe-

merintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”. Nah, karena warga negara yang berusia tujuh sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (pasal 6 ayat (1)), maka BOS diberikan kepada semua SD dan SMP. Kalau hanya mengacu pada pasal tersebut pelaksanaan BOS sudah tepat, karena diberikan kepada semua SD dan SMP, tanpa melibat karakteristiknya.

Namun pemaknaan pasal 11 ayat (2) UU no. 20/2003 perlu direnungkan secara substansial. Pasal 4 ayat (1) UU No. 20.2003 menyatakan “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” Berkeadilan bermakna anak-anak mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik, sesuai dengan bakat dan minatnya. Tidak diskriminatif, artinya tidak boleh anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan yang kurang baik, karena kemampuan membayarnya kecil.

Di sinilah yang menjadi bahan renungan, bagaimana merangkai makna pasal 11 ayat (2) dengan pasal 4 ayat (1). Dalam upaya mendorong pendidikan yang berkeadilan, seharusnya pemerintah juga berperan menciptakan keseimbangan. Keseimbangan agar perbedaan akses ke pendidikan yang bermutu bagi masyarakat yang mampu tidak berbeda jauh dengan masyarakat yang kurang mampu. Kesenjangan mutu pendidikan dari sekolah kaya dan sekolah miskin harus dikurangi dan itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Kalau mengacu pada delapan standar pendidikan sebagaimana diterapkan selama ini, banyak sekolah yang telah

mencapai delapan standar atau paling tidak mendekatinya. Namun juga sangat banyak sekolah masih jauh di bawah standar tersebut. Sekolah yang telah memenuhi delapan standar, biasanya sekolah kaya, berada di komunitas masyarakat kaya dan siswanya juga berasal dari keluarga kaya. Sebaliknya sekolah yang jauh di bawah standar, biasanya berada di komunitas masyarakat miskin dan siswanya berasal dari keluarga kurang mampu.

Bagaimana mendekatkan gap tersebut? Itulah yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan BOS dapat menjadi salah satu instrumen yang baik. Sekolah kaya sebenarnya tidak memerlukan BOS, karena orangtua siswa mampu menopang biaya operasional sekolah. Bahkan seringkali berlebih. Bukankah pasal 9 UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Rasanya sangat wajar jika keluarga kaya memberikan dukungan finansial bagi penyelenggaraan sekolah tempat anaknya belajar.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa keluarga kaya sering berebut memasukkan anaknya ke sekolah bagus. Bahkan bersedia membayar cukup mahal. Yang harus dijaga adalah jangan sampai seleksi masuk ke sekolah seperti itu didasarkan kepada besarnya sumbangan. Namun setelah masuk, sangat wajar jika orangtua memberikan sumbangan, sesuai dengan kemampuannya. Nah, jika ada orangtua siswa yang kurang mampu, pemerintah perlu memberikan BOS sesuai dengan jumlah anak seperti itu.

Saya yakin jumlah sekolah seperti itu cukup banyak. Jumlah orangtua yang mampu memberi sumbangan juga cukup banyak. Seiring dengan perbaikan ekonomi masyarakat, jumlah tersebut juga akan semakin banyak. Jika



Fakta lapangan menunjukkan, keluarga kaya sering berebut memasukkan anaknya ke sekolah bagus. Bahkan bersedia membayar cukup mahal.

Yang harus dijaga adalah jangan sampai seleksi masuk ke sekolah seperti itu didasarkan kepada besarnya sumbangan.”

pola pikir itu diterapkan, saya yakin cukup banyak dana BOS yang “tidak terpakai”. Tinggal bagaimana memanfaatkan dana tersebut agar lebih berhasil guna.

Dana tersebut sebaiknya dipakai untuk membantu sekolah yang masih jauh dari standar dan orangtua siswa tidak mampu memberikan sumbangan. Selama ini sekolah seperti itu mengandalkan dana BOS untuk operasional sekolah. Umumnya mereka tidak memiliki dana untuk pengembangan, karena orangtua tidak memiliki kemampuan memadai untuk memberikan sumbangan.

Dengan cara itu BOS dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Ada pemeo, anak orang kaya memperoleh gizi baik, belajar di sekolah bagus, sehingga menjadi SDM yang berkualitas, memperoleh kesempatan kerja yang baik dan akhirnya menjadi orang kaya seperti orangtuanya. Sementara itu, anak orang miskin memperoleh gizi yang kurang baik, belajar di sekolah yang seadanya, pada akhirnya tidak memiliki keahlian, memperoleh perkerjaan seadanya dan menjadi orang miskin seperti orangtuanya. Semoga BOS dapat mematahkan pemeo tersebut. ◆

10

Angka Drop Out Masih Menyedihkan

Unesa kedatangan tamu dari Bappenas. Rombongan sebanyak tujuh orang itu dipimpin oleh Ibu Nina Sardjunani, Deputi Meneg PPN/Bappenas Bidang Sumberdaya Manusia. Ikut dalam rombongan pada 15 Juni 2013 itu, Direktur Pendidikan, Direktur Kesehatan dan beberapa staf lainnya. Bu Nina adalah teman lama dan saya sering menyebutnya sebagai “dewa penolong” ketika Unesa mengajukan bantuan IDB. Tanpa bantuan Bu Nina, bantuan IDB yang sudah dirintis sejak 2004 akan “hilang”.

Karena beliau adalah perancang utama dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia, termasuk bidang pendidikan, maka saya berpesan agar Bu Nina mem-

”

Dengan keyakinan bahwa pendidikan dapat pemotong lingkaran kemiskinan, maka kita harus memikirkan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang baik dan akhirnya dapat terentas dari kemiskinan.”

beri pencerahan tentang kondisi mutakhir pendidikan di Indonesia secara makro, program apa yang sedang berjalan dan program apa yang sedang dipersiapkan untuk tahun-tahun mendatang. Gambaran seperti itu penting bagi Unesa, agar dapat melakukan antisipasi terhadap perkembangan mendatang.

Bagian presentasi yang sangat mengagetkan saya adalah gambaran kohor peserta didik yang dibagi menjadi lima kelompok (*quintile*) menurut kemampuan ekonomi orangtuanya. Dari 100% anak Indonesia yang masuk ke SD, ternyata hanya 94,1% yang tamat. Jadi ada 6% yang *drop out* (DO). Dari grafik tampak bahwa DO mulai signifikan pada kelas 4. Artinya mulai kelas 4 SD anak mulai rawan DO. Perlu dicari penjelasan mengapa begitu, karena sampai kelas 3 DO sangat kecil.

Dari 94% anak yang lulus SD itu hanya 72,4% yang melanjutkan ke SMP. Jadi ada 21,7% anak yang lulus SD tetapi tidak melanjutkan ke SMP. Dari 72,4% anak yang masuk ke SMP hanya 71,2% yang lulus SMP. Berarti ada 1,2% yang DO. Rendahnya angka transisi

dari SD ke SMP perlu mendapat perhatian, karena SD dan SMP adalah wajib belajar. Seharusnya seluruh atau paling tidak sebagian besar lulusan SD melanjutkan ke SMP. Mungkinkah jarak antara lokasi SMP dengan tempat tinggal penduduk menjadi kendala? Atau ada kendala lain, misalnya biaya untuk buku, seragam dan sebagainya? Atau ada masalah budaya?

Dari 71,2% anak lulus SMP hanya 49% yang masuk SLTA. Jadi ada 22,2% yang tidak melanjutkan ke SLTA. Dari 49% anak yang masuk SLTA hanya 46% yang lulus. Jadi ada 3% yang DO. Besarnya proporsi lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SLTA dapat dipahami, karena SLTA bukan wajib belajar sehingga siswa harus membayar. Apalagi SLTA pada umumnya berada di kabupaten atau minimal di ibukota kecamatan yang jaraknya mungkin jauh dari lokasi tempat tinggal anak-anak. Memang ada gagasan lulusan SMP masuk ke SMA/SMK/MA dengan nama Pendidikan Menengah Universal (PMU), tetapi itu masih dalam tahap sangat awal.

Gambaran di atas menjadi lebih buram saat dicermati dalam setiap *quintile*. Pada kelompok seperlima anak-anak dari keluarga paling miskin, hanya 87,8% yang tamat SD. Dari 87,8% hanya 49,7% yang melanjutkan ke SMP. Dan akhirnya hanya 48,2% yang tamat SMP. Dari angka itu hanya 21% yang masuk SLTA dan hanya 19,1% yang tamat.

Jadi anak-anak keluarga miskin hanya 48% yang tamat SMP dan hanya 19% yang tamat SLTA. Sebuah gambaran yang tidak menggembirakan. Kita dapat membayangkan anak-anak dari keluarga miskin dan banyak tamat SD (sebanyak 52%), lantas apa yang dapat diperbuat? Hanya tamat SMP (sebanyak 48%), lantas apa yang dapat diper-

buat?

Ungkapan tersebut di atas bukan untuk merendahkan kemampuan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang pendidikan formalnya terbatas. Namun untuk mendorong kita memikirkan nasib anak-anak tersebut. Dengan keyakinan bahwa pendidikan yang baik dapat berperan sebagai pemotong lingkaran kemiskinan, maka kita harus memikirkan bagaimana anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang baik dan akhirnya dapat terentaskan dari kemiskinan.

Seperti pemikiran yang kami sampaikan terdahulu, bagaimana dana BOS dapat berfungsi untuk mendekatkan perolehan pendidikan antara keluarga kaya dan keluarga miskin. Data yang disajikan Bu Nina menunjukkan 72,5% anak keluarga kaya dapat menyelesaikan pendidikan SLTA, sementara anak-anak keluarga miskin hanya 19,1%. Itu belum melihat kualitas SLTA-nya. Sangat mungkin anak keluarga kaya bersekolah di sekolah yang relatif bagus, sebaliknya anak keluarga miskin menempuh SLTA dengan mutu seadanya. Betapa lebar kesenjangan pendidikan yang diterima anak keluarga kaya dengan anak keluarga miskin. Semoga data tadi menggugah empati kita untuk ikut memikirkannya. ◆

11

Menyemai Budi Pekerti, Jangan Seperti P4

Tekad Kemendibud untuk menyemai lahan subur budi pekerti luhur (*Jawa Pos*, 26 Juli 2015) harus diapresiasi, karena sebagaimana kita ketahui bersama problema serius bangsa ini sebenarnya bersumber dari rusaknya akhlak atau budi pekerti atau karakter. Namun demikian, peringatan Muhammad Zuhdi, jangan sampai program bagus tersebut mengalami kegagalan seperti program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di era Orde Baru juga harus mendapat perhatian serius.

Saya termasuk orang yang beruntung, karena sebagai dosen muda saat itu sempat ikut penataran P4 dan bahkan menjadi penatar bagi mahasiswa baru di kampus. Oleh

”

Belajar dari sekolah yang sukses mengembangkan karakter, program penyemaian budi pekerti harus dilakukan melalui pembiasaan (habitulasi) yang disambung dengan pembudayaan dan disertai dengan teladan yang baik.”

karena itu saya ingin berbagi pendapat mengapa penataran P4 yang diberlakukan secara masif bagi siswa baru, mahasiswa baru, dan PNS baru tersebut gagal.

Dilihat dari konsep, struktur penataran, dan biaya penyelenggaraan, penataran P4 cukup bagus. Jika dicermati 37 butir P4 yang saat itu harus dihafal dan dipahami oleh peserta penataran merupakan jabaran yang komprehensif dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penataran P4 yang disertai dengan diskusi dan bahkan penyusunan makalah juga merupakan pola penataran yang bagus. Para penatar juga diambilkan dari tokoh masyarakat. Untuk dapat menjadi manggala, sebutan penatar P4, seseorang harus lulus pelatihan khusus dengan skor nilai tertentu. Apalagi penataran P4 ditopang oleh kemauan politik pemerintah yang sangat kuat.

Lantas mengapa penataran P4 gagal? Menurut saya, karena tidak adanya contoh nyata bagaimana penerapan P4 dalam kehidupan sehari-hari. Para to-

koh di pemerintahan maupun di masyarakat tidak dapat menjadi teladan penerapan butir-butir P4. Televisi juga sering menayangkan perilaku tokoh yang tidak menggambarkan penerapan butir-butir P4. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, para manggala juga bukan merupakan teladan yang baik. Tidak sedikit peserta penataran yang bergunjing: “*walah ngomong doang*”, “*Kelakuannya sendiri begitu, kok sekarang menceramahi macem-macem.*”

Kalau kita mengacu kepada penjelasan Lickona dalam bukunya yang fenomenal *Educating for Character* (1992), penataran P4 hanya sampai pada *moral knowing* dan tidak sampai pada *moral feeling* apalagi *moral action*. Peserta penataran paham dan hafal 37 butir P4, tetapi mereka tidak merasa harus melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena perilaku masyarakat di tempat mereka tinggal dan bahkan para tokoh yang mereka lihat juga tidak menerapkannya. Ibarat pengemudi yang suka menggunakan bahu jalan di jalan tol, karena setiap hari mereka melihat banyak orang yang menggunakan bahu jalan. Bahkan di Jakarta para pejabat tinggi yang dikawal oleh patwal juga sering menggunakan bahu jalan.

Lalu bagaimana strategi penyemaian budi pekerti luhur agar tidak gagal seperti P4? Bukankah perilaku banyak tokoh sekarang ini juga tidak berbeda dengan era Orde Baru? Belajar dari sekolah yang sukses mengembangkan karakter, program penyemaian budi pekerti harus dilakukan melalui pembiasaan (habitulasi) yang disambung dengan pembudayaan (inkulturasi) dan disertai dengan teladan yang baik. Seperti disarankan oleh Linkona (1992) dan Nucci & Narvaez (2008) sebaiknya program itu difokuskan kepada beberapa aspek budi pekerti sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari. Pembiasaan harus dilakukan secara

konsisten dan cukup lama, sehingga menjadi perilaku keseharian di sekolah.

Setelah itu kebiasaan tersebut dicantolkan pada nilai-nilai agama atau tradisi tertentu, sehingga siswa paham mengapa hal itu harus dilakukan. Dengan demikian apa yang dilakukan tidak hanya karena kebiasaan, tetapi menjadi budaya baru. Hal ini untuk menghindari perasaan siswa yang melaksanakan kebiasaan itu sebagai keterpaksaan, tetapi sebagai kebutuhan karena merupakan bagian dari nilai-nilai agama atau tradisi yang diyakini kebenarannya.

Lebih dari itu, pimpinan sekolah, guru dan karyawan harus menjadi teladan yang baik bagi penyemaian budi pekerti. Seperti ceramah Dahlan Iskan pada acara Wisuda Unesa (2013) karakter itu tidak dapat diajarkan, tetapi harus ditularkan. Artinya, yang mengajarkan harus terlebih dahulu melakukan dan baru setelah itu mengajarkannya. Seperti kata-kata bijak, *ordinary teacher tells, good teacher shows, and great teacher inspires*.

Apakah kita punya tokoh yang dapat menjadi inspirasi pengembangan budi pekerti luhur? Punya dan banyak, hanya sebagian besar belum diketahui orang. Kita harus berterima kasih kepada Yudi Latif yang melalui buku *Mata Air Keteladanan Pancasila dan Perbuatan* (2014) berhasil menghimpun sederet orang, baik tokoh maupun orang kebanyakan yang sukses menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupannya. ◆

12

Ironi Pengangguran Lulusan SMK

Judul di atas terkait dengan kabar di *Republika* tanggal 7 Nopember 2013. Kabar itu menguraikan tingkat pengangguran yang terjadi pada bulan Agustus 2013. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 6,25%. Jika dirinci menurut tingkat pendidikan, TPT untuk lulusan SMK sebesar 11,19%, lulusan SMA sebesar 9,74%, lulusan Diploma I/II/III sebesar 6,01%, dan lulusan S1 sebesar 5,50%.

Pertanyaannya: mengapa pengangguran terbuka lulusan SMK lebih besar dibanding lulusan SMA? Bukankah pemerintah memperbanyak SMK itu disertai harapan dapat menghasilkan lulusan yang segera dapat bekerja? Jika faktanya TPT lulusan SMK justru lebih banyak yang

”

Tujuan pemerintah memperbanyak SMK adalah agar lulusannya dapat segera dapat pekerjaan. Jika faktanya lulusan SMK banyak yang menganggur dibanding lulusan SMA, kebijakan tersebut perlu dilihat kembali.”

menganggur dibanding lulusan SMA, kebijakan tersebut perlu dilihat kembali.

Tentu data tersebut tidak dapat serta merta diartikan bahwa lulusan SMK kalah bersaing dengan lulusan SMA dalam mencari pekerjaan. Masih diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk sampai kepada simpulan yang valid. Namun tetap merupakan sinyal untuk melihat kembali apakah kebijakan memperbanyak SMK memang relevan.

Sebenarnya data tersebut mirip dengan pendapat David Clark (1983) yang melakukan penelitian di Indonesia dan dituangkan dalam laporan *How Secondary School Graduates Perform in the Labour Market: A Study of Indonesia*. Dia menyimpulkan, tidak ada perbedaan signifikan keterserapan lulusan SMA dan SMK di lapangan kerja. Gaji yang diterima juga tidak berbeda secara signifikan. Oleh karena itu Clark menyimpulkan investasi di SMA lebih baik dibanding SMK, karena biayanya lebih murah namun hasilnya sama.

Hasil penelitian Clark sempat

merisaukan Depdikbud saat itu. Kerisauan bertambah kuat, ketika penelitian Muljani Nurhadi (1988) untuk disertasi di State University of New York at Albany juga menyimpulkan penghasilan karyawan lulusan SMK lebih kecil dibanding kawannya yang lulusan SMA.

Bukankah penelitian Clark dan Nurhadi sudah 30 tahun lalu? Apakah data saat ini masih seperti itu? Studi Newhouse dan Suryadarma (2011) sedikit memberi gambaran. Perbedaan penghasilan lulusan SMK dibanding lulusan SMA sangat kecil dan bahkan tidak signifikan. Tampaknya hasil penelitian Clark, Nurhadi, Newhouse dan Suryadarma, dan tulisan *Republika* konsisten bahwa keterserapan maupun gaji lulusan SMK tidak berbeda dengan lulusan SMA.

Apakah fenomena tersebut juga terjadi di negara lain? Ternyata tidak. Studi yang dilakukan oleh Aysit Tansel (1999) di Turki menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran lulusan SMK (*vocational high school*) lebih rendah dibanding lulusan SMA (*general high school*). Gaji lulusan SMK juga lebih besar dibanding dengan gaji lulusan SMA.

Kalau demikian tentu ada faktor lain yang menyebabkan ketidaksamaan kondisi lulusan SMK di Indonesia dan di Turki. Dan itu ternyata kualitas SMK. Untuk SMK yang berkualitas bagus dan memiliki sarana praktik lengkap, lulusannya banyak terserap lapangan kerja dan bahkan “*diijon*” (dipesan) sebelum lulus. Studi Samani (1991) terhadap lulusan STM (SMK Bidang Teknologi) juga menyimpulkan ada perbedaan signifikan keterserapan lulusan antara SMK bagus dan SMK tidak bagus.

Tapi Itu kan data puluhan tahun lalu. Apakah sekarang masih cocok? Studi Newhouse dan Suryadarma pada

tahun 2011 menunjukkan bahwa simpulan studi Samani masih relevan. Dan itu tampak sejalan dengan tulisan di *Republika* tadi.

Bagaimana penjelasannya? Lulusan SMK diharapkan memiliki keterampilan yang tinggi. SMK yang tidak memiliki fasilitas praktik, membuat lulusannya tidak terampil. Masyarakat sering menyebut dengan SMK Sastra, karena berisi teori/wacana *melulu*. Lulusan seperti itu kalah dalam persaingan masuk dunia kerja. Tes akademik kalah dengan lulusan SMA, sementara tes keterampilan selalu gagal. Mereka juga sulit memilih pekerjaan di luar jurusannya di SMK. Lengkaplah kemeranaan lulusan SMK Sastra itu.

Perajaran apa yang dapat dipetik? Jika pemerintah ingin memperbanyak jumlah SMK, harus dipastikan mempunyai fasilitas praktik yang baik dan memiliki guru yang baik pula. Dengan begitu lulusannya akan memiliki keterampilan tinggi sehingga mudah terserap di lapangan kerja. Harus dihindari membuka SMK Sastra, karena lulusannya akan sulit mendapat pekerjaan dan akhirnya merana. ◆

*Tulisan ini dimuat di harian Republika,
14 November 2013, hlm 6*

13

Tepakna Awakmu Dhewe (Menggugah Empati yang Mati)

Orang Surabaya terkenal lugas dalam berbicara. Walaupun menggunakan bahasa Jawa, tentu dengan dialek *Suroboyoan*, yang juga dipahami oleh pengguna bahasa Jawa lainnya, namun cara orang Surabaya mengungkapkan pikiran berbeda dengan masyarakat Jawa Tengah ataupun masyarakat Jawa Timur Mataraman (masyarakat Jawa Timur bagian barat). Konon orang dengan budaya Mentaraman, menggunakan bahasa simbul dalam menyampaikan pemikiran, sementara orang Surabaya cenderung menyampaikan secara lugas, *to the point* apa adanya.

Beberapa hari lalu ada diskusi tentang linieritas guru, yaitu kaitan matapelajaran yang diampu guru dengan

pendidikan S1/D4 ketika kuliah. Karena berbagai sebab, selama ini banyak guru yang *mismatch* yaitu guru yang antara latar belakang pendidikan dan matapelajaran yang diampu tidak cocok.

Tentu guru *mismatch* tidak ideal, karena tugas mengajar yang dilakukan tidak pas dengan bekal yang dipelajari ketika kuliah. Oleh karena itu program sertifikasi dan pemberian tunjangan profesi digunakan untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi jumlah guru yang tugasnya tidak *matching* ini.

Ketika mengikuti program sertifikasi, guru didorong untuk mengambil bidang keahlian yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya sehingga sertifikat pendidik yang nanti diperoleh juga sesuai dengan itu. Ketika, mereka sudah memiliki sertifikat pendidik dan kembali bekerja, juga didorong untuk mengajar matapelajaran yang pas.

Persoalan muncul karena cukup banyak guru yang *mismatch*. Guru berijazah Pendidikan Bahasa Indonesia mengajar bahasa Daerah, guru berijazah Pendidikan Agama Islam (PAI) mengajar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), guru berijazah Olahraga mengajar Seni Budaya dan sebagainya.

Mereka ini mengajar mapel itu sudah bertahun-tahun, sehingga menjadi dilema kalau harus kembali ke bidang studi asalnya. Apalagi di sekolah tempat mengajar tidak ada guru yang berijazah mapel itu, misalnya bahasa Daerah, Seni Budaya, dan TIK. Kalau mereka mengikuti program sertifikasi seperti ijazah yang dimiliki dan ketika kembali ke sekolah mengajar mapel yang selama ini dipegang, tentu tidak memperoleh tunjangan profesi.

Dalam diskusi itu yang hadir sebagian besar dosen dan pejabat atau staf di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Kemdikbud. Tampaknya keinginan untuk mengembalikan guru ke bidang aslinya begitu kuat. Oleh karena itu linieritas dalam sertifikasi dan pemberian tunjangan profesi ingin diterapkan dengan cukup ketat. Alasan yang diajukan sangat bagus, yaitu agar mutu pembelajaran yang diampu guru itu menjadi bagus. Guru juga akan menjadi ringan dalam menjalankan tugas, karena materi yang diajarkan sudah dipelajari dengan baik ketika kuliah.

Namun di lapangan ternyata tidak seideal itu. Para guru *mismatch* itu sebagian besar justru mengorbankan diri menjadi “dewa penolong”, namun sekarang malah menjadi korban kebijakan. Ketika TIK muncul sebagai mata pelajaran baru, LPTK belum menghasilkan lulusan untuk mengajar itu. Akhirnya sekolah mengambil kebijakan guru yang memiliki kemampuan TIK diminta mengajarkannya. Banyak di antaranya guru berijazah Fisika atau apa saja yang penting punya kemampuan TIK. Nah, tidak sedikit yang latar belakang pendidikan formalnya jauh dari TIK, tetapi menyenangi TIK dan bahkan sehari-hari menggunakannya untuk berbagai aktivitas.

Misalnya ada yang belajar belakang PAI dan seingat saya di Unesa ada staf yang ijazahnya S1 Filsafat tetapi jagoan dalam TIK. Mencari guru Seni Budaya dan bahasa Daerah ternyata tidak mudah, sehingga banyak sekolah meminta guru yang memiliki kemampuan bidang itu untuk mengajar.

Persoalan menjadi lebih serius untuk sekolah di daerah terpencil. Pengalaman melaksanakan program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (SM3T) kita dapat menyaksikan sulitnya mendapatkan guru. Mendapatkan guru sekedar berijazah S1/D4 saja bukan main sulitnya, apalagi harus pas antara ijazah dengan

matapelajarannya.

Ada sebuah SMP Negeri di daerah SM3T dengan enam rombongan belajar, yang sejak berdiri tidak punya guru dengan latar belakang IPA dan bahasa Inggris. Yang mengajar IPA adalah guru dengan ijazah S1 Olahraga yang kebetulan SMA-nya IPA. Yang mengajar bahasa Inggris adalah guru dengan S1 Theologi. Nah, guru IPA itu harus ikut sertifikasi IPA atau Olahraga? Guru bahasa Inggris itu harus ikut sertifikasi bahasa Inggris atau Agama Katolik?

Ketika terjadi diskusi sengit dan para dosen cenderung mendorong guru ikut sertifikasi sesuai ijazah S1/D4nya, muncul ungkapan Surabaya: “*mbok ditepakna awakmu dhewe opo’o, Rek*” (coba dipikirkan seandainya itu terkena dengan diri kita sendiri). Bukankah di perguruan tinggi banyak dosen yang mengajar tidak pas dengan ijazah S2/S3-nya? Bukankah para pejabat dan staf di Kemdikbud itu banyak yang menangani pekerjaan yang tidak pas dengan ijazah S1/S2/S3-nya? Mestinya kita justru berempati kepada guru seperti itu, karena mereka sudah kerja keras, belajar keras karena mengajar bukan bidang aslinya.

Empati seperti itu seringkali dikalahkan dengan idealisme akademik dan tidak dilengkapi dengan wawasan lapangan. Empati kita seringkali menjadi tumpul karena tidak memahami pengorbanan orang lain. Empati kita tidak muncul, karena ego kita terlalu tinggi. Empati kita sirna karena kita tidak mampu mengidentikan diri seperti orang yang sedang kita nilai. Ungkapan “*tepakna awakmu dhewe*” rasanya cocok untuk menggugah empati yang hampir mati. ◆



Bagian 3

PENDIDIKAN TINGGI



1

Merger Universitas Besar, Why Not?

Saya mengikuti konferensi antara *Council of Rector of Indonesian State Universities* dan *Council of University Presidents of Thailand* di Kendari, pada 17-19 Oktober 2013 silam. Di sana saya bertemu dengan Prof. Roger Frutos dari *Universite Montpellier-2* Perancis.

Deputy Vice President for International Relation itu memaparkan strategi pengembangan universitasnya sehingga menjadi universitas yang memiliki reputasi internasional. Di akhir paparannya, dia mengagetkan banyak orang karena menginformasikan bahwa *Universite Montpellier-2* dan *Universite Montpellier-1* akan segera merger, menjadi *Universite Montpellier*.

Ketika saya ke Perancis tahun 2008, beberapa universitas di Grenoble membentuk suatu konsorsium untuk membuka program studi tingkat doktoral. Ada dua alasan mengapa hal itu dilakukan. *Pertama*, agar lebih efisien karena dapat berbagi dosen dan laboratorium. *Kedua*, agar mahasiswa doktoral dapat kuliah dan dibimbing oleh profesor yang benar-benar ahli di bidangnya. Tampaknya pembentukan konsorsium masih dianggap belum cukup, sehingga kemudian ada dua universitas sekelas Montpellier 1 dan 2 melakukan merger.

Sinergi antar universitas merupakan hal jamak di Perancis. Namun jika yang melakukan merger itu universitas sekelas Montpellier-1 dan Montpellier-2 tetap merupakan suatu kejutan. Bayangkan saja jika Unair merger dengan ITS tentu akan menjadi berita besar di Indonesia.

Mengapa banyak orang kaget dengan informasi itu? Karena di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya. Politeknik yang semula berada di dalam universitas malah dipisahkan menjadi institusi sendiri. Universitas yang akan membuka program studi baru harus memiliki dosen sendiri secara lengkap. Bahkan dosen program studi S1 dipisahkan dengan program studi S2/S3. Jadi program S1 harus memiliki dosen sendiri dan program S2/S3 harus memiliki dosen sendiri, walaupun itu keduanya dalam satu jurusan. Padahal, idealnya dosen pengajar S2/S3 juga mengajar di S1. Di negara maju banyak mahasiswa S3 yang menjadi *teaching assistant* di S1. Dan itu hanya dapat terjadi jika profesornya juga mengajar di S1.

Kalau kita bandingkan apa yang terjadi di Perancis dan di Indonesia, tampak sekali beda argumennya. Perancis lebih menekankan aspek efisiensi dan mutu. Efisiensi dilakukan dengan berbagi dosen dan fasilitas. Dengan cara itu, tidak

perlu setiap jurusan atau perguruan tinggi memiliki dosen sendiri, karena dapat menggunakan dosen di universitas sesama anggota konsorsium. Yang harus dipastikan adalah dosen tersebut masih memiliki waktu untuk mengajar atau membimbing. Universitas juga tidak harus memiliki laboratorium sendiri, jika ada universitas anggota konsorsium sudah memilikinya. Yang harus dipastikan bahwa di laboratorium itu masih tersedia waktu untuk praktikum.

Jaminan mutu ditempuh agar mahasiswa bertemu dengan profesor yang benar-benar ahli di bidangnya. Sebagaimana diketahui biasanya profesor memiliki keahlian spesifik. Tidak mudah setiap universitas mendapatkan profesor semacam itu. Daripada mahasiswa dibimbing oleh profesor yang tidak pas bidangnya atau dibimbing oleh profesor yang “belum ahli”, lebih baik mahasiswa dikirim ke universitas sesama anggota konsorsium yang punya profesor benar-benar pas bidang keahliannya.

Saya pernah menanyakan, apa tidak sulit mengatur manajemen dengan membuat konsorsium beranggotakan beberapa universitas? “Itu *kan* masalah manajemen. Jika perusahaan dapat membuat konsorsium untuk menangani proyek besar, mengapa universitas tidak bisa? Bukankah sudah ada program *double degree*, program *sandwich* dan *credit earning* yang juga melibatkan beberapa universitas?” begitu jawaban ringan seorang pimpinan universitas di Grenoble saat itu.

Berbeda dengan Perancis, Indonesia menjamin mutu dengan memastikan setiap program studi memiliki dosen yang cukup. Dan bentuk perguruan tinggi sesuai dengan undang-undang. Dalam konteks ini Indonesia masih dalam tahap kuantitas dan normatif. Belum masuk ke aspek kualitas dan yang bersifat substantif. Mungkin karena usia

pendidikan tinggi kita masih muda.

Namun demikian tidak ada jeleknya kita mulai berpikir ke arah itu. Bukankah kita juga sudah punya pengalaman serupa? Guru SMK Pertanian dididik oleh IPB atau Akademi Pertanian bekerja sama dengan LPTK. Bidang pertanian dibina oleh orang-orang ahli pertanian di IPB atau Akademi Pertanian, sedangkan bidang kependidikan dibina oleh orang-orang ahli pendidikan di LPTK. Program serupa juga dilakukan ketika menghasilkan guru SMK Kesehatan. Bukankah itu juga mirip dengan konsorsium?

Jika konsorsium itu dapat dirintis, kemudian kita bertanya apakah sudah tepat memisahkan politeknik dari universitas induknya? Tentu acuannya bukan undang-undang, tetapi efisiensi. Toh undang-undang juga tidak melarang adanya politeknik di dalam universitas. Toh di negara lain itu sudah biasa. Toh ketika politeknik berada di dalam universitas juga tidak ada masalah.

Ketika ide ini saya sampaikan, ada teman yang berseloroh, “Kalau digabung nanti rektornya cuma satu, terus bagaimana yang lain? Bukankah dengan begitu menghilangkan kesempatan orang menjadi rektor.” Saya juga ganti berseloroh, “Kalau begitu apa bedanya dengan orang yang nekad membentuk kabupaten baru walaupun potensinya minim? Yang penting ada pos jabatan baru untuk bupati, wakil bupati, ketua DPRD dan sebagainya.”

Jika merger universitas masih dianggap berat, pola konsorsium sudah saatnya dirintis. Sebagai misal, pembukaan program studi Ekonomi Islam di Surabaya dapat merupakan konsorsium Unair dengan IAIN Sunan Ampel. Pembukaan program studi Bio Engineering mungkin konsorsium Unair dengan ITS. Penyiapan guru SMK Kesehatan merupakan konsorsium Unair dengan Unesa. Semoga. ◆

2

Mengelola Universitas, antara Ilmu dan Bisnis

Bahwa mengelola suatu lembaga tidak selalu sama dengan teori di *textbook* dan banyak mengandung seni sudah kita ketahui. Bahwa mengelola perguruan tinggi bukan hanya masalah akademik keilmuan juga sudah kita ketahui. Tetapi ketika melakukan serangkaian diskusi dengan Utrecht University dan Groningen University, ditambah berita di BBC ketika pemerintah Inggris akan memotong anggaran pendidikan tinggi, saya baru *ngeh* (paham), bahwa pada akhirnya pengelolaan perguruan tinggi (setidaknya di Eropa) bersentuhan dengan aspek-aspek bisnis.

Pada 13 Februari 2013 silam Tim Unesa (saya, PR-1, dan Direktur Pascasarjana) dan Tim Unsri (rektor, direktur

dan asdir-1 Pascasarjana) berdiskusi dengan Tim Utrecht University. Tujuannya meluaskan kerja sama program S2 Internasional (IPOME) menjadi S2 *double degree* bidang Pendidikan Matematika dan Pendidikan Sains. Sorenya, sekitar pukul 16.00 di stasiun Utrecht Central, bertemu dengan teman lama dari Groningen University yang mengu-rusi kerja sama dengan perguruan tinggi di Asia.

Besoknya Tim Unesa mengunjungi Groningen University dengan naik kereta api sekitar 2,5 jam dari Amsterdam. Kami bersemangat, karena punya harapan besar dapat menjalin kerja sama. Apalagi Groningen merupakan kota yang indah di bagian ujung utara Belanda dan banyak orang Indonesia tinggal di sana. Jadilah diskusi yang sangat produktif dan diakhiri dengan makan siang gaya Belanda.

Nah, komentar dari beberapa pengurus orang perguruan tinggi di Inggris terhadap rancangan pemotongan anggaran pendidikan tinggi, juga muncul dari diskusi tersebut. Memang tidak seterbuka komentar di BBC tetapi kesannya sangat kuat. Apa itu? Perguruan tinggi di Belanda dan Inggris harus bekerja keras “mencari uang” karena anggaran dari pemerintah tidak lagi mencukupi. Tidak hanya itu, mereka harus memutar otak agar pengelolaan menjadi lebih efisien tanpa mengurangi mutu akademik maupun layanan.

Sepengetahuan saya Utrecht University dan Groningen University termasuk *research university* di Belanda, sehingga lebih mengutamakan riset dibanding pengajaran. Oleh karena itu, program S3 dan beberapa program S2, diarahkan untuk benar-benar terkait dengan riset mereka. Program S3 merupakan *research based program*, sehingga tidak ada kuliah. Mahasiswa benar-benar melakukan riset dan publikasi di jurnal ternama menjadi salah satu sasaran-

nya. Mahasiswa S2 diarahkan untuk terlibat dengan grup riset sesuai dengan bidangnya.

Lantas bagaimana kiat mereka menggabungkan riset dengan mencari uang? Itulah yang menarik untuk dipelajari. Tentu kami hanya dapat menangkap ungkapan dan gambaran program yang mereka miliki, sedangkan apa strategi di balik itu, menjadi “rahasia dapur” mereka. Berikut ini fenomena yang menarik.

Kebetulan salah satu tokoh Realistic Mathematics yang juga mantan Direktur Freudental Institute (FI) sekarang pindah ke Groningen. Namun yang bersangkutan masih bekerja satu hari dalam sepekan di Utrecht Univ untuk membimbing mahasiswa S3. FI mirip sebuah lembaga mandiri tetapi berafiliasi dengan Utrecht Univ dalam mengembangkan program S2/S3 dalam bidang Pendidikan Matematika. Program IPOME terkait dengan program tersebut.

Nah, ternyata Groningen menawarkan kerja sama dengan Unesa untuk program S2 Pendidikan Matematika dan Sains. Memang tidak secara terbuka. Mungkin “malu” menawarkan sesuatu yang dulu dia rancang saat masih menjadi direktur FI. Tetapi program yang mereka miliki secara khusus dijelaskan panjang lebar. Yang ditawarkan jauh lebih “lunak” dibanding dengan apa yang kemarin dibahas dengan Utrecht. Juga ada kesan kompetisi.

Saat ketemu di stasiun di Utrecht Central, teman Groningen yang mengurus kerja sama dengan Indonesia sudah menjelaskan bahwa dia ditugasi khusus untuk menggaet kerja sama dengan Indonesia, dengan memanfaatkan beasiswa Dikti. Tetap dalam koridor riset, baik program S3 maupun S2, tetapi dana menjadi salah satu pertimbangan.

Mereka mengharapkan kehadiran mahasiswa S2 dan khususnya S3 dari Indonesia (dan juga negara lain) dengan membawa beasiswa, tetapi sekaligus menjadi pendukung program penelitian yang mereka lakukan. Kiat yang menurut saya cukup cerdas. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam riset kelas dunia, di lain pihak mereka mendapat dukungan tenaga periset yang membawa biaya sendiri.

Saat saya menyodorkan akan mengirim dosen “senior” untuk melakukan kerja sama riset dengan menggunakan jalur SAME Dikti, secara terbuka baik Utrecht Univ maupun Groningen Univ menyatakan senang dan pesan jangan lupa *bench fee*. Dengan agak berkelakar, partner di Belanda juga memerlukan sedikit honor.

Saat saya menyodorkan gagasan, program *double degree* yang dirancang pada saatnya menjadi “pintu” orang ASEAN untuk menempuh S2/S3 ke Belanda, mereka tampak gembira. “Ya, itu akan bagus dan lebih murah bagi orang dari ASEAN untuk menempuh pendidikan dengan standar Belanda. Dan jika itu dapat dijaga kontinuitasnya, kami akan buat skema khusus.” Nah, tampak lebih jelas unsur bisnisnya.

Rupanya Belanda sudah terimbas pola pikir Australia, bahwa pendidikan merupakan bentuk bisnis layanan sosial. Tentu bisnis dalam arti positif, atau *education as a noble industry*, istilah yang diperkenalkan oleh Yohanes Untoro sekian tahun lalu. Tentu harus dijaga agar betul-betul *noble industry* dan bukan industri biasa yang berorientasi kepada *profit*. Semoga. ◆

3

Mengadopsi Teori 'Mobil Kijang'

Seperti saya tulis sebelumnya, saya akan menjelaskan mengapa untuk memulai penelitian level internasional, Unesa perlu bekerja sama dengan lembaga/universitas/peneliti yang “diakui” dunia internasional. Pemikiran seperti ini bukan baru dan bahkan sudah saya kemukakan sejak saya menjadi Pembantu Rektor 4 Unesa dan saya terapkan ketika saya menjadi Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti. Teori “mobil kijang” berikut pernah saya sampaikan ketika saya menjadi Direktur Ketenagaan di forum PMRI.

Pada suatu ketika saya diundang oleh Tim PMRI (Pendidikan Matematika Realistik Indonesia). Tempat acaranya di Hotel Garuda Yogyakarta, tahunnya sekitar akhir 2007

”

Langkah Toyota atau Astra memproduksi mobil kijang sangat jitu.

Awalnya menggunakan nama besar Toyota, tapi dibuat di Indonesia dengan muatan lokal sangat besar. Setelah masyarakat percaya dan banyak digunakan, kemudian diekspor ke luar negeri.”

atau awal 2008. Prof. Sembiring yang “memaksa” saya untuk hadir. Seingat saya waktu itu forumnya laporan implementasi PMRI. Forum dihadiri oleh para tokoh PMRI dan para guru yang terlibat dalam program PMRI.

Di awal paparan, saya menyampaikan fenomena mobil kijang. Semua orang tahu mobil kijang adalah mobil *Toyota* “milik Jepang”. Rancangan mobil kijang dibuat oleh Jepang, tetapi dibuat di Indonesia dan muatan lokalnya cukup besar. Saat itu mobil kijang merupakan jenis mobil yang paling banyak berseliweran di jalan raya. Saat saya ke Filipina, saya menemui banyak mobil kijang di jalanan dan teman di sana mengatakan, mobil itu diimport dari Indonesia. Ketika saya konfirmasi kepada teman yang bekerja bidang otomotif, dijawab memang Indonesia (lebih tepatnya perusahaan pembuat mobil Kijang di Indonesia) mengekspor mobil kijang ke Filipina dan beberapa negara lain.

Apa hebatnya fenomena itu? Pada awalnya Indonesia mene-

rima rancangan mobil kijang dari Jepang tetapi dibuat di dalam negeri dengan diberi banyak muatan lokal. Seakan-akan mobil kijang mengandung muatan Indonesia yang cukup besar dan kemudian kita eksport. Mengapa tidak langsung dirancang sebagai mobil buatan Indonesia? Saya ragu apakah si kijang bakal laku di negara lain, jika cara seperti itu dilakukan.

Saya ingat fenomena tahun 1970-an, saat kali pertama keluar sepeda (engkol) merek *Simking* buatan China. Saat itu semua orang mencibir, sepeda buatan China jelek tidak sebaik sepeda buatan Eropa yang sudah mendominasi pasar sepeda di Indonesia. Radio buatan Jepang juga pernah dicibir pada awal kemunculannya, karena sebelumnya dirajai oleh buatan Belanda. Sekarangpun banyak orang Indonesia lebih percaya produk asing dibanding buatan dalam negeri.

Bagi penulis yang sudah terkenal akan sangat mudah memasukkan artikelnya di koran dan naskah bukunya ke penerbit. Redaktur koran sering kali hanya membaca sekilas dan segera yakin tulisan itu bagus, karena ditulis oleh penulis beken. Orang awam sering membeli gambar atau lukisan bukan karena paham gambar atau lukisannya bagus, tetapi karena nama besar pelukisnya.

Apa arti semua fenomena di atas? Nama besar sering membuat orang mudah percaya. Hal itu dapat terjadi pada suatu produk tertentu atau bahkan pendidikan. Misalnya, ini mesin buatan Jerman, ini lukisan Affandi, ini mebel Jepara. Dia doktor teknik lulusan Jepang. Ini temuan dari Amerika. Jaket ini dibeli di Australia dan sebagainya. Banyak orang yang merasa ragu, jika mendapatkan tawaran mesin ini buatan China. Ini lukisan mahasiswa Unesa. Ia lulusan universitas X di Indonesia". Jaket buatan Bangil

dan sebagainya.

Menurut saya langkah *Toyota* atau *Astra* memproduksi mobil kijang sangat jitu. Pada awalnya menggunakan nama besar *Toyota*, tetapi dibuat di Indonesia dengan muatan lokal sangat besar. Setelah masyarakat percaya dan banyak digunakan, kemudian diekspor ke luar negeri. Nama besar *Toyota* seakan digunakan sebagai jaminan, sebelum masyarakat merasakannya.

Pola itu kiranya juga cocok digunakan untuk pengembangan penelitian. Jika sekarang Unesa “mengibarkan bendera” penelitian tingkat internasional, mungkin banyak yang belum percaya. Dapat saja mutunya bagus, namun karena belum banyak yang mengenal apa itu Unesa dan siapa itu penelitiannya. Akibatnya orang tidak mudah percaya. Nah, jika Unesa bekerja sama dengan universitas atau lembaga penelitian atau peneliti yang sudah dikenal di dunia, hasil penelitiannya akan lebih mudah diterima. Nanti, jika nama Unesa sudah mulai dikenal atau peneliti Unesa sudah mulai dikenal, pada saatnya Unesa dapat mengibarkan penelitian tingkat internasional sendiri.

Cara seperti itu juga baik diterapkan oleh peneliti muda. Pada tahap awal, lebih baik peneliti muda bergabung dengan peneliti senior. Di samping belajar melakukan penelitian yang bermutu, sekaligus “memperkenalkan” diri di kalangan peneliti lain. Nanti jika sudah beberapa kali namanya muncul di pentas penelitian (seminar hasil maupun artikelnya muncul di jurnal), baru mulai “melepaskan diri” dari bayang-bayang seniornya. Semoga. ◆

4

Tri Darma sebagai Akselarator Mutu

Saya yakin semua mahasiswa, karyawan, dan dosen, tidak asing dengan istilah tri darma perguruan tinggi. Biasanya pada saat acara awal masuk kampus, para pimpinan perguruan tinggi selalu mengenalkan istilah tersebut. Tri darma merupakan ciri aktivitas universitas dan tidak dimiliki oleh pendidikan jenjang SLTA ke bawah. Bahkan tri darma perguruan tinggi juga tidak dikenal universitas di luar negara.

Saya tidak tahu kapan dan dari mana istilah tri darma perguruan tinggi berasal. Saya juga bingung kalau harus mencari padanan tri darma perguruan tinggi dalam bahasa Inggris. Tetapi saya setuju dan yakin tri darma yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, merupakan sesuatu yang sangat bagus. Jika

ketiga darma dikerjakan dengan baik dan dirancang menjadi suatu siklus terpadu, akan menjadi akselerator peningkatan mutu perguruan tinggi. Itulah sebabnya mengapa saat “*macung*” sebagai rektor, tri darma saya angkat sebagai salah satu bahan saat presentasi di depan Senat.

Suatu saat saya mendengarkan gerutuan mahasiswa pascasarjana sebuah perguruan tinggi ternama. Waktu itu saya sedang berkunjung ke perguruan tinggi tersebut dan makan siang di kantin yang kebetulan banyak mahasiswa pascarsarjana juga sedang makan. “Kalau kuliah hanya dari buku teks *melulu* seperti itu, *ngapain* harus datang?”, “Baca sendiri juga bisa”, “*Pengin-nya*, saya dapat materi kuliah dari penelitian dosen”, “*Kan* katanya dia dosen jabatan penelitian”.

Walaupun terasa agak kasar, gerutuan mahasiswa S2 tersebut menyentak logika saya. Betul sekali. Hasil penelitian merupakan “temuan” baru dalam bidang ilmu si peneliti. Jika dilakukan dengan baik, temuan tersebut merupakan akumulasi dari teori/konsep keilmuan yang telah dikaji secara mendalam sebelumnya. Jadi jika hasil penelitian disampaikan sebagai bahan kuliah, mahasiswa akan memperoleh *cream of the cream* dari bidang ilmu/bidang kajian tersebut.

Bertolak dari gerutuan mahasiswa dan logika tersebut, saya menduga gagasan tri darma perguruan tinggi bukan sekadar menjejerkan ketiga darma tersebut. Perguruan tinggi bukan sekadar melakukan darma pendidikan, penelitian, dan pengabdian secara terpisah. Ketiganya harus merupakan suatu kesatuan. Ketiganya harus dirancang menjadi siklus kegiatan yang saling mendukung, menjadikan masukan sekaligus menjadi muara.

Bahan kuliah idealnya merupakan akumulasi hasil pene-

litan dan pengalaman melakukan pengabdian masyarakat. Penelitian seharusnya untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah yang ditemukan saat melakukan pengabdian kepada masyarakat atau melakukan perkuliahan. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dilaksanakan dengan menerapkan hasil-hasil penelitian dan pengalaman dalam perkuliahan.

Dalam konteks tersebut penelitian tidak harus diartikan dengan penelitian laboratorium atau penelitian lapangan. Penelitian pustaka juga tidak kalah penting. Jika dosen melakukan kajian berbagai buku referensi dan jurnal, menurut saya sudah dapat disebut melakukan penelitian. Bukankah itu merupakan bagian kajian teori dalam laporan penelitian? Memang belum mencapai suatu temuan baru, tetapi paling tidak sudah merangkum hal-hal terbaru dalam bidang kajian tersebut. Apalagi jika yang dibaca buku dan jurnal baru, hasilnya sudah akan menggambarkan *the state of the art*.

Saya ajukan logika tersebut, karena kondisi perguruan tinggi di Indonesia yang belum dalam taraf *research university*, di mana kegiatan penelitian menjadi kegiatan utama. Pada universitas riset seperti itu, setiap saat semua dosen terlibat suatu proyek penelitian yang hasilnya harus masuk menjadi publikasi di jurnal bergengsi. Jika yang dibaca adalah buku-buku dan jurnal baru, rasanya bahan kuliah sudah cukup memadai pada saat ini.

Yang perlu dicatat, adalah topik penelitian yang seharusnya *in line* dengan bidang ilmu atau bidang keahlian dosen. Kebiasaan penelitian yang “melebar” ke mana-mana mengikuti kemauan si pemilik sumber dana harus mulai diakhiri. Mengapa? Karena penelitian seperti itu tidak memberi kontribusi besar dalam pengembangan keilmuan

dosen. Penambahan pengalaman iya, tetapi pengembangan keilmuan tidak.

Bagaimana dengan pengabdian kepada masyarakat? Sering kali problem di masyarakat memang multidisipliner, sehingga tidak dapat didekati dan dipecahkan oleh satu bidang ilmu. Dalam konteks seperti itu, saya mendukung jika tim pengabdian kepada masyarakat terdiri dari dosen yang berasal dari berbagai bidang. Namun prinsip berbasis keilmuan harus tetap dipegang. Jadi solusi yang diajukan harus bertumpu pada kajian ilmiah dan dosen yang terlibat memiliki latar belakang keilmuan yang relevan.

Lebih dari itu, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sedapatnya juga dijadikan wahana kajian keilmuan. Penelitian tindakan (*action research*) dan penelitian pengembangan (*developmental research*) mungkin dapat diterapkan. Paling tidak, respons masyarakat terhadap *treatment* selama pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi kajian dosen-dosen bidang ilmu yang cocok.

Khusus untuk LPTK seperti Unesa, perkuliahan juga dapat menjadi wahana penelitian. Memang agak aneh, banyak dosen LPTK mengajari guru melakukan PTK (penelitian tindakan kelas) dan *lesson study*, tapi tidak banyak yang menerapkannya saat memberi kuliah kepada mahasiswa. Jika saja itu dilakukan akan menjadi perbaikan model perkuliahan, sekaligus temuan baru tentang bagaimana perkuliahan di perguruan tinggi. Lebih dari itu mahasiswa dapat mencontoh bagaimana dosen mengajar, saat mereka sudah lulus dan menjadi guru di sekolah. Semoga. ◆

5

Dosen Muda Harus Studi ke Luar Negeri

Beberapa hari ini saya disibukkan menjawab dan menjelaskan, mengapa dosen muda di Unesa didorong atau bahkan “dipaksa” untuk studi S2 atau S3 ke luar negeri. Saya dapat menangkap kekecewaan beberapa dosen yang ingin studi S2/S3 di dalam negeri, tetapi saya minta mereka ke luar negeri. Alasan yang diajukan adalah anak masih kecil, bahasa Inggris belum cukup, tidak diizinkan keluarga, dan sebagainya.

Pada awal-awal menjadi Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti, pada tahun 2007, saya terlibat diskusi intens untuk mewujudkan *world class university (WCU)*, yang menjadi salah satu indikator kinerja kunci (IKU) atau *key performance indicator (KPI)* Ditjen Dikti. Saya mengajukan

pemikiran, kalau ingin perguruan tinggi Indonesia menjadi WCU maka mutu dosennya harus didorong bertaraf internasional. Bukan karena saya sebagai Direktur Ketenagaan yang mengurus dosen, tetapi dosen adalah kunci utama maju tidaknya perguruan tinggi.

Kalau gedung dan alat, begitu ada uang, dapat segera dibangun atau dibeli. Namun kalau dosen, walaupun ada uang, untuk menyekolahkan atau mengirim untuk pelatihan, masih memerlukan waktu beberapa tahun. Itupun belum tentu lulus semua. Untuk memperoleh dosen bertaraf internasional, cara yang paling mudah adalah dengan menyekolahkan mereka, meminta mengambil S2 atau S3 di perguruan yang bagus di negara maju.

Sebenarnya kurikulum perguruan tinggi di negara maju dan di negara berkembang, tidak jauh berbeda. Yang berbeda adalah iklim akademik yang ditunjang oleh adanya dosen yang berkualitas, perpustakaan, dan laboratorium yang memadai. Iklim akademik itulah yang kemudian membentuk lulusan berkualitas bagus. Kecuali itu, dengan menempuh pendidikan di universitas bagus di negara maju, dosen akan memiliki jejaring dengan para ilmuwan di berbagai negara. Jejaring itulah yang sulit didapat jika para dosen kuliah di negeri sendiri.

Bukan berarti dosen lulusan dalam negeri tidak berkualitas, namun sulit untuk membangun jejaring internasional. Sekali lagi, bukan masalah kualitas, tetapi lebih karena “belum kenal”. Di tambah lagi, dosen lulusan dalam negeri, banyak yang bahasa Inggris-nya pas-pasan, sehingga sulit berkomunikasi dengan dosen sebidang dari negara lain. Belum lagi kebiasaan menulis artikel yang juga belum berkembang di sebagian besar perguruan tinggi dalam negeri.

Mengapa hanya dosen muda yang diharuskan? Mengapa dosen yang senior diizinkan untuk studi S2/S3 di dalam negeri? Sebenarnya itu lebih terkait dengan iklim akademik di Unesa dan kampus Indonesia pada umumnya serta prinsip mumpung belum telanjur.

Sebagaimana diketahui, secara jujur harus diakui bahwa sebagian besar universitas di Indonesia, termasuk Unesa, masih lebih tepat disebut *teaching university* daripada *research university*. Itu dapat diketahui dari proporsi pemanfaatan waktu kerja dosen. Mana yang lebih banyak waktunya di kampus, untuk memberi kuliah/membimbing mahasiswa atau melakukan riset. Saya yakin, sebagian dosen lebih banyak menggunakan waktu di kampus untuk mengajar. Kalau begitu perguruan tingginya lebih cocok disebut *teaching university*.

Karena aktivitasnya lebih banyak untuk memberi kuliah, maka iklim riset belum berkembang. Kebiasaan dan pola pikir riset belum tumbuh dengan baik di kalangan dosen. Nah, jika dosen yang sudah bertahun-tahun bekerja di iklim seperti itu, kemudian menempuh studi di luar negeri yang iklim akademiknya bernuansa riset, dia akan kaget. Belum lagi ditambahi dengan beban ekonomi yang konon semakin besar, kalau anak semakin besar. Kemampuan berbahasa Inggris yang juga tidak tumbuh dengan baik, karena pergaulan sehari-harinya terbatas dengan *kanca dhewe*, sesama orang Indonesia.

Dosen muda yang baru lulus dari S2 diharapkan masih *fresh from the oven* dari studi pascasarjana yang tentunya banyak muatan riset dan iklim akademik sebagai komunitas mahasiswa S2. Beban ekonominya juga belum seberat dosen senior. Oleh karena itu mumpung belum telanjur terkontaminasi, dosen muda didorong untuk studi S3 di

luar negeri.

Memang ada kendala bahasa, khususnya yang lulusan S2 di dalam negeri. Untuk itu, universitas harus memberi fasilitas untuk kursus bahasa Inggris. Dosen senior yang berpengalaman dapat membantu mencari perguruan tinggi yang tepat, termasuk mencari calon promotor.

Di Surabaya ada perguruan tinggi yang pada tahun 1980-an mengirimkan banyak dosen untuk S2/S3 di luar negeri. Walau waktu itu, para dosen yang “ditinggal” studi mengeluh karena beban mengajarnya bertambah banyak. Kesempatan studi ke luar negeri terbuka luas, karena terkait dengan pinjaman luar negeri yang diterima perguruan tinggi tersebut. Nah, saat ini perguruan tinggi itu menikmati keunggulan akademik. Jejaring internasionalnya juga berkembang baik, karena para dosen alumni berbagai negara itu, kemudian menjadi jembatannya.

Fenomena itu yang sebenarnya menjadi inspirasi, ketika saya mengajukan gagasan beasiswa luar negeri saat menjadi Direktur Ketenagaan. Saat itu saya sampaikan, kalau setiap tahun Indonesia dapat mengirim 1.000 orang untuk studi S3 di berbagai negara maju dan itu berlangsung lima angkatan sejak tahun 2008, maka pada tahun 2012-2017 akan pulang 5.000 doktor baru dari perguruan tinggi ternama dan itu akan menggoyang iklim akademik perguruan tinggi di Indonesia. *Alhamdulillah*, pada tahun 2008 Indonesia dapat mengirim 1.100 dosen studi ke luar negeri. Semoga Unesa dapat ikut menikmatinya. ◆

6

Waspada! ‘Over Supply’ Guru

Saya diundang oleh Kemdikbud bersama Bappenas untuk ikut berdiskusi dalam rangka menyusun RPJMN Bidang Pendidikan di Hotel Sultan Jakarta. Hadir pada forum itu para tokoh, antara lain Prof Satrio Brojonegoro (mantan Dirjen Dikti), Prof Sudjarwadi (mantan Rektor UGM), Prof Mulyadi Bur (dosen Universitas Andalas), Prof Tian Belawati (Rektor UT), Prof Aman Wirakartakusumah (mantan Rektor IPB dan Dubes untuk Unesco), Prof. Azyumardi Azra (mantan Rektor UIN Jakarta), Prof Djoko Suharto (dosen ITB), Prof Chan Basarudin (dosen UI), Prof Mayling Gardiner (dosen UI), dan masih banyak yang lain.

Dari pemerintah pusat hadir Dr. Taufik Hanafi (staf ahli

Mendikbud), Dr. Subandi (Direktur Pendidikan Bappeanas), Dr. Patdono (Sekretaris Ditjen Dikti), Dr. Bambang Indriyanto (Kapuslijak Balitbang Dikbud) dan masih ada beberapa lainnya. Juga hadir teman-teman dari lembaga multilateral, antara lain Samer Al Samarraï (World Bank), Wolfgang Kubitzki (Asian Development Bank), dan Erik Habers (European Union).

Dalam diskusi pada 7 Januari 2013 itu, Prof Mayling menyampaikan kerisauannya terhadap perkembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Saya jadi ikut risau sehingga malamnya berusaha mencari data yang mutakhir. Saya kaget sekali, karena data di Majalah *Dikti* Volume 3 Tahun 2013, menunjukkan jumlah LPTK saat ini sudah mencapai 429 buah, terdiri dari 46 LPTK Negeri dan 383 LPTK Swasta. Jumlah mahasiswa mencapai 1.440.770 orang. Padahal, tahun 2010 LPTK masih berjumlah 300-an. Jadi ada kenaikan 100 buah lebih dalam waktu tiga tahun atau sekitar 30 setiap tahun atau 3 buah setiap bulan. Jadi setiap 10 hari muncul sebuah LPTK baru.

Jika jumlah mahasiswanya 1,44 juta, dapat diperkirakan lulusan sarjana kependidikan sekitar 300 ribu orang per tahun. Padahal informasi dari Dr. Abi Sujak (Sekretaris BPSDM Kemdikbud), keperluan guru hanya sekitar 40 ribu orang per tahun. Akan terjadi *over supply* yang sangat besar. Padahal 100-an LPTK baru yang didirikan tahun 2010-2013 tentu belum memiliki mahasiswa penuh dan baru akan mulai meluluskan beberapa tahun ke depan. Jadi dalam beberapa tahun ke depan jumlah lulusan LPTK akan bertambah banyak. Mungkin itu yang menjadi kerisauan Prof Mayling.

LPTK adalah perguruan tinggi “khusus” yang menyiap-

kan lulusannya menjadi guru dan atau menekuni bidang pendidikan. Walaupun tidak menutup kemungkinan lulusan LPTK memasuki profesi lain, tetapi dari pengalaman sebagian besar mereka menekuni bidang pendidikan. Apalagi sebagian besar mahasiswa LPTK biasanya perempuan yang tentunya tidak selincah laki-laki untuk mengembara ke sana-ke mari.

Besuk paginya saya diundang lagi untuk diskusi tentang masalah guru di Bappenas. Kerisauan Prof Mayling ternyata menjadi satu topik bahasan yang panjang. Dimulai dari data bahwa sejak tahun 2009 jumlah guru meningkat secara signifikan. Sementara jumlah siswa tidak seperti itu. Rasio guru-murid di SD konon mencapai 1 : 16, sedangkan untuk SMA mencapai 1 : 12. Jauh melampaui ketentuan dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kemdikbud yang menyebut 1 : 30.

Di pihak lain, masih banyak sekolah yang kekurangan guru. Khususnya di daerah terpencil. Pengalaman melaksanakan SM3T di kabupaten Sumba Timur dan Talaud, masih banyak sekolah yang sangat kekurangan guru. Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi dan bagaimana cara memecahkannya? Mari kita analisis penyebabnya terlebih dahulu, sehingga dapat ditemukan pemecahan yang tepat.

Supply-Demand

Tampaknya “hukum ekonomi” berjalan dalam perkembangan jumlah guru maupun LPTK. Sejak sertifikasi guru (sergur) dilaksanakan tahun 2007 dan kemudian tahun 2008 mulai ada guru yang memperoleh tunjangan profesi, maka profesi guru “naik daun”. Banyak orang ingin menjadi guru. Sekolah-sekolah menambah guru. Sekolah

swasta yang semula “hemat” dalam mengangkat guru tetap, kemudian menambah guru dengan maksud agar mereka dapat ikut sertifikasi dan memperoleh tunjangan profesi.

Ketika profesi guru naik daun, peminat masuk LPTK meningkat signifikan. Di Unesa, jumlah pelamar calon mahasiswa meningkat tajam sejak tahun 2010. Pada tahun 2013, rasio pelamar dan yang diterima sudah mencapai 1:20. Artinya satu kursi direbut oleh 20 orang pelamar. Bahkan untuk program studi tertentu, rasio mencapai 1:40.

Nah, ketika fenomena itu muncul, keinginan untuk membuka LPTK juga muncul. Itulah sebabnya jumlah LPTK juga meningkat tajam. Bahkan LPTK yang sudah ada juga meningkatkan daya tampung. Artinya jumlah mahasiswa di program studi yang sudah ada ditambah. Universitas yang semula tidak memiliki program studi kependidikan, juga membuka program studi kependidikan. Dan itu tidak hanya berlaku untuk PTS. Tahun 2008 jumlah LPTK Negeri hanya 33 buah dan sekarang menjadi 46. Memang ada PTN baru yang pada umumnya punya LPTK. Namun jumlah PTN baru hanya 4 buah. Jadi ada 9 PTN “lama” yang semula tidak memiliki program studi kependidikan kemudian membukanya.

Pengangkatan guru baru ternyata juga bermasalah. Banyak kabupaten di daerah terpencil yang melaporkan kesulitan mendapatkan pelamar, sehingga akhirnya menerima guru yang bukan lulusan LPTK atau bahkan hanya lulusan SMA. Tampaknya lulusan LPTK yang berlebih itu juga tidak tertarik untuk menjadi guru di daerah terpencil. Padahal, guru di perdesaan biasanya ingin juga pindah ke kota kabupaten, setelah cukup lama mengabdikan di pedalaman. Biasanya dengan alasan untuk dapat menunggui anaknya yang sekolah di tingkat SMA, yang hanya ada

di kota.

Jika seperti itu masalahnya, perlu ditemukan solusi yang komprehensif. Bagaimana agar *supply-demand* diatur, termasuk penempatannya. Jika kita hanya mengurangi *supply* dengan mengurangi LPTK dikhawatirkan kabupaten terpencil kesulitan guru. Jika jumlah LPTK sangat banyak, dikhawatirkan terjadi kelebihan calon guru yang tidak terkendali. Jika kabupaten terpencil tidak memperoleh pasok guru baru dikhawatirkan tetap terjadi pengangkatan guru yang bukan lulusan LPTK, sehingga memerlukan pendidikan lagi.

Intinya bagaimana kita memiliki pola pendidikan calon guru yang mutunya bagus, tidak *over supply*, tetapi penempatan dalam dilakukan dengan mulus, sehingga sekolah-sekolah di daerah terpencil mendapatkan guru. Tampaknya pasal 23 ayat (1) UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen, dapat menjadi pintu pemecahkan. Pasal itu mengamanatkan agar pendidikan guru dilakukan dengan ikatan dinas dan berasrama. Dengan ikatan



Tampaknya hukum ekonomi berjalan dalam perkembangan jumlah guru maupun LPTK. Sejak sertifikasi guru dilaksanakan sehingga guru memperoleh tunjangan profesi, maka profesi guru naik daun.”

dinas, penempatan guru dapat dilaksanakan dengan baik, karena lulusan terikat kontrak. Dengan adanya asrama, pembinaan calon guru khususnya tentang karakter dapat dilaksanakan secara intensif.

Pertanyaannya apa tidak mahal? Mari kita hitung. Jika informasi Dr. Abi Sujak dijadikan pijakan dan komposisi guru SD sama dengan jumlah guru SMP, SMA, dan SMK, maka kebutuhan guru baru sekitar 20 ribu orang untuk SD dan 20 ribu orang untuk SMP, SMA, dan SMK. Jika menurut ketentuan proses Pendidikan Profesi Guru (PPG) SD berlangsung satu semester, sedangkan untuk guru SMP/SMA/SMK dua, maka pendanaan PPG untuk 40 ribu calon guru baru setara dengan pendanaan untuk 60 ribu calon guru per semester.

Jika SPP di PPG dianggap sama dengan S2 yaitu sekitar Rp. 6 juta per orang per semester, berarti diperlukan biaya untuk SPP sebesar: $60.000 \times \text{Rp. 6 juta} = \text{Rp. 360 miliar}$. Jika biaya hidup mahasiswa PPG diasumsikan sama dengan SPP, biaya total yang diperlukan sebesar Rp. 720 miliar per tahun. Rasanya cukup kecil untuk memastikan kita memperoleh guru yang bagus dan dapat didistribusi ke seluruh pelosok tanah air. Semoga. ◆

7

Kendalikan Pendidikan Profesi Guru

Pada 28-29 Juni 2014 saya diundang oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) untuk *review draft* Standar Nasional Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Prof. Haris yang menjadi Ketua Tim Ad Hoc penyusun *draft* tersebut menjelaskan, pada awalnya yang ingin disusun adalah standar kelembagaan LPTK untuk menjaga mutu lulusan. Mudah-mudahan, untuk menjaga mutu dan jumlah lulusan LPTK. Namun dalam perkembangannya, yang disusun bergeser menjadi standar program. Mungkin dengan standar program, nanti dapat ditentukan standar lembaga yang cocok (baca: mampu) untuk melaksanakan.

Tampaknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

mulai khawatir dengan menjamurnya LPTK yang seakan tak terkendali. Oleh karena itu disusun standar yang diharapkan dapat mengendalikannya. Tentu maksudnya baik, agar tidak terjadi lulusan LPTK yang tidak memenuhi standar minimal dan juga agar tidak terjadi pengangguran lulusan LPTK secara massif akibat timpangnya *supply-demand* guru. Sebenarnya agak terlambat, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak dilakukan apa-apa.

Menutup perguruan tinggi merupakan suatu hal yang tidak mudah di Indonesia. Seringkali keinginan seperti itu menjadi problem sosial bahkan menyerempet ke hal-hal yang berbau politis. Sewaktu baru menjadi Direktur Ketena-
gaan, saya dihadapkan masalah STKIP di Kabupaten Alor. STKIP itu sudah beroperasi dua tahun tetapi belum mendapatkan izin program studinya. Mahasiswa sempat bergolak, takut kalau sampai saatnya lulus izin belum keluar, sehingga tidak dapat lulus.

Waktu itu data yang ada di Dikti menunjukkan bahwa persyaratan STKIP itu untuk pendirian prodi belum memenuhi syarat. Terjadilah buah simalakama: akan diberi izin tidak memenuhi syarat, tidak diberi izin mahasiswa berdemo dan menjadi problema sosial. Akhirnya diputuskan, mahasiswa yang sudah telanjur kuliah ditransfer ke Universitas Nusa Cendana, sementara SKIP tersebut dibekukan dan tidak boleh menerima mahasiswa baru, sampai izin diperoleh. Prof. Frans Umbu Data, Rektor Undana sungguh berjasa, karena mau menerima limpahan mahasiswa PGSD dari STKIP di Alor tersebut. Seandainya Undana tidak dapat menerima limpahan mahasiswa tersebut mungkin masalah akan berkepanjangan.

Dalam tahap diskusi bersama antara BSNP, Tim Ad Hoc, dan *rivewer* diinformasikan bahwa judul *draft* diubah men-

jadi Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG). Dengan demikian arahnya sudah lebih jelas. Karena LPTK sebagai lembaga penghasil guru juga merupakan perguruan tinggi, maka SNPG besoknya merupakan kelengkapan dari SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) yang sudah menjadi Permendikbud. Jadi hanya memuat hal-hal yang belum tercakup dalam SNPT.

Yang terbayang dibenak saya adalah bagaimana penerapan SNPG besok. Jika ada (dan dugaan saya banyak) LPTK yang tidak memenuhi SNPG apakah harus ditutup? Sebaliknya jika banyak LPTK yang memenuhi SNPG, sehingga terjadi *over supply* guru, apa akan dibiarkan saja? Itulah sebabnya dalam forum itu saya mengusulkan menganggap pendidikan guru sebagai bentuk pendidikan kedinasan. Toh pendidikan guru dilaksanakan oleh Kemdikbud dan hasilnya digunakan oleh Kemdikbud. Jadi mirip dengan pendidikan di AMN yang dilaksanakan oleh TNI AD dan hasilnya digunakan oleh TNI AD. Juga mirip dengan



Yang perlu dikendalikan dengan ketat adalah PPG. Biarlah program S1 Kependidikan di LPTK berjalan sebagaimana biasanya, dengan pengertian lulusannya adalah sarjana pendidikan yang belum tentu menjadi guru.”

pendidikan di STPDN yang dilaksanakan oleh Kemdagri dan hasilnya digunakan oleh Kemendagri.

Menurut UU No. 14/2005, guru haruslah lulusan S1/D4 ditambah Pendidikan Profesi Guru (PPG). Nah kita perlu merumuskan, mana yang disebut pendidikan guru? Apakah sejak dari S1/D4 sampai PPG atau hanya PPG-nya saja. Menurut saya lebih bijak jika yang disebut pendidikan guru adalah PPG-nya. Program akademik di S1 tidak termasuk di dalamnya. Mengapa? *Pertama*, program S1 adalah program akademik dan belum tentu semua pesertanya menjadi guru. Sangat mungkin ada orang yang ingin belajar tentang pendidikan, tetapi tidak ingin menjadi guru. Misalnya ibu-ibu muda yang ingin pandai mendidik anaknya. Melarang mereka masuk LPTK dapat dimaknai melanggar hak asasi.

Apakah dengan pola itu, seakan-akan pendidikan guru harus konsekutif, program S1 dipisah dengan PPG? Di negara maju, memang ada pola konkuren (S1 dan PPG menyatu), tetapi juga ada pola konsekutif. Undang-undang No. 14/2005 menyebut bahwa pola yang digunakan di Indonesia adalah konsekutif. Bukan tidak mungkin mengembangkan pola konkuren, tetapi tentu hanya untuk program-program khusus. Setahu saya, sekarang juga sudah ada inisiasi PPG Terintegrasi dengan pola konkuren untuk calon guru dari daerah terpencil.

Kedua, dengan pola ini yang perlu dikendalikan dengan ketat adalah PPG, sedangkan S1 LPTK dapat lebih longgar. Mengapa demikian? Biarlah program S1 Kependidikan di LPTK berjalan sebagaimana biasanya, dengan pengertian lulusannya adalah sarjana pendidikan yang belum tentu menjadi guru. Mirip lulusan S1 Farmasi yang belum tentu menjadi apoteker atau lulusan S1 Hukum yang belum tentu

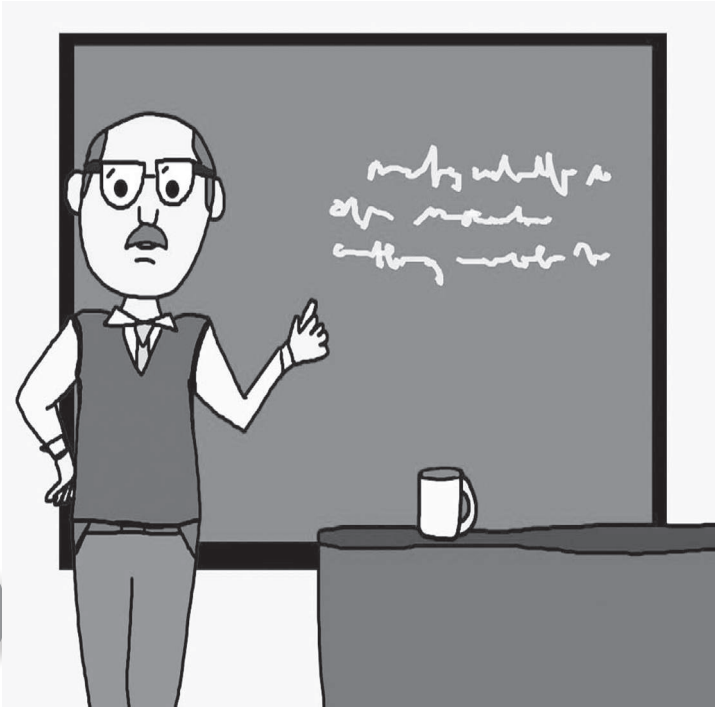
menjadi hakim, jaksa, notaris, dan pengacara.

PPG yang harus dikendalikan, baik jumlah maupun mutunya, agar mampu menghasilkan calon guru dalam jumlah, jenis, dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan. Toh, UU No. 14/2005 mengamanatkan pemerintah mengembangkan pola pendidikan guru berikatan dinas dan berasrama untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan. Jadi yang diberi ikatan dinas dan diasramakan hanyalah mahasiswa PPG, karena mereka memang dididik untuk menjadi guru. Dengan pola itu berarti hanya LPTK yang memenuhi syarat dan jumlah tertentu yang diberi izin melaksanakan PPG, tetapi mereka tetap dapat melanjutkan program S1.

Tentu ada kemungkinan minat masuk ke LPTK yang tidak memiliki PPG akan menurun. Pengelola LPTK mungkin akan risau karena sudah telanjur memiliki dosen dan sarana lainnya. Pada kasus seperti ini perlu dicarikan solusi, termasuk LPTK yang memiliki PPG tetapi harus mengurangi jumlah mahasiswa kependidikan. Salah satu cara adalah memberikan izin prodi nonkependidikan yang senafas. Misalnya memberikan izin prodi Matematika (murni) bagi LPTK yang memiliki prodi Pendidikan Matematika. Asumsinya lapangan lulusan S1 Matematika tidak menjadi guru.

Jika izin prodi nonkependidikan itu diberikan, mahasiswa dapat didorong untuk menempuh program gelar ganda (*double degree*). Misalnya menempuh S1 Pendidikan Akutansi dan S1 Akutansi (murni). Setelah lulus mereka dapat memilih akan menjadi guru atau bekerja sebagai akuntan. Untuk prodi Kependidikan yang tidak memiliki padanan murni, misalnya S1 PGSD dan sejenisnya perlu dicarikan prodi nonkependidikan yang terdekat.

Setelah SNPG final menjadi peraturan, sebaiknya disu-



sun skenario implementasi termasuk kapan dimulai penerimaan guru baru yang harus lulusan PPG. Jika skenario ditentukan dan disosialisasikan secara luas, diharapkan semua LPTK dan lembaga lain terkait dapat menyiapkan diri. Semoga. ◆

8

Kuliah Bilingual di PTN, Harus

Radio *Suara Surabaya* menyiarkan berita bahwa Menteri Ristek dan Dikti meminta Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mulai tahun depan menerapkan perkuliahan dalam dua bahasa atau *bilingual*. Tidak disebutkan kapan dan di mana Pak Menteri menyampaikan itu mungkin saja di Unair atau di Unesa, karena Sabtu 28 November 2015 beliau memang di Surabaya dan kalau tidak keliru mengunjungi Unair dan Unesa.

Tanggapan terhadap berita itu bermunculan, baik di Radio SS atau dalam obrolan teman-teman. Seperti biasanya pro dan kontra terjadi, dengan alasan masing-masing. Mendengar itu saya langsung teringat saat memberi kuliah beberapa hari lalu, mahasiswa S2 saya sedang mendiskusi-

kan masalah sulitnya anak-anak S1 memenuhi skor *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL).

Seperti diketahui setiap PTN dan beberapa PTS sekarang menerapkan aturan skor TOEFL minimal yang harus dicapai mahasiswa sebelum dinyatakan lulus. Konon banyak mahasiswa terhambat lulus karena itu. Semua matakuliah sudah lulus, skripsi sudah lulus. tetapi skor TOEFL belum mencapai batas minimal yang dipersyaratkan.

Nah, dalam diskusi dengan topik *Analisis Kebijakan Pendidikan* itu, sekelompok mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan mengangkat masalah tersebut. Mereka mencoba menelaah urgensi kebijakan tersebut, masalah yang timbul, dan alternatif pemecahannya. Seperti biasanya diskusi berjalan seru, karena masing-masing mahasiswa punya pandangan berbeda. Pengalaman dan bahan bacaan tampaknya sangat memengaruhi pandangan mereka.

Saya juga teringat, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang dikembangkan Kemdikbud, salah satu alasannya adalah ketidaksetujuan MK terhadap RSBI yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Nah, sekarang Pak Menteri Ristek Dikti ingin menerapkan itu pada jenjang perguruan tinggi tentu ada alasan yang kuat.

Betulkah bahasa Inggris itu penting? Apakah belajar bahasa Inggris itu mendesak? Dua pertanyaan itu perlu didiskusikan. Saya pribadi berpendapat belajar bahasa Inggris, sebagai bahasa internasional, sangat penting. Ketika era global telah datang dan interaksi dalam bekerja maupun kehidupan sehari-hari mengglobal, maka kita akan dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan bangsa lain. Dan bahasa yang paling lazim digunakan adalah bahasa

Inggris.

Dengan mampu berbahasa Inggris kita juga akan lebih percaya diri dan mampu mengekspresikan pikiran dalam forum-forum internasional. Walaupun kita pandai dan punya pemikiran yang cemerlang, tetapi kalau tidak dapat menyampaikan dengan baik, tentu orang lain tidak tahu dan akhirnya pemikiran yang bagus itu tidak bermanfaat bagi orang banyak.

Ketika memberi kuliah kepada mahasiswa S2 dan lebih khusus S3, selalu saya sampaikan kalau bahasa Inggris itu mutlak. Bayangkan kalau kita sudah lulus S3 dan menjadi doktor, kemudian bertemu dengan doktor lain dari luar negeri yang bidangnya sama, kemudian kita tidak dapat berdiskusi tentu tidak nyaman. Dari pengalaman, biasanya dalam konteks seperti itu orang tersebut akan minggir dan tidak ingin malu. Padahal dari pergaulan semacam itulah, kita akan berkembang.

Apakah dengan sekolah atau kuliah dengan pengantar bahasa Inggris akan mengikis rasa nasionalisme kita? Saya tidak yakin itu. Rasanya juga belum ada penelitian tentang itu. Pak Habibie, Gus Dur, dan banyak tokoh lain bahkan kuliah mulai S1 di luar negeri dan tentu tidak menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Pondok Modern seperti Pondok Gontor juga mewajibkan santrinya mampu berbahasa Inggris dan Arab. Setahu saya banyak anak-anak pejabat kita yang berkuliah dan bahwa sejak SMA di luar negeri. Setahu saya Azrul Ananda putra Pak Dahlan Iskan sejak SMA juga di Amerika Serikat.

Ketika MK membatalkan pasal di UU Sisdiknas sehingga RSBI berhenti, saya termasuk yang menyesalkan. Buktinya saat ini banyak sekolah swasta yang tetap melaksanakan pola RSBI dengan berbeda nama. Sekolah seperti itu juga

tetap menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Hanya saja, karena sekolah swasta dan biasanya mahal, yang dapat masuk adalah anak-anak dari keluarga kaya. Tentu tidak hanya anak keluarga kaya yang harus mampu berbahasa Inggris.

Mudah-mudahan dengan gagasan Pak Menteri Ristek dan Dikti itu, anak-anak muda cemerlang yang mendapat beasiswa Bidik Misi dan berkuliah di PTN segera dapat mengejar kemampuan berbahasa Inggris, sehingga pada saatnya mampu setara dengan teman-temannya dari keluarga kaya dan lebih dahulu bersekolah di sekolah-sekolah swasta dengan pengantar bahasa Inggris.

Apakah penerapan perkuliahan *bilingual* itu mendesak untuk segera diterapkan? Menurut saya, ya dan bahkan sudah terlambat. Coba kita lihat formulir saat kita menabung di bank. Hampir pasti menggunakan dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Coba kita lihat iklan lowongan pekerjaan. Sebagian besar menyaratkan bahasa Inggris. Artinya saat ini saja, bahasa Inggris telah menjadi kebutuhan untuk bekerja dan berinteraksi sosial kemasyarakatan. Jadi mestinya penerapan perkuliahan *bilingual* itu sudah diterapkan sepuluh tahun lalu.

Ada pertanyaan, apa tidak terlalu tergesa-gesa, sementara dosen dan mahasiswa belum siap. Kalau itu mungkin saja, tetapi harus dimulai segera dan segala keperluan untuk mendukung harus segera pula dikuatkan. Kalau di Unesa, dosen-dosen muda katakanlah di bawah 35 tahun pada umumnya sudah lumayan bahasa Inggrisnya. Jika mereka itu diberi pelatihan khusus saya yakin akan segera dapat memulai perkuliahan dua bahasa. Yang pokok berani memulai dengan kerja keras dan konsisten demi masa depan anak-anak kita. Semoga. ◆

9

Lulusan IPA Banyak yang Pilih Soshum

Judul di atas diambil dari berita di *Jawa Pos* 17 April 2016. Pada sambungannya di halaman berlatang, judulnya diubah menjadi “*Dan banyak yang diterima*”. Sore harinya saya mendapat banyak SMS, *WhatsApp*, maupun telepon mempertanyakan mengapa seperti itu? Sebenarnya fenomena itu yang sudah lama terjadi, tetapi baru kali ini ada koran yang memuat.

Dalam satu rapat panitia Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) beberapa tahun lalu fenomena itu juga pernah didiskusikan bahkan melebar sampai ketidakselarasan penjurusan di SMA dengan SBMPTN. Dalam diskusi itu terungkap kalau penjurusan di SMA lebih merupakan klasifikasi kemampuan siswa. Siswa yang nilai

MIPA-nya (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi) bagus masuk ke jurusan IPA, sedangkan yang kurang bagus masuk ke jurusan IPS atau Bahasa. Sepanjang informasi yang saya peroleh sangat jarang sekolah yang mendasarkan penjurusan itu atas dasar bakat dan minat siswa.

Apa pola itu baru sekarang terjadi? Tidak. Anak sulung saya yang sekolah di salah satu SMA Kompleks Surabaya awal tahun 2000 pernah mengalami hal menarik. Saat itu penjurusan dimulai di kelas 2. Nah anak saya naik ke kelas 2 IPA, karena nilai untuk matapelajaran MIPA memang baik. Namun dia minta pindah ke IPS, karena dia lebih tertarik ke hal-hal yang bersifat seni dan aktif di kegiatan sosial. Inginnya dia nanti akan kuliah di Psikologi atau Komunikasi. Ketika menyampaikan keinginan itu kepada wali kelas, justru ditertawakan dan dikomentari, “Kamu aneh, lainnya merengek pindah dari IPS ke IPA kok kamu malah minta pindah dari IPA ke IPS”. Tampaknya saat penjurusan di SMKnilai matapelajaran IPS, Bahasa, dan Kesenian tidak begitu menjadi pertimbangan. Yang diperimbangkan nilai IPA, yang bagus masuk jurusan IPA dan yang kurang bagus masuk jurusan IPS atau Bahasa.

Memang akhirnya terbukti. Saat S1 anak saya mengambil bidang Manajemen Komunikasi yang isinya merupakan perpaduan antara sosial dan seni. Setelah malang melintang di pekerjaan, kemudian mengambil S2 di bidang Lingkungan dengan peminatan *food security*. Agak berat karena banyak matakuliah yang termasuk kelompok MIPA dan itu tidak pernah didapat di SMA IPS maupun S1 Manajemen Komunikasi. Namun kerja keras dan mungkin potensi bidang MIPA yang cukup toh dia dapat lulus dengan baik dan sekarang aktif di kegiatan NGO bidang *food security*. Tampaknya potensi seni dan aktivis sosial tidak

dikenali atau tidak mendapat perhatian saat penjurusan di SMA. Bahwa nilainya untuk matapelajaran MIPA bagus bukan karena minatnya, melainkan karena kemampuan dasarnya baik.

Tahun lalu keponakan saya, anak kedua adik bungsu saya, juga mengalami hal yang sangat menarik. Ketika pendaftaran SMA keponakan saya ikut tes psikologi dan atas dasar tes itu keponakan saya dimasukkan di jurusan IPS. Namun karena si anak lebih tertarik IPA dan bapaknya menyampaikan hal itu ke Kepala Sekolah, oleh sekolah keponakan saya diberi peluang untuk semacam uji coba kelas IPA dan nanti akan dilihat hasilnya. Ketika uji coba berjalan setengah sementer, wali kelas dan kepala sekolahnya bingung karena nilai bidang MIPA dan IPS seimbang. Yang menarik kepala sekolahnya berkomentar, “Kok nilai Biologi rendah? Kalau sampai akhir semester seperti itu akan dimasukkan ke IPS”.

Untungnya ada hal “ajaib” terjadi. Ketika hasil tes psikologi per siswa dikirim oleh lembaga pengetes dan dibagikan kepada masing-masing siswa, diketahui bahwa hasil tes keponakan saya cenderung ke IPA. Ternyata lembaga itu melakukan kesalahan saat melakukan tabulasi hasil tes psikologi, sehingga keponakan saya yang hasilnya cenderung ke MIPA-Engineering dimasukkan ke IPS. Akhirnya walaupun nilai Biologi tetap kurang baik, keponakan saya dimasukkan kelas IPA.

Jadi banyaknya lulusan IPA memilih Soshum (sosial dan humaniora), dan banyak yang diterima, itu bukan karena salah pilih, tetapi karena mereka memang “anak pintar”, sehingga dapat masuk kelas IPA. Teman-teman saya yang lulusan Psikologi, Ekonomi dan bahkan Bahasa Indonesia dengan prestasi menonjol ternyata banyak yang lulusan



Jadi banyaknya lulusan IPA memilih Soshum (sosial dan humaniora), dan banyak yang diterima, itu bukan karena salah pilih, tetapi karena mereka memang “anak pintar”, sehingga saat penjurusan dulu dapat masuk kelas IPA.

SMA IPA. Jadi mereka yang lulusan IPA mendaftar ke Soshum dan kemudian diterima, bukan karena matapelajaran IPA-nya, melainkan karena mereka memang anak pintar.

Penelitian yang membandingkan lulusan SMA dan SMK mungkin dapat menjadi tambahan penjelasan. Ada studi yang menyimpulkan lulusan SMA lebih baik kinerjanya dan

kariernya dibanding lulusan STM (sekarang disebut SMK Bidang Rekayasa). Nah, ketika datanya dikoreksi dengan NEM mereka saat SMP, ternyata kinerja dan karier mereka tidak berbeda.

Jika NEM SMP dapat dimaknai sebagai indikator “pintarnya” seseorang, berarti setelah dikoreksi dengan analisis kovariat, perbandingan lulusan SMA dan STM sudah disamakan kepintarannya dan hasilnya tidak beda. Jadi perbedaan kinerja dan karier bukan karena asal sekolah tetapi karena kepintarannya.

Akronim Soshum dalam SBMPTN adalah istilah yang baru digunakan mulai tahun 2012 atau 2013 untuk menggantikan istilah IPS. Seingat saya penggunaan istilah Soshum sebagai solusi terhadap fenomena ketidaksesuaian penjurusan di SMA dengan tes di UMPTN atau yang sekarang disebut SBMPTN. Di SMA ada tiga jurusan yaitu IPA, IPS dan Bahasa, tetapi di waktu lalu UMPTN hanya punya dua pilihan program yaitu IPA dan IPS. Nah akhirnya istilah IPS diubah menjadi Soshum yang merupakan “gabungan” IPS dan Bahasa. ◆

10

Hasil UKG adalah Cermin

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru saja selesai melaksanakan UKG (Uji Kompetensi Guru) untuk seluruh guru di Indonesia. Kalau menurut Mendikbud bahwa hasil UKG itu analog dengan kaca benggala atau cermin bagi guru, saya ingin menambahkan bukan hanya cermin bagi guru tetapi juga cermin bagi penghasil guru, pembina guru, dan *stakeholders* pendidikan. Kalau ternyata hasil UKG tahun 2015 konon tidak jauh berbeda dengan hasil UKG sebelumnya, maka marilah kita bercermin dari hasil UKG itu.

Jika hasil UKG dapat dibuat secara figuratif berdasarkan sub-sub kompetensi guru, maka setiap guru dapat mengetahui kompetensi atau subkompetensi mana yang

”

Jika benar hasil UKG 2015 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, berarti perlu upaya sungguh-sungguh dan konsisten untuk meningkatkannya.”

belum dikuasai, sehingga yang bersangkutan dapat fokus dalam memperbaiki diri. Oleh karena itu akan sangat baik, jika setiap guru dapat mengetahui figurasi tersebut. Ibarat bercermin, bayangan yang dilihat dapat utuh dan rinci.

Namun perlu dicatat bahwa kompetensi masih berupa potensi dan belum menjadi kinerja. Oleh karena itu akan sangat ideal jika hasil UKG dipadukan dengan hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG). Sebagaimana diketahui kinerja merupakan perpaduan antara kompetensi dan komitmen dalam bekerja. Jika kompetensinya tidak bagus, tentu kinerja tidak akan maksimal. Sebaliknya walaupun kompetesinya bagus belum dijamin kinerjanya maksimal, jika ternyata komitmen kerjanya rendah.

Ibarat alat timbangan yang menentukan hasil berat benda yang ditimbang, maka instrumen UKG dan PKB haruslah dapat dipercaya. Dalam istilah pengukuran disebutkan instrumen seperti itulah haruslah valid dan reliabel. Apalagi PKG

dilaksanakan oleh kepala sekolah dan atau pengawas yang sangat mungkin pemahamannya berbeda. Oleh karena itu, baik instrumen maupun pelaksanaan UKG dan PKG harus dipastikan kredibilitasnya.

Para pembina guru juga dapat menggunakan hasil UKG dan PKG sebagai cermin dari kinerjanya. Ibarat petani mangga, kesuburan pohon mangga dan kelebatan buahnya juga cermin apakah petani tersebut berhasil memelihara kebun mangganya atau tidak. Petani yang sukses adalah yang mampu memelihara pohon mangga yang semula kurang subur dan kurang lebat buahnya, menjadi pohon mangga yang tumbuh subur dan lebat buahnya. Pembina guru yang berhasil dalam menjalankan tugasnya adalah mereka yang membuat para guru yang semula kurang kompeten menjadi kompeten dan yang semula kurang baik kinerjanya menjadi baik kinerjanya. Sebaliknya jika hasil UKtG tidak baik dan cenderung turun ketika usia guru bertambah, berarti pembinaan guru tidak berhasil.

Bagaimana dengan LPTK sebagai produsen guru? Hasil UKG dan PKG juga dapat menjadi cermin baginya. Apakah guru yang dihasilkan memiliki kompetensi yang bagus? Apakah guru yang dihasilkan merupakan pembelajar yang baik, sehingga setelah lulus dan bekerja terus belajar sehingga kompetensinya terus meningkat. Apakah guru yang dihasilkan memiliki jiwa pengabdian yang baik, sehingga dengan segala kondisi tetap memiliki komitmen pengabdian yang baik.

Jika benar hasil UKG 2015 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, berarti perlu upaya sungguh-sungguh dan konsisten untuk meningkatkannya. Ibarat beras bisa putih karena saling bergesek sesama butiran beras, maka guru akan semakin pandai kalau mereka berinteraksi se-



METRONWS.COM

cara akademik dengan rekan sesama guru. Oleh karena itu, forum Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan wahana yang baik untuk membuat guru saling berinteraksi.

Kita sudah punya KKG maupun MGMP, yang diperlukan adalah merancang agar keduanya berfungsi dengan baik. Di negara lain lembaga seperti itu biasanya disebut *Professional Learning Community* (PLC) dan terbukti juga menjadi wahana pembinaan sangat baik untuk meningkatkan kemampuan kinerja guru. Jadi menjadi tugas para pembina guru dan LPTK sebagai prodosen guru untuk melaksanakan *after sales services*. Semoga. ◆

11

8 di Antara 11 Lulusan Bidik Misi 'Cum Laude'

Sudah lama saya ingin menulis artikel ini, tetapi entah mengapa selalu tersisih oleh urusan lain. Hari ini teringat kembali dan saya tulis dengan maksud berbagi pemikiran dengan pembaca. Pada wisuda Maret 2014, mahasiswa penerima Beasiswa Bidik Misi angkatan pertama Unesa sudah lulus sebanyak 11 orang.

Yang sangat menarik, ternyata 8 di antara 11 orang yang lulus dalam tujuh semester itu lulus dengan predikat *cum laude*. Tiga lain yang tidak *cum laude*, tetapi IPK-nya semua di atas 3,3. Sungguh menggembirakan. Ternyata adik-adik mahasiswa dari keluarga kurang mampu itu potensinya luar biasa.

Seperti diketahui, Kemendikbud sejak 2010, meluncur-

kan program bantuan biaya untuk lulusan SMA/SMK/MA/ sederajat dari keluarga kurang mampu namun memiliki nilai akademik memadai. Bantuan Bidik Misi tersebut meliputi bantuan keseluruhan biaya pendidikan dan biaya hidup selama kuliah.

Karena mereka “luar biasa”, maka saya perlukan untuk secara khusus mengundang mereka. Bukan apa-apa, saya ingin tahu lebih jauh keadaan keluarga mereka dan apa langkah yang ingin diambil setelah lulus. Saya ingin tahu dari mana mereka berasal, apa pekerjaan orangtuanya, berapa saudara kandungnya dan sebagainya. Dan yang terpenting, saya ingin tahu setelah lulus apakah, mereka masih ingin melanjutkan kuliah atau ingin segera bekerja.

Dalam dialog singkat dengan mereka, menjadikan saya menahan rasa haru yang sangat dalam. Ke sebelas alumni Bidik Misi itu betul-betul dari keluarga kurang mampu. Pekerjaan orangtua mereka ada yang buruh tani yang mengandalkan ongkos ketika diminta/disuruh mengerjakan ini dan itu oleh petani yang memiliki lahan. Mereka tidak memiliki lahan. Ada yang buruh nelayan yang juga tidak memiliki perahu. Pekerjaannya melaut dengan perahu nelayan pemilik perahu dan mendapatkan ongkos sesuai dengan lamanya melaut. Ada yang buruh serabutan, artinya bekerja apa saja yang diminta atau disuruh oleh orang lain. Yang lebih mengharukan, beberapa di antara mereka adalah anak yatim. Bahkan ada seorang alumni yang yatim piatu, anak sulung dari tiga bersaudara yang sehari-hari diasuh oleh pakdenya.

Namun prestasi mereka yang dapat lulus 7 semester, dengan IPK di atas 3,3 bahkan *cum laude*, menambah keyakinan bahwa Allah SWT itu Maha Adil, mungkin segera memberikan otak encer kepada mereka untuk pada

saatnya menjadi “lokomotif” penarik gerbong keluarganya keluar dari kemiskinan.

Semangat belajar mereka sudah teruji, sehingga ketika 10 di antara mereka ingin menempuh S2, sebagai rektor saya mendukung penuh. Apalagi pemerintah memang menyediakan beasiswa khusus bagi mereka. Namun tentu dengan pesan, jangan sampai melupakan keluarga, khususnya adik-adiknya yang memerlukan bimbingan dan bantuan, agar segera menyusulnya untuk berkuliah dan berprestasi.

Yang sungguh sangat menarik, adalah “si yatim piatu”. Gadis dari Cerme Gresik, lulusan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dengan predikat *cum laude* itu, memutuskan belum ingin melanjutkan kuliah ke S2. Bahkan sekarang dia sudah mulai mengajar di SMK Swasta di Cerme. Apa yang membuat alumni tersebut istimewa? Kesadarannya untuk segera bekerja, sehingga dapat mengasuh dua adiknya yang masih kecil dan sekolah. Sungguh hebat. Tidak hanya cerdas otaknya, tetapi juga mulia hatinya. Semoga Illahi robbi membimbingnya, dan pada saatnya dapat menempuh S2 bahkan S3. Sabar ya *Mbak*, pengorbanan Anda pasti dicatat oleh Sang Khaliq.

Usai pertemuan itu saya terusik untuk menghitung-hitung berapa *sih* sebetulnya biaya yang dibutuhkan untuk membuat lulusan SMA menjadikan seorang sarjana? Program Bidik Misi memberikan bantuan untuk biaya hidup plus biaya kuliah sebesar Rp 12 juta rupiah per orang, per tahun. Dengan asumsi masa kuliah 4 tahun maka diperlukan biaya Rp. 48 juta. Jadi, hanya butuh Rp. 48 juta untuk menjadikan seorang sarjana.

Jika sarjana baru tersebut bekerja sebagai guru honorer (belum PNS atau guru tetap), dengan gaji 2 juta/bulan,

berarti bantuan Bidik Misi itu hanya setara dengan gaji 24 bulan atau 2 tahun. Jika yang bersangkutan menjadi guru PNS dengan gaji 2,5 juta rupiah ditambah tunjangan profesi juga 2,5 juta rupiah, beasiswa tersebut hanya setara dengan sekitar 10 bulan penghasilan. Artinya, kalau itu dianggap hutang mereka akan segera dapat membayarnya.

Sebagai salah seorang yang ikut membidani lahirnya program Bidik Misi saya sungguh bahagia. Apalagi ada beberapa mahasiswa Bidik Misi yang berhasil lulus 7 semester di Fakultas Kedokteran. Bahkan Birrul Qhodriyah alumnus FK UGM yang memberikan testimoni dalam silaturahmi dengan Presiden, mampu membuat mata Pak SBY berkaca-kaca dan beberapa kali mengusap airmata.

Seingat saya Bidik Misi angkatan pertama pada tahun 2010 sebanyak 20 ribu orang. Dengan demikian pada 2014 sudah melahirkan sarjana angkatan pertama. Dapat dibayangkan, mulai 2014 setiap tahun akan lulus 20 ribu orang sarjana baru dari berbagai PTN dengan berbagai bidang keahlian, yang berasal dari keluarga kurang mampu. Apalagi jika di antara mereka banyak yang menempuh S2 dan atau S3.

Jika mereka memerlukan waktu 10 tahun untuk bekerja dan mengentas keluarganya, maka mulai tahun 2024 setiap tahun akan terentas 20 ribu keluarga kurang mampu menjadi mampu. Artinya Bidik Misi telah dapat membuktikan sebagai cara elegan untuk mengentas kemiskinan. Tidak hanya mengentas dari kemiskinan secara ekonomi tetapi juga secara edukasi.

Saat Mas Anies Baswedan awal-awal menggagas program *Indonesia Mengajar*, membayangkan anak-anak cerdas yang dikirim ke sekolah-sekolah di pelosok itu akan menjadi “jendela” bagi anak-anak setempat. Jendela untuk

melihat masa depan yang cerah jika bersekolah. Pada saat itu, saya mengatakan tidak hanya itu, Mas. Pengalaman selama 1-2 tahun di pelosok itu akan membekas di sanubarinya. Pada saatnya dia menjadi “orang penting” dia akan ingat masih ada anak-anak di daerah pelosok yang perlu dibantu.

Nah, jika dahulu saya membayangkan anak cerdas itu hanya bergaul selama 1-2 tahun dengan keluarga miskin, sekarang alumni Bidik Misi itu benar-benar berasal dari keluarga miskin. Saya berharap, jika kelak mereka memegang posisi penting di berbagai sektor, akan tergerak hatinya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Semoga. ◆



KASKUS.ID



The background is a grayscale photograph of a modern building with a grid overlay. The grid consists of solid and dashed lines. In the foreground, a person is visible, partially obscured by the grid. The overall aesthetic is technical and architectural.

Bagian 4

GURU DAN PEMBELAJARAN



1

Guru Hebat, Guru Inspiratif

Ketika mengisi acara seminar atau pelatihan kepada para guru, saya sering mengakhiri presentasi dengan mengutip ungkapan: *bad teacher tells, good teacher shows, great teacher inspires*. Guru yang tidak baik bercerita, guru bagus memberi contoh, guru yang hebat memberi inspirasi. Biasanya tidak ada yang mempertanyakan, karena *caption* itu saya tampilkan di akhir presentasi dan tidak saya bahas.

Dalam suatu seminar dengan topik *Guru Masa Depan*, *caption* itu sengaja saya tampilkan di awal dan saya elaborasi. Akibatnya banyak yang mempersoalkan. Ada peserta yang menyatakan bahwa para guru sudah memiliki pegangan “Kepala sekolah sebagai EMASLIM”, artinya guru sebagai *educator, manager, administrator, supervisor*,

leader, innovator, dan motivator. Guru ya mirip itu.

Saya senang peserta dapat menjelaskan guru sebagai EMASLIM. Artinya guru sudah memahami tugas dan fungsinya, sebagai edukator sampai motivator. Itu adalah tugas atau fungsi guru. Jadi tugas guru tidak hanya mengajar dalam pengertian menjelaskan materi ajar, memberi tugas, memberikan tugas dan sebagainya. Itu hanya salah satu tugas guru, yaitu sebagai pengajar. Guru masih memiliki tugas lain yang lengkapnya adalah EMASLIM.

Lantas apa hubungannya dengan ungkapan *bad teacher tells, good teacher shows, great teacher inspires?* Ungkapan ini merupakan kegiatan guru saat menjalankan tugas dan fungsinya. Jika saat mengajar, membimbing serta tugas lainnya, guru hanya bercerita “begini dan begitu” maka yang bersangkutan tergolong guru yang kurang baik. Jika guru mampu memberikan contoh bagaimana melakukan sehingga menjadi teladan itulah guru yang baik. Jika kemudian mampu memberi inspirasi kepada siswanya, sehingga siswa terdorong melakukan itu tanpa disuruh/diawasi bahkan terdorong berbuat lebih baik, itulah yang disebut memberi inspirasi. Guru yang mampu memberi inspirasi itulah guru yang hebat.

Ketika mendapat penjelasan itu, masih ada peserta yang bertanya. “Ya pak, itu seakan dampak dari bagaimana guru mengajar dan membimbing murid. Lantas untuk dapat berbuat seperti itu apa modal yang diperlukan guru?” Saya senang mendapat pertanyaan itu, karena menunjukkan yang bersangkutan ingin belajar. Oleh karena itu, saya mencoba menjelaskan dengan rinci sebagai berikut. Saya teringat metafora yang digunakan oleh Gus Ipul (Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur), sehingga saya gunakan sebagai contoh.

Kalau ingin menjadi guru yang baik, diperlukan empat bekal pokok. *Pertama*, harus pandai. Harus “lebih pandai dari siswanya”. Jika guru kalah pintar dengan murid, dapat dibayangkan guru tersebut tidak akan dihormati atau bahkan disepelekan. Guru yang pandai akan membuat murid percaya dan bahkan berwibawa di hadapan murid. Wibawa karena kepandaian akan memberikan dampak besar dalam proses belajar mengajar. Siswa akan memperhatikan penjelasan guru. Siswa akan mengerjakan serius tugas yang diberikan guru.

Namun guru yang pandai itu tidak cukup, maka bekal yang *kedua* dan ini sangat penting, yaitu guru harus siap dan berusaha sungguh-sungguh membuat muridnya lebih pandai dari dia sendiri. Artinya sang guru harus berusaha membuat muridnya lebih pandai dari dirinya. Berarti sang guru harus siap “dikalahkan” oleh muridnya. Jangan sampai seperti cerita guru silat, yang konon selalu “menyembunyikan” jurus pamungkas agar tidak dikalahkan oleh muridnya.

Konsekuensi dari syarat kedua tadi, maka dalam proses belajar mengajar guru harus siap didebat oleh murid. Mengapa demikian? Karena ketika siswa didorong dan dimotivasi untuk belajar keras, mencari informasi dari segala sumber dan menggunakan pola pikir lateral, sangat mungkin siswa memiliki gagasan dan pendapat yang berbeda dengan gurunya. Dengan demikian, guru harus siap didebat dan bahkan kalah ketika adu argumen dengan siswa. Dan, sebenarnya ketika kalah argumen itulah, sang guru telah berhasil. Artinya, telah berhasil membuat siswanya lebih pandai dari dirinya.

Apakah prinsip tersebut bersifat universal? Menurut saya, ya. Kalau siswa lebih pandai dari gurunya, berarti



Jika perilaku guru tidak baik, biasanya rasa hormat akan hilang.

Wibawa yang terbangun dari kepandaian dan kemampuan mengajar seakan terhapus oleh perilaku yang tercela.”

generasi muda lebih pandai dibanding generasi yang lebih tua. Bayangkan, jika murid lebih “bodoh” dibanding gurunya, berarti generasi muda lebih “bodoh” dibanding generasi sebelumnya. Berarti akan ada penurunan peradaban bangsa.

Bekal *ketiga*, masih meminjam metafora Gus Ipul, guru itu ibarat dokter. Dia harus tahu dosis obat yang tepat untuk seorang pasien yang menderita penyakit tertentu. Inilah sebenarnya saripati dari pedagogik. Yaitu, tahu bagaimana cara mengajar dan membimbing siswanya. Maksudnya cara mengajar dan membimbing yang sesuai dengan karakteristik siswa, materi yang sedang dipelajari dan situasi dan kondisi saat itu. Guru harus paham karakteristik siswa dan karakteristik bahan ajar. Dengan dua dasar tersebut dan dengan bekal ilmu pedagogik yang mumpuni, guru dapat menentukan bagaimana memandu siswa agar dapat belajar dengan optimal.

Bekal *keempat*, adalah kesediaan guru menjadi panutan

atau teladan. Perilaku keseharian guru harus dapat menjadi contoh bagi murid. Guru harus bersedia “mengendalikan diri” agar perilakunya layak menjadi teladan siswa. Apa itu penting? Sangat penting. Sudah ada pepatah lama “guru kecing berdiri, murid kecing berlari”. Artinya, jika ada perilaku guru yang kurang baik, akan ditiru murid dan bahkan lebih jelek lagi.

Tidak hanya itu. Jika perilaku guru tidak baik di mata murid dan masyarakat, biasanya rasa hormat yang terbangun oleh ketiga bekal di atas akan hilang. Wibawa yang terbangun dari kepandaian dan kemampuan mengajar seakan terhapus oleh perilaku yang tercela. Jika hal itu terjadi, ketaatan siswa terhadap arahan guru akan habis. Semoga kita memiliki empat bekal tadi dan pada saatnya dapat memberi inspirasi kepada murid-murid kita. ◆



2

Guru Sekolah Terpencil, Itu Pahlawan

Untuk memperingati hari Pahlawan, saya diminta memberi paparan tentang pahlawan dan kaitannya dengan mahasiswa, dalam forum yang diselenggarakan oleh UKKI Unesa. Paparan saya *sih* biasa-biasa saja. Yang menarik justru pertanyaan seorang mahasiswa. Kurang lebih begini: “Ibu saya berpesan agar setelah saya lulus nanti saya diminta pulang kembali untuk mengajar di desa saya yang terpencil, dan tidak usah menjadi guru PNS”. Mahasiswa itu meminta pendapat saya terhadap pesan ibunya.

Saya sengaja dengan hati-hati menjawab pertanyaan itu. Saya mulai dengan mengajak memaknai apa *sih* pahlawan itu? Menurut Wikipedia, pahlawan berasal dari bahasa

”

Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain itu identik dengan menjadi pahlawan dan itu merupakan ibadah kepada Sang Pencipta.”

Sansekerta (*phala* dan *wan*). *Phala* artinya buah. Pahlawan adalah orang yang perbuatannya menghasilkan “buah” yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi pahlawan kemerdekaan disebut pahlawan, karena jasanya (perbuatannya) memberikan manfaat besar orang banyak, yaitu kemerdekaan Indonesia.

Jika menggunakan pengertian tersebut, siapa saja dapat menjadi pahlawan. Tidak hanya pahlawan kemerdekaan. Orang-orang yang dengan kemauan sendiri menghijaukan pantai (menanam bakau) agar tidak terjadi abrasi dan banyak ikan di situ, juga dapat disebut pahlawan. Orang yang membangun masjid di suatu daerah yang belum ada masjid, agar orang lewat dapat shalat, juga layak disebut pahlawan. Seorang relawan kesehatan di masyarakat terpencil juga patut disebut pahlawan.

Tentu saja jika perbuatannya memberikan manfaat orang banyak. Tentu jika perbuatan itu dilakukan dengan ikhlas dan bukan mengharap balasan dari orang lain. Juga asalkan per-

buatan itu dilakukan secara konsisten dan bukan sekadar hangat-hangat tahi ayam.

Dengan pengertian tersebut, guru-guru di sekolah terpencil dapat disebut pahlawan. Asalkan disertai niat baik, dikerjakan dengan ikhlas dan bukan sekedar mencari batu lompatan untuk berpindah ke kota. Mengapa demikian? Ibaratnya, uang Rp. 10.000,- tidak ada artinya bagi orang kaya. Tetapi uang Rp. 10.000,- sangat berharga bagi orang miskin yang sedang kelaparan. Guru muda mungkin tidak begitu penting bagi sekolah di kota, tetapi sangat bermanfaat bagi sekolah di daerah terpencil.

Mengapa tidak perlu menjadi PNS? Saya berpikir positif. Jika menjadi PNS sangat mungkin pada saatnya ingin pindah ke kota untuk meningkatkan karier. Jika tidak menjadi PNS mungkin sejak awal ingin menetap di desa itu dan dengan demikian agar berusaha mengembangkan desa terpencil itu. Bahkan sangat mungkin akan mendirikan sekolah (bersama masyarakat) dan dapat memberi lapangan pekerjaan bagi orang lain. Jadi semakin kuat “nilai” pahlawannya.

Bagi yang beragama Islam, sebenarnya pengertian pahlawan dapat diacukan dengan Hadis yang menyebutkan “*sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain*”. Bukankah sangat dekat maknanya? Bukankah hadis itu mendorong semua orang menjadi pahlawan. Bukankah pahlawan sangat mulia di mata Sang Khaliq?

Apalagi jika diingat Al Qur'an secara jelas menyebutkan “...dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu...” Dengan demikian, menjadi orang yang memberi manfaat bagi orang lain itu identik dengan menjadi pahlawan dan itu merupakan ibadah

kepada Sang Pencipta.

Apakah untuk menjadi orang baik, menjadi pahlawan harus berbuat yang “besar”. Rasanya tidak seperti itu. “*Sesungguhnya Sang Pencipta tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya*”. Menyingkirkan paku di tengah jalan, yang mungkin dapat melukai pejalan kaki atau mengenai ban kendaraan orang, sangat mungkin menjadi wahana menjadi orang baik. Siapa tahu itu ujian bagi kita, apakah kita mau menolong orang atau tidak.

Dengan contoh sederhana tadi, semoga mendorong kita semua untuk berbuat baik, berbuat yang memberi manfaat bagi orang lain, sekecil apapun. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semoga itu dikategorikan ibadah kepada Tuhan. ◆



3

Pendidikan Guru di Era Digital, Seperti Apa?

Sejak selesai menjabat Rektor Unesa (2010-2014) saya ingin sekali kembali ke dunia akademik. Dunia yang sudah sekitar delapan tahun saya tinggalkan sejak menjadi Pembantu Rektor 4, menjadi Direktur Ketenagaan, dan terakhir menjadi Rektor. Jika sebelumnya saya sering terlibat dalam penelitian dan kegiatan akademik lainnya, saat menjabat di birokrasi waktu untuk itu hampir tidak ada. Paling banter hanya ikut seminar. Buku yang saya belipun seringkali tidak sempat terbaca tuntas.

Pada 30 Juni 2015, kerinduan itu mendapat pintu, karena saya mengikuti seleksi proposal penelitian IDB di Unesa. Saya lebih gembira karena *reviewer*-nya bukan dosen Unesa, tetapi satu orang dari Universitas Malang

”

Jika guru dan dosen harus mampu melaksanakan pembelajaran dengan model *problem based*, tentu memerlukan bekal yang berbeda dengan model yang sekarang ini berjalan.”

dan satu orang dari Universitas Jember. Jika *reviewer*-nya dari Unesa mungkin saling segan. *Reviewer* mungkin *sungkan* menguji saya, karena pernah menjadi rektor dan ikut mencarikan dana IDB. Saya juga *sungkan*, masak mantan rektor kok ikut kompetisi proposal yang diuji oleh orang Unesa sendiri.

Saya juga sangat gembira ketika gagasan yang saya ajukan mendapat respons positif, walaupun belum tentu diterima. Saya mengajukan proposal penelitian tentang Pengembangan Model Pendidikan Guru di Era Digital. Saya jelaskan bahwa saya pernah memberi kuliah dan ada mahasiswa yang sibuk membaca laptop. Ketika saya tanya apa yang sedang dibaca, mahasiswa tersebut menjawab sedang membaca topik yang saya jelaskan, tetapi dari sumber lain. Dia menjelaskan ada teori lain yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan.

Saya sangat senang dengan respons mahasiswa tersebut dan kemudian saya minta dia menjelaskan apa yang dia baca.

Sungguh mengagetkan, ternyata sudah membaca dua sumber ketika saya menjelaskan dalam kelas itu. Saya membayangkan kalau semua mahasiswa seperti dia, maka dosen tidak perlu panjang lebar menerangkan dengan lisan. Saya menduga era digital yang kini melanda generasi muda akan membuat mahasiswa yang berperilaku seperti mahasiswa tadi semakin banyak.

Nah, kalau sudah banyak mahasiswa yang seperti itu tentu pola perkuliahan model ceramah tidak cocok lagi. Jika ada dosen yang masih bertahan, dapat saja mahasiswa *nggerundel*, “Iha kalau itu sih saya bisa baca sendiri.” Atau malah berguman, “Iha itu sih teori kuno, nih yang lebih baru dapat dibaca di web ini.”

Sekarang juga sudah berkembang MOOC (*massive open online courses*), di mana bahan kuliah dapat diakses secara bebas di internet. Siapa saja dapat membaca bahan kuliah perguruan tinggi besar, seperti Harvard, MIT, dan sebagainya. Nah, kalau bahan kuliah dapat diperoleh dengan mudah, apa dosen masih perlu menerangkan secara detail? Apa tidak bisa, langsung memulai dengan *problem based*, yaitu memberikan masalah yang harus dipecahkan secara bersama?

Saya menduga pengalaman saya ketika memberi kuliah tadi juga dialami oleh teman-teman guru. Bukankah anak-anak sekarang, mulai dari siswa SD, sudah terbiasa dengan gawai (*gadget*)? Bukankah mereka justru lebih pandai dari kita, karena konon mereka itu “*native*” sementara kita ini “*imigran*” dalam dunia gawai. Jadi yang memerlukan perubahan pola tidak hanya perkuliahan, tetapi juga pembelajaran di sekolah.

Jika demikian, berarti kompetensi guru atau dosen juga harus dipikirkan kembali. Jika guru dan dosen harus

mampu melaksanakan pembelajaran dengan model *problem based*, tentu memerlukan bekal yang berbeda dengan model yang sekarang ini berjalan. Jika problem yang ingin dipecahkan adalah sesuatu yang kontekstual dengan lingkungan dan lintas disiplin, maka bekal dosen tentu juga harus seperti itu.

Lebih lanjut fokus pada guru, jika kita memerlukan perubahan kompetensi guru agar mampu mengasuh pembelajaran di era digital ini, tentu pola pendidikan guru juga harus berubah. Itulah yang saya ajukan untuk diteliti dan dikembangkan. Seperti apa modelnya? Saya sendiri belum tahu, karena masih akan diteliti selama dua tahun, yaitu tahun 2016 hingga 2017 dan *insyaAllah* bekerja sama dengan rekan di Bremen University Jerman. ♦



4

Bibit Calon Guru Semakin Bagus

Guru merupakan salah satu komponen sangat penting dalam pendidikan. Bahkan beberapa ahli mengatakan bahwa guru merupakan tiang penyangga utama pendidikan. Ada ahli lain yang mengatakan guru sebagai ujung tombak pendidikan. Pendapat itu dilandasi argumen bahwa guru adalah pelaksana utama proses pendidikan. Gurulah yang dalam kenyataannya melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Apapun kebijakan dan apapun fasilitas yang ada, pada akhirnya guru yang menggunakannya. Fasilitas yang sederhana tetapi ditangani guru yang kreatif terbukti lebih unggul dibanding peralatan yang lengkap tetapi ditangani oleh guru yang tidak kompeten.



Negara Finlandia, Belanda, Hong Kong, dan Jepang sukses meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memastikan adanya guru yang kompeten dan berkomitmen kerja tinggi.”

(Wang, Sahlberg)

Banyak penelitian yang mengukur seberapa kontribusi guru dalam menentukan mutu pendidikan. Kontribusi yang ditemukan berbagai macam, namun semuanya di atas 50% (Samani, 2013). Artinya 50% mutu pendidikan ditentukan oleh guru. Jika sekolah memiliki guru yang baik, maka separuh masalah mutu pendidikan di sekolah itu sudah terselesaikan. Oleh karena itu dapat dimengerti jika banyak menyebutkan guru sebagai kunci peningkatan mutu pendidikan.

Negara-negara maju seperti Finlandia, Belanda, Hong Kong, dan Jepang sukses meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memastikan adanya guru yang kompeten dan berkomitmen kerja tinggi (Wang, 2003; Sahlberg, 2011). Negara-negara itu dikenal memiliki guru yang kompeten dan berkinerja bagus, sehingga proses pembelajaran berjalan optimal dan pada ujung-ujung hasil belajar anak optimal pula. Konon di Finlandia hanya lulusan dengan rangking 1-10 yang boleh mendaftar ke sekolah guru. Hongkong dan Singapura

juga mulai meniru itu. Dalam derajat tertentu, China juga mengarah ke sana (Lianqing, 2003).

Berdasarkan fenomena seperti itulah, banyak orang mengatakan “kalau ingin pendidikan bagus, maka langkah pertama guru harus profesional”. Untuk mendapatkan guru yang profesional, maka mereka harus memiliki kompetensi yang bagus, berkinerja yang tinggi, dan mendapatkan penghasilan yang bagus. Keadaan seperti itulah yang terlihat pada guru di beberapa negara dengan pendidikan bagus.

Kondisi pendidikan di Indonesia yang belum berkembang baik sangat mungkin juga dipengaruhi oleh faktor guru. Sudah menjadi rahasia umum kalau kompetensi guru kita belum bagus. Hasil Uji Kompetensi Guru menunjukkan hanya guru-guru Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapatkan skor 50,1 sedangkan daerah lain di bawah 50 atau separuh dari kompetensi yang seharusnya dikuasai. Dengan kompetensi guru seperti itu dapat dimengerti kalau mutu pendidikan di Indonesia belum bagus.

Dilihat dari faktor usia, hasil Uji Kompetensi Guru menunjukkan semakin tinggi usia guru kompetensi justru semakin menurun. Kompetensi tertinggi dicapai oleh guru yang berusia 35-40 tahun, dan terus menurun setelah itu. Pada hal sekitar 54% guru kita berusia 41 tahun ke atas. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi sebagian besar guru kita memang belum baik. Apalagi itu masih ditambah dengan distribusi guru yang tidak merata antardaerah dan antarsekolah.

Mengapa mutu guru saat ini kurang baik? Bukankah di masa lalu kita memiliki guru-guru yang bagus? Belum ada studi yang memelajari pergeseran tersebut. Namun dari data dan informasi terbatas, pada masa penajahan dan

awal kemerdekaan, guru merupakan profesi bergengsi, sehingga banyak anak muda cerdas menjadi guru. Namun seiring dengan perjalanan waktu, gengsi tersebut perlahan menurun sampai saatnya yang masuk pendidikan guru (misalnya SPG dan IKIP/LPTK) adalah mereka yang biasanya tidak diterima di perguruan tinggi atau jurusan favorit. Dan mereka itulah saat mengabdikan diri di sekolah-sekolah di seluruh pelosok tanah air.

Namun semenjak ada sertifikasi dan tunjangan profesi, minat anak muda untuk menjadi guru naik signifikan. Sejak tahun 2011 pendaftar ke LPTK (prodi kependidikan) selalu menduduki peringkat 10 besar. Adanya tunjangan profesi guru tampak mendorong anak muda (dari keluarga menengah ke bawah) berkeinginan menjadi guru. Bibit bagus sudah mulai datang, sehingga pertanyaannya bagaimana bibit bagus tersebut diproses menjadi guru yang bagus dan dapat didistribusikan ke seluruh pelosok tanah air. ◆

*Tulisan ini dicuplik dari naskah
Grand Design Pendidikan Guru*

5

Jangan Selalu Menyalahkan Guru

Beberapa hari ini saya mendengar ungkapan yang menarik dari acara *Titik Nol* di Radio *Suara Surabaya*. Saya tidak ingat siapa yang menyampaikan, tetapi intinya narasumber itu menganalogkan nurani manusia sebagai kacamata. Jika kacamata kita kotor apa yang kita lihat menjadi buram. Jika nurani kita tidak bersih pandangan kita terhadap orang lain atau apapun yang kita saksikan menjadi tidak baik, bahkan kita dapat menilai Sang Maha Pencipta tidak adil. Sebaliknya jika katamata kita bersih dan jernih, apa yang kita lihat menjadi jelas dan terang. Oleh karena itu, kita jangan selalu membersihkan benda yang kita lihat, tetapi cobalah membersihkan katamata yang kita pakai. Artinya jangan selalu menyalahkan orang lain, tetapi menata nurani kita

agar pandangan kita menjadi positif.

Ungkapan tersebut menjadi sangat relevan karena dalam beberapa kesempatan saya mendengar beberapa kawan selalu memandang guru kita dengan pandangan negatif. Ketika pemerintah mengadakan uji kompetensi guru (UKG) dan hasilnya kurang baik, kita cenderung mengolok-olok guru. Ketika pemerintah mengadakan penilaian kinerja guru (PKG) dan konon tidak ada bedanya antara guru yang sudah bersertifikat dan mendapat tunjangan profesi dengan mereka yang belum mendapatkan, kita juga mengolok-olok guru. Bahkan mulai ada yang mengungkit UU nomer 14 Tahun 2005, yang mengatur adanya tunjangan profesi guru, dengan alasan toh walaupun sudah mendapat tunjangan profesi kinerjanya tidak meningkat.

Mari kita merenung dengan pikiran jernih seperti yang disampaikan dalam *Titik Nol* tersebut. Kalau kita cermati hasil uji kompetensi awal (UKA) yang tidak beda dengan UKG, tampak sekali semakin senior (semakin tambah usia) semakin rendah skor yang diperoleh guru. Seakan-akan semakin lama para guru bekerja justru semakin rendah kompetensinya. Apa sesederhana itu tafsirnya, sehingga kita memandang negatif kepada guru dengan mengatakan mereka tidak mau belajar?

Mari kita melihat dari kacamata yang berbeda. *Pertama*, pada akhir tahun 1970-an Pemerintah membangun SD Inpres sangat banyak dalam upaya memberikan layanan pendidikan di perdesaan. Karena jumlah SD Inpres sangat banyak, terjadilah kekurangan guru baru, sehingga pemerintah melakukan program pendidikan khusus, yang disebut SPG-C (SPG Khusus) dengan input lulusan SLTP saat itu, yaitu SMP, SMEP, ST, SKKP. Lamanya program 1 tahun dan begitu lulus langsung diangkat menjadi guru SD Inpres

di pelosok desa, sambil menempuh program Kursus Pendidikan Guru (KPG) selama dua tahun di sore hari. Ijazah KPG disetarakan dengan ijazah SPG.

Mereka itulah yang saat ini menjadi guru SD senior. Sayangnya saat itu pamor profesi guru tidak bagus, sehingga yang mendaftar ke SPG-C bukanlah lulusan SLTP yang baik. Kebanyakan yang mendaftar adalah yang ingin segera bekerja dan atau yang tidak diterima di SMA/SMK. Dengan demikian dapat kita bayangkan seperti apa kualitas guru SD senior lulusan SPG-C plus KPG. Apalagi mereka bertugas di SD di pedesaan yang relatif sulit untuk melakukan *updating* pengetahuan.

Kedua, ketika menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) cukup banyak guru SD yang mengatakan semenjak diangkat sekian tahun lamanya, baru pertama kali ikut pelatihan ketika dipanggil PLPG. Dapat dibayangkan, sudah lulusan SPG-C dan KPG, bertugas di pedesaan yang minim informasi dan belum pernah disentuh

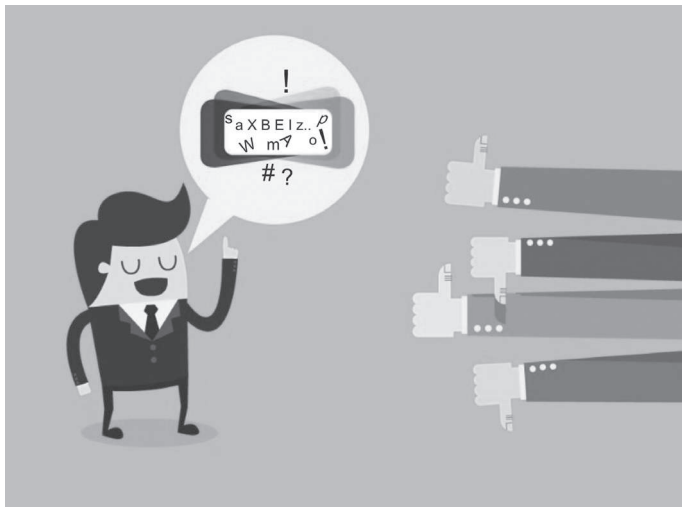
”

Saya pernah membaca sekilas soal UKG dan UKA yang sepertinya didasarkan pada kurikulum S1 saat ini. Guru senior SD lulusan SPG-C dan KPG diminta menjawab pertanyaan tentang teori konstruktivis. Apa itu valid?”

pelatihan.

Ketiga, ada teman yang mempertanyakan soal UKG dan UKA. Seberapa tinggi validitasnya? Saya pernah membaca sekilas soal UKG dan UKA yang sepertinya didasarkan pada kurikulum S1 saat ini. Jadi UKG untuk guru SD didasarkan pada kurikulum S1 PGSD, dengan asumsi guru harus menguasai materi dan metoda mengajar semua matapelajaran dan semua level kelas. Apakah itu valid? Saya membayangkan, guru senior di SD yang telah bertahun-tahun mengajar kelas 1 dan harus mengerjakan soal yang mungkin ada materi Matematika untuk kelas 6. Guru senior di SD, yang lulusan SPG-C dan KPG, diminta menjawab pertanyaan tentang teori konstruktivis.

Tulisan ini tidak bermaksud membela guru yang dianggap “malas mengembangkan diri”, padahal sudah mendapatkan tunjangan profesi. Tulisan ini semata-mata mengajak kita untuk melihat dengan kaca mata yang jernih, sehingga tidak selalu menyalahkan orang lain. Semoga. ♦



6

Masuk SD Tes Baca Tulis, Perluakah?

Saat liburan saya menyempatkan pulang kampung untuk mengunjungi orangtua dan keluarga. Kakak saya yang tinggal di kampung dengan bangga bercerita bahwa cucunya baru tes masuk SD dan diterima. Tesnya antara lain berupa membaca dan menulis serta membuka komputer. SD yang dimasuki adalah SD swasta favorit yang lokasinya di kota dan konon siswanya dari berbagai kecamatan.

Apakah tes masuk SD hanya terjadi pada satu SD itu saja? Ternyata tidak. Kata kakak saya dan saudara yang ikut ngobrol saat itu, ternyata hampir semua SD menerapkan tes masuk. Bahkan di SD negeri di kampung sayapun juga menerapkan tes masuk. Apa *sih* isi tesnya? Biasanya baca tulis. Jadi anak sudah harus bisa membaca dan menulis

”

Menulis dengan huruf-huruf merupakan sesuatu yang baku. Oleh karena itu belajar menulis bagi anak kecil (bukan mengarang) tidak banyak memberikan ruang untuk berimajinasi.”

saat akan masuk SD.

Saya sungguh risau dengan fenomena itu. Memang saya sudah lama mendengar adanya tes masuk SD. Ketika menjadi Kepala SD Alam Insan Mulia Surabaya (SAIMS) pada tahun 2000-2003 kami juga menggunakan tes masuk SD. Tetapi waktu itu tesnya tentang kematangan psikologis, artinya apakah anak memang secara psikologis sudah siap masuk SD. Maklum saat itu orangtua getol memasukkan anaknya ke SAIMS, bahkan saat anaknya belum genap usia 6 tahun.

Oleh karena itu ketika mendengar tes masuk SD adalah baca tulis, apalagi membuka komputer, saya sungguh kaget dan kemudian risau. Bukan risau anaknya lulus atau tidak lulus, toh masih ada SD lain yang mau menerimanya. Yang saya risaukan adalah dampaknya pada pendidikan di TK. Saya khawatir, adanya tes baca tulis tersebut kemudian mendorong TK memaksa anak-anak belajar membaca dan menulis.

Bahwa membaca itu penting,

tentu kita setuju. Bahwa menulis itu penting kita juga setuju. Pertanyaannya apakah anak TK sudah harus belajar membaca-menulis. Apakah itu merupakan syarat “kelulusan” TK dan kemudian diteskan saat masuk SD? Bukankah di usia TK, pembelajaran sebaiknya diarahkan untuk pengembangan diri, bersosialisasi, dan menumbuhkan kreativitas? Untuk anak TK seharusnya justru lebih penting didorong mengenal dirinya, lingkungannya, mengembangkan cita-cita dan sebagainya. Intinya mengembangkan kecakapan hidup yang sesuai dengan usianya.

Mengenal orang-orang besar, orang-orang sukses, orang-orang baik, sangat penting bagi anak-anak usia TK, sebagai awal mengembangkan cita-cita. Biasanya dengan mengenal orang-orang “besar” tersebut, anak mulai mencari identifikasi diri untuk membangun cita-cita. Cita-cita seperti itu, walaupun sangat mungkin pada saatnya berubah, tetap sangat penting. Apalagi jika kemudian anak-anak mulai belajar (sesuai dengan usianya) bagaimana perjalanan hidup tokoh yang diidamkan.

Perlu dipahami bahwa menulis dengan huruf-huruf merupakan sesuatu yang baku. Oleh karena itu belajar menulis bagi anak kecil (bukan mengarang) tidak banyak memberikan ruang untuk berimajinasi. Lain dengan menggambar (yang betul caranya), anak berkesempatan menuangkan apa yang ada di pikirannya. Bahkan mendorong anak untuk berimajinasi. Saya khawatir, orang berpandangan belajar menulis analog dengan belajar mengarang. Mengarang memang merupakan wahana mengembangkan imajinasi, tetapi belajar menulis (melukis huruf yang memiliki standar baku) tidak sama. Sekali lagi belajar menulis dalam pengertian melukis huruf dengan standar-standar baku justru tidak sejalan dengan mengarang. Yang sejalan

7

Membangun Karakter Lewat Inkulturasi

Dalam berbagai kesempatan bertemu dengan guru maupun orangtua/wali murid, saya suka bertanya: “Kalau bapak/ibu memasuki sebuah perpustakaan dan kebetulan pengunjungnya sedang membaca dengan tenang, sementara bapak/ibu memakai sepatu kulit dan berbunyi tok-tok, apa yang sebaiknya dilakukan?”. Umumnya mereka menjawab: “Ya berjalan pelan-pelan agar sepatu tidak berbunyi.”

Biasanya saya melanjutkan bertanya: “Kalau ibu ke Tunjungan Plaza (sebuah plaza besar di Surabaya) dan makan permen, ke mana bungkusnya dibuang?”. Biasanya ibu-ibu menjawab: “Ke tempat sampah”. Saya kejar dengan pertanyaan: “Kalau belum menemukan tempat sampah?”. Mereka umumnya menjawab: “Dimasukkan tas dulu”.

”

Perilaku hasil pembiasaan harus ditumpangi dengan penanaman nilai-nilai, sehingga anak paham mengapa itu harus dilakukan.”

“Betul, jujur lho ya”, begitu biasanya saya berkelakar.

Kita semua tahu, kalau masyarakat Indonesia senang dan terbiasa mencegat taksi di sembarang tempat dan juga turun dari taksi sesuai yang diinginkan. Anehnya, ketika mereka ke Singapura kok bisa tertib ya? Mencegat taksi di halte yang tersedia dan turun juga di tempat yang diizinkan. Kalau contoh itu saya ajukan ke berapa teman yang sering ke Negeri Singa, jawaban yang sering muncul: “Ya menyesuaikan diri, karena di sana tidak mungkin naik dan turun taksi di sembarang tempat. Sopir tidak akan mau dan kita akan diterawakan orang jika memaksa.”

Apa yang dapat dipetik dari tiga contoh di atas? Orang punya naluri atau punya fitrah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Kita semua pasti merasakan hal itu. Kita akan berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Kalau sedang bertakziah di tempat orang meninggal, tentu kita akan berusaha untuk tenang dan tidak bergurau. Jika menghadiri pesta

perkawinan, kita akan berpakaian yang sesuai.

Ada anak Indonesia selama SMP tinggal di Singapura dan setiap hari naik bus untuk ke sekolah. Bagaimana kira-kira kebiasaan dia naik bus? Saya menduga, dia akan terbiasa naik bus di halte dan juga turun di halte. Bagaimana jika anak Indonesia bersekolah SMA selama tiga tahun di Jepang? Apakah dia akan selalu tepat waktu saat datang? Apakah dia akan selalu membuang sampah di tempatnya? Silahkan menebak. Kalau saya meyakini, anak Indonesia itu akan mengikuti pola hidup Jepang, datang ke sekolah tepat waktu dan membuang sampah di tempatnya.

Bagaimana jika mereka pulang ke Indonesia? Apakah tetap membuang sampah di tempatnya? Apakah tetap datang ke sekolah tepat waktu? Apakah *menyegat* bus atau angkutan umum di tempatnya? Nah itu yang sulit menjawab. Namun contoh berikut mungkin menjadi panduan untuk menjawab.

Seorang dosen muda sedang kuliah di Australia. Seperti pemuda pada umumnya, seperti itulah kebiasaan dia naik motor di Surabaya. Setelah sekitar empat tahun tinggal di negara kanguru, sepertinya berubah perilaku dia dalam berlalu lintas. Suatu saat saya bertanya, mengapa begitu. Jawabannya: “Kalau semua teratur lalu lintas jadi lancar. Kalau ada orang parkir se-enaknya *kan* mengganggu lalu lintas.”

Saya juga pernah mengamati anak seorang teman yang lama tinggal di Jepang. Ketika orangtuanya selesai sekolah dan pulang, anak tersebut berusia kira-kira delapan tahun dan kelas 2 SD. Anak tersebut tertib sekali dan berbagai hal. Kalau pagi saat berangkat sekolah, selalu tepat waktu. Aktif dan tertib dalam tugas-tugas di kelasnya.

Tampaknya kebiasaan di negara maju membekas kepada

anak-anak Indonesia yang cukup lama tinggal di sana. Setelah mereka merasakan “nyamannya” mengikuti aturan itu, mereka ingin menerapkan ketika pulang ke Indonesia. Itulah yang dalam teori pendidikan karakter disebut dengan habituasi (pembiasaan). Karakter dapat dibentuk melalui pembiasaan.

Saya membayangkan SD, SMP, SMA di Indonesia keadaannya bersih, tertib, guru dan karyawan santun, segala acara dilaksanakan tepat waktu. Jika hal itu terjadi, siswa yang baru masuk akan berusaha menyesuaikan diri. Dan karena selama enam tahun di SD, tiga tahun di SMP dan tiga tahun di SMA, pada siswa akan terbentuk kebiasaan bersih, santun, disiplin, tepat waktu, dan sebagainya. Seperti itulah terbentuknya karakter anak-anak Jepang maupun anak-anak Belanda.

Apa itu cukup? Menurut teori pendidikan karakter belum. Perilaku hasil pembiasaan harus “ditumpangi” dengan penanaman nilai-nilai, sehingga anak paham mengapa itu harus dilakukan. Mengapa harus menjaga kebersihan? Mengapa harus tepat waktu? Mengapa harus santun? Mengapa harus tolong-menolong? dan sebagainya. Jika nilai-nilai itu terinternalisasi, maka kebiasaan tadi akan berubah menjadi budaya. Itulah yang disebut inkulturasi (pembudayaan), yaitu habituasi (pembiasaan) yang dibarengi dengan penanaman nilai-nilai. Tentu cara penanaman nilai-nilai disesuaikan dengan usia anak dan juga budaya setempat. Semoga. ◆

8

Kurikulum Penting Tetapi...

Saya diundang Universitas Terbuka (UT) UPBJJ Surabaya untuk mengisi seminar bersama calon wisudawan. Tampaknya UT UPBJJ Surabaya ingin membekali calon lulusannya. Topik pada acara 26 Februari 2013 itu adalah *Guru dan Dinamika Perubahan Kurikulum*. Lulusan yang akan diwisuda sekitar 2000 orang. Anggap saja 75% yang hadir, berarti seminar diikuti oleh 1500 orang. Ya ampun ini seminar atau kampanye?

Topik yang dipilih tampaknya disesuaikan dengan mayoritas lulusan dan isu yang sedang hangat. Dari sekitar 2000 lulusan, konon sekitar 1200 adalah guru SD dan sekitar 200 adalah guru PAUD. Yang nonkependidikan sangat kecil. Jadi mayoritas lulusan adalah guru. Saat ini perubahan kurikulum dengan menjadi topik yang “hot”. Berarti topik

seminar yang dipilih cocok dengan profesi peserta dan isu yang sedang hangat di masyarakat.

Berbekal pengalaman bergaul dengan teman-teman guru, saya menyiapkan materi yang ringan saja, tetapi semoga menginspirasi untuk maju. Saya tidak ingin berteori apa itu kurikulum dan berbagai implikasinya. Toh peserta banyak, sudah senior, dan tempatnya di sebuah gedung besar yang saya yakin *sound system*-nya tidak akan cocok untuk seminar.

Nah, diawal presentasi saya meminta yang merasa guru SD dan PAUD mengangkat tangan. Dugaan saya benar, sebagian besar peserta angkat tangan. Setelah itu, saya meminta guru SD dan guru PAUD yang pernah membaca kurikulum angkat tangan. Kali ini, peserta saling berpandangan dan sepertinya berbisik-bisik. Saya ulangi lagi, “Tolong jujur dan tidak takut, guru SD dan guru PAUD yang sudah pernah membaca kurikulum angkat tangan.” Yang angkat tangan tidak lebih dari 20 orang.

Selanjutnya, saya menunjuk beberapa guru yang angkat tangan dan bertanya: “Buku ke berapa dari Kurikulum yang dibaca?” Mereka bingung dan bertanya apa maksud saya. Saya jawab: “OK, bagian apa dari kurikulum yang ibu baca?” Tiga orang yang saya tunjuk, semua menjawab bagian Silabus.

Jawaban tersebut memberikan informasi bahwa sebenarnya tidak banyak guru yang membaca kurikulum secara lengkap. Yang biasanya membaca adalah kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dan yang dibaca biasanya adalah Standar Isi atau dengan kata lain, silabus yang harus diajarkan oleh guru.

Jika bapak/ibu tidak membaca kurikulum lantas pedoman untuk mengajar? Hampir semua menjawab: “Buku

paket!” Kalau begitu, buku paketlah yang sebenarnya memandu guru dalam mengajar. Oleh karena itu saya gem-bira ketika mendengar informasi pelaksanaan Kurikulum 2013 akan disertai dengan buku guru dan buku paket yang disediakan oleh pemerintah dengan gratis. Dengan begitu semestinya dijamin bahwa buku guru dan buku paket sejalan dengan kurikulum. Dengan gratis, berarti setiap guru dan setiap siswa memiliki buku pegangan.

Namun demikian, perlu dicatat dua hal. *Pertama*, buku panduan guru tidak boleh kaku dan mengungkung kreativitas guru. Setiap kelas itu unik. Tidak ada kelas yang benar-benar identik, baik siswa, maupun situasinya. Bahkan situasi kelas pada hari ini berbeda dengan besuk. Oleh karena itu cara mengajar yang sukses di “Kelas A” belum tentu cocok diterapkan di “Kelas B”. Bahkan yang cocok di “Kelas A” pada pagi hari mungkin kurang tetap untuk siang hari saat siswa capai dan mengantuk.

Gurulah yang harus menyesuaikan implementasi panduan tersebut dengan situasi dan kondisi kelas di saat mengajar, disesuaikan dengan kemampuan awal siswa, disesuaikan dengan karakteristik psikologis siswa, disesuaikan dengan situasi kelas dan sebagainya. Itulah makna guru sebagai profesional yang memiliki otoritas dan kemampuan untuk mengambil keputusan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Kedua, buku paket atau buku siswa harus disesuaikan dengan latar belakang geografis dan sosial budaya siswa. Siswa di pedalaman Papua akan sulit memahami kereta api, karena belum pernah melihat. Anak yang tinggal di pegunungan akan sulit memahami contoh gelombang laut dan sebagainya. Jadi buku siswa harus sesuai dengan konteks sosial budaya siswa.

”

Kurikulum penting, tetapi guru jauh lebih penting. Kurikulum yang bagus ditangani oleh guru yang tidak bagus, hasilnya tidak akan bagus.

Guru itu beyond system. Artinya pentingnya guru melebihi pentingnya sistem.”

Nah, tentu tidak mudah membuat buku siswa yang dapat benar-benar cocok dengan konteks kehidupan setiap siswa, yang sangat beragam. Sekali lagi tugas guru yang harus mengatur agar pembelajaran dan contoh-contoh kasus yang digunakan sesuai dengan konteks setempat siswa. Itulah yang sebenarnya disebut pembelajaran kontekstual. Dan itulah sebenarnya salah satu inti KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), yaitu pelaksanaan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi sekolah (satuan pendidikan). Dan lagi-lagi guru yang menjadi tumpuannya.

Gambaran di atas menunjukkan betapa peran penting guru. Kurikulum penting tetapi guru jauh lebih penting. Kurikulum yang bagus ditangani oleh guru yang tidak bagus, hasilnya tidak akan bagus. Kurikulum yang kurang bagus, kalau gurunya bagus akan dapat berinovasi sehingga hasilnya bagus. Oleh karena itu beberapa pakar menyebut “guru itu *beyond system*”. Artinya pentingnya guru melebihi pentingnya sistem.



Masih ada satu aspek lagi yang seringkali mengalahkan peran kurikulum dalam pendidikan. Apa itu? Soal-soal ujian atau ulangan. Di manapun guru selalu ingin siswanya dapat lulus ujian dengan nilai bagus. Akibatnya guru akan mengajarkan hal-hal yang diyakini akan keluar dalam ujian atau ulangan. Itulah yang disebut “*teaching for the test*”. Oleh karena itu bagaimana kita memiliki soal-soal yang bagus untuk ulangan harian, ulangan umum dan ujian sekolah dan ujian nasional menjadi sangat penting.

Sayang sekali soal-soal UN dan UABN yang selama ini beredar mutunya masih kurang bagus dan cenderung menguji kemampuan berpikir level bawah. Kalau menggunakan taksonomi Bloom, tidak banyak yang menggunakan C4 ke atas. Akibatnya guru juga mengarahkan pembelajaran ke kognitif tingkat rendah. Semoga Kurikulum 2013 dapat mengubah pola soal ulangan maupun ujian, sehingga mampu mendorong guru menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan karakter dan sebagainya. Semoga. ◆



9

Siswa Kita Jeblok di Pisa, Mengapa?

Kualitas pendidikan suatu negara dapat diukur dengan berbagai cara. Salah satu cara praktis yang dapat dipakai adalah dengan membandingkan mutu pendidikan suatu negara dengan negara-negara lain di dunia. Dengan cara tersebut akan dapat diketahui posisi dan seberapa jauh tingkat pendidikan kita di hadapan jajaran bangsa-bangsa lain.

Ada banyak hasil riset dan studi internasional yang layak dijadikan acuan atau perbandingan. Umpamanya riset dari *Program for International Student Assessment (PISA)*, *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)*, maupun *Progress in International Reading Literacy Studies (PIRLS)*.

Studi PISA memfokuskan studi pada aspek literasi bacaan/bahasa, matematika, dan IPA dicapai peserta didik usia 15 tahun. PISA dilaksanakan tiap tiga tahun sekali dan diikuti semua negara OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dan negara lain yang berminat. Bagaimana posisi siswa Indonesia?

Ternyata hasil PISA tahun 2012 menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Siswa kita menduduki peringkat ke 64 dari 65 negara yang ikut diuji. Jadi, posisinya satu tingkat di atas Peru sebagai juru kunci. Sementara negara-negara Asia Timur berjaya. Shanghai menduduki peringkat pertama, disusul berturut-turut Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Korea Selatan.

Sebenarnya hasil itu tidak terlalu mengagetkan, karena selama ini memang Indonesia selalu berada di peringkat bawah dalam PISA. Tahun 2009, posisi Indonesia pada peringkat 57 dengan skor Membaca 402, Matematika 371 dan IPA 383. Tahun 2012 skor tersebut menjadi, Membaca 396, Matematika 375, dan IPA 382. Jadi perubahannya hanya sedikit.

Pertanyaannya, mengapa skor PISA anak-anak kita sangat rendah? Bukankah anak-anak SMP kita (usia yang ikut PISA) sukses dalam ujian nasional (UN). Nilainya juga sangat bagus. Apakah materi UN berbeda dengan PISA? Apakah kurikulum Indonesia sangat berbeda dengan kurikulum Shanghai, Singapura, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan.

Sebelum membahas itu, ada baiknya diketahui hasil analisis terhadap UN. Tahun 2012, Unesa mengkaji hasil UN SMA tahun 2009, 2010, dan 2011. Simpulannya sangat menarik. Sebagian besar peserta *jeblok* pada soal-soal yang termasuk dalam kategori analisis. Termasuk untuk

matapelajaran Bahasa Indonesia. Hasil itu sejalan dengan kajian terhadap tes masuk PTN yang menyimpulkan bahwa sebagian peserta jatuh pada soal IPA Terpadu, yang memang memerlukan kemampuan analisis cukup tinggi.

Lalu apa hubungannya dengan tes PISA? Jelas ada hubungannya. PISA membagi kemampuan siswa menjadi enam level:

Level 1 : mengingat kembali apa yang sudah diajarkan.

Level 2 : menjelaskan yang telah dipelajari dengan bahasa sendiri.

Level 3 : menerapkan yang telah dipelajari untuk pemecahan masalah.

Level 4 : mampu mengurai permasalahan untuk diselesaikan dengan metode yang telah dipelajari.

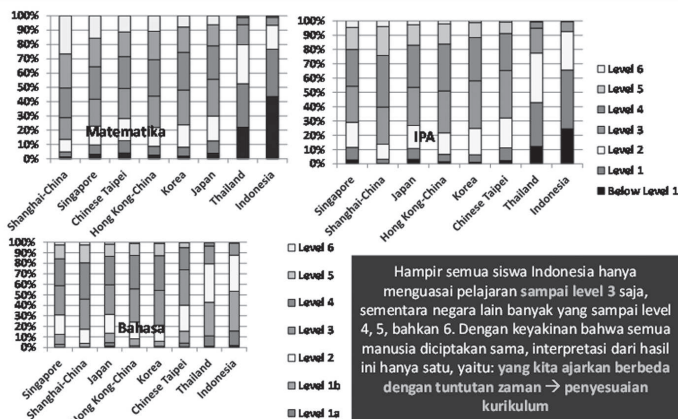
Level 5 : mampu menentukan kesesuaian dan keunggulan metode tertentu dalam menyelesaikan permasalahan.

Level 6 : mampu berpikir abstrak dan merancang metode baru.

Level 1 sampai 3 disebut dengan kemampuan berpikir tingkat rendah (*low order thinking*), sedangkan level 4 sampai 6 disebut dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking*) yang mencakup kemampuan analisis, sintesis, evaluasi, dan kreativitas. Jadi, PISA tidak hanya menguji kemampuan berpikir tingkat rendah tetapi juga berpikir tingkat tinggi. Data terhadap hasil PISA, UN maupun tes masuk PTN, konsisten menunjukkan kalau kemampuan berpikir tingkat tinggi anak-anak kita lemah.

Bila kita mencermati hasil PISA (tahun 2009), ditemukan bukti bahwa dari 6 level kemampuan yang diuji, hampir semua siswa Indonesia hanya mampu menguasai pelajaran

Refleksi dari Hasil PISA 2009



Hampir semua siswa Indonesia hanya menguasai pelajaran sampai level 3 saja, sementara negara lain banyak yang sampai level 4, 5, bahkan 6. Dengan keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sama, interpretasi dari hasil ini hanya satu, yaitu: yang kita ajarkan berbeda dengan tuntutan zaman → penyesuaian kurikulum

Oleh
Muchlis Samani

202

SEMUA 'DIHANDLE' GOOGLE,
TUGAS SEKOLAH APA?

sampai level 3 saja. Sementara negara lain yang terlibat di dalam studi ini banyak yang mencapai level 4, 5, dan 6 (lihat gambar). Dengan keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sama, interpretasi yang dapat disimpulkan dari hasil studi ini adalah pelajaran yang kita ajarkan berbeda dengan tuntutan zaman. Lihat Gambar.

Lantas mengapa siswa kita sukses menempuh UN? Itu antara lain karena sebagian besar soal-soal UN berkisar pada *low order thinking* yaitu menghafal, memahami, dan menerapkan. Hanya sebagian kecil yang masuk level berpikir tingkat tinggi. Kajian terhadap UN SMA 2009, 2010, dan 2011 tampak sekali mereka sukses pada soal-soal *low order thinking* tetapi gagal di *high order thinking*.

Pertanyaan yang menarik berikutnya adalah mengapa PISA fokus kepada *high order thinking* sementara UN pada *low order thinking*? Tentu hanya perancang PISA dan perancang UN yang dapat menjawabnya. Namun dapat diduga bahwa perancang PISA menerapkan prinsip pendidikan era teknologi. Di era teknologi yang diperlukan

adalah kemampuan *problem solving* secara kreatif dan untuk itu diperlukan kemampuan berpikir analisis, kritis, dan kreatif.

Sementara kita tampaknya masih terperangkap pada pola pikir mekanistik. Padahal pola kerja mekanistik, walaupun rumit, akan dapat dikerjakan oleh mesin, sehingga pola itu tidak lagi penting. Lihatlah, soal-soal kita seringkali berupa perhitungan yang rumit dan memerlukan ketelitian tinggi. Namun itu sebenarnya pekerjaan mekanistik yang dapat diserahkan kepada komputer. Sementara soal-soal yang bersifat analisis kreatif belum mendapat perhatian yang cukup.

Apakah *high order thinking* dapat diajarkan pada siswa setingkat SMP? Pertanyaan itu juga pernah mengganggu saya beberapa tahun lalu. Bukankah menurut Piaget kemampuan berpikir abstrak baru dimulai ketika anak berusia 13 tahun bahkan 15 tahun? Ternyata bisa. Saat berkunjung ke sekolah-sekolah di Amerika Serikat dan Belanda saya menyaksikan bahwa siswa



Data terhadap hasil tes PISA, UN maupun tes masuk PTN, konsisten menunjukkan kalau kemampuan berpikir tingkat tinggi anak-anak kita lemah.”

SD dapat diajari berpikir tingkat tinggi. Kepada anak SD Kelas 1 ditunjukkan gitar dan biola. Kepada mereka ditanyakan apa persamaan dan perbedaannya.

Memang sederhana, tetapi anak-anak belajar berpikir analisis dan kritis. Misalnya persamaan biola dan gitar adalah sama-sama punya senar, sama-sama mengeluarkan suara. Bedanya jumlah senar gitar berbeda dengan jumlah senar biola. Gitar lebih besar dibanding biola. Dan sebagainya.

Kepada siswa Kelas 4 SD di sana dibagikan bacaan cerita dan selembur kertas yang memiliki dua kolom. Kolom kiri bertuliskan “Saya tidak paham, karena....”, sedangkan kolom kanan bertuliskan “Saya tidak setuju, karena...”. Siswa diminta membaca cerita dan menuliskan bagian mana yang tidak paham dan menyebutkan alasannya. Siswa juga diminta menyebutkan bagian yang tidak setuju dan menyebutkan alasannya. Sungguh mengagetkan, ternyata anak Kelas 4 dapat mengerjakan dengan baik. Tentu isi cerita sesuai dengan usia anak SD Kelas 4. Jadi kepada siswa SD dapat diajarkan kemampuan *high order thinking*.

Semoga Kurikulum 2013 memberi penekanan pengembangan *high order thinking*, karena itulah kemampuan yang diperlukan di masa depan. Semoga Kurikulum 2013 dapat mengentas kita dari perangkap paradigma bahwa *high order thinking* baru dapat diajarkan di SMA. Semoga UN untuk Kurikulum 2013 memberi porsi cukup untuk berpikir level tinggi, sehingga hasilnya paralel dengan PISA yang telah menjadi acuan internasional. Dengan begitu peringkat kita pada PISA tidak lagi berada pada nomor buncit. ◆

10

Merisaukan Perilaku Anak-Anak

Suatu siang, Prof. Suhartono Taat Putra seorang dosen FK Universitas Airlangga menelepon saya. Banyak yang dibicarakan, antara lain menyampaikan kerisauannya tentang perilaku orang sekarang yang mencari benarnya sendiri. Saya bisa memahami karena beliau seorang dosen senior di Fakultas Kedokteran Unair dan sedang merintis psikoneuro imunologi, yang sangat peduli dengan lingkungan sekitar. Ujung-ujungnya mengajak bertemu untuk diskusi apa yang dapat dilakukan bersama-sama.

Saya bukan sosiolog dan bukan ahli politik. Bukan pula dukun sakti yang pintar menerawang kejadian masa lampau. Sebagai guru tahunya hanya pendidikan sehingga melihat gejala itu juga dari sudut pandang pendidikan saja.

”

Di negara maju seperti Inggris maupun Belanda ada UU yang melarang anak kecil tinggal sendirian di rumah. Di sana tidak lazim punya pembantu, jika punya anak kecil, pilihannya salah satu orangtua (ayah atau ibu) yang tinggal di rumah atau membawa anaknya ke *day care* (*child care*) ketika ditinggal bekerja.”

Saya sampaikan, bahwa semua yang ada sekarang ini sangat mungkin merupakan buah dari pendidikan kita pada 20-30 tahun lalu.

Memang sedang terjadi masa transisi di pola kehidupan kekeluargaan kita. Dahulu, banyak ibu yang tidak bekerja di luar rumah. Kalau toh bekerja, waktunya tidak terlalu ketat sehingga punya waktu cukup untuk membimbing anak-anaknya ketika masih kecil.

Ini bukan masalah gender, tetapi secara psikologis hubungan anak yang masih kecil itu akan selalu lebih dekat dengan ibu dibanding dengan orang lain, termasuk bapaknya. Itulah sebabnya sering dikatakan ibu itu pendidik pertama dan pendidik utama bagi anaknya. Jadi di waktu lalu banyak ibu yang dapat melaksanakan fungsi sebagai pendidik dengan maksimal.

Sekarang sebagian besar ibu bekerja di luar rumah dan berangkat pagi-pagi, pulang sudah sore. Beberapa teman saya yang menjadi guru, sekarang juga berangkat pagi-pagi dan pulang

sudah sore. Biasanya anak diasuh oleh pembantu atau siapa yang ada di rumah. Biasanya distelkan TV agar tidak rewel. Jadi yang dilihat sehari-hari ya tingkah laku bintang sinetron dan para selebritis itu.

Sangat ingat ungkapan Pak Boediono, mantan Ka Balitbang Dikbud, “lakukan berulang-ulang, nanti akan menjadi sebuah kebenaran.” Maksudnya jika sesuatu ungkapan atau tindakan diucapkan atau dilakukan berulang-ulang, maka lama-lama akan dipahami orang sebagai suatu kebenaran. Paling tidak, sebagai sesuatu yang dianggap wajar.

Setiap hari saya melihat banyak mobil parkir di sepanjang jalan Margorejo Indah Surabaya, bahkan banyak mobil yang digunakan untuk berjualan buah dan makanan disitu. Padahal, jelas-jelas di sepanjang jalan itu ada tanda dilarang parkir. Namun karena setiap hari keadaannya seperti itu, orang-orang, termasuk saya, akhirnya menganggap mobil-mobil itu tidak salah. Saya juga merasa tidak salah ketika parkir di situ. Jadi, kita tidak boleh heran ketika anak-anak kita banyak yang meniru perilaku selebritis di TV, karena setiap hari mereka melihatnya di TV.

Di negara maju seperti Inggris, Belanda atau lainnya, ada undang-undang yang melarang anak sampai umur tertentu (ingat saya sampai 12 tahun) tinggal sendirian di rumah. Di sana tidak lazim punya pembantu, sehingga jika suatu keluarga punya anak kecil, pilihannya salah satu orangtua (ayah atau ibu) yang tinggal di rumah atau membawa anaknya ke *day care* (*child care*) ketika ditinggal bekerja. Jadi anak sampai usia 12 tahun selalu diasuh oleh orang yang “paham” bagaimana mengasuh anak kecil.

Di sana, TV juga taat memuat label “peringatan” untuk tayangannya, di pojok atas layar. Umpamanya, BO untuk tayangan yang jika anak melihat harus didampingi

orangtua dan AO jika itu khusus untuk orang dewasa. Anak-anak juga patuh terhadap peringatan itu, karena sudah dibiasakan sejak kecil. Jadi walaupun isi tayangan TV tidak karuhan, penonton sadar untuk memilih yang cocok buat dirinya.

Saya jadi ingat pendapat Pak Kadir Baradja dari Al Hikmah. Menjadi orangtua (ayah dan ibu) itu suatu keniscayaan, tetapi pendidikan kita tidak memberikan bekal tentang itu. Jadi orangtua baru itu memang tidak punya bekal apa-apa tentang bagaimana mendidik anaknya. Paling banter hanya sedikit cerita dari KUA sewaktu mendaftar akan menikah. Itupun kalau datang sendiri dan petugas KUA tidak terlalu sibuk.

Lantas apa yang dapat dilakukan? Mungkinkah memasukkan persiapan menjadi ayah/ibu dalam pendidikan kita? Mungkinkah pendidikan keayahbundaan atau *parenting* ke dalam kurikulum? Mungkinkah PAUD diperluas menjadi semacam *day care (child care)* di negara maju? Mungkinkah PAUD itu sebagai bagian wajib belajar yang biayanya ditanggung negara? Apa kita mau meniru Jepang dengan program “*mother back home*”? Sederet pertanyaan yang saya sendiri juga belum tahu jawabannya. ◆

11

Hitam Putih Tim Sukses UN

209

Tahun 2011 Unesa menjadi koordinator pengawas Ujian Nasional (UN). Sebagai Rektor otomatis saya menjadi penanggung jawab pengawasan UN tersebut. Akibatnya saya sering diundang di berbagai acara, misalnya pada acara *Ajang Wadul* di TVRI, Kompas TV, RRI, Radio Elshinta, dan Suara Surabaya, baik langsung maupun via telepon. Penanya dan pemberi komentar pada acara tersebut sangat beragam, mulai dari ibu-ibu rumah tangga, guru/pendidik dan para pegiat LSM. Tentu mereka itu orang-orang yang peduli pada pendidikan dan saran maupun komentarnya sangat bagus-bagus.

Komentar dan pertanyaan yang akhir-akhir ini sering muncul dan bahkan berulang-ulang adalah adanya Tim Sukses UN. Saya juga tahu adanya tim seperti itu. Saya

juga tahu bahwa tim itu di satu sisi bertujuan baik, yaitu mengupayakan agar siswa lulus dengan nilai bagus. Namun di lain pihak, kadang-kadang keinginan agar siswa lulus dengan nilai baik itu dilakukan dengan cara-cara yang kurang baik. Bahkan sering kali merugikan siswa itu sendiri. Tulisan singkat berikut ini dimaksudkan untuk memberi masukan kepada tim sukses itu.

Seperti halnya menghadapi pekerjaan penting lainnya, untuk menghadapi UN diperlukan persiapan yang baik yaitu belajar dengan baik, menjaga kesehatan agar bugar pada saat ujian, berdoa secara khusus untuk mendapatkan ridha Illahi, dan bekal percaya diri.

Percaya diri sangat penting karena akan membuat siswa melangkah ke ruang ujian dengan mantap. Ibarat dalam pertandingan sepakbola, pemain memasuki lapangan dengan mantap dan penuh percaya diri. Sebaliknya jika siswa tidak percaya diri akan ragu memasuki ruang ujian dan juga selalu ragu dalam mengerjakan soal, sehingga seakan-akan “kalah sebelum perang”. Keraguan dalam mengerjakan soal akan menghilangkan konsentrasi siswa.

Lantas apa hubungannya antara tim sukses dengan rasa percaya diri siswa? Jika tim sukses menyiapkan siswa belajar dengan baik, misalnya bersama *me-review* materi ujian dengan baik, membahas bagian yang belum dipahami oleh siswa, berlatih mengerjakan soal-soal yang lalu maupun soal-soal kreasi guru/pakar yang dikembangkan berdasar kisi-kisi ujian, mengajak siswa untuk beribadah dan berdoa secara khusus, akan membuat siswa percaya diri.

Siswa merasa telah menguasai materi ujian, baik konsep maupun latihan soal, yakin mendapat ridha Illahi karena telah beribadah dan berdoa dengan tulus, maka mereka akan dengan penuh keyakinan diri memasuki ruang ujian.

Sekali lagi rasa percaya diri seperti itu sangat penting untuk menghadapi ujian yang diselenggarakan serempak secara nasional itu.

Sebaliknya jika tim sukses justru sibuk mencari bocoran soal, memberi tahu siswa bahwa akan dicarikan bocoran soal, mengajari bagaimana cara menerima kode-kode contekan dan sebagainya, maka akan membuat siswa tidak percaya akan kemampuan sendiri. Siswa akan merasa menggantungkan dari bocoran soal maupun contekan dari orang lain.

Lebih jauh, siswa akan merasa tidak percaya akan bekal yang telah dimiliki walaupun telah belajar keras dan juga beribadah serta berdoa. Apalagi jika kemudian tim sukses menjanjikan akan dapat bocoran soal dan atau dapat memberi kode saat siswa mengerjakan soal ujian. Akibatnya sangat mungkin siswa tidak dapat mengerjakan soal UN bukan karena tidak menguasai materi ujian, tetapi lebih disebabkan oleh ketidakpercayaan diri, keragu-raguan dan ketergantungan pada janji bocoran soal maupun contekan dari orang lain. Jika hal itu terjadi, tim sukses sebenarnya berperan sebagai tim gagal, artinya tidak membuat anak berpotensi sukses tetapi malah berpotensi gagal.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk direnungkan oleh tim sukses adalah halal-haram-nya bocoran dan contekan serta dampak selanjutnya pada anak-anak. Bagi yang percaya halal-haram tentu sepakat bahwa soal bocoran dan contekan itu termasuk barang haram. Nah, jika siswa kita mencari dan atau mendapatkan bocoran dan atau contekan, bukankah hasil pengerjaan UN mengandung barang haram?

Jika nanti keluar hasilnya, bukankah dalam hasil UN terkandung barang haram? Jika nanti hasil UN masuk ke

STTB/ijazah bukankah dalam STTB/ijazah itu terkandung barang haram? Jika dengan STTB/ijazah anak kita bekerja, bukankah dalam perolehan kerja itu terkandung barang haram? Jika dari bekerja itu mendapatkan gaji, bukankah dalam gaji itu terkandung barang haram?

Jadi tim sukses UN itu berpotensi dapat sorga jika membantu siswa menyiapkan diri dengan baik dan caranya juga baik. Sebaliknya tim sukses UN juga berpotensi dapat neraka jika ternyata cara membantu siswa juga membuat anak gagal dan atau membuat hasil UN anak-anak mengandung barang haram.

Ini sebuah metafora. Ada seseorang yang meninggal, sebut saja namanya Fulan. Nah, di alam sana, si Fulan “diadili” dan ditanya mengapa makanan yang dimakan mengandung barang haram, karena pekerjaan diperoleh dengan ijazah yang mengandung barang haram. Fulan protes, karena itulah satu-satunya ijazah tertinggi yang dimiliki dan tentu itu yang digunakan untuk mendapatkan pekerjaan.

Fulan mencoba terus membantah. Namun, seluruh anggota badannya menjelaskan memang dulu saat UN mendapatkan bocoran dan contekan. Singkatnya Fulan tidak dapat mengelak dan diputuskan masuk neraka. Setengah frustrasi Fulan berkata: “Baik saya menerima putusan masuk neraka, tetapi tim sukses UN yang mengajari dan membantu saya mendapatkan bocoran dan contekan mohon juga dimasukkan neraka.” Semoga itu tidak terjadi kepada kita. ◆

12

Yang UN Siswa, yang Cemas Guru dan Orangtua

Akhir-akhir ini demam menghadapi Ujian Nasional (UN) tampak mewabah. Dalam dua minggu ini, saya sudah mengisi lima kali acara yang terkait dengan UN. Dua kali diundang saat acara doa bersama dan tiga kali diminta untuk memberi motivasi. Rasanya saya kok seperti menjadi “dukun” bagi mereka yang risau menghadapi UN.

Saat bertemu dengan para kepala sekolah untuk memberi motivasi, saya menayangkan foto siswa yang sedang mengerjakan UN, guru yang sedang mengajar dan orangtua siswa yang mengantar anaknya mendaftar sekolah. Saya tanyakan kepada mereka: “Siapa di antara tiga orang tersebut (siswa, guru, dan orangtua) yang paling

”

Kekhawatiran guru dan orangtua yang berlebihan, apalagi dipertontonkan secara mencolok kepada siswa, dapat menurunkan kepercayaan diri siswa. Juga berdampak negatif bagi siswa yang telah bekerja keras menyiapkan diri.”

takut dan khawatir menghadapi UN?” Hampir serempak mereka menjawab: “guru”. Ketika saya tanyakan, setelah guru siapa yang juga khawatir? Mereka menjawab: “orangtua.”

Mendengar jawaban itu saya lantas ingat keluhan Rektor ITS (Prof Triyogi Yuwono) yang salah satu putranya akan ikut UN SMA. Beliau sangat risau, karena putranya tidak begitu rajin belajar. Beliau bercerita, ketika ditegur putranya menjawab dengan ringan: “Kenapa sih, kok ribut amat, *wong UN gitu saja kok*”. Saya menduga peristiwa seperti itu, banyak terjadi pada keluarga lainnya. Orangtua begitu khawatir dan meminta putranya lebih rajin belajar. Sementara sang putra menganggap UN itu ringan dan belajar yang dilakukan selama ini sudah cukup.

Mengapa fenomena tersebut terjadi? Untuk memudahkan memahami, berikut ini analoginya. Saat melaju, sopir dengan tenangnya mengemudikan mobil. Namun sering kali justru penumpang yang khawatir? Ke-

napa? Karena sopir tahu pasti apa yang dilakukan dengan berbagai pertimbangannya. Sementara penumpang yang tidak paham mengapa itu terjadi, sehingga takut. Mirip itu, guru dan orangtua khawatir karena tidak paham apa yang telah dan akan dilakukan siswa untuk menghadapi UN. Sementara siswanya sendiri tenang-tenang, karena paham apa yang telah dilakukan untuk menghadapi UN.

Tentu ada siswa yang ceroboh dalam menghadapi UN. Siswa seperti itu tidak belajar dengan baik, tetapi tetap tenang-tenang saja. Mirip itu, juga ada sopir yang kurang terampil dan bahkan “ugal-ugalan”. Sopir seperti itu akan mengemudikan mobil seenaknya tanpa memperhatikan keselamatan penumpang. Namun, saya yakin jumlah siswa yang ceroboh dan sopir yang ugal-ugalan tersebut tidak terlalu banyak. Jadi guru dan orangtua yang khawatir, bukan hanya yang siswanya kurang persiapan. Guru dan orangtua yang anaknya rajin belajarpun ikut khawatir. Mirip penumpang bus, yang walaupun sopirnya ahli, sering kali tetap khawatir.


Saya dapat memahami kekhawatiran guru dan orangtua seperti digambarkan di atas. Namun sebaiknya tidak berlebihan, yang justru berpengaruh negatif terhadap psikologis siswa. Kekhawatiran yang berlebihan, kadang-kadang menjadi “ketidakpercayaan” guru terhadap siswa dan “ketidakpercayaan” orangtua kepada anaknya.

Untuk menghadapi UN atau ujian dalam bentuk apapun, diperlukan dua bekal pokok. *Pertama*, penguasaan materi UN. Belajar yang rajin dan latihan mengerjakan soal-soal adalah bagian dari memperkuat penguasaan materi UN. *Kedua*, kemantapan psikologis menghadapi UN. Dengan bekal kepercayaan diri yang kuat/mantap, siswa akan dapat mengerjakan UN dengan tenang. Sebaliknya, jika

kepercayaan diri tidak mantap sering kali siswa akan “grogi” dalam mengerjakan UN. Akibatnya siswa tidak dapat mengerjakan UN dengan baik.

Kekhawatiran guru dan orangtua yang berlebihan, apalagi kemudian dipertontonkan secara mencolok kepada siswa, dapat menurunkan kepercayaan diri si siswa. Jika itu terjadi, justru menimbulkan dampak negatif bagi siswa yang telah bekerja keras menyiapkan diri. Oleh karena itu, khawatir boleh tetapi jangan berlebihan. Seyogyanya guru dan orangtua tidak menampakkan kekhawatiran berlebih itu kepada siswa atau anaknya. Berilah dukungan psikologis, agar siswa/anak dapat melangkah dengan mantap memasuki ruang UN. Semoga. ♦





Bagian 5

KECAKAPAN HIDUP



1

Menulis Itu Menata Nalar

Beberapa hari yang lalu, sambil menyetir mobil, saya mendengarkan siaran radio *Suara Surabaya*. Waktu itu muncul ungkapan “menulis itu dapat menjadi media pengungkapan pikiran yang mungkin tidak mudah diungkapkan melalui lisan.” Saya setuju dengan ungkapan orang radio itu, karena saya juga sering melakukan. Biasanya ungkapan pikiran itu saya masukkan ke dalam blog di internet. Hal-hal yang kita sungkan menyampaikan secara lisan dapat dengan nyaman kita tuangkan dalam tulisan. Tentu tetap dengan menunjung tinggi etika penulisan.

Saya juga ingin menambahkan, pemikiran yang ditulis memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dibanding jika disampaikan secara lisan. Mengapa? Karena tulisan dapat

”

Budaya tulis dan baca berperan penting dalam penyebaran gagasan. Mengapa pemikiran orang Barat banyak memengaruhi kita, salah satunya karena pemikiran mereka banyak yang tertuang dalam bentuk teks tulis. Sementara pemikiran kita masih banyak yang tersimpan menjadi cerita lisan.”

dibaca banyak orang. Di era *cyber*, sekali tulisan masuk ke dunia maya, pembacanya menjadi tak terbatas. Apalagi sekarang beberapa mesin pencari (*searching engine*), seperti Google, menyediakan fasilitas terjemahan. Dengan demikian naskah yang ditulis dalam bahasa Indonesia dapat dengan mudah diperoleh terjemahannya dalam bahasa Inggris atau bahasa lain.

Oleh karena itu saya mendukung setiap gagasan untuk mengembangkan budaya literasi. Harus jujur diakui bahwa membaca dan menulis belum menjadi kebiasaan keseharian orang Indonesia. Konon budaya kita adalah budaya tutur. Pada saat naik kereta, menunggu kereta, dan menunggu antrean, biasanya kita memilih ngobrol dengan orang sebelah. Bahkan banyak orang yang memberi ceramah di atas mimbar tanpa menggunakan naskah. Sudah saatnya budaya tutur dilengkapi dengan budaya baca dan tulis. Pendidikan literasi merupakan wahana cocok untuk mengembangkannya.

Budaya tulis dan baca tampaknya juga memegang peran dalam penyebaran gagasan. Mengapa pemikiran orang Barat banyak memengaruhi kita, salah satunya karena pemikiran mereka banyak yang tertuang dalam bentuk teks tulis. Sementara pemikiran kita masih banyak yang tersimpan menjadi cerita lisan yang dituturkan secara turun-temurun dan hanya disampaikan secara “manual” tradisional.

Sebagai contoh, taksonomi Bloom yang banyak dikutip oleh ahli pendidikan di Indonesia, ditulis pada tahun 1956. Konsep itu sama tepat dengan yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara pada Kongres Taman Siswa Pertama pada tahun 1930. Jadi 26 tahun lebih dahulu dibanding tulisan Bloom. Jangan-jangan Bloom “meniru” Ki Hajar Dewantara. Atau mungkin karena, pemikiran Ki Hajar tidak ditulis dan disebarluaskan, seakan-akan konsep Bloom lebih diketahui oleh pendidik di Indonesia.

Prof. Mohammad Nuh dengan bagus mengibaratkan, menulis itu seperti membuka kran air. Begitu kran dibuka maka air akan mengalir memenuhi kebutuhan kehidupan, terus mengalir sebagai asupan yang menyuburkan intelektual dan mempertajam mata hati.

Menurut mantan Mendikbud ini menulis tidak lain adalah upaya untuk menampilkan pengetahuan yang tak terucap (*tacit knowledge*), yang tersimpan dalam benak, pikiran, dan pengalaman seseorang, menjadi pengetahuan yang eksplisit (*codified knowledge*), sehingga dapat diketahui orang lain dan bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran.

Sekian tahun lalu saya mendapat tugas untuk membaca naskah beberapa teman dosen di Unesa. Karena sifatnya rahasia, maka halaman yang berisi nama penulis dihilangkan. Saya berkelakar, walaupun tanpa nama saya dapat

mengenali tulisan siapa yang saya baca. Beberapa teman juga menyampaikan hal serupa. Artinya, kita dapat mengenali seseorang yang sering kita baca tulisannya.

Saya ingat betul, ada senior di Unesa yang tulisannya sangat runtut. Kalimatnya pendek-pendek dan sangat cermat menggunakan titik koma. Ada senior lain yang kalau membuat naskah, kalimatnya panjang-panjang. Kadang-kadang satu kalimat terdiri dari 10 baris ketikan. Ada teman yang tulisannya sangat mudah dimengerti. Ada juga teman yang tulisannya sangat sulit dipahami. Sering menghadirkan kata majemuk bertingkat, kalimatnya beranak cucu, tetapi tidak jelas mana subjek dan predikatnya. Kadang malah kalimat aktif bercampur pasif dalam satu kalimat. Tampaknya setiap orang memiliki pola tulisan yang khas.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa tulisan menggambarkan pola pikir penulisnya. Pengalaman saya membimbing mahasiswa dalam menyusun skripsi, tesis, dan disertasi mendukung pendapat tersebut. Biasanya mahasiswa yang nalarnya tertata, tulisannya juga runtut. Sementara mahasiswa yang masih rancu nalarnya, tulisannya juga susah dimengerti. Mahasiswa jenis kedua ini memerlukan waktu untuk menata nalar. Latihan menulis yang runtut secara intensif tampaknya membantu yang bersangkutan dalam menata nalar berpikirnya.

Itulah alasan kedua saya mendukung ide pendidikan literasi. Dengan belajar menulis diharapkan kita dapat mengasah nalar agar menjadi lebih runtut dan logis. Dengan belajar menulis kita menghidupkan budaya baca-tulis. Dengan belajar menulis kita dapat menuangkan gagasan yang dapat dibaca banyak orang. Semoga. ♦

2

Mengapa Kemampuan Menulis Mahasiswa Kita Sangat Rendah?

Sebagai guru besar, saya memiliki kewajiban membimbing mahasiswa S1/S2/S3 saat menyusun skripsi, tesis, maupun disertasi. Saya juga sering menguji kelayakan proposal tesis dan disertasi, serta menguji tesis dan disertasi sebagai bagian akhir mahasiswa menempuh program S2/S3. Kadang-kadang saya juga diminta menguji kelayakan proposal tesis atau disertasi di beberapa universitas lain. Ketika memberi kuliah saya juga selalu memberi tugas kepada mahasiswa untuk menyusun makalah.

Dari deretan pengalaman tersebut, saya mencatat, salah satu kekurangan mahasiswa adalah kemampuan menyusun kalimat. Awalnya saya mengira itu persepsi subyektif saya. Tetapi saat berdiskusi dengan sesama dosen penguji mereka

juga memiliki penilaian yang sama. Bahkan sering kali, ketika ujian kelayakan proposal, ada dosen penguji berseloroh: “Kalimat ini membuat kita sakit kepala”, “Kalimat ini seperti tidak selesai”, atau “Kalimat ini kok tidak punya subyek ya”. Intinya banyak kalimat dalam proposal tersebut terasa janggal, sulit dimengerti, dan tidak memenuhi kaidah bahasa Indonesia.

Semula saya menduga kalau kejadian seperti itu hanya terjadi pada mahasiswa S1. Maklum mereka belum terbiasa harus membuat karya tulis ilmiah. Tetapi ternyata juga terjadi pada mahasiswa S2 dan bahkan beberapa mahasiswa S3. Saya juga pernah menguji kelayakan disertasi mahasiswa S3 dari PTN lain, ternyata bahasanya juga sulit dipahami. Berarti masalah itu tidak hanya terjadi di Unesa. Dan akhir-akhir ini saya juga membimbing tesis beberapa guru yang sedang kuliah di program S2 Unesa. Ya ampun, beberapa juga cukup parah kalimatnya.

Mengapa ya? Bukankah mereka itu sudah mendapat pelajaran Bahasa Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA, dan kuliah? Bukankah mereka sudah ujian matapelajaran Bahasa Indonesia dan lulus UN SMP, UN SMA? Bukankah mereka juga menempuh matakuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi? Bukankah guru yang sedang menempuh S2 setiap hari mengajar dan tentunya menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar?

Saya sempat berseloroh kepada teman-teman dosen jurusan Bahasa Indonesia, bahwa fenomena ini perlu diteliti. Dikaji secara diagnostik untuk dicari penyebabnya. Konon keruntutan struktur tulisan dan ucapan, menggambarkan keruntutan cara berpikir. Orang yang bicaranya runtut berarti jalan pikirannya juga runtut. Sebaliknya orang yang tulisannya mengalir sistematis berarti jalan pikirannya tera-

tur. Berdasar asumsi itu, bolehlah dikatakan bahwa banyak mahasiswa S1/S2 dan bahkan ada mahasiswa S3 kita yang berpikinya tidak runtut. Dan jika itu benar, merupakan pekerjaan besar untuk mengevaluasi pendidikan kita. Bukankah salah satu tugas pendidikan adalah membangun kemampuan berpikir logis?

Ada teman memberi komentar begini: karena pelajaran mengarang tidak lagi banyak dilakukan di sekolah. Dengan begitu siswa/mahasiswa tidak terbiasa membuat karangan. Namun, bukankah dalam pelajaran bahasa Indonesia tentunya ada pokok bahasan “menulis”? Bukankah siswa dan mahasiswa juga membuat laporan saat praktikum? Bukankah mereka juga membuat laporan ketika melakukan kegiatan ekstrakurikuler?

Seorang teman yang kebetulan guru Bahasa Indonesia memberi penjelasan. Walaupun terkesan membela diri, namun penjelasannya patut direnungkan. Teman tersebut menjelaskan, memang ada pokok bahasan menulis, tetapi itu hanya bagian

”

Pak, kami menyiapkan anak-anak agar sukses dalam UN. Soal-soal UN tidak terkait banyak dengan praktikum. Lantas apa perlu saya menghabiskan waktu banyak untuk praktikum? Jangan-jangan, nanti siswa malah gagal dalam UN.”

kecil dari apa yang dibahas dalam matapelajaran bahasa Indonesia. Dan itu tidak mendapat penekanan karena tidak ada dalam ujian, baik Ujian Nasional, Ujian Sekolah, dan bahkan dalam ulangan-ulangan di akhir semester.

Memang dalam ulangan atau Ujian Sekolah, ada bagian soal yang siswa harus membuat isian dalam bentuk kalimat. Namun hanya kalimat-kalimat pendek dan tidak berupa rangkaian suatu alur cerita. Itupun sangat sedikit proporsinya dalam keseluruhan soal. Memang dalam ulangan, Ujian Sekolah maupun Ujian Nasional, ada soal-soal “membaca”. Namun biasanya bentuk soal dari bacaan itu berupa pilihan ganda.

Tidak puas dengan informasi tersebut, saya mencoba mencari tahu ke guru Kimia. Jawabannya hampir sama. Laporan praktikum Kimia tidak banyak membuat kalimat. Biasanya sudah ada format yang disediakan dan mahasiswa tinggal mengisi. Mengapa begitu? Guru Kimia menjelaskan, yang dipentingkan adalah tahapan-tahapan praktikum yang dilakukan dengan benar. Apakah hasil pengamatan dan pengukurannya benar. Dan, apakah kesimpulan yang dibuat benar. Itu saja. Jadi penyusunan kalimat tidak menjadi perhatian dalam model laporan seperti itu.

Belum puas, saya mencoba bertanya dengan guru PPKn. Apakah dalam matapelajaran PPKn tidak ada tugas membuat laporan atau sejenis, yang memaksa siswa menuliskan kegiatan dengan cukup intens? Kembali jawaban yang saya peroleh tidak memuaskan. Ada kegiatan menulis tetapi tidak banyak. Yang banyak, siswa harus membaca sehingga mengerti. Kalau ulangan, sebagian besar bentuk soal berupa pilihan ganda. Kalau toh ada yang isian hanya sangat sedikit. Ujian Sekolah dan UN soalnya semua pilihan ganda.

Mendapat gambaran dari tiga guru bidang studi tersebut saya berpikir, apakah karena soal dalam ulangan, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional bentuknya pilihan ganda ya? Apakah karena soalnya seperti itu, guru tidak mementingkan siswa membuat karangan, membuat laporan yang lengkap dan sejenis itu?

Saya jadi teringat peristiwa tahun 1992-an. Saat itu saya menjadi anggota Tim Peneliti (dikeuai Prof Mohammad Nur) melakukan penelitian pola pembelajaran di SMA. Saya bertugas ke Pekanbaru dan kebetulan mengamati pembelajaran Kimia dan dilanjutkan berdiskusi dengan gurunya. Nah, saat diskusi saya menanyakan, mengapa praktikum tidak intens padahal laboratoriumnya lengkap. Jawabannya sungguh mengejutkan: “Pak, kami menyiapkan anak-anak agar sukses dalam UN (seingat saya waktu itu namanya Ebtanas). Soal-soal UN tidak terkait banyak dengan praktikum. Lantas apa perlu saya menghabiskan waktu banyak untuk praktikum? Jangan-jangan, nanti siswa malah gagal dalam Unas.”

Kalau, argumen empat guru tadi dirangkai tampak sekali bahwa ungkapan *teaching for the test* tengah terjadi di Indonesia. Artinya, guru akan mengajar sesuai dengan apa yang nanti bakal diujikan. Bentuk dan jenis soal akan menggiring pola pembelajaran. Tampaknya bentuk dan jenis soal-soal UN menjadi “kiblat” penyusunan Ujian Sekolah maupun ulangan di akhir semester. Sudah saatnya kita memikirkan bentuk soal UN, US maupun ulangan yang mampu mendorong siswa terbiasa menulis. Bukankah komunikasi (lisan dan tulisan) adalah bagian penting dalam kehidupan? Bukankah menulis dapat mengasah keruntutan berpikir? Semoga. ◆



3

Imbangkan Budaya Tutar dengan Budaya Tulis

Pernahkah Anda mencermati apa yang dilakukan banyak orang di saat menunggu bus, nunggu kereta, di ruang tunggu pesawat, di dalam kereta atau dalam pesawat? Umumnya ngobrol atau bercanda. Fenomena itu juga saya jumpai bersama rombongan umrah sepanjang perjalanan.

Dulu pada saat saya manasik umrah, setiap jamaah disuruh memilih dua buku karya Agus Mustofa secara gratis. Ternyata tawaran itu tidak gayung bersambut. Ngobrol tampaknya lebih menyenangkan. Dan mungkin itu aktivitas bagus juga. Dapat mengakrabkan teman yang baru kenal, menghilangkan kejenuhan dan mengakrabkan kekeluargaan bagi yang pergi bersama keluarga. Mungkin saat di rumah jarang punya waktu bersama-sama lebih

dari 10 jam.

Memang sekarang banyak orang Indonesia yang membaca koran atau majalah saat nunggu sesuatu atau dalam perjalanan naik kereta atau pesawat. Ada juga yang membaca buku, tetapi jumlahnya tidak banyak. Itulah sebabnya banyak pedagang asongan yang menawarkan koran atau majalah di tempat-tempat umum. Bahkan beberapa penerbangan memberi koran secara gratis ketika penumpang masuk pesawat.

Apakah itu hanya ciri khas orang Indonesia? Saya tidak paham. Mungkin mereka yang mendalami sosiologi dan antropologi atau bidang sejenis itu yang dapat menerangkan. Yang saya amati, kalau turis asing ke Indonesia dan naik kereta atau pesawat biasanya membaca sepanjang perjalanan. Biasanya buku yang dibaca tebal dan sepertinya buku sejenis novel. Demikian pula kalau kita naik kereta di Eropa hampir semua penumpang membaca dan hampir tidak ada yang ngobrol. Bahkan di Belanda ada gerbong kereta yang ditulisi “Gerbong Tenang”, maksudnya jangan ribut atau berbicara keras di dalam gerbong tersebut.

Mengapa kita senang ngobrol dan tidak suka membaca? Mungkin itulah yang oleh beberapa orang disebut bahwa budaya kita bukan budaya tulis melainkan budaya tutur. Masyarakat kita tidak terbiasa menuliskan apa yang dia ketahui atau apa yang dia pikirkan. Yang biasa dilakukan adalah apa yang diketahui atau yang dia pikirkan itu dituturkan (disampaikan secara lisan) kepada orang lain.

Apakah itu jelek? Menurut saya tidak, karena menuturkan secara lisan juga salah satu cara berbagi pengalaman dan berbagi pemikiran. Bahkan budaya tutur mungkin berkontribusi terhadap keramahan masyarakat kita. Hanya saja, daya jangkau penuturan secara lisan sangat terbatas

hanya kepada orang yang dijumpai. Itu berbeda dengan seandainya apa yang diketahui dan dipikirkan itu ditulis akan dibaca orang banyak. Bahkan di era internet itu akan dibaca oleh orang “sedunia”.

Budaya tutur yang kita miliki juga membuat banyak nilai-nilai luhur yang hilang, paling tidak berpotensi untuk hilang. Ketika saya masih kecil dan tinggal di kampung ada kebiasaan yang disebut dengan *Mocopat*. Ketika ada orang melahirkan, sampai bayi berumur 5 hari (sepasar) atau bahkan 35 hari (selapan), setiap malam ada jagongan. Setelah isya, bapak-bapak berkumpul di rumah keluarga yang baru punya bayi dan menembangkan apa yang disebut *Mocopat* tadi.

Saya pernah mencermati apa yang ditembangkan tadi. Nadanya sederhana dan tidak diiringi alat musik apapun. Namun isi tembang itu berupa petuah dan harapan tentang kebahagiaan dan harapan kesuksesan sang bayi. Tentu dengan bahasa simbol (*sanepa*) khas budaya Jawa. Sangat indah dan filosofis.

Nah, kebiasaan *Mocopat* itu kini hampir tidak pernah lagi dilakukan. Karena tidak ada tulisan atau buku yang mengabadikan, sangat mungkin pada saatnya akan punah. Hal yang sama akan terjadi pada *pranata mangsa* dan sebagainya. Saya masih ingat, almarhum ayah saya memberi tahu, kalau gadung dan uwi (jenis tumbuhan yang merambat) sudah keluar batangnya, yaitu menyebul dari tanah dan menjalar ke pohon terdekat, itu artinya sudah mendekati “labuh” atau awal musim hujan. Dan kalau batang tersebut sudah keluar daunnya itu artinya labuh sudah datang.

Sayang nasihat seperti itu tidak ditulis dan hanya disampaikan secara lisan dan turun-temurun. Padahal itu “ilmiah”

karena keluarnya batang gadung dan keluarnya daun tadi konon terkait dengan kelembaban udara. Ketika mendekati musin bujan dan udara lembab akan memancing tumbuhnya batang gadung dan tanaman sejenis lainnya.

Budaya tutur yang kita miliki mungkin juga menyebabkan kita kurang senang dan kurang terbiasa membaca dan menulis. Itu mungkin juga berkontribusi sedikitnya karya tulis dari bangsa kita, termasuk tulisan ilmiah (buku dan artikel) dari para ilmuwan. Bahkan mungkin juga terkait dengan apa yang pernah saya tulis bahwa kemampuan menulis kita rendah. Konon paling rendah dibanding negara tetangga.

Padahal surat pertama yang diturunkan ke Nabi Muhammad adalah perintah membaca, *Iqra'*. Saya yakin membaca dalam konteks tersebut juga dimaksudkan untuk menulis. Apa yang dibaca kalau tidak ada yang ditulis? Jadi membaca dan menulis adalah ajaran penting dalam Islam. Dan yakin itu juga berlaku bagi agama lain. Bahkan dalam peradaban umat manusia.

Jika pemikiran kita ingin diketahui orang banyak, jika budaya kita ingin dapat bertahan lebih baik, maka kita harus mulai menumbuhkan budaya tulis. Tentu tidak harus dengan membuang budaya tutur, karena budaya tutur juga punya manfaat. Misalnya, menjadikan kita lebih ramah, karena terbiasa ngobrol dengan orang lain. Jika budaya tulis dapat ditumbuhkan bersama mempertahankan budaya tutur, maka kita akan menjadi bangsa yang ramah sekaligus bangsa yang pemikirannya dikenal oleh bangsa lain. Semoga. ◆

4

‘Generic Skills’ Modal Kuat Ponpes Salafiah

Sudah beberapa kali saya gagal ke Pondok Pesantren Al Fitrah di Kendinding Lor, Surabaya. Gagal karena waktunya tidak cocok. Saya ingin ketika ke Al Fitrah pas ada Pak Wawan Setiawan, kawan lama yang sekarang menjadi salah satu pembinanya. Pasalnya, saya belum pernah ke Al Fitrah, jadi jika ada Pak Wawan, maka saya tidak begitu kikuk dalam bersikap.

Saya tahu Ponpes Al Fitrah adalah ponpes salafiah besar yang didirikan oleh almarhum Kyai Asrori. Salah seorang tokoh Tariqoh di Indonesia. Saya menjadi lebih tertarik ke Al Fitrah, setelah mendapat cerita Mas Pratama, mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Unesa. Akhirnya saya dapat datang ke sana pada 31 Januari 2014, bertepatan dengan Tahun Baru Imlek

Di Al Fitrah saya diminta menyampaikan pemikiran tentang *Tantangan Pondok Pesantren Menghadapi Era Bonus Demografi 2020-2030*. Saya agak terkejut tetapi bangga. Pondoknya salafiah tetapi peduli dengan tantangan era teknologi. Sebelum memulai pembicaraan, saya minta izin untuk mengganti kata “Tantangan” menjadi “Peluang” dalam topik tersebut. Mengapa? Karena menurut saya pondok pesantren memiliki peluang tinggi di era bonus demografi.

Forum diskusi itu hanya diikuti sekitar 30 orang dan semuanya dari pengurus dan pengajar pondok. Karena forum kecil, sehingga diskusi menjadi *gayeng*. Apalagi semua peserta adalah ”orang” pondok yang tentu secara psikologis ingin mengembangkan pondoknya. Hanya saja waktunya sangat pendek, sekitar 1,5 jam, karena sebelum acara dimulai ada shalat jenasah di masjid pondok.

Salah satu pokok bahasan yang saya sampaikan adalah hasil survei Bank Dunia Tahun 2010 yang dikutip oleh Wapres Boediono saat pidato di Australia. Isinya sebagai berikut: *“the skills of Indonesian secondary school leavers do not match the expectations of employers, due to their inadequate generic skills.”*

Sebenarnya temuan survei Bank Dunia itu, jauh-jauh hari sudah disinyalir oleh banyak pakar. Tony Wagner (2008) dalam bukunya yang berjudul *The Global Achievement Gap* sudah menjelaskannya panjang lebar. Trilling dan Fadel juga menjelaskan hal serupa dalam bukungan *the 21st Century Skills*.

Mengapa saya mengajukan hasil survei Bank Dunia tersebut sebagai salah satu bahasan utama? Karena saya yakin itulah tren ke depan. Ketika kemajuan ilmu dan teknologi semakin pesat, pola kerja, dan keterampilan kerja akan

sangat cepat berubah. Globalisasi telah masuk ke semua belahan bumi, sehingga mau tidak mau orang harus bisa bekerja bersama-sama bangsa lain. Dengan situasi seperti itu, setiap orang harus mampu bekerja sama dalam tim, memiliki integritas tinggi, harus mampu berpikir logis dan kritis, harus mampu memecahkan masalah, harus memiliki kelincahan, dan sekaligus adaptasi dengan situasi.

Beberapa tahun lalu, saya dengan beberapa teman pernah diminta *Japan Internatinal Cooperation Agency* (JICA) untuk melakukan studi pelacakan (*tracer study*), terhadap lulusan politeknik. Setelah mendatangi banyak perusahaan yang memperkerjakan lulusan politeknik, kami menemukan hal yang sangat menarik.

Untuk aspek keterampilan (*specific skills*), hampir tidak ada komplain. Yang dianggap kurang adalah kebiasaan mencatat pekerjaan, kemampuan komunikasi, bekerja sama, dan kemampuan memimpin tim. Bukankah ini juga sejalan dengan temuan Bank Dunia?

Jiwa Mandiri

Menurut saya kekuatan pondok pesantren justru terletak pengembangan *generic skills*. Pondok pesantren salafiah seperti Al Fitrah tentu tidak memberikan bekal *specific skills*, misalnya kompetensi khusus sebagai pengacara, sebagai insinyur, sebagai dokter dan sebagainya. Kalau toh ada mungkin sebagai dai. Namun yang jelas, selama menyantri para santri akan digembleng ketrampilan umumnya. Selama di pondok, santri mendapat gemblengan dan pembiasaan tentang berkomunikasi, bekerja sama, berintegritas, berpikir logis kritis, dan sebagainya.

Sejauh pengetahuan saya, hampir tidak ada alumni

”

Kekuatan pondok pesantren terletak pada pengembangan generic skills. Selama di pondok, santri mendapat gemblengan dan pembiasaan tentang berkomunikasi, bekerja sama, berintegritas, berpikir logis kritis, dan sebagainya.”

(boleh disebut lulusan?) pondok pesantren yang melamar pekerjaan. Mungkin karena mereka tidak memiliki ijazah dan memang pada umumnya orang mondok (belajar di pondok) tidak mengharapkan mendapat ijazah. Dengan bekal kemampuan yang diterima selama mondok (dan juga dari sumber lainnya), kemudian pada alumni bekerja sesuai dengan minatnya.

Oleh karena itu pada umumnya alumni pondok pesantren memiliki jiwa kemandirian yang kuat. Rasa percaya diri dan keyakinan akan bimbingan Sang Pencipta menjadi bekal utama dalam bekerja dan mengarungi kehidupan. Mereka yakin, dengan mengamalkan prinsip-prinsip Islam dan kehidupan, maka Sang Pencipta akan membimbing langkah menuju sukses. Sering kita dengar ungkapan sederhana, bekerja apa saja asalkan haal dan dikerjakan dengan baik hasilnya akan barokah. Semua ini bumi Allah, sehingga kita dapat bekerja di mana saja.

Memang banyak alumni pondok pesantren yang kemudian

menjadi pegawai atau karyawan. Namun pada umumnya itu terjadi di pondok pesantren yang sudah memiliki lembaga pendidikan formal, seperti MI, MTs, MA dan sebagainya. Jadi bukan lagi pondok salafiah seperti Al Fitrah. Atau orang yang di samping mondok juga menempuh pendidikan formal.

Dalam sesi tanya jawab, semua peserta yang memberikan respons setuju dengan pemikiran yang saya ajukan. Pertanyaannya bagaimana menumbuhkan *generic skills* itu secara baik. Bagaimana cara menggabungkan antara *generic skills* dan *specific skills*. Di satu sisi ada keinginan pengasuh pondok untuk juga memberikan *specific skills* yang cocok dengan dunia kerja (*marketable skills*) agar lulusannya mudah mendapatkan kerja atau memulai usaha. Namun di sisi lain, pengasuh juga setuju pentingnya *generic skills*.

Saya tidak memiliki pengalaman mondok, sehingga saya tidak berani memberikan solusi yang pasti. Yang saya ajukan adalah analogi dari apa yang saya ketahui dan apa yang pernah saya lakukan. Memang tidak perlu ada pelajaran atau pokok bahasan kerja keras, kerja sama, kreativitas, dan sebagainya. Namun ketika kuliah mahasiswa harus didorong kerja keras, memecahkan masalah secara kreatif, dan diberi pengalaman untuk kerja sama. Misalnya mengerjakan tugas bersama-sama. Misalnya dalam setiap saat kepada mahasiswa diberi tugas yang “memaksa” mereka untuk bekerja keras. Jika semua dosen melakukan itu, maka kerja keras dan bekerja sama akan menjadi kebiasaan sehari-hari. Jika pada saatnya dijelaskan bahwa kerja keras dan bekerja sama itu penting, maka itu akan menjadi proses pembudayaan.

Trilling dan Fadel dalam buku *The 21st Century Skills*

menceritakan dialog antara delegasi China dengan Direktur Napa New Tech High School, sebuah sekolah inovatif di Northern California. Delegasi China bertanya bagaimana atau pada kurikulum bagian mana, sekolah itu mengajarkan kreativitas dan inovasi. Jawaban yang didapat kurang lebih: *It is not in our curriculum guide. It is more in the air we breathe or maybe the water we drink, the history of our country-Thomas Edison, Henry Ford, Benjamin Franklin, it is in our business culture, our entrepreneurs, our willingness to try new ideas, the tinkering and inventing in our garages, the challenge of tackling tough problems and the excitement of creating something new, in being rewarded for our new ideas, taking risks, failing and trying again.*

Saya menggunakan istilah budaya sekolah. Jadi *generic skills* pada siswa atau santri diharapkan tumbuh karena sehari-hari mereka hidup dalam komunitas yang jujur, kerja keras, berpikir kritis, memecahkan masalah secara arif, dan kreatif. Jadi *generic skills* itu sebagai ruh kehidupan. Apapun kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan itulah yang menjadi ruh dan nilai-nilai yang mengilhaminya. *Generic skills* sebagai ruh sedangkan pekerjaan real (penerapan *specific skills*) sebagai wadagnya. ◆

5

Kreativitas, Bagaimana Mengembangkannya?

Pentingnya kreativitas kembali menjadi topik hangat dalam berbagai forum diskusi. Termasuk diskusi dalam bidang pendidikan. Mungkin itu dipicu oleh hasil-hasil penelitian mutakhir yang menunjukkan betapa pentingnya kreativitas, baik yang terkait dengan pengembangan profesi maupun pembangunan negara.

Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa keunggulan suatu negara 45% ditentukan oleh inovasi. Inovasi tidak lain adalah “buah” dari kreativitas. Studi Trilling dan Fadel (2009), Wagner (2008) dan studi lain juga menunjukkan kalau kreativitas merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting pada era iptek.

Apa itu kreativitas dan di mana posisinya dalam kerangka

potensi dan pembelajaran, tampaknya juga masih menjadi bahan diskusi. Delapan kecerdasan majemuk (*multiple intelegences*) yang dikenalkan oleh Prof Howard Gardner (1985) yaitu kecerdasan linguistik-verbal, kecerdasan logis-matematis, visual-spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan kecerdasan naturalis, juga tidak menyebutkan kreativitas. Tambahkan satu intelegensi yang dimunculkan belakangan, yaitu *existential intelegences*, juga tidak terkait dengan kreativitas.

Ki Hajar Dewantara (2004), ketika mengartikan pendidikan juga hanya menyebutkan: karakter (budi pekerti), intelektual (kognitif), dan tubuh (psikomotor). Bloom (1956) ketika menunjukkan tahapan ranah kognitif hanya memiliki enam tingkat, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.

Namun kemudian Bloom merevisi dengan menggabungkan analisis dan sintesis menjadi satu dan menambahkan satu tahap yaitu mencipta (*creativity*). Jadi Bloom menganggap kreativitas merupakan tingkat terakhir dari kognitif. Apa betul seperti itu? Apakah untuk kreatif orang harus mampu melakukan evaluasi lebih dahulu?

Seingat saya, Prof Conny R. Semiawan memaknai kreativitas sebagai interseksi antara ketiga ranahnya Bloom. Artinya kreativitas merupakan perpaduan antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Pertanyaannya, apakah untuk menjadi kreatif orang harus terampil lebih dahulu? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa posisi kreativitas dalam skema potensi dan hasil belajar masih perlu diteliti.

Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ada orang yang kaya ide, sebaliknya juga ada orang yang tidak punya ide, atau katakanlah jarang memunculkan ide. Jika

kreativitas itu bentuk nyata dari ide, maka seakan-akan memang ada orang yang memiliki potensi kreativitas tinggi dan ada yang rendah. Jadi kreativitas merupakan salah satu potensi, sebagaimana sembilan potensi (intelejensi) yang disebutkan oleh Gardner.

Apakah kreativitas dapat dipelajari atau betul-betul bawaan? Ini juga perlu didiskusikan. Seandainya Agnes Monica itu lahir dan dibesarkan di desa terpencil apa juga akan dapat bernyanyi dengan bagus, sebagus sekarang ini? Saya yakin tidak. Mungkin tetap bisa bernyanyi bagus, tetapi tidak akan sehebat seperti sekarang ini. Sebaliknya, jika Agnes Monica lahir di keluarga yang senang bulu tangkis dan setiap hari latihan bulu tangkis, apakah dapat sehebat Susi Susanti? Saya kira juga tidak. Jadi sejalan teori konvergensi, bakat (potensi/intelegensi menurut Gardner) dan ajar (hasil belajar menurut Bloom) sama-sama berperan. Idealnya orang belajar pada potensi kuat yang dimiliki, sehingga hasil belajarnya juga

”

Banyak inovasi yang dilakukan secara sederhana dengan memperbaiki suatu yang sudah ada sebelumnya.”

(Boyd dan Goldenberg)

maksimal.

Apakah orang kreatif selalu berpikir *out of the box*, yaitu mengajukan ide yang benar-benar beda dengan yang selama ini ada? Ternyata juga tidak selalu. Boyd dan Goldenberg (2013) memberikan penjelasan, bahwa banyak inovasi yang dilakukan secara sederhana dengan memperbaiki “sesuatu yang sudah ada sebelumnya”, yaitu dengan apa yang disebut dengan *subtraction*, *division*, *multiplication*, *task unification*, dan *attribute dependency*. Bahkan mereka meyakini bahwa inovasi dapat ditumbuhkan dengan metoda yang disebut *systematic inventive thinking* (SIT).

Di pihak lain, Jane Piirto (2011) menyebutkan, pengembangan kreativitas memerlukan lima sikap dasar (*five core attitudes*), yaitu (1) *self-discipline of doing creative works, including the presence of motivation*, (2) *naviete or openness to experiences*, (3) *risk taking*, (4) *tolerance of ambiguity*, dan (5) *group trust*. Piirto meyakinkan, untuk mengembangkan kemampuan kreatif diperlukan motivasi yang kuat, mau mencoba berulang-ulang, berani mengambil risiko salah, menerima hal-hal yang belum pasti, dan saling percaya dengan teman satu grup kerja.

Apa simpulan dari beberapa cuplikan di atas? Menurut saya: (1) kreativitas itu penting, baik untuk pengembangan diri secara pribadi, instansi atau perusahaan, (2) setiap orang memiliki potensi kreatif, tetapi ada orang yang potensinya kuat dan ada orang yang potensinya tidak seberapa kuat, dan (3) kreativitas dapat ditumbuhkan, tetapi memerlukan sikap-sikap dasar. Semoga. ◆

6

Kreativitas Ternyata Tidak Instan

Ketika di SD dahulu saya mendapat cerita bagaimana hukum Archimedes dan hukum Gravitasi ditemukan. Katanya, suatu saat Archimedes (si penemu) mandi di *bath-up* yang diisi air penuh. Ketika dia masuk, airnya tumpah. Lantas dia berpikir, kalau begitu tubuhnya mendesak air dalam bak itu, sehingga tumpah. Kalau begitu tentu ada gaya angkat sebesar air yang terdesak. Saking senangnya mendapat ide cemerlang, konon Archimedes lari keluar kamar mandi tanpa berpakaian sambil teriak-teriak: "eureka... eureka...(saya telah menemukan)!!"

Untuk Newton, cerita yang saya dapat, dia duduk-duduk di bawah pohon apel dan tiba-tiba ada buah apel jatuh.

”

Inovasi tidak dapat diperoleh dengan instan, tapi harus melalui kerja keras dalam waktu lama.

Para inventor melakukan kerja keras dan kerja panjang sebelum menemukan sesuatu.”

(Jane Piirto)

Mengapa apel jatuh “ke bawah”? Kalau begitu pasti ada gaya yang menariknya, sehingga apel tidak jatuh ke samping atau ke atas. Itulah awal ditemukannya gaya gravitasi.

Dari cerita itu saya menyimpulkan kalau temuan-temuan besar bersifat tiba-tiba. Artinya mendadak si penemu punya ide yang kemudian menjadi temuan besar. Apalagi iklan *Pepsodent* menayangkan bagaimana sikat gigi melengkung ditemukan. Tayangan itu menggambarkan si penemu sedang melihat apa atau membayangkan sesuatu yang melengkung untuk mencukil sesuatu. Dan dari situ muncul ide kalau sikat gigi mestinya juga melengkung agar dapat mencukil kotoran di gigi bagian belakang.

Namun simpulan itu, beberapa hari ini berubah. Jane Piirto dalam bukunya *Creativity for 21st Century Skills* (2011) menyebutkan bahwa Van Gogh membuat sketsa atau lukisan lebih dari 100 kali sebelum menghasilkan lukisan yang hebat. Thomas Edison bekerja bertahun-tahun

untuk menemukan lampu listrik dan temuan lainnya. Demikian pula composer William Bolcom mencoba ratus kali sebelum menemukan sebuah komposisi musik. Dari deretan data itu, Piirto menyimpulkan bahwa kreativitas itu hasil kerja keras, disiplin diri, dan sebagainya.

Mungkin saja ide dasar sebuah temuan muncul secara tiba-tiba, tetapi untuk sampai kepada inovasi diperlukan kerja panjang, kerja keras bermotivasi tinggi, berpikiran terbuka terhadap “ide-ide gila” dan berani mengambil risiko gagal dalam mencoba-coba. Menurut saya, simpulan atau sebutkanlah “revisi simpulan” ini penting untuk meluruskan pola pikir bahwa orang kreatif itu memang “dari *sono*-nya” dan tidak dapat dipelajari, oleh karena itu tidak perlu kerja keras untuk menjadi kreatif.

Uraian yang diberikan Piirto sekaligus mengajarkan bahwa inovasi itu tidak dapat diperoleh dengan mudah, tetapi harus melalui kerja keras dalam waktu lama. Tidak ada inovasi yang diperoleh secara instan atau secara cepat. Para inventor (penemu) melakukan kerja keras dan kerja panjang sebelum menemukan sesuatu. Di samping itu, inovasi memerlukan fokus dan tidak “melebar ke mana-mana”. Itulah sebabnya para inventor bekerja fokus selama bertahun-tahun sebelum menghasilkan temuan spektakulernya.

Celakanya, pola pikir instan kini telah menjangkiti masyarakat kita. Semuanya ingin serba cepat untuk mendapatkan hasil. Segera ingin lulus, segera ingin bekerja, segera ingin kaya, dan segera ingin sukses. Tidak ada yang salah untuk segera berhasil, tetapi upaya sungguh-sungguh untuk mencapai itu juga harus mendapat perhatian. Memang pepatah Jawa *alon-alon waton kelakon* harus diberi makna baru. Bukan harus pelan-pelan, tetapi harus sabar dan

tekun menjalani proses kerja keras untuk mencapai hasil yang besar. Jadi kata *alon-alon* jangan dimaknai pelan-pelan tetapi kerja tekun.

Apakah dengan begitu kreativitas dapat dipelajari? Pada tulisan terdahulu saya sudah mengajukan teori konvergensi, yang artinya kreativitas dapat dipelajari tetapi juga memerlukan potensi yang memadai. Kreativitas akan optimal, jika yang bersangkutan memiliki potensi cukup dan belajar keras. Untuk itu diperlukan suasana belajar yang memungkinkan orang berpikir kreatif.

Dalam kenyataan memang kerap muncul kejanggalan atau semacam anomali. Penulis novel seringkali tidak berlatar belakang pendidikan sastra. Pengusaha yang hebat banyak yang bukan berlatar belakang pendidikan bisnis. Guru yang baik banyak yang berlatar belakang akademik nonkependidikan. Pelukis yang baik banyak yang berlatar belakang nonsenirupa. Mengapa begitu? Saya duga karena di saat menempuh pendidikan formal, mereka terlalu “dipatok harus ini harus itu”, “tidak boleh begini dan begitu”, akibatnya kebebasan berpikirnya tidak berkembang. Akhirnya tidak berani berpikir bebas dan ujungnya kreativitas tidak tumbuh maksimal. Semoga semua ini menjadi pemikiran kita yang menekuni dunia pendidikan. ◆

7

Inside The Box: Kreatif Dapat Disistematisasikan?

Terlalu awal saya tiba di bandara Soekarno Hatta. Ternyata tiket saya pulang ke Surabaya berlaku untuk pukul 14.40 siang. Waktu itu saya hanya memegang SMS kode *booking* dari teman yang membelikan tiket, jadi sejak pukul 08.00 saya sudah meluncur ke bandara. Takut kalau ada masalah, karena hari itu musim orang berebut tiket untuk mudik Lebaran. Begitu saya menunjukkan SMS kepada petugas *counter*, saya langsung dapat tiket. Saya mencoba memajukan jam penerbangan, tetapi tiket sudah terjual habis. Jadi, saya harus bisa “membunuh waktu” sekitar lima jam.

Saya mengisi waktu dengan membaca dan melihat TV. Tapi lama-lama bosan juga. Akhirnya, setelah shalat

Duhur saya jalan-jalan dan masuk ke toko buku. Di situ saya melihat buku dengan judul *Inside The Box* karya Drew Boyd dan Jacob Goldenberd. Kebetulan ada yang sudah terbuka (tidak dibungkus plastik), sehingga saya dapat membaca daftar isi dan sedikit *introduction*-nya. Ternyata itu buku tentang kreativitas. Merasa tertarik, akhirnya saya beli. Buku itu ditulis oleh Drew Boyd, seorang pensiunan dari pejabat penting di Johnson & Johnson, sedangkan Jacob Goldenberd adalah profesor bidang *Marketing* di Columbia University.

Selama ini saya, mungkin juga banyak teman, memahami bahwa untuk kreatif kita harus berpikir *out of the box*. Harus berpikir yang tidak seperti biasanya. Itulah sebabnya para seniman, yang konon kreatif, banyak berpakaian dan berperilaku aneh. Kantor lembaga seni atau sejenisnya juga sering tidak seperti kantor pada umumnya. Pokoknya selalu beda. Mungkin metafora *see what all see but think what nobody thinks* cocok indikator untuk orang kreatif.

Stan Sigh, CEO dan pendiri komputer Acer pernah menulis buku berjudul *Me Too Is Not My Style*. Buku itu bercerita, sejak bocah Stan Sigh memang sudah berpikiran tidak lazim atau bahkan berseberangan dengan pikiran pada umumnya. Jika orang pada umumnya berpikiran A, dia menempuh jalan B. Ketika perusahaan baru umumnya takut membuat *brand* sendiri, dia justru melakukan, yaitu Acer. Pokoknya dengan pikiran yang berbeda dengan orang banyak akan menghasilkan suatu kreasi yang tidak dihasilkan orang lain.

Nah, buku *In Side the Box* memberi bukti dan mengajarkan hal yang bertentangan. Menurut buku itu, selain berpikir *out of the box*, untuk menjadi kreatif juga dapat dilakukan dengan berpikir *in side the box*. Bahkan

menurutnya sebagian besar penemuan yang selama ini kita kenal, misalnya *remote control* TV dan AC, penerbangan dengan harga murah (*low cost carrier*) tas punggung dan sebagainya ditemukan dengan pola pikir *in side the box*. Berikut ini ringkasan (sangat ringkat dari buku itu, silakan baca sendiri jika ingin yang lebih detail).

Buku itu mengenalkan metoda berpikir yang disebut *Systematic Inventive Thinking* (SIT). Ada lima teknik dalam SIT yaitu *subtraction*, *division*, *multiplication*, *task unification*, dan *attribute dependency*. Menurut buku itu, sebagian besar penemuan yang ada selama ini muncul melalui metoda itu. Metoda *subtraction* pada intinya mengurangi atau menghilangkan sesuatu bagian yang tidak penting, sehingga produk (benda atau layanan) menjadi lebih simpel, tanpa mengurangi hal-hal yang pokok. Penerbangan murah yang diterapkan *Air Asia* merupakan contoh penerapan metoda itu. Penerbangan ini mengurangi jenis layanan yang tidak penting,

”

Selain berpikir *out of the box*, untuk menjadi kreatif juga dapat dilakukan dengan berpikir *in side the box*. Bahkan sebagian besar penemuan, misalnya *remote control* TV dan AC, ditemukan dengan pola pikir *in side the box*”.

(Drew Boyd & Jacob Goldenberd)

misalnya minuman dan transfer bagasi. Toh tidak banyak yang memerlukan. Hasilnya harga tiket *Air Asia* menjadi murah.

Mungkin (ini pendapat saya) pola anggaran hotel yang kini marak juga menerapkan prinsip *subtraction*. Budget hotel mengurangi beberapa layanan yang tidak penting dan diubah menjadi optional dengan tarif tambahan. Harga dasar hanya mencakup kamar dengan fasilitas tertentu. Kalau ingin tambahan layanan, misalnya telepon kamar, TV, makan pagi, atau lainnya, harus menambah lagi. Nah, bagi yang tidak memerlukan, harga menjadi murah.

Metoda *division* pada intinya melepas fungsi tertentu dan dibuat berdiri sendiri. Remote control TV dan AC merupakan hasil pemikiran itu. Demikian pula *external hard disk*, *flash disk*, dan *drop box* untuk menyimpan file dokumen. Mungkin (ini pendapat saya) layanan *electronic ticket* dan ATM untuk pengambilan uang juga merupakan produk pemikiran itu.

Metoda *multiplication* pada intinya meng-kopi komponen yang sudah ada lalu digunakan untuk keperluan lain yang lebih penting. Tambahan dua roda untuk sepeda yang digunakan anak kecil, agar tidak jatuh, merupakan bentuk penggunaan pola pikir *multiplication*. Kunci elektronik mobil mungkin juga seperti itu.

Metoda *task unification* pada intinya menggabungkan beberapa fungsi menjadi satu kesatuan sehingga menjadi lebih kompak dan simpel. Tas punggung yang dapat digunakan untuk membawa buku, laptop, dan beberapa lembar baju merupakan penerapan pola pikir ini. Mungkin juga (menurut saya) kopi mix, sampho yang sekaligus mengandung conditioner rambut merupakan produk pola pikir *task unification*.

Metoda *attribute dependency* pada prinsipnya menggabungkan beberapa komponen menjadi satu kesatuan. Penggabungan wiper mobil, penggabungan flash disk yang sekaligus untuk senter mungkin juga merupakan bentuk pola pikir tersebut.

Dengan mempelajari uraian buku itu, mungkin yang dimaksud dengan *in side the box* adalah memanfaatkan barang/komponen/fungsi yang ada untuk selanjutnya dikembangkan/ digabungkan/dikurangi dan sebagainya. Jadi tidak selalu harus memulai dari yang benar-benar baru sama sekali. Jadi prinsip penyempurnaan/pengembangan juga berlaku dalam mengembang kreativitas. Rasanya, pada pendidik yang berkeinginan mengembangkan kreativitas anak didiknya, perlu mempelajari prinsip tersebut. Syukur kalau dapat mengembangkan agar lebih cocok dengan budaya Indonesia. Semoga. ◆

8

Inovasi dan Daya Juang Mbah Kung

KECAKAPAN
HIDUP

253

Gaweyan ketok wae mosok ora isa. Ungkapan itu cukup populer di lingkungan keluarga masa kecil saya, di kampung. Alharhum Bapak saya yang menggunakan dan sering kali kami menggunakannya untuk hal-hal serius maupun kelakar. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira: ”pekerjaan kelihatan nyata, seharusnya kita bisa.”

Ungkapan itu sering terucap ketika Mbak Kung (almarhum Bapak saya) melihat anak-anaknya atau anak muda lainnya takut tidak berhasil mengerjakan sesuatu atau bahkan ketika beliau sendiri kesulitan mengerjakan sesuatu. Sepertinya ungkapan itu dimaksudkan untuk memberi semangat bahwa tidak ada pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan asal kita mau belajar dan kerja keras.

SEMUA 'DIHANDLE' GOOGLE,
TUGAS SEKOLAH APA?

”

Mbah Kung sangat berani berinovasi. Ayam diberi makan daging bekicot supaya bertelur banyak, diberi makanan daun pepaya supaya tidak terserang penyakit, diberi makan campuran kulit kerang agar kulit biar telurnya tebal.”

Kang Rin, orang muda yang sering membantu kerja di rumah kami, sering meniru ungkapan itu ketika mengerjakan sesuatu dan mendapat kesulitan. “*Mengko dioloke Bapak, mandak gaweyan ketok wae ora isa*” (nanti dikomentari Bapak, lha pekerjaan kelihatan saja tidak dapat menyelesaikan). Saya juga sering menggunakan ungkapan itu, walaupun dalam hati dan saya ubah menjadi “orang lain bisa, mengapa saya tidak bisa?” Ungkapan itu sering saya gunakan untuk meyakinkan diri sendiri ketika mengerjakan hal-hal yang sulit. Dengan anak-isteri saya sering berkelajar “*mosok anake mbah Samani ngene wae ora isa*”.

Wajarkah Mbah Kung mengutarakan ungkapan itu? Sungguh menarik untuk didiskusikan. Beliau hanya tamat Sekolah *Angka Loro* zaman Belanda. Konon hanya itu sekolah yang ada di desa untuk masyarakat awam. Sekolahnya hanya dua tahun dan dilaksanakan di rumah Pak Lurah dengan pengantar bahasa Jawa. Oleh karena itu Mbah

Kung tidak lancar ketika berbahasa Indonesia. Saya tidak tahu pasti lancar atau tidak dalam membaca, tetapi beliau membaca majalah berbahasa Jawa *Panjebar Semangat*.

Dengan sekolah hanya dua tahun, tinggal di desa dengan pekerjaan utama petani tentulah pengetahuan Mbah Kung juga terbatas. Namun kalau dilihat kehidupan dan pekerjaan keseharian, sayapun sebagai anaknya kerap terkagum-kagum. Idenya banyak dan berani sekali melakukan eksperimen.

Sebagai petani padi, beliaulah yang pertama kali membuat dan melaksanakan penanaman dengan “*rengkek*” agar jarak antartanaman padi sama dan teratur. Setelah itu beliau menciptakan *sorok* beroda untuk menyiangi padi. Rengkek dan sorok itulah yang sekarang ditiru oleh petani oleh tetangga dan bahkan kampung sekitar. Beliau yang memulai menanam *enceng-enceng* ketika hujan turun dan kemudian dibajak sehingga menjadi pupuk hijau.

Hampir semua pekerjaan di desa dapat dikerjakan oleh beliau, bertani, menukang kayu, beternak ayam, berdagang kapur, dan pekerjaan sederhana lainnya. Ketika beternak ayam petelor beliau menjadi juara 1 lomba peternak kecil yang diadakan oleh *Charon Pokpan*. Beliau sangat berani berinovasi, misalnya ayam diberi makan daging bekicot dengan analogi bekicot bergizi sehingga diharapkan ayam bertelur banyak. Ayam diberi makanan daun pepaya dengan asumsi supaya tidak mudah terserang penyakit. Diberi makan campuran kulit bekicot yang ditumbuk agar kulit telornya tebal.

Apakah inovasi itu didapat dengan mudah? Ternyata tidak. Apakah beliau tidak pernah gagal? Ternyata sering. Tetapi tampaknya beliau tidak mudah menyerah. Misalnya inovasi memberi makan ayam dengan kulit bekicot terbukti

gagal: telur ayam menjadi tebal tapi mudah pecah. Ketika mencoba membuat gilingan padi secara manual juga gagal, karena beras yang dihasilkan pecah-pecah.

Mbah Kung juga pernah mencoba membuat sandal dari ban mobil. Pekerjaan yang sukses dalam beberapa tahun kemudian bangkrut ketika muncul sandal jepit. Mbah Kung juga pernah berdagang gamping, yang pada awalnya sukses tetapi kemudian bangkrut ketika muncul semen PC dan masuk ke desa-desa.

Gambaran di atas itulah yang membuat saya sering merenung, bagaimana Mbah Kung punya ide-ide inovatif dan daya juang untuk mewujudkan gagasan itu, walaupun tidak semuanya berhasil. Jika proses bertumbuhnya gagasan dan daya juang itu dapat diketahui, rasanya sangat bermanfaat untuk pendidikan kita. Bukankan pengembangan kreativitas dan daya juang merupakan aspek penting dalam pendidikan kita. Jujur, sampai saat ini saya belum mampu mereplikasi dua kemampuan itu. ◆

10

Haruskah Kita Bisa Berbahasa Inggris?

Barangkali judul di atas lebih tepat jika diubah sedikit menjadi *Haruskah Anak-Anak Kita Dapat Berbahasa Inggris?*. Bagi kita, khususnya generasi saya yang usianya di atas 60 tahun, mungkin sudah agak terlambat atau bahkan sudah sangat terlambat untuk belajar bahasa Inggris. Tetapi bagi anak-anak kita, yang usianya di bawah 20 tahun, mungkin pertanyaan tersebut layak untuk didiskusikan.

Pertanyaan itu saya ajukan terkait dengan pengalaman dilayani oleh sopir Seameo Chat di Myanmar yang ternyata bisa berbahasa Inggris cukup fasih. Beliau berpakaian seperti layaknya orang Myanmar, mengenakan sarung atau longgi. Bahkan pada hari kedua sore hari, hanya memakai

celana pendek karena harus membersihkan mobil, mungkin maksudnya mencuci mobil, sebelum menjemput kami. Beliau juga makan sirih seperti biasanya orang laki-laki kebanyakan (bukan mereka yang terpelajar) di Myanmar. Jadi dari penampilan tidak ada bedanya dengan sesama sopir lokal lainnya.

Dalam pandangan saya, kelebihan pokok beliau adalah dapat berbahasa Inggris. Dengan kemampuan itu, pak sopir mampu berkomunikasi dengan tamunya dengan baik. Dengan demikian tidak terjadi salah pengertian antara tamu yang dilayani dengan sopir. Dengan kemampuan itu tidak diperlukan lagi petugas lain untuk mengantar tamu kesana-kemari dan bahkan pak sopir dapat merangkap sebagai guide. Apalagi orangnya ramah.

Saya membayangkan, jika Unesa memiliki sopir seperti beliau tentu sangat indah. Menjadi efisien karena tidak diperlukan petugas lain untuk menjemput tamu asing. Unesa juga menjadi lebih keren karena sopirnya saja dapat berbahasa Inggris. Namun tampaknya saat ini masih sulit diterapkan. Jangankan sopir, mencari karyawan bahkan dosen yang mampu berbahasa Inggris dengan baik, tidak mudah. Akibatnya jika ada tamu atau dosen dari negara lain, seringkali Unesa kesulitan melayani. Semoga ini tidak terjadi di universitas yang lain.

Kini kita sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Barang dan jasa bebas keluar masuk antara negara-negara ASEAN. Jadi orang dan barang Indonesia bebas masuk ke Singapura, Malaysia, dan semua anggota ASEAN lainnya, demikian juga sebaliknya. Kalau hal ini nantinya makin intensif terjadi, lantas bahasa apa sebagai alat komunikasi utama? Jika orang Indonesia bekerja di Thailand atau orang Filipina bekerja di Myanmar, mere-

ka menggunakan bahasa apa ya? Mungkin ada yang menjawab menggunakan bahasa tempat mereka bekerja. Jawaban yang tidak salah, walaupun menurut saya tidak sepenuhnya benar.

Mari kita cermati fenomenanya. Kalau kita ke bank untuk mengambil uang, menabung atau mentransfer uang, coba kita cermati slip atau blanko yang harus kita isi. Saya hampir dapat memastikan blanko tersebut menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mengapa? Karena sangat mungkin ada nasabah orang asing, sehingga yang paling sederhana menggunakan bahasa Inggris. Kalau setiap bangsa harus disediakan blanko khusus tentu tidak efisien. Atau mungkin pemilik bank tersebut, sebagian atau sepenuhnya orang atau lembaga asing, sehingga harus dapat membaca laporan dan data keuangannya. Bukankah sekarang banyak bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan multinasional atau perusahaan asing?

Rasanya tidak hanya bank, banyak perusahaan lain yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing atau perusahaan multinasional. Nah, pada perusahaan seperti itu tentu data dan laporan resmi harus menggunakan bahasa Inggris. Saya menduga fenomena seperti itu semakin bertambah banyak, sehingga keperluan berbahasa Inggris juga akan semakin penting. Agaknya nanti semua orang akan punya tiga bahasa sekaligus: bahasa ibu (bahasa daerah), bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.

Desa Global

Saya pernah membaca sebenarnya kehidupan kita ini sedang menuju ke arah apa yang disebut dengan desa global (*global village*). Ketika transportasi semakin mudah,

”

Batas negara tetap ada. Mereka tetap memegang kewarganegaraan masing-masing, tetapi berbaur dalam kehidupan keseharian. Mungkin itulah yang disebut sebagai *the end of nation state.*”

jaringan internet semakin mudah dan murah, mobilitas orang semakin tinggi, kepemilikan suatu usaha semakin mudah berpindah tangan lintasnegara, sebenarnya pelan tetapi pasti komunitas di bumi ini semakin menyatu.

Jika di masa lalu, orang Jawa hanya berbahasa Jawa dan tinggal di Jawa, orang Bali hanya tinggal di Bali dan berbahasa Bali, sekarang kita melihat betapa banyaknya orang Jawa yang bekerja dan tinggal di Bali dan sebaliknya banyak orang Bali yang bekerja di Jawa dan pandai berbahasa Jawa. Tetapi mereka umumnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi.

Bukankah sangat mungkin gejala itu akan meluas antarnegara? Bukankah sekarang banyak orang Indonesia yang bekerja dan tinggal di negara lain? Artinya bukan mustahil bila nanti banyak orang Indonesia yang bekerja dan tinggal di negara lain. Sebaliknya banyak orang asing yang bekerja dan tinggal di Indonesia. Mereka akan tetap sebagai warga negara asal, tetap

tinggal menetap di negara lain. Itulah yang dimaksud kita sedang menuju *global village*.

Batas negara tetap ada. Kewarganegaraan tetap ada. Tetapi itu akan menjadi sekadar catatan administratif dan tidak terlalu bermakna dalam interaksi sosial maupun pekerjaan. Maksudnya dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal maupun lingkungan pekerjaan orang sudah terbiasa berbaur dengan orang asing dari berbagai negara. Mereka tetap memegang kewarganegaraan masing-masing, tetapi berbaur dalam kehidupan keseharian. Mungkin itulah yang disebut sebagai “*the end of nation state*.”

Ketika menjadi Dubes Indonesia di Amerika Serikat Dino Patti Jalal pernah menggagas apa yang disebut dengan Diaspora, yaitu menghimpun orang-orang Indonesia yang bekerja dan tinggal di negara lain. Ternyata jumlah yang berhasil dihimpun ribuan orang dan banyak yang sukses menekuni berbagai profesi. Mereka banyak yang tetap sebagai warga negara Indonesia dan ingin tetap menyumbangkan pemikirannya untuk Indonesia.

Apakah belajar bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Inggris dalam bekerja dan berinteraksi sosial tidak mengurangi rasa nasionalisme? Bukankah konon salah satu keputusan membubarkan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) karena RSBI menggunakan pengantar bahasa Inggris, khususnya untuk matapelajaran Matematika dan IPA, sehingga ditakutkan menurunkan rasa nasionalisme siswa?

Jujur saya tidak tahu jawabannya. Saya hanya dapat mengajukan pertanyaan balik, apakah rasa nasionalisme Pak Habibie, Pak Anies Baswedan, Bu Susi, dan Pak Prabowo menurun karena beliau-beliau mampu berbahasa Inggris sangat baik dan mungkin juga dalam kehidupan sehari-

hari sering berbahasa Inggris? Konon anak-anak para pejabat tinggi dan konglomerat banyak yang sekolah di negara lain (baca negara maju), sehingga sangat mungkin pandai berbahasa Inggris. Apa rasa nasionalisme mereka menurun ya?

Saya juga pernah berdiskusi dengan mahasiswa tentang globalisasi. Beberapa mahasiswa mengatakan berpendapat kita harus menggunakan bahasa Indonesia, karena itu bukti nasionalisme. “Janganlah kita menggunakan bahasa asing atau produk budaya asing, agar tidak mengikis rasa nasionalisme kita,” katanya. Mungkin peringatan mahasiswa tadi benar. Namun saya juga ingin mengajukan pertanyaan, pakaian celana panjang, kemeja, dan jas yang banyak kita pakai itu budaya asli Indonesia atau bukan ya? Bukankah di waktu dulu kakek-kakek kita mengenakan sarung, jarit baju berkap, dan blangkon? Apakah makan dengan sendok itu budaya asli kita ya? Bukankah nenek kita dulu makan dengan tangan?

Sepanjang penerbangan dari Yangoon sampai Surabaya terus memikirkan itu dan kemudian saya tuangkan dalam tulisan ini. Jujur saya tidak tahu jawabannya dengan pasti, sehingga berharap ada orang yang ahli tentang nasionalisme dan pendidikan kebangsaan yang dapat menjawabnya. Namun dengan catatan tidak terjebak dalam wawasan sempit. ◆

11

'What Winners Are Made Of'

Saat punya waktu luang, saya membaca *Winning* tulisan Jack Welch dan Suzy Welch. Jack Welch adalah mantan bos General Electric, sedang Suzy Welch saya duga istrinya. Kebetulan yang saya baca *Chapter 6* yang berjudul *Hiring: What Winners Are Made of*. Isinya sangat bagus, oleh karena itu saya ingin berbagi dengan Anda.

Pada bab itu Jack dan Suzy Welch menjelaskan kriteria yang perlu digunakan pada saat melakukan rekrutmen karyawan. Kriteria itu konon sering ditanyakan ketika mereka memberikan seminar maupun pelatihan manajemen. Kriteria tersebut sangat penting agar perusahaan memiliki karyawan dan pimpinan yang betul-betul bagus. Staf yang

tidak sesuai dengan kriteria yang diperlukan seringkali merepotkan.

Menurut Jack dan Suzy Welch saringan pertama untuk rekrutmen calon karyawan adalah menguji tiga aspek yaitu *integrity*, *intelligence*, dan *maturity*. Yang dimaksud dengan *integrity* dalam konteks ini adalah kejujuran dan satunya kata dengan perbuatan. Setiap karyawan harus memahami nilai-nilai serta aturan-aturan yang diterapkan di perusahaan dan harus dengan sepenuh hati menerapkannya.

Bagaimana cara mengetahui integritas orang? Untuk orang dalam, integritas dapat diketahui dari perilaku sehari-hari yang bersangkutan. Tentu itu dilakukan dalam waktu cukup lama, sehingga dapat dilihat konsistensinya. Bagaimana bagi calon dari luar? Tentu lebih sulit. Biasanya didasarkan dari reputasi yang bersangkutan dan atau referensi orang lain yang terpercaya.

Karyawan tidak harus secerdas Einstein dan Stephen Hawking. Calon karyawan juga tidak harus membaca buku Shakespeare dan Ary Ginandjar. Tetapi karyawan harus memiliki kecerdasan yang cukup baik agar dapat mengerjakan tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya. Lebih dari itu, karyawan yang cerdas dapat dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaan. Ketika perusahaan tumbuh, tentu terjadi perubahan tata kerja diperusahaan, dan karyawan tentu harus dapat mengikutinya.

Tetapi penulis buku ini mengingatkan agar kita tidak mengaburkan antara kecerdasan dan pendidikan. Memang benar, biasanya lulusan perguruan tinggi terkenal adalah mereka yang cerdas. Tetapi itu juga tidak menjamin. Fakta juga menunjukkan banyak lulusan perguruan tinggi biasa atau bahkan tidak pernah kuliah ternyata cerdas.

Kematangan (*maturity*) penting bagi karyawan. De-

ngan kematangan karyawan tidak mudah emosi, dapat menghargai orang lain, dapat melakukan introspeksi dari kekurangan diri, serta mudah bekerja sama dalam tim. Karyawan yang kurang matang seringkali menimbulkan situasi kerja yang tidak kondusif.

Disamping tiga syarat tadi, Jack dan Suzy Welch mengatakan karyawan harus memiliki “The 4-E dan 1-P”. Apa itu? E pertama, karyawan harus memiliki *positive energy*. Maksudnya karyawan harus memiliki energi dan semangat untuk “kerja-kerja-kerja”. Karyawan dengan *positive energy* akan selalu optimistis dan bersemangat untuk mengerjakan tugasnya. Mereka biasanya mencintai pekerjaannya.

E kedua adalah *energize others*. Maksudnya karyawan yang baik akan memberi semangat kepada rekan lainnya. Hal itu tidak selalu disampaikan sebagai ucapan, tetapi lebih dari itu melalui contoh yang menginspirasi orang lain. Membangun kebersamaan kerja keras merupakan contoh *energize others*.

E ketiga adalah *edge, the courage to make tough yes-or-no decision*. Seringkali situasi kerja bersifat abu-abu, sehingga orang dapat berbeda pendapat karena masing-masing melihat dari sisi yang berbeda. Dalam situasi seperti itu karyawan harus mampu menganalisis mana yang tepat dan berani mengatakan “ya” untuk yang diyakini benar dan mengatakan “tidak” untuk yang diyakini tidak benar. Walaupun informasi yang keliru tadi berasal dari orang/pihak yang berpengaruh.

E keempat adalah *execute*. Maksudnya kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas. Tidak semua orang yang paham dan bahkan pandai berteori mampu melaksanakan apa yang diteorikan. Di samping kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan juga diperlukan keberanian.

”

Jika pekerjaan telah menjadi *passion*-nya, maka karyawan akan menikmati pekerjaannya. Dia akan bekerja dengan sepenuh hati dan hasilnya akan maksimal. Sedangkan karyawan yang bekerja karena terpaksa atau sekadar melaksanakan kewajiban, hasilnya tidak akan maksimal.”

Apalagi ada pekerjaan-pekerjaan yang mengandung risiko.

Sedangkan P yang dimaksud adalah *passion*. Jika pekerjaan telah menjadi *passion*-nya, maka karyawan akan menikmati pekerjaannya. Dengan demikian dia akan bekerja dengan sepenuh hati dan hasilnya akan maksimal. Sedangkan karyawan yang bekerja karena terpaksa atau sekadar melaksanakan kewajiban, hasilnya tidak akan maksimal.

Kriteria Pemimpin

Kriteria di atas berlaku untuk semua karyawan. Namun untuk level pimpinan apalagi pimpinan puncak di unit kerja, diperlukan kriteria tambahan. Jack dan Suzy Welch menyebutkan empat tambahan untuk syarat pimpinan, yaitu *authenticity*, *ability to see around corners*, *strong penchant to surround themselves with better people*, dan *heavy duty resilience*.

Orang dengan *authenticity* memiliki kemandirian dan rasa percaya diri yang kuat. Dengan demikian dia akan berani

mengambil keputusan yang dianggap tepat walaupun mungkin tidak populer. Pemimpin apalagi pemimpin puncak tidak boleh hanya mencari popularitas dan melupakan kemajuan organisasi. Pemimpin dengan *authenticity* tidak akan sekadar mengikuti arus orang banyak. Dia akan mengambil langkah berani demi kemajuan organisasi yang dipimpinya.

Yang dimaksud dengan *ability to see around corners* adalah kemampuan memprediksi apa yang akan terjadi di masa datang. Tentu yang dimaksud bukan semacam juru ramal, tetapi dengan berbagai data dan fenomena, pemimpin puncak harus mampu membuat prediksi ke depan. Dengan begitu, dapat dilakukan antisipasinya. Bahkan dengan kemampuan itu, yang bersangkutan dapat “memanfaatkan” perubahan itu untuk kemajuan organisasi.

Pemimpin harus mampu mendayagunakan staf untuk kemajuan organisasi. Makin pandai staf yang dimiliki tentunya makin lancar pekerjaan. Namun demikian tidak semua pimpinan merasa nyaman ketika dikelilingi dan mendapat masukan dari karyawan yang lebih pandai dari dia sendiri. Pemimpin yang baik, apalagi pemimpin puncak, seharusnya siap dikelilingi dan mendapat masukan dari staf yang lebih pandai atau lebih pengalaman dari dia sendiri. Pemimpin seperti itulah yang oleh Jack dan Suzy Welch disebut dengan *strong penchant to surround themselves with better people*.

Tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Demikian pula setiap organisasi pernah mengalami kegagalan program. Setiap orang maupun organisasi juga akan selalu menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Pemimpin apalagi pemimpin puncak harus memiliki *heavy duty resilience*, yaitu kemampuan menghadapi tantangan

dan berani bangkit dari kegagalan. Pemimpin yang baik harus memaknai kegagalan sebagai pelajaran dan sukses yang tertunda. Pemimpin yang baik harus memaknai tantangan sebagai peluang untuk sukses.

Jujur saya merasa mendapat pelajaran banyak dari buku *Winning* ini. Yang ingin mendapatkan gambaran lebih lengkap, silahkan membaca buku aslinya. Semoga. ◆



Bagian 6

PRIBADI INSPIRATIF

1

Defi Ingin Majukan Anak Talaud

ni hari pertama saya bersama dengan tim monitoring evaluasi (monev) datang ke Desa Bulude, Kecamatan Essang, Kepulauan Talaud Kabupaten, Sulawesi Utara. Sampai di lokasi (di rumah tokoh masyarakat, sekaligus Ketua Komite Sekolah) kami disambut oleh Komandan Koramil, Kepala Desa Bulude dan Bulude Selatan, Kepala SMP Satu Atap Negeri 1 Essang di Bulude, Kepala Negeri 3 Essang di Mamahan, Kepala SDK Nazari Bulude, para siswa SD dan SMP serta warga sekitar.

Sungguh di luar dugaan. Walaupun di saat kami datang matahari sudah tenggelam (sekitar pukul 18.30), tetapi mereka tetap menunggu. Halaman Pak Ketua Komite Sekolah dipenuhi para undangan, termasuk anak-anak SD dan SMP

yang memakai seragam. Halaman rumah dipasangi terop lengkap dengan janur. Jadi mirip dengan orang punya hajut di Jawa. Ada upacara penyambutan secara adat, dengan bahasa daerah, sehingga diterjemahkan. Artinya kira-kira ucapan selamat datang.

Acara diisi dengan sambutan dan hiburan berupa tarian dan paduan suara anak-anak SD dan SMP. Dan tentu saja sambutan tuan rumah dan tim monev. Sungguh menarik, anak-anak itu sudah sejak pukul 15-an menunggu dan tetap bersemangat saat menari. Anak-anak SD menari tempurung yang diiringi lagu daerah yang dinyanyikan oleh gurunya. Sangat khas. Ketua Komite yang mewakili masyarakat menyampaikan, “baru kali ini Bulude didatangi pejabat dari luar Talaud.”

Selesai acara “resmi” kami semua yang hadir menikmati hidangan makan malam. Konon makanan tersebut dimasak oleh masyarakat sekitar secara gotong royong. Masakannya khas daerah dan dipenuhi oleh *sea food*. Ada lobster besar-besar yang banyak di Talaud, ada ketam kenari yang sangat khas, berbagai jenis ikan laut, dan sayur-sayuran khas Talaud.

Setelah selesai makan malam, kami minta waktu untuk ketemu dengan peserta SM3T. Maksudnya untuk menerima laporan, apa yang sudah dilaksanakan dan apa masalah yang dihadapi, agar kami dapat membantu memecahkan. Secara umum tidak ada masalah yang berat. Seperti biasa, masalah utama adalah kekurangan guru sehingga peserta SM3T seringkali harus mengajar rangkap matapelajaran dan juga rangkap kelas untuk SD. Kemampuan anak-anak SD dan SMP juga sangat “terbatas”, sehingga peserta yang mengajar di SMP takut bagaimana nanti anak-anaknya menghadapi Ujian Nasional.

Sambil mendengarkan peserta menyampaikan laporan, saya mencoba mengamati raut muka mereka. Umumnya cerah dan tampak gembira. Oleh karena itu, di sela-sela laporan saya menyela: “Kok sepertinya sudah para kerasan ya. Apalagi sudah pada bisa bahasa daerah”. Dan serempak, mereka menyatakan “kerasan!!.” Mungkin, karena masyarakatnya sangat ramah, terbuka dan ekonomi masyarakat baik, sehingga tidak ada hambatan yang terkait dengan makan, tempat tinggal dan interaksi mereka dengan para guru serta masyarakat sekitar sekolah.

Tiba giliran Defi Bagus Satriyo tampil, laporan yang disampaikan agak berbeda. Alumni FIK ini bertanya bagaimana dapat membantu anak-anak Talaud yang memiliki prestasi bagus, agar dapat sekolah “keluar” Talaud. Menurut dia, ada beberapa anak yang prestasinya bagus. Anak-anak itu tidak akan berkembang maksimal kalau tetap sekolah di sekitar Bulude. Defi ingin anak-anak tersebut dapat bersekolah di Jawa. Namun, dia belum tahu caranya membawa anak-anak itu ke Jawa. Bagaimana cara pindah dan mungkin terbayang siapa yang akan membiayai.

Saya terharu bercampur bangga mendapat pertanyaan itu. Pertanyaan itu menunjukkan kepekaan Defi untuk membantu anak-anak Talaud yang berprestasi. Jika anak-anak pandai yang dimaksud Defi memang ingin melanjutkan ke sekolah yang tinggi, maka ada indikator “sepasang” harapan saya terhadap program SM3T mulai tampak hasilnya. Melalui SM3T saya berharap, di satu sisi, peserta yang nantinya menjadi guru mengenal Indonesia, tidak hanya mengenal Jawa. Banyak daerah lain yang keadaannya belum sebaik Jawa. Namun di daerah itu pasti ada “mutiara” berupa anak-anak cerdas yang perlu pembinaan. Saya yakin di kemudian hari, di antara peserta

SM3T ada yang menjadi kepala sekolah, kepala dinas pendidikan kabupaten atau provinsi, bahkan akan menjadi bupati atau menteri. Moga-moga setelah menjadi pejabat, mereka ingat daerah tempat mereka melaksanakan SM3T dan tetap ingin membantu.

Di sisi lain, kehadiran peserta SM3T dapat menjadi “jendela” bagi anak-anak SD/MI, SMP/MTs dan SMK/SMK/MA setempat untuk melihat “dunia lain”. Dunia yang lebih menjanjikan. Melalui interaksi dengan peserta SM3T, diharapkan pada anak-anak setempat muncul keinginan untuk sekolah sampai keluar daerahnya. Diharapkan dari anak-anak setempat muncul keinginan untuk kuliah di perguruan tinggi dan paling tidak menjadi “orang-orang seperti peserta SM3T”.

Nah, pertanyaan Defi itu merupakan indikator kepedulian peserta SM3T untuk membantu anak-anak setempat. Jika ternyata anak-anak setempat juga ingin sekolah ke Jawa, berarti “jendela” SM3T juga telah berfungsi. Program SM3T telah menjadi wahana untuk mempercepat kemajuan SDM di Indonesia, khususnya bagi daerah tertinggal.

Merespons pertanyaan Defi, saya sampaikan bahwa peluang itu sangat banyak. Di Jawa banyak sekolah yang mau menerima anak-anak pandai dari daerah. Bahkan banyak yang mau memberikan beasiswa dan asrama. Saya memberi contoh beberapa nama sekolah. Memang pada umumnya sekolah swasta yang memiliki misi membantu masyarakat kurang mampu. Namun umumnya sekolah swasta yang bermutu bagus. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Defi dan peserta lainnya, tolong bertemu dengan anak tersebut, orangtuanya dan juga guru di sekolah setempat untuk merundingkannya. Jika mereka setuju dan bertekad kuat, kami siap membantu. Semoga

banyak Defi-Defi yang lain, sehingga tidak hanya menjadi “jendela” tetapi menjadi katalisator kesuksesan anak-anak cerdas dari daerah SM3T. ◆

2

Lorentino Guterres Berpikir Ke Depan

Namanya mengingatkan kita kepada orang yang pada masa “perpisahan” Timor Timur menjadi Timor Leste banyak menghiasi koran dan televisi, yaitu Enrico Guterres. Dan memang sama-sama orang dari sana, sehingga wajar kalau berasal dari satu marga. Bedanya Lorentino memilih menjadi warga Timor Leste, sedangkan Enrico Guterres memilih menjadi warga negara Indonesia.

Pak Lorentino, begitu dia dipanggil, adalah Direktur Katilosa, sebuah NGO Timor Leste yang bergerak di bidang penanganan orang cacat. Katilosa bekerja sama dengan Unesa untuk mengembangkan pendidikan inklusi di Timor Leste. Tanggal 2-4 Juli 2013 saya diundang Katilosa ke

”

Lorentino Guterres memiliki pola pikirnya yang terbuka.

Pada saat masih banyak orang Timor Leste “ragu-ragu” bekerja sama dengan Indonesia, dia sudah melangkah.

Pikiran bahwa Indonesia pernah “menjajah” dipahami sebagai bagian sejarah masa lalu.

Baucau, kota kedua di Timor Leste, untuk menandatangani nota kesepahaman, sekaligus mengisi pelatihan guru.

Orangnya kecil dengan tinggi sekitar 155 cm. Kulitnya terang dan rambutnya berombak dan tidak keriting. Dari tampilan Pak Lorentino lebih mirip orang NTB atau Sulsel. Berbeda dengan orang Timor Leste yang pada umumnya yang berkulit gelap dengan rambut keriting. Bahasa Indonesiannya lancar dengan logat yang mirip orang Jawa. Jadi kalau tidak kenal orang mengira dia orang Indonesia, yang berasal dari Jawa atau NTB atau Sulawesi Selatan.

Saya kali pertama bertemu dengannya di Denpasar. Saat menunggu pesawat untuk penerbangan Denpasar-Dili, tiba-tiba dia muncul. Pak Jarwanto memperkenalkan saya dengan dia. Ternyata dia dalam perjalanan pulang dari Korea Selatan. Sepertinya dia sudah mengatur, kembali ke Timor Leste tepat orang yang diundang datang ke sana. Walaupun baru ketemu, dia segera akrab dan banyak

bercerita.

Tiba di Dili, dialah yang menyopiri kami menuju Baucau dengan mengendarai Toyota Landcruiser. Badannya yang kecil menyebabkan seperti lucu saat menyopiri mobil jip yang begitu gede. Selama perjalanan saya duduk di sampingnya, sehingga dapat ngobrol selama perjalanan selama sekitar empat jam. Obrolan dengan aneka topik. Mulai yang sangat ringan, misalnya sudah bulan Juli tetapi masih banyak hujan. Sampai yang agak sensitif, mengapa pemerintah Timor Leste memilih bahasa Porto sebagai bahasa nasional.

Dari obrolan, saya menangkap Pak Lorentino orang yang energik dan punya pergaulan sangat luas. Lulusan seminari untuk jenjang SMP dan SMA itu, kemudian kuliah di Universitas Katholik Widya Mandira, Kupang. Pada waktu Timor Timur pisah dari Indonesia, dia belum lulus dan terpaksa berhenti. Selanjutnya bekerja di UN selama lima tahun sambil menyelesaikan kuliah di Dili.

Menurut dia, banyak “ahli” dari UN yang membantu Timor Leste itu sebenarnya tidak pandai. Gajinya sangat besar, tetapi tidak dapat berbuat banyak. Mereka tidak paham kondisi dan budaya Timor Leste, sehingga hanya ingin membuat Timor Leste meniru negaranya. Pada hal situasi dan kondisinya jauh berbeda. Akhirnya Lorentino mengundurkan diri dari pekerjaannya lalu mendirikan Katilosa.

Selama tiga hari bersamanya, diam-diam saya mengagumi dia. Orang NGO tetapi begitu luas jaringannya. Saat di Baucau, hampir setiap ketemu orang menyapanya. Berarti dia dikenal luas oleh masyarakat Baucau. Saat makan malam, Direktur Pendidikan Distrik Baucau tampak sangat menghormatinya. Saat pembukaan Pelatihan Pen-

didikan Inklusi bagi kepala sekolah, tampak sekali Wakil Menteri Solidaritas Sosial, Sekretaris Daerah Baucau juga sangat menghormatinya. Saat memberi sambutan, tampak dia seorang orator hebat yang meyakinkan semua pihak pentingnya memperhatikan nasib orang cacat.

Pak Lorentino juga aktif di berbagai kegiatan. Kedatangannya ke Korea Selatan mewakili KOI Timor Leste. Dia menjadi salah seorang pengurus KOI dan juga pimpinan Persatuan Renang Timor Leste. Dia bercerita kenal baik dengan Ibu Rita Subowo, Ketua KOI dan juga mantan Menpora, Pak Andi Malarangeng. Dia bercerita bagaimana saling mendukung saat pertandingan bulu tangkis di Inggris beberapa tahun lalu.

Ketika kami diajak berkunjung ke Menteri Pendidikan Timor Leste, ternyata Pak Lorentino kenal baik dengan Pak Menteri. Mereka sempat bercanda karena pernah adik kelas ketika di SMP-SMA Seminari. Dia juga yang meyakinkan Menteri Pendidikan Timor Leste perlunya mengundang Unesa untuk melakukan pelatihan guru dan mengirim guru muda Timor Leste untuk kuliah di Unesa. Dan sangat ajaib, Menteri Pendidikan menyetujui usul itu. Saat itu diputuskan untuk mengirim guru muda atau calon guru untuk kuliah di program studi PLB di Unesa. Menteri Pendidikan Timor Leste juga menyetujui untuk melakukan pelatihan guru MIPA dengan mengundang Unesa.

Apa yang dapat dipelajari dari fenomena Pak Lorentino? *Pertama*, pola pikirnya yang terbuka. Pada saat masih banyak orang Timor Leste “ragu-ragu” bekerja sama dengan Indonesia, dia sudah melangkah. Pikiran bahwa Indonesia pernah “menjajah” dipahami sebagai bagian sejarah masa lalu. Yang penting menatap ke depan dan untuk itu Indonesia adalah pilihan terbaik. Tetangga terdekat, memiliki

budaya yang sangat mirip, dan kenyataannya banyak anak Timor Leste yang kuliah di Indonesia. Apalagi 60% barang yang beredar di Timor Leste didatangkan dari Indonesia.

Kedua, jejaringnya yang sangat luas. Dengan “bendera” NGO, dia dapat bergaul dengan berbagai pihak. Mulai dari kalangan masyarakat biasa, politisi, dan pejabat pemerintahan. Bahkan dengan organisasi internasional. Aktivitasnya di berbagai kegiatan mendukung pengembangan jejaring itu. Demikian pula pengalaman bekerja di UN selama lima tahun. Penguasaan bahasa Inggris yang bagus, bahasa Portugis, bahasa Indonesia, dan tentu bahasa Tetun, membuat Pak Lorentino mudah bergaul dengan berbagai pihak.

Ketiga, kemauan kerja keras. Selama tiga hari saya menyaksikan bagaimana dia kerja keras sampai malam hari untuk mengurus pelatihan.

Itupun ditambah menyopiri kami ke berbagai tempat. Termasuk mengajak makan malam serta mengatur pertemuan dengan beberapa pejabat di Timor Leste. Semoga kita dapat belajar darinya. ◆

3

Kadir Baraja, Infoglobal, dan Pesawat Tempur

r. Abdulkadir Baraja pernah datang ke kampus Unesa. Beliau datang sebagai Ketua Yayasan Dana Sosial Alfalah (YDSF) untuk “meniru” program SM3T bagi sekolah di pelosok di Jawa Timur. Ide cemerlang sekaligus wujud kepedulian YDSF kepada sekolah-sekolah di daerah terpencil di Jawa Timur. Program itu diberi nama Jawa Timur Mengajar. Pada saat itu juga ditandatangani MoU antara Unesa dengan YDSF untuk program Jawa Timur Mengajar. Unesa bertindak sebagai pelaksana dan YDSF selaku penyandang dana.

Di akhir acara Pak Kadir bercerita tentang salah satu perusahaannya, yang bernama Infoglobal. Katanya perusahaan itu dapat *me-replace* dashboard pesawat F5 dan

F16 milik TNI-AU yang banyak *grounded* akibat embargo suku cadang. Saya kaget dan setengah tidak percaya. Bukankah itu teknologi canggih dan hanya perusahaan besar yang dapat melakukan? Untuk meyakinkan saya, beliau mengajak saya melihat *workshop*-nya di daerah Dinoyo. Beliau berjanji akan menjemput saya di kampus.

Rabu pagi, 17 Juli 2013, sekitar pukul 8.30 Pak Kadir sudah berada di lobi rektorat Unesa. Kami segera meluncur ke daerah Dinoyo. Ketika mobil berbelok di suatu gedung tua, di sebelah kantor Pajak jalan Dinoyo, dalam hati saya bertanya: apakah ini lokasi Infoglobal? Gedungnya nampak tua dan kurang terawat. Halamannya ditumbuhi rumput tinggi yang juga tampak kurang terawat. Di tempat parkir ada beberapa mobil tua. Atap tempat parkir terbuat dari seng yang sudah karatan dan bolong-bolong.

Ketika kami masuk lewat pintu halaman samping, terlihat sepeda motor berjajar yang saya duga milik karyawan. Mungkin sekitar 20 buah. Di samping gedung *workshop* tampak gedung lain yang mirip rumah tinggal yang juga kurang terawat. Teras *workshop* terbuat dari paving yang juga tampak sudah tua. Semua mengesankan seperti gedung tua, kurang terawat, dan tidak memberi gambaran perusahaan yang membuat barang canggih. Satu-satunya yang menunjukkan itu, hanya tulisan di gerbang berbunyi “Infoglobal Avionic”.

Ketika masuk saya baru kaget. Begitu membuka pintu, yang saya hadapi adalah model *dashboard* pesawat F5. Ketika didemokan bagaimana sistem kontrol di *dashboard* itu mampu mengendalikan pesawat tempur, saya jadi terkagum-kagum. *Workshop* di gedung tua, mampu *replace* sistem kontrol pesawat tempur. Dari demo tampak sekali semua instrumen berjalan dengan baik sesuai dengan

tayangan pesawat di layar TV.

Setelah itu saya diajak melihat karyawan yang sedang bekerja di ruangan yang sama. Menurut Mas Choirul, pimpinan Infoglobal, ruang itu mirip ruang “R and D”. Di situlah teknologi kontrol pesawat tempur dipelajari. Kemudian dirancang penggantinya. Karena yang asli menggunakan “teknologi lama”, sementara pengganti yang diciptakan menggunakan “teknologi baru”. Namun tempatnya harus sesuai dengan yang ada, maka para desainer harus mampu membuat instrumen yang wadahnya (*casing*-nya) tepat dengan yang lama, fungsinya minimal sama dengan yang lama tetapi menggunakan teknologi baru. Dan ternyata para anak muda itu mampu. Suatu prestasi yang menurut saya harus diacungi jempol.

Menurut Pak Kadir dan Mas Choirul, sistem kontrol pada *dashboard* pesawat F5 dan F16 yang dibuat oleh Infoglobal telah teruji. Artinya, pesawat yang semula *grounded* telah dapat kembali terbang dengan fungsi yang sama dengan aslinya. Oleh karena itu, gedung tua dan tidak terawat itu setiap tahun menjadi kunjungan peserta SESKO AU. Para perwira menengah TNI AU yang konon nantinya akan menjadi pejabat penting itu belajar ke Infoglobal. Bahkan dari email yang dikirim Pak Kadir, saat pameran di Jakarta stand Infoglobal dikunjungi oleh Menhankam.

Yang lebih menarik, gedung tua itu sudah dikunjungi petinggi dari Malaysia dan ditawarkan untuk pindah ke Kuala Lumpur dengan dibuatkan gedung bagus. Konon juga sudah mendapat pesanan dari Iran. Mungkin untuk *me-replace* sistem kontrol pesawat tempur Iran tinggalan Amerika Serikat, pada saat era sebelum revolusi Islam.

Dari ruang R and D, saya diajak ke ruang sebelah yang disebut ruang *assembling*. Di ruang itu empat anak muda

”

Ternyata anak-anak Indonesia terbukti mampu mengerjakan teknologi canggih, yang mungkin tidak dibayangkan banyak orang.”

bekerja, merakit komponen elektronik untuk sistem kontrol tadi. Luar biasa. Mereka bekerja semi manual dibantu dengan kaca pembesar. Namun mereka mampu merakit dan menyoder dengan sangat presisi.

Dari ruang *assembling*, saya diajak melihat ruang desain. Di ruang itu, lagi-lagi anak muda merancang *casing* alat-alat avionik. Kalau alat yang lama ada dan dapat ditiru, tinggal meniru. Namun kalau tidak ada, mereka mendesain dari nol. Hasil desain itu kemudian ditransfer ke mesin CNC yang ada di ruang sebelah. Mesin CNC itu dioperasikan oleh anak SMK yang sedang praktik.

Apa yang dapat dipetik sebagai pelajaran dari Infoglobal Avionic tadi? *Pertama*, ternyata anak-anak Indonesia terbukti mampu mengerjakan teknologi canggih, yang mungkin tidak dibayangkan banyak orang. Menurut Mas Choirul, memang itu pekerjaan berat yang memeras otak dan semangat pantang menyerah. Sesuatu yang mungkin tidak pernah diperoleh di bangku sekolah dan bangku kuliah.

Konon untuk memahami teknologi sistem kontrol pesawat tempur F5 perlu waktu dua tahun. Baru setelah itu memikirkan bagaimana dapat *me-replace* dengan teknologi yang lebih baru.

Kedua, para anak muda tersebut sangat beragam latar belakang pendidikannya. Ada yang berpendidikan S1, D3, dan bahkan beberapa tamatan SMK. Bidangnya juga macam-macam, ada mesin, elektronika, telekomunikasi, dan bahkan ada yang statistik. Ketika saya tanya berapa persen dari apa yang dikerjakan saat ini sudah diperoleh di bangku kuliah, sambil tersenyum rata-rata menyebut angka di bawah 10%. Artinya sebagian besar harus dipelajari sendiri. Itulah sebabnya, mereka mengatakan perlu waktu sekitar satu tahun untuk memahami tugas yang sekarang ditangani. Berarti kemampuan dan semangat belajar sendiri menjadi kunci penting dalam bekerja di Infoglobal.

Ketiga, melihat cara kerja para anak muda itu, rasanya itulah laboratorium yang sebenarnya. Mereka merancang bangun sesuatu yang canggih. Mereka memeras otak untuk menemukan desain yang terbaik, menemukan cara kerja yang terefisien, menemukan rakitan yang presisi dan sebagainya.

Rasanya para pendidik, khususnya perancang kurikulum perlu melihat cara kerja anak muda di Infoglobal. Saya yakin, di era teknologi pola kerja seperti itu yang akan banyak mengisi pekerjaan mendatang. Infoglobal mungkin dapat menjadi laboratorium bagaimana menyiapkan tenaga hebat untuk era iptek. Perancang kurikulum perlu menemukan apa sebenarnya bekal utama yang harus dipelajari dan dikembangkan untuk mampu menghadapi era iptek seperti itu. Dan Pak Kadir layak untuk mendapat apresiasi untuk inovasinya. ◆

4

Kuliah Inspiratif Ismail Nachu

Saya mengenal Ismail Nachu sudah cukup lama, mungkin sekitar 13 tahunan. Saat itu sebagai anak muda aktivis dan menjadi Ketua Masika. Setelah itu menjadi Sekretaris ICMI Jawa Timur dan sekarang menjadi ketuanya. Seingat saya saat menjadi Ketua Masika, dia aktif di LSM. Namun kemudian banting stir menjadi penguasa properti dan sukses.

Ismail Nachu lulusan Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya. Anak nelayan dari Pasuruan yang saat kuliah harus nyambi kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun sekarang sudah pengusaha properti yang sukses membangun perumahan di Surabaya, Madiun, dan Malang. Sekarang juga membangun ruko di Jalan Ahmad

”

**Menjadi
pengusaha itu
mindset. Bukan
kemampuan dan
bukan kerja keras.
Untuk menjadi
pengusaha, seseorang
harus memiliki
konsep diri sebagai
pengusaha.”**

Yani Wonocolo Surabaya, di sekitar pertigaan menuju ke Rungkut Industri.

Latar belakang itulah yang membuat Unesa mengundang dia untuk memberikan “kuliah pendek” menjelang terbuka bersama di hadapan pengurus BEM Universitas, BEM Fakultas, BEM Jurusan dan UKM di lingkungan Unesa. Harapannya, Mas Ismail dapat berbagi pengalaman bagaimana mentrasformasi diri dari mahasiswa dari keluarga kurang mampu, menjadi aktivis kampus, menjadi aktivis LSM, dan menjadi pengusaha muda yang sukses. Rasanya itu penting bagi aktivis kampus Unesa.

Kuliah pendek itu sengaja digandeng dengan sosialisasi tentang UKT (Uang Kuliah Tunggal). Dalam UKT Unesa diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa Unesa berasal dari keluarga kurang mampu. Dalam UKT mahasiswa dikelompokkan berdasar kemampuan ekonomi orang tua menjadi lima tingkatan. Ternyata 57% mahasiswa baru Unesa hasil SNMPTN tahun 2013, termasuk kategori I dan II.

Artinya lebih separuh dari mereka termasuk kategori kurang mampu dan sangat kurang mampu.

Setelah menjelaskan tentang UKT, saya mengantar kuliah Mas Ismail dengan mengatakan: “Mas Ismail ini lulusan IAIN, tetapi dapat menjadi pengusaha sukses. Mas Ismail waktu mahasiswa tergolong kategori sebelah kiri, yaitu kelompok kurang mampu, tetapi sekarang menjadi kelompok kanan, artinya orang yang kaya. Bagaimana bisa begitu nanti beliau akan berbagi pengalaman. Saya yakin walaupun sekarang adik-adik termasuk kelompok sebelah kiri, nanti setelah lulusan akan mampu bergeser menjadi kelompok sebelah kanan.”

Saya sengaja mengikuti kuliah beliau. Di samping untuk menghormati, saya juga ingin mendapatkan informasi apa kunci hidup beliau yang secara cepat mengubah diri dari aktivis kampus, aktivis LSM menjadi pengusaha, dan tetap menjadi aktivis sosial. Tetap menjadi Ketua ICMI Jawa Timur dan memiliki program mencetak 10.000 saudagar muslim. Kantor dia boleh digunakan untuk kegiatan ICMI dan dia siap mendampingi mahasiswa dan anak muda yang ingin menjadi pengusaha.

Dengan cermat mendengarkan kuliah pendeknya, saya menangkap beberapa poin penting. Prinsip-prinsip hidup yang dia terapkan sehingga mampu dengan cepat mentransformasi diri. *Pertama*, menjadi penguasaha itu *mindset*. Bukan kemampuan dan bukan kerja keras. Untuk menjadi pengusaha, seseorang harus memiliki konsep diri sebagai pengusaha. Harus menjadi tujuan hidup dan itu dipegang kuat-kuat. Di benak kita harus tertanam kuat-kuat bahwa ingin menjadi pengusaha dan bukan menjadi pegawai yang digaji orang lain.

Mas Ismail menganalogkan dengan perjalanan. Orang

yang berjalan dari Pasuruan ke Unesa Ketintang, akan cepat sampai kalau dengan jelas memastikan akan ke Unesa dan tahu letak kampusnya. Jika tidak akan *keblasuk-blasuk* tidak cepat sampai atau bahkan tidak pernah sampai. Artinya, harus dipastikan bahwa ingin menjadi pengusaha dan tahu bagaimana jalannya untuk menjadi pengusaha.

Kedua, untuk mendukung ketercapaian tujuan menjadi pengusaha tadi adalah semangat hidup pantang menyerah. Tidak boleh mudah menyerah. Jika belum tahu peta ke kampus Ketintang harus berupaya bertanya dan mencari tahu. Setelah itu harus berani memulai langkah menuju kampus dan tidak mudah menyerah jika ada hambatan. Mas Ismail menceritakan nasihat ibunya, kurang lebih seperti berikut: “Ismail, ibu melahirkan kamu dengan taruhan nyawa. Jika kamu mudah menyerah dalam kehidupan, berarti kamu mengkhianati perjuanganku saat melahirkan kamu.”

Ketiga, menjadi pengusaha harus banyak kawan. Kawan sangat penting bagi pengusaha untuk mendapatkan informasi, mendapatkan bantuan, dan mendapatkan dukungan moral. Pertemanan tidak dapat dibangun sekejap. Oleh karena itu sejak menjadi mahasiswa dan aktivis kampus atau kegiatan lainnya harus membangun pertemanan yang luas. Teman seperti itu sangat berguna setelah menjadi pengusaha yang memerlukan informasi, bantuan dari orang lain.

Ke empat, kepercayaan. Pengusaha tidak akan berkembang jika tidak dipercaya orang lain. Menjual rumah harus dipercaya pembeli. Mencari kredit harus dipercaya bank. Bekerja sama harus dipercaya partner. Bahkan katanya, membangun rumah tangga harus dipercaya istri/suami. Nah, untuk dapat dipercaya jujur menjadi kata kunci. Semoga kita dapat belajar dari Ismail Nachu. ♦

5

Iqra dan Kesederhanaan Prof. Budi Darma

Siapakah Prof Budi Darma, sepertinya tidak perlu dijelaskan. Para budayawan, sastrawan, dan akademisi tentu mengetahui. Beliau adalah guru besar bidang sastra di Universitas Negeri Surabaya, mantan rektor IKIP Surabaya (sekarang menjadi Unesa), budayawan, novelis, cerpenis, dan entah berapa predikat yang beliau miliki. Dan baru saja beliau terpilih sebagai salah satu akademisi berdedikasi sekaligus cerpen beliau terpilih menjadi yang terbaik.

Ketika saya sedang di Jakarta beberapa hari lalu, tiba-tiba beliau kirim SMS memberi tahu kalau tulisan saya dimuat *Jawa Pos*. SMS-nya dengan bahasa Jawa halus bernada pujian, “*Tulisan panjenengan wonten Jawa Pos*

”

Budi Darma sangat sederhana. Cara berpakaian dan bahkan cara menyampaikan pendapat. Kalau rapat jarang sekali berbicara. Namun begitu bicara selalu mengungkapkan hal-hal yang penting dan biasanya peserta lain diam.”

sae sanget”. Saya sungguh “ter-sanjung” mendapat SMS itu. Bayangkan seorang “begawan” bidang sastra memuji tulisan saya. Walaupun saya sadar dan yakin SMS itu lebih banyak bernuasa motivasi.

Sebenarnya saya bingung karena tidak merasa mengirim tulisan ke *Jawa Pos*. Saya baru mengerti ketika mendapat SMS dari Pak Choiri yang menyebutkan bahwa tulisan saya tentang *Iqra* sebagai modal penting pengembangan generasi muda muslim. Oh, jadi itu lebih merupakan wawancara Mas Chudori, wartawan *Jawa Pos*, yang mungkin diolah menjadi artikel. Saya mencoba membuka *Jawa Pos online* tetapi hanya dapat membaca judulnya saja. Ya sudah. Seingat saya, saya menjelaskan bahwa bagi umat muslim belajar itu kewajiban karena itu termaktub dalam ayat Al Qur'an yang pertama kali turun. Jadi yang perlu dipuji sebenarnya Mas Chudori.

Saya memahami kata *iqra* bukan sekadar membaca dalam arti membunyikan huruf. Juga

bukan sekadar membaca suatu teks. Iqra berarti belajar dengan membaca, mengamati dan menganalisis segala sesuatu di alam raya ini. Dengan catatan harus diniati untuk ibadah untuk kemaslahatan umat, karena yang diperintahkan adalah “membaca dengan nama Tuhan”. Artinya mempelajari segala sesuatu dengan tujuan beribadah, yaitu menggunakan pengetahuan hasil belajar tadi untuk kemaslahatan umat manusia.

Apakah ungkapan itu yang dianggap baik oleh Pak Budi Darma? Terus terang saya tidak tahu. Beliau kan penulis hebat dan jujur saya seringkali sulit memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Waktu masih muda dan mengaguminya, saya berusaha membaca novel beliau, namun sulit menangkap pesan di balik itu. Mungkin kepekaan sastra saya terlalu tumpul atau daya imajinasi saya yang terlalu rendah.

Lebih dari itu kadang-kadang saya juga sulit memahami keseharian beliau. Biasanya budayawan atau sastrawan itu nyentrik. Misalnya seperti Emha Aiun Nadjib dan Sutarji Chalsom Bachri. Paling tidak seperti Gus Mustofa Bisri atau Taufik Ismail. Namun keseharian Pak Budi Darma tidak berbeda dengan dosen pada lazimnya. Biasanya beliau berbaju lengan pendek dengan warna putih atau abu-abu dan dimasukkan. Rambutnya dipotong pendek dan disisir rapi. Jadi yang tidak kenal tidak akan mengira kalau beliau itu seorang budayawan kelas wahid.

Sekian tahun lalu saya pernah menanyakan hal itu kepada beliau. Saat itu (pertengahan tahun 1990-an) saya bersama beliau di Makasar ikut suatu acara. Kebetulan naik becak bersama, sehingga saya berkesempatan menanyakan mengapa cara berpakaian beliau tidak seperti seniman pada umumnya. Jawabnya sungguh mengagetkan. Kira-

kira: “saya tidak perlu berpakaian seperti itu.” Hanya itu jawabnya dan sepertinya tidak ingin ditanya lagi. Lagi-lagi saya sulit untuk menangkap apa maksudnya. Saya hanya menebak-nebak, mungkin beliau tidak perlu berpakaian nyentrik, yang penting hasil karyanya dan bukan tampilan luarnya.

Apa yang dapat dipelajari dari Pak Budi Darma? Menurut saya paling tidak ada tiga hal. Pertama, kesederhanaannya. Beliau sangat sederhana. Cara berpakaian dan bahkan cara menyampaikan pendapat. Seingat saya kalau rapat jarang sekali beliau berbicara. Namun begitu berbicara selalu mengungkapkan hal-hal yang penting dan biasanya peserta lain diam. Mungkin beliau berprinsip kalau berbicara harus yang penting, kalau tidak lebih baik diam.

Kedua, sangat menghargai orang lain. Contoh di atas, yaitu mengirimkan SMS untuk memuji tulisan saya, walaupun saya yakin itu lebih bernuasa motivasi. Juga dalam pergaulan keseharian di kampus. Tidak menonjolkan diri, walaupun semua warga Unesa tahu siapa Budi Darma.

Ketiga, orang yang produktif. Walaupun sudah purna dengan usia berkepala tujuh, beliau masih aktif mengajar, menulis, dan mengisi acara seminar/diskusi. Dari tulisan dan makalah yang disampaikan tampak sekali beliau terus belajar. Semoga kita dapat meneladani beliau. ◆

6

Yudi Latif dan Kisah Karakter

Saya mulai mengenal Yudi Latif secara pribadi pada tahun 2009. Namun sebelumnya saya sudah membaca tulisannya di koran, terutama rubrik *resonansi* di *Republika*. Itulah sebabnya ketika saya ditugasi untuk “mengomandani” pengembangan Pendidikan Karakter di Depdiknas (sekarang Kemdikbud) saya mengajak Mas Yudi Latif untuk bergabung. Orangnya cerdas, berpengetahuan, dan idealis. Berpartner dengan Zaim Uchrowi (Direktur Pusbuk), mereka bertandem memberi masukan yang sangat signifikan dalam menyusun konsep Pendidikan Karakter.

Ketika saya pulang Unesa dan mahasiswa mengadakan seminar, Mas Yudi Latif kami undang. Mahasiswa

senang karena mendapatkan pembicara muda, cerdas, dan bercakrawala pandang luas. Di usia 49 tahun Mas Yudi Latif telah berkriprah nyata di dunia pemikiran. Dia alumnus Gontor, S1 bidang Komunikasi Unpad dan S2+S3 Bidang Sosiologi Politik Australian National University. Kualitas intelektual dan kepeduliannya dengan masalah kebangsaan tidak usah diragukan. Dalam tulisan di koran biasanya dia disebut sebagai pemikir masalah keagamaan dan kenegaraan.

Lama tidak ketemu, tahu-tahu Yudi Latif menerbitkan buku yang sangat fenomenal berjudul *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Buku setebal 665 halaman dengan pengantar 20 orang dari berbagai kalangan itu seakan menunjukkan “kelas” Yudi Latif. Seingat saya buku itu dibedah di beberapa tempat. Almarhum Taufiq Kemas seperti “kesengsem” dengan pemikiran Yudi Latif, sehingga menyempatkan diri untuk ikut hadir dan memfasilitasi bedah buku tersebut. Konon buku itu dijadikan buku teks wajib di beberapa perguruan tinggi. Saya yang bidangnya jauh dari kandungan buku itu, tertarik ikut membeli dan membaca.

Membaca buku itu, saya merenung berapa lama dia menulis. Bagaimana dia mencari sumber. Siapa saja yang diajak diskusi dalam proses penyusunannya. Konon Yudi Latif perlu waktu dua tahun menulis buku itu. Lama mencari sumbernya tidak dapat dipastikan, karena dihimpun sedikit demi sedikit dan sambil berjalan. Yang jelas perlu waktu sangat lama. Saya sendiri sulit membayangkan, bagaimana dapat memperoleh sumber koran, naskah pidato, notulen rapat, artikel majalah pada masa sebelum kemerdekaan. Tetapi itulah salah satu kelebihan Yudi Latif. Beridealisme tinggi, tekun, dan pantang menyerah dalam

melakukan sesuatu.

Tanpa sengaja pada 8 Oktober 2013 sore saya ketemu Mas Yudi di bandara Cengkareng. Setelah saling menyapa dan bertanya tentang kabar kesehatan, saya bertanya “sekarang sedang menulis buku apa Mas?”. Dia menjawab sedang menulis buku kisah orang-orang Indonesia yang berkarakter hebat. Menurut dia, sebenarnya banyak orang Indonesia yang dapat menjadi teladan karakter. Hanya saja tidak ada yang menulis atau menceritakan. Yang dimuat di koran dan diberitakan di TV, pada umumnya yang negatif. Seakan-akan Indonesia tidak memiliki teladan untuk pendidikan karakter.

Dia lantas menjelaskan mengapa para rasul, misalnya Ibrahim, Musa, dan Muhammad, juga diteladani oleh masyarakat pada zaman sekarang, karena perilakunya dikisahkan oleh para dai atau buku-buku. Orang sekarang tidak pernah ketemu dengan para rasul tetapi memahami perilaku agungnya dari kisah-kisah yang dibaca atau dijelaskan para guru agama dan dai.

Untuk penyusunan buku itu,

”

Sebenarnya banyak orang Indonesia yang dapat menjadi teladan karakter. Hanya saja tidak ada yang menulis atau menceritakan.

Yang dimuat di koran dan diberitakan di TV, pada umumnya yang negatif.”

Yudi Latif membaca ratusan biografi, mencari bahan dari seluruh pelosok negeri. Dia mendapatkan ratusan kisah orang (saya lebih senang menyebut tokoh karakter) dari berbagai profesi, dari berbagai agama dan dari berbagai suku. Menurut dia, Indonesia memiliki segudang teladan orang berkarakter mulia. Hanya saja belum ada yang menuliskan secara utuh sehingga menjadi bacaan masyarakat.

Saya terhenyak dan bertambah kagum kepada anak muda ini. Dia sangat peka terhadap kebutuhan negara kita. Ketika banyak warga bangsa yang “agak lupa” dengan Pancasila, dia menerbitkan buku tentang “kehebatan” Pancasila. Ketika kita sedang bingung bagaimana melaksanakan Pendidikan Karakter, dia bersiap menulis buku tentang kisah-kisah orang berkarakter.

Di tengah-tengah kami ngobrol, muncul Bu Unifah Rosyidi, Kepala Pusat Pengembangan Pendidik di BPSDM Kemdiknas. Gayung bersambut, karena Bu Unifah memerlukan referensi atau bahan bacaan untuk pelatihan guru. Dan apa yang sedang ditulis Mas Yudi Latif rasanya sangat cocok untuk guru PPKn, guru Sejarah, guru Agama dan guru bidang lain yang mengajarkan Pendidikan Karakter.

Ketika pembicaraan semakin *gayeng* saya menyarankan bahasa buku itu “diturunkan” agar tidak terlaku akademik seperti buku *Negara Paripurna*. Secara berkelakar, saya katakan kalau buku *Negara Paripurna* untuk pembaca yang paripurna, sedangkan buku yang sedang ditulis itu untuk dibaca anak-anak SD dan SMP. Syukur kalau ada foto atau gambar tokoh yang dikisahkan. Semoga buku itu mempermudah guru dalam melaksanakan Pendidikan Karakter. Dan semoga kita dapat belajar pada kegigihan Mas Yudi Latif. ◆

7

Mbak Yos, Mantan TKW yang Eksis

Ini sebuah kisah inspiratif yang saya pungut dari sebuah warung di Taiwan. Saya mengunjungi negeri berjuluk Naga Kecil Asia itu setelah selesai mengikuti acara Confucius Institute International Conference di Beijing. Minggu sore, sebelum penutupan acara selesai saya berangkat ke Taipei, karena Senin pagi sudah ada acara di NTNU (National Taiwan Normal University).

Kami masuk Taipei sudah pukul 23.30 malam dan dijemput oleh Pak Eppy bersama dua orang staf dari University of Taipei. Sampai di hotel sudah sekitar pukul 00.30. Jadi langsung masuk hotel dan tidur. Namun ketika *check in*, saya sempat bertanya apakah ada sarapan dan dijawab petugasnya “ada”. Saya bertanya apakah ada makanan

”

**Mbak Yos paham,
di Taiwan terdapat
20 ribu orang
Indonesia dan
di dalamnya termasuk
2.000 mahasiswa
Indonesia yang kuliah
di Taiwan.
Mereka merupakan
pasar bagus untuk
barang dan makanan
Indonesia.”**

yang tidak mengandung babi, dijawab “akan disiapkan telur ceplok”. Hal itu saya tanyakan, karena informasi yang saya dapat tidak mudah mendapatkan makanan yang tidak mengandung babi di Taiwan. Apalagi hotel tempat saya menginap termasuk hotel kecil.

Besuk paginya saya benar-benar mendapatkan telur ceplok. Ketika saya menyodorkan nomor kamar, petugas restoran langsung memberi saya satu telur ceplok. Lumayan, dapat di makan bersama roti bakar. Sayangnya layanan telur ceplok hanya berjalan satu hari. Hari kedua, ketika sarapan saya tanyakan ternyata tidak ada. Petugas restoran juga susah diajak komunikasi, karena tidak lancar berbahasa Inggris. Ya, akhirnya hanya makan roti bakar dengan diolesi selai.

Saya bertanya kepada teman-teman yang sedang kuliah di Taiwan, apakah ada makanan Indonesia yang tidak jauh dari hotel. Ternyata ada. Pemilik warungnya bernama Mbak Yos, orang dari Magetan. Kata teman-

teman, jika terpaksa boleh membayar dengan uang rupiah. Saya sangat gembira dan hari itu juga minta diantar ke warung Mbak Yos. Sudah beberapa hari perut tidak merasakan masakan Indonesia.

Ternyata warung Mbak Yos merupakan toko dan merangkap warung. Saya menduga awalnya merupakan toko, tetapi kemudian juga menjual makanan (nasi). Di dalam toko itu ada empat meja makan dengan masing-masing meja makan ada empat kursi. Pola penyajian mirip swalayan. Pembeli mengambil sendiri, baik nasi maupun lauknya. Lauknya mirip “makanan rumah” di Jawa. Ada sayur terong, sayur tahu, sayur kangkung, tempe orek-orek, bali daging, tempe goreng dan sebagainya. Rasanya, menurut saya, sama dengan masakan di Jawa.

Sambil makan, saya memperhatikan Mbak Yos. Saya menduga usianya sekitar 30-an. Wanita ini memakai celana jeans dan berkaos lengan pendek. Rambutnya diikat. Berkulit kuning dan agak pendiam, tetapi memberi kesan cerdas dan cekatan dalam bekerja. Dari obrolan singkat, saya menangkap kesan Mbak Yos adalah pekerja keras dan berkemauan keras.

Info yang saya dapat, pada awalnya Mbak Yos adalah TKW yang dipekerjakan menjaga toko. Tidak tahu ceritanya, akhirnya Mbak Yos menikah dengan orang Taiwan dan mengelola toko kecil yang merangkap sebagai warung makan. Isi tokonya sangat “berbau” Indonesia. Hampir semua barang yang dijual berasal dari Indonesia. Mbak Yos juga menjual tempe mentah yang dibuat sendiri. Dan kabarnya laris.

Saya bertanya, siapa yang membeli tempe mentah itu. Dijawab, kebanyakan orang Indonesia, tetapi juga ada orang Malaysia dan juga orang Taiwan. Kedelai mudah

didapat di Taiwan, tetapi ragi harus dikirim dari Indonesia. Demikian pula yang makan di warung Mbak Yos, juga ada orang-orang non Indonesia. Artinya, makanan Indonesia (atau masakan rumahan Jawa) dapat diterima oleh orang Malaysia dan orang Taiwan.

Ketika saya makan, Mbak Yos menerima telepon dengan berbahasa Indonesia campur bahwa Jawa. Sepertinya tentang pengiriman barang yang harus dikirim ke tempat lain. Ternyata, warung Mbak Yos sudah punya “cabang” yang ditunggu adiknya. Bukan main. Saya sangat bangga. Ada orang Indonesia (mantan TKW lagi) berhasil membuka usaha di Taiwan.

Saya sempat bertemu dengan suami Mbak Yos. Namun sulit untuk berkomunikasi, karena beliau tidak dapat berbahasa Indonesia maupun Inggris. Sementara saya tidak dapat berhasa China. Namun, sepotong-sepotong, sang suami ini bisa berbahasa Jawa. Misalnya, bilang *matur nuwun*. Dia juga bilang kalau bulan depan akan ke Indonesia. Kesan saya, suami Mbak Yos ramah.

Di toko yang merangkap warung itu hanya Mbak Yos dan suaminya yang menanganinya. Tidak ada orang lain. Mengamati aktivitas mereka berdua selama tiga kali makan di situ, saya menangkap kesan Mbak Yos yang lebih memegang peran. Misalnya, ketika Mbak Yos akan berangkat belanja berpesanan ini dan itu (saya tidak paham karena dengan bahasa China). Demikian pula ketika Mbak Yos sedang masak di toko bagian belakang, meminta ini dan itu kepada suaminya. Namun, tampak sekali keduanya kompak bekerja.

Ketika malam di hotel saya merenung. Apa kunci sukses Mbak Yos, mantan TKW dari desa di Magetan dapat membuka usaha di rantau. Saya bukan ahli bisnis, jadi hanya

dapat menduga-duga. Izinkan saya berbagi dugaan itu. *Pertama*, Mbak Yos punya kemauan kuat, kerja keras, dan percaya diri. Tentu juga cerdas. Saya menduga itu yang membuat Mbak Yos berani membuka usaha.

Kedua, Mbak Yos memiliki insting bisnis yang cukup tajam. Tokonya diberi nama dengan bahasa Indonesia. Sayang saya lupa namanya. Yang dijual di toko itu barang-barang Indonesia. Makanan yang dijual juga masakan tradisional Indonesia (Jawa). Mungkin Mbak Yos paham, di Taiwan terdapat 20 ribu orang Indonesia dan di dalamnya termasuk 2.000 mahasiswa Indonesia yang kuliah di Taiwan. Mereka merupakan pasar bagus untuk barang dan makanan Indonesia. *Ketiga*, dalam skala tertentu Mbak Yos paham manajemen. Dari telepon yang saya dengar, instruksi Mbak Yos kepada adiknya yang ditugasi menjaga cabang warungnya, tampak sekali dirinya menguasai bagaimana mengelola warung.

Semoga kita dapat belajar dari perjalanan Mbak Yos. Seandainya mudik ke Indonesia, sangat baik kalau diundang untuk “mengajar” para calon TKW/TKI dan bahkan siswa/mahasiswa. Semoga. ◆

8

Bu Sarce Mendidik Anak TKI

Salah satu pendorong yang membuat saya mau ikut ke Sabah Malaysia adalah ingin melihat dengan mata kepala sendiri anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dulu tidak mendapat kesempatan bersekolah kini sudah mendapat “pintu belajar” melalui *Community Learning Center* (CLC). Sabtu, 14 Nopember 2015, saya bersama rombongan mendapat kesempatan mengunjungi salah satu tempat itu yaitu CLC Cinta Mata. Lokasi CLC tersebut sekitar tiga jam bermobil dari Kota Kinabalu. Setelah mengunjungi Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), sekitar pukul 9.30 kami meluncur ke Cinta Mata.

Lokasinya di daerah pegunungan, di kaki Gunung

”

Bersama ibu Sarce ada 10 guru yang sebenarnya relawan, karena mengajar dengan gaji seadanya yang dikumpulkan dari orangtua siswa.”

Kinabalu yang udaranya segar. Masyarakatnya banyak yang berkebun sayuran. Lokasi CLC Cinta Mata tidak jauh dari jalan raya, hanya sekitar lima menit bermobil. Keluar dari jalan raya, belok ke jalan menuju daerah wisata, kemudian belok ke jalan makadam lokasi kebun sayur. Sampailah sudah.

CLC Cita Mata menggunakan fasilitas gereja untuk kegiatan belajar mengajar dan memang pada awalnya dirintis oleh para aktivis gereja. Walaupun bernama resmi CLC tetapi lebih tepat disebut SD dan SMP Terbuka. Jumlah siswanya 410 orang, dengan guru 13 orang. Orangtua siswa adalah para TKI yang pada umumnya bekerja sebagai pekerja kebun sayuran. Sebagian besar mereka berasal dari Toraja dan Timor. Mereka sudah di Sabah sangat lama dan banyak anak-anak itu lahir di Sabah. Mereka pada umumnya bekerja sebagai pekerja di kebun sayur milik petani setempat. Ada yang mendapat gaji dan ada yang bekerja dengan pola bagi hasil dengan pemilik lahan/modal.

Saat kami datang, ada seorang ibu berperawakan kecil bercelana panjang sederhana, berbaju merah dengan simbol Garuda Pancasila di dadanya. Segera saja saya hampiri ibu itu dan ternyata beliau ibu guru perintis CLC Cinta Mata. Ibu Sarce, sudah 23 tahun tinggal di Cinta Mata dan menjadi guru di situ sejak CLC dirintis 9 tahun lalu. Walaupun pendidikan formalnya “hanya” SMA, tetapi dari sorot mata dan cara bertutur Bu Sarce adalah sosok cerdas dan teguh pendirian. Dari beliaukah saya mendapat banyak informasi tentang CLC Cinta Mata dan kehidupan TKI di situ.

Bersama ibu Sarce ada 10 guru yang sebenarnya relawan, karena mengajar dengan gaji seadanya yang dikumpulkan dari orangtua siswa. Mereka adalah Bu Sarce, Pak Martin, Pak Sampe, Pak Yohanes, Bu Yuliana, Pak Emanuel, Pak Agustinus, Bu Elis, Pak Yusuf, dan Pak Yunus. Di samping itu ada dua relawan guru dari Malaysia, yaitu Pak Faisal dan Bu Ronisa. Menurut saya ke sepuluh bahkan kedua belas orang itu layak disebut pahlawan pendidikan. Mereka rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk merintis dan mengajar CLC Cinta Mata demi anak-anak TKI yang telah sekian lama teraniaya.

Di depan orang banyak jujur saya mengatakan, saya merasa tidak ada apa-apanya berhadapan dengan beliau-beliau itu. Saya datang ke Cinta Mata karena ditugasi Kemdikbud dan dibiayai dengan uang rakyat. Sementara beliau-beliau itu tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang membiayai tetapi dengan ikhlas merintis CLC. Kalau sekarang mendapat gaji. Toh jumlahnya tidak memadai. Padahal dari informasi yang saya dapat, beliau-beliau itu bukanlah orang kaya.

Pak Martin, di samping guru juga ketua Komite Seko-

lah. Seperti halnya Bu Sarce, tampaknya Yang Maha Adil memberikan imbalan atas perjuangannya. Putra Pak Marti, Bonu Sampe, walaupun sekolah di CLC yang serba terbatas memenangkan Olimpiade Sains dan Seni di Kuala Lumpur dan mendapat medali emas untuk tingkat SMP. Demikian juga putra Bu Sarce juga mendapat juara tiga untuk tingkat SD.

Di akhir acara, kami disuguhi nyanyian *Burung Dadali* oleh murid-murid CLC Cinta Mata. Saya semakin *trenyuh*. Dengan alat seadanya, pakaian seadanya, ternyata mereka menyanyi dengan baik dan penuh semangat. Saya memang tidak melihat bagaimana dia belajar dan juga tidak sempat melihat secara detail sarana pembelajarannya.

Namun dari fasilitas ruangan dan permintaan Pak Martin agar dibantu kursi dan buku, saya menduga fasilitas pembelajarannya juga sangat terbatas. Namun toh dapat melahirkan pemenang Olimpiade Sains dan Seni di Kuala Lumpur. Semoga mereka menjadi pemutus mata rantai kemiskinan bagi keluarga masing-masing. Semoga mereka sukses dalam belajar dan pada saatnya sukses dalam menapaki kehidupan dan tidak kembali miskin seperti orangtuanya. ◆

9

Pak Suwarsono dan Mesin Faks KPK

Saya mendapat undangan menghadiri acara Semi-loka Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan oleh Pemprov Jatim bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tempatnya di Gedung Grahadi Surabaya. Kegiatan pada 2 Oktober 2013 itu berlangsung biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Dibuka oleh Sekda Provinsi Jatim, diteruskan sambutan dari BPKP Jakarta dan KPK. Presentasi dari BPKP Jatim tentang hasil pemeriksaan di Jatim diteruskan dengan tanggapan oleh beberapa instansi dan Walikota Surabaya.

Yang justru menarik adalah sambutan yang disampaikan oleh Pak Suwarsono, Penasihat KPK. Sebuah sambutan yang boleh dikata ringan-ringan saja, tetapi justru me-

”

Mobil dinas tidak boleh mampir mengantar ke rumah

Pak Warsono yang jaraknya hanya lima menit dari kantor KPK. Tidak boleh ada orang lain yang ikut menempati kamar hotel saat dinas, walaupun itu isteri.”

nyentak dan menyentuh. Misalnya, beliau bercerita suatu saat bertanya kepada sekretarisnya, berapa nomor faksimile di kantor KPK. Sekretarisnya balik bertanya, “Untuk apa Bapak bertanya nomor faks?” Dijawab, kalau keluarganya di Yogyakarta akan mengirim faks tiket untuk perjalanan pulang. Pak Warsono kaget, ketika sekretarisnya meminta mengurungkan niat itu. Faks kantor untuk keperluan dinas dan tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi. Walaupun hanya selembat.

Cerita kedua, beliau ke kantor naik ojek. Rumah tinggal Pak Warsono masih di Yogya sedang di Jakarta dirinya hanya kos. Karena jarak dari rumah ke kantor dekat, maka dengan naik ojek perjalanan dapat ditempuh hanya sekitar 5 menit. Biasanya di tengah jalan dia minta berhenti, untuk membeli nasi bungkus untuk dibuat sarapan di kantor. Walaupun kedudukannya sebagai penasihat KPK, tetapi Pak Warsono ke kantor naik ojek dan sarapan nasi bungkus.

Cerita ketiga, saat dirinya

bertugas ke Bandung dan diantar dengan mobil dinas pulang-pergi. Saat pulang, Pak Warsono diantar sampai kantor dan setelah itu pulang dari kantor naik ojek atau jalan kaki. Kenapa mobil tidak mengantar sampai tempat kos? Karena dari kantor ke tempat kos itu urusan pribadi, jadi tidak boleh menggunakan mobil dinas.

Cerita ke empat, ketika beliau bertugas ke Purwokerto. Beliau sudah tahu kalau tidak boleh mampir pulang ke Yogyakarta, karena itu hari kerja dan biaya ke Purwokerto dibiayai oleh kantor. Oleh karena itu Pak Warsono bertanya kepada stafnya bolehkah Bu Warsono nyusul ke Purwokerto? Jawaban stafnya tidak boleh, karena hotel tempat menginap itu dibiayai oleh kantor untuk Pak Warsono yang sedang dinas.

Mendengar cerita itu, Kyai Abdussomad Buchori, Ketua MUI Jatim yang duduk di sebelah saya nyeletuk. Itulah sama dengan yang dicontohkan Khalifah Umar. Suatu saat pintu ruangan Khalifah Umar diketuk dan ternyata yang datang anaknya. Khalifah bertanya, anaknya datang untuk keperluan negara atau keluarga. Anaknya menjawab untuk keperluan keluarga. Maka lampu di ruang kerja Khalifah dimatikan, karena minyak lampu itu dari negara. Dan urusan keluarga tidak boleh menggunakan biaya negara.

Walaupun disampaikan secara santai dan tentang hal-hal yang tampak sederhana, cerita tersebut rasanya menyentak. Saya sulit membayangkan dapat memisahkan secara tegas, mana urusan kantor mana urusan pribadi dan keluarga seperti itu. Mobil tidak boleh mampir mengantar ke rumah yang jaraknya hanya lima menit dari kantor KPK. Tidak boleh ada orang lain yang ikut menempati kamar hotel, walaupun itu Bu Warsono. Faksimile satu lembarpun tidak boleh, padahal itu untuk tiket pulang ke Yogyakarta.

Memang saya pernah mendengar orang yang sudah menerapkan pola seperti itu, yaitu Prof Mahmud Zaki. Ketika beliau menjadi Rektor ITS, kalau bekerja sampai sore dan yang dikerjakan adalah urusan pribadi, maka AC ruangan dimatikan. Konon Ibu Zaki tidak boleh naik mobil dinas, sehingga pernah jatuh dari angkot.

Apa yang dilakukan oleh Prof Mahmud Zaki (atas kehendak sendiri dan mungkin diilhami oleh Khalifah Umar) ternyata dapat dijadikan kode etik di KPK. Sungguh kebijakan bagus yang patut diberi penghargaan. Walaupun saya yakin tidak mudah menerapkan. Juga tidak mudah bagi pejabat dan karyawan KPK untuk melaksanakannya.

Kami sudah tahu kalau “orang KPK” tidak mau disuguhi, tidak mau dijemput, atau diantar saat datang ke suatu instansi. Unesa beberapa kali mengundang dan mendapat tamu dari KPK. Abdullah Hehamuwa (saat itu sebagai Penasihat KPK) pernah hadir dalam acara pembukaan PKKMB. Mas Dedi dan Mas Rian dari KPK juga beberapa kali ke Unesa dalam kaitan Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa baru. Namun informasi Pak Suwarsono tetap saja menyentak.

Ada teman komentar, KPK dapat menerapkan itu karena gajinya besar. Saya setuju untuk dapat menerapkan kebijakan seperti itu, gaji harus cukup. Namun gaji cukup belum tentu dapat menerapkan. Jadi gaji cukup merupakan syarat perlu tetapi belum merupakan syarat cukup. Syarat cukup-nya adalah tekad yang kuat. Semoga kode etik KPK menjadi teladan bagi kita semua. ◆

10

Bagus Adimas Tunanetra yang Istimewa

PRIBADI
INSPIRATIF

315

Ada hal menarik pada saat berlangsungnya wisuda ke-76 di Universitas Negeri Surabaya. Wisudawan sebanyak 1.515 orang terdiri dari doktor, magister, sarjana dan ahli madya (D3). Upacara wisuda di Unesa berlangsung sederhana yang cepat. Agar hikmad, acara dibagi dua: pagi antara pukul 08.00-11.00 dan siang pukul 13.00-16.00. Jadi peserta pagi sekitar 750 orang demikian pula peserta siang hari.

Semua berjalan seperti biasa, kecuali satu. Adanya Bagus Adimas Prasetio. Siapa dia? Lulusan S2 (magister) program studi Seni dan Budaya. Kebetulan dia tunanetra. Sebenarnya sudah sering Unesa mewisuda S1 atau S2 yang berkebutuhan khusus atau menyandang ketunaan. Namun

SEMUA 'DIHANDLE' GOOGLE,
TUGAS SEKOLAH APA?

biasanya mereka dari program studi Pendidikan Luar Biasa (PLB). Namun kali ini, Bagus lulus S2 Pendidikan Seni dan Budaya dengan IPK 3,43. Judul tesisnya *Pengembangan Buku Ajar Seni Musik untuk Panduan Guru SLB-A YPAB Surabaya, Berbasis Pemecahan Masalah pada Materi Pelajaran Piano*.

Saya tidak sempat berbicara banyak. Saya hanya sempat bertanya sekilas tentang kegiatannya sehari-hari saat berfoto bersama. Seperti biasanya, setiap ada wisudawan penyandang ketunaan saya ajak berfoto bersama, setelah acara foto rektor bersama para pemuncak yang mendapat piagam penghargaan. Selebihnya saya bertanya tentang Mas Bagus kepada Kaprodi S1 Seni Budaya, Dr. Trisakti.

Dari pengamatan saya saat bersalaman memberi ucapan selamat setelah Mas Bagus menerima ijazah dari Asisten Direktur I Pascasarjana (Prof Ismet Basuki) dan juga saat berfoto bersama. Juga dari dialog singkat sambil foto bersama dan informasi yang saya terima dari Bu Trisakti, saya menangkap ada dua pelajaran penting dari Mas Bagus, yang ingin saya bagi dengan pembaca.

Pertama, saya bertambah yakin bahwa Sang Khalik itu Maha Adil. Mas Bagus yang di satu sisi dikaruniai tunanetra, di sisi lain dikaruniai kemampuan dalam bidang musik dan ketekunan serta keuletan yang luar biasa. Ternyata Mas Bagus adalah pianis andal dan sekaligus mengajar piano. Judul tesisnya menunjukkan bahwa dia punya pemahaman yang bagus terhadap proses pembelajaran musik di SLB, apa masalah yang dihadapi dan bagaimana solusinya.

IPK 3,43 memang tidak istimewa bagi “orang normal” namun sudah termasuk bagus. Namun jika dilihat bahwa Mas Bagus tunanetra, capaian seperti sungguh sangat istimewa. Secara mudah dibayangkan bahwa kira-kira

60 % matakuliah mendapat nilai B dan 40 % matakuliah mendapat nilai A. Dapat dibayangkan bagaimana Mas Bagus mampu mengikuti kuliah bersama teman-teman yang dapat melihat dan ternyata mampu meraih prestasi yang bagus.

Mungkin di program studi PLB sudah tersedia bacaan dan fasilitas yang mendukung penyandang tunanetra seperti Mas Bagus. Namun di program studi Seni Budaya belum menyediakan. Dengan demikian, secara prinsip Mas Bagus terpaksa mengikuti kuliah seperti teman lainnya yang dapat melihat. Sekali lagi, jika tidak memiliki kelebihan dia tentu akan kesulitan.

Kedua, daya juang dan optimisme. Saat salaman dan dialog singkat saya menangkap semangat juang dan optimisme yang sangat kuat pada Mas Bagus. Sama sekali tidak tampak kesan minder atau ragu-ragu pada dia. Ketika salaman menjelang foto bersama dia memanggil nama saya dengan jelas dan mantap. Tentu diberi tahu petugas, tetapi cara menyebut nama saya tampak tidak ada keraguan. Cara menjabat tangan juga terkesan mantap.

Ketika saya tanya apa kegiatan sehari-hari, dengan mantap menjawab: “sebagai pianis dan mengajar piano”. Dari Bu Trisakti saya mendapat informasi memang dia sebagai pianis yang andal dan mengajar di YPAB. Saya jadi kagum, walaupun tunanetra tetapi Mas Bagus “bekerja” dan melanjutkan kuliah ke jenjang S2. Konon tesisnya juga termasuk sangat baik. Semoga kita dapat belajar kepada Mas Bagus Adimas Prasetyo. ♦

11

Refleksi Diri Cara Gus Mus

PRIBADI
INSPIRATIF

319

Saya gembira karena berkesempatan menyaksikan penampilan KH Mustofa Bisri (Gus Mus) di acara Mata Najwa Metro TV. Tampaknya Najwa Sihab sengaja ingin menampilkan Pengasuh Ponpes Raudlatuh Tholibin Rembang ini sebagai sosok utuh, sehingga yang hadir dan diminta pendapat tentang Gus Mus adalah berbagai elemen yang tentu memberikan testimoni tentang sosok Rais Syuriah PBNU itu dari berbagai sudut pandang pula. Gus Mus sebagai ulama, sebagai budayawan dan juga sebagai “manusia” sedikit banyak tergambarkan dalam tayangan itu.

Di akhir acara, Najwa minta Gus Mus membacakan puisinya dengan judul *Puisi Islam*. Seingat saya, saya sudah

SEMUA 'DIHANDLE' GOOGLE,
TUGAS SEKOLAH APA?

pernah membaca puisi itu, tetapi ketika dibacakan oleh penulisnya sendiri, saya menjadi tercenung. Saya baru merasa dapat menangkap makna puisi itu ya saat dibacakan oleh Gus Mus sendiri. Itupun kalau benar tangkapan saya sebagai orang awam dalam hal puisi. Izinkan saya mengutip puisi itu secara utuh.

PUISI ISLAM

*Islam agamaku nomor satu di dunia
Islam benderaku berkibar di mana-mana
Islam tempat ibadahku mewah bagai istana
Islam tempat sekolahku tak kalah dengan yang lainnya
Islam sorbanku
Islam sajadahku
Islam kitabku
Islam podiumku kelas exclusive yang mengubah cara
dunia memandang
Tempat aku menusuk kanan kiri
Islam media massaku
Cahaya komunikasi islami masa kini
Tempat aku menikam saat ini
Islam organisasiku
Islam perusahaanku
Islam yayasanku
Islam instansiku, menara dengan seribu pengeras
suara
Islam muktamarku, forum hiruk-pikuk tiada tara
Islam pulsaku
Islam warungku hanya menjual makanan sorgawi
Islam supermarketku melayani segala keperluan ma-
nusiawi
Islam makananku*

Islam teaterku menampilkan karakter-karakter suci
Islam festivalku memeriahkan hari-hari mati
Islam kaosku
Islam pentasku
Islam seminarku, membahas semua
Islam upacaraku, menyambut segala
Islam puisiku, menyanyikan apa saja
Tuhan, islamkah aku?

Dalam pemahaman saya, kalimat terakhir puisi itu seakan mempertanyakan semua kalimat sebelumnya. Pada kalimat-kalimat sebelumnya Gus Mus menyodorkan Islam sebagai label kita dalam segala aktivitas, yang tentu dengan segala warna-warninya. Nah, puisi diakhiri dengan sebuah pertanyaan jika kita punya aktivitas seperti itu apakah kita layak disebut sebagai orang Islam. Seakan Gus mempertanyakan apakah orang-orang yang mengaku Islam, memiliki berbagai aktivitas berlabel Islam dan bahkan seringkali menyepelekan orang lain yang tidak sefaham, betul-betul dia Islam.

Saya sungguh tidak paham apa yang dimaksud dengan kata “*Islamkah aku?*” oleh Gus Mus. Apakah maksudnya “yang benar-benar Islam dan bukan hanya kulitnya saja.” Jika itu seperti apa ya indikatornya? Jujur saya tidak tahu dan moga-moga ada teman yang berkenan memberikan pencerahan.

Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan itu. Saya justru ingin menggunakan puisi itu sebagai analogi kehidupan kita sehari-hari. Rasanya kita sering melihat fenomena seperti itu atau bahkan kita juga termasuk yang melakukannya. Kita sering mempertanyakan betulkah yang diungkapkan si Fulan itu akan dilaksanakan. Atau betulkah apa yang dilakukan di Fulan itu bertujuan mulia seperti yang

”

Apakah orang-orang yang mengaku Islam, memiliki berbagai aktivitas berlabel Islam dan bahkan seringkali menyepelekan orang lain yang tidak sefaham, betul-betul dia Islam?”

diomongkan. Bahkan kita juga dapat mempertanyakan kepada diri sendiri, betulkah apa yang saya lakukan bertujuan mulia seperti yang saya ucapkan? Jangan-jangan itu semua hanya kedok, karena di balik itu ada tujuan lain.

Merenungkan itu saya teringat seorang teman baik di Unesa yang menyampaikan kelakar berupa pertanyaan sebagai berikut. Bangsa mana yang sedikit bicara tetapi banyak kerja? Biasanya teman lain menjawab: bangsa Jepang. Betul, nah bangsa mana yang banyak bicara dan juga banyak kerja. Ketika tidak ada yang menjawab kawan tadi menjawab sendiri: bangsa Amerika. Pertanyaan selanjutnya, bangsa mana yang banyak bicara tetapi sedikit kerja. Beberapa kawan menjawab: “bangsa Indonesia.” Teman tadi mengatakan: bukan, itu bangsa Arab. Lha kalau kita bangsa Indonesia termasuk apa? “Kalau kita, apa yang dibicarakan dan dikerjakan berbeda,” jawabnya.

Tentu itu hanya kelakar dan kita tidak harus menanggapi dengan serius. Namun ketika kawan tadi mengatakan: kalau bangsa kita, apa yang dikatakan berbeda dengan yang dikerjakan, jangan-jangan seiring dengan puisi Gus Mus tadi. Mari kita menggunakan puisi Gus Mus untuk cermin untuk merefleksi diri. ◆

Catatan Akhir

CATATAN
AKHIR

323

Tidak diduga, buku yang asalnya kumpulan tulisan di blog ini ternyata mengundang banyak tanggapan. Bahkan buku sederhana itu dibedah dua kali pada bulan Maret 2017 lalu dan mendapatkan tanggapan sangat beragam dari peserta. *Email* dan *facebook* saya juga dibanjiri tanggapan, mulai yang sifatnya minta klarifikasi, bertanya dan bahkan ada yang menyanggah, atau katakanlah protes. Berikut ini saya ingin berbagi dengan pembaca.

Beberapa hari sebelum bedah buku, saya minta saran kepada Prof. Kisyani dan Sirikit Syah, MA, apa yang harus saya sampaikan dalam bedah buku? Kedua teman baik, yang merupakan penulis andal itu, memberikan saran yang

SEMUA 'DIHANDLE' GOOGLE,
TUGAS SEKOLAH APA?

hampir sama, yaitu agar saya menyampaikan rangkuman singkat isi buku dan proses kreatif ketika menuliskannya. Untuk saran yang pertama relatif mudah, namun untuk saran yang kedua saya mengalami kesulitan. Mengapa? Karena tulisan itu merupakan *uneg-uneg* yang saya tulis begitu saja. Isinyapun seringkali merupakan respons terhadap apa yang saya lihat, apa yang saya alami, dan apa yang berkecamuk di pikiran saya.

Mengikuti saran kedua teman tadi, di awal presentasi, padalayar monitor, saya pampangkan gambar di bawahini, untuk menunjukkan bahwa tulisan itu buah kerisauan yang kemudian dirangkai oleh orang lain (Mas Adriono) menjadi buku.

Saya tidak banyak memberikan penjelasan yang panjang lebar. Dalam benak saya, sebagai penulis saya tidak etis kalau harus memperdebatkan apa yang saya tulis dengan pihak yang menanggapi. Sengaja dipilih gambar simppanse yang sedang galau, untuk menunjukkan si penulis sendiri (saya) tidak benar-benar memahami fenomena yang se-



dang dibahas.

Jadi buku *Semua Di'handle' Google, Tugas Sekolah Apa?*, bukanlah dimaksudkan sebagai buku teks dimana si penulis “menggurui” si pembaca. Dalam buku itu, justru saya sebagai penulis mengajukan pertanyaan, dengan harapan pembaca mengetahui jawabannya atau paling tidak terdorong untuk mencarinya.

Judul buku ini ternyata juga menimbulkan salah tafsir dan bahkan protes. Pada saat bedah buku yang pertama ada seorang guru dari sekolah elite di Surabaya yang bertanya dan menyanggah. Intinya beliau tidak setuju kalau peran guru dapat diambil alih semua oleh *google*. Guru tetap penting dalam proses pendidikan. Tampaknya ketidaksetujuan itu sangat mendalam, sehingga menurut Mas Adriono, yang bersangkutan tetap belum puas dengan jawaban singkat saya.

Sepertinya Pak Nuh (Prof. Mohammad Nuh) yang menjadi pembedah buku menangkap kerisauan teman guru tadi. Oleh karena itu dengan gaya yang santai dan dengan bahasa yang sederhana Pak Nuh mengklarifikasi bahwa yang dimaksud dengan judul itu bukan guru kehilangan peran, tetapi peran guru harus berubah. “Pak Muchlas ingin mengajak kita semua, khususnya guru, untuk menyadari bahwa perannya berubah karena peran sebagai pemberi informasi telah digantikan oleh *Google*.” Begitu kira-kira penjelasan Pak Nuh.

Mas Satria (Drs. Satria Darma, MM, M.Pd, tokoh literasi dan penulis buku) yang hadir pada bedah buku yang pertama dan menjadi pembedah pada bedah buku yang kedua, sepertinya memahami kemungkinan salah pengertian itu. Oleh karena itu, sebelum ada yang bertanya, beliau menjelaskan bahwa buku ini seakan membangunkan

kita dari tidur dan berkata, “Hei... peran guru sebagai sumber informasi telah diambil alih oleh *google*, sehingga guru harus fokus pada peran lain yang tidak diambil oleh *google*.” Mas Satria mengingatkan, jangan hanya tergelitik oleh judulnya, tetapi bacalah semua karena isinya sangat mengaduk-aduk pikiran kita. Secara agak berlebihan, Mas Satria mengatakan, “buku ini wajib dibaca oleh mahasiswa pascasarjana bidang pendidikan.”

Saya ingin memberi gambaran bahwa sebenarnya hal seperti itu merupakan proses alami dan sudah terjadi di berbagai bidang. Di masa lalu, ketika teknologi belum berkembang, petani memanggul atau memikul jagung, padi, dan hasil panen lainnya dari sawah atau ladang. Nah, ketika muncul gerobak, jagung dan padi tidak dipikul tetapi dinaikkan ke gerobak yang ditarik sapi. Peran petani bukan lagi memikul jagung tetapi mengendalikan sapi agar gerobaknya berjalan dengan baik. Sekarang era gerobak telah usai dan diambil alih oleh truk. Jadi petani justru diringankan oleh kehadiran teknologi itu. Yang penting petani harus mampu memanfaatkan teknologi itu, sehingga lebih produktif.

Di masa lalu, ibu-ibu memasak nasi dengan *dandang*. Nah, ketika muncul *rice cooker*, proses menanak nasi berubah dan tugas ibu menjadi jauh lebih ringan. Namun bukankah masih banyak peran lain yang tidak diambil oleh mesin penanak nasi modern? Memilih beras yang cocok dengan kesehatan, menentukan bagaimana mencuci beras sebelum dimasukkan *rice cooker*, sampai menyetel *rice cooker* agar nasi yang ditanak sesuai harapan, masih menjadi tugas ibu-ibu.

Bukankah fenomena *google* dapat dianalogikan seperti itu? Jika di masa lalu guru harus menjadi sumber informasi

bagi murid, kiniperan itu sudah dapat digantikan oleh sederet mesin pencari yang canggih di internet. Namun bagaimana mencari informasi, mengolah dan menggunakan informasi secara benar, efektif dan efisien, tetap menjadi tugas guru. Masih banyak peran penting guru yang tidak dapat digantikan oleh *mbahgoogle*. Salah satunya adalah membimbing siswa dalam belajar memecahkan masalah dan mengembangkan kreativitas. Belum lagi yang terkait dengan karakter, yang tentu sangat memerlukan kehadiran guru sebagai teladan. Sebagaimana teknologi yang lain, *search engine* dapat meringankan tugas guru dan bukanlah menggantikannya. Yang diperlukan, bagaimana guru memanfaatkan teknologi informasi itu agar siswa dapat belajar lebih baik.

Esensi Pembelajaran

Esensi pembelajaran tampaknya juga masih perlu dipahami bersama oleh kita sebagai pendidik. Yang belajar itu siswa dan bukan guru. Tugas pokok guru “membuat dan membantu agar siswa mengalami proses belajar itu”. Paradigma *teaching* yang menekankan guru berbuat apa harus diubah menjadi paradigma *learning* yang menekankan siswa berbuat apa. Jika kita sepakat kalau proses belajar dirancang agar siswa menguasai kompetensi tertentu, maka kompetensi yang ingin dicapai itulah yang menjadi fokus guru ketika mengajar. Sebagai guru kita mesti memilih apa yang harus dilakukan siswa agar menguasai kompetensi tertentu, kemudian apa yang harus dilakukan guru agar siswa melakukan proses pembelajaran tadi.

Dalam konteks ini, kompetensi “dapat menjelaskan”, “dapat melakukan”, dan “melakukan tanpa disuruh” adalah tiga hal yang berbeda. Orang yang dapat menerangkan

cara mengemudi mobil, tetapi belum tentu terampil mengemudikan mobil. Sebaliknya yang pandai mengemudikan mobil juga belum tentu pandai menjelaskan. Orang yang pandai menerangkan shalat belum tentu melaksanakannya secara tertib tanpa paksaan. Sebaliknya orang yang melaksanakan shalat dengan tertib belum tentu mampu menjelaskan dengan baik.

Untuk setiap kompetensi tersebut diatas, diperlukan proses belajar yang berbeda. Oleh karena itu harus dipastikan mana yang menjadi target pembelajaran, sehingga dapat dirancang proses belajar yang harus dialami oleh siswa dan apa peran guru dalam mendukung proses belajar tersebut. Jadi metoda belajar yang tepat sangat tergantung kepada target kompetensi yang ingin dicapai.

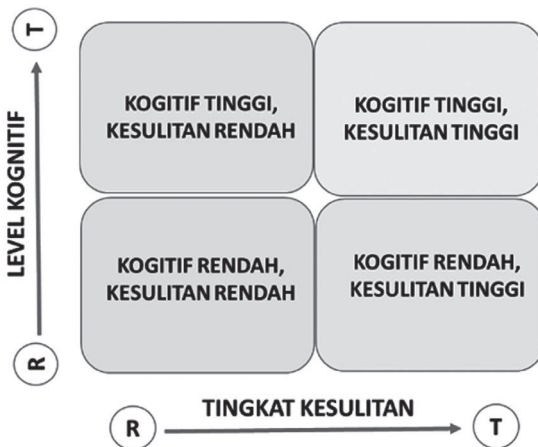
Lebih jauh dari itu, materi yang harus dipelajari siswa juga harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Memberikan materi ajar di luar kompetensi yang ingin dicapai berarti membuang waktu dan energi untuk hal yang tidak diperlukan. Sebaliknya, tidak memberikan materi yang diperlukan untuk membentuk kompetensi yang diinginkan, ibarat membuat minuman kopi susu, tetapi tanpa menyiapkan kopi atau susu dengan cukup. Ungkapan yang sering muncul “materi itu diajarkan karena ada dalam kurikulum atau dalam buku paket” harus ditinggalkan. Diperlukan kejelian dan keberanian guru dan pendidik, untuk memiliki materi ajar yang diyakini sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Tidak boleh berlebihan dan sebaliknya tidak boleh kurang. Jadi materinya harus pas dan metoda belajarnya juga harus pas.

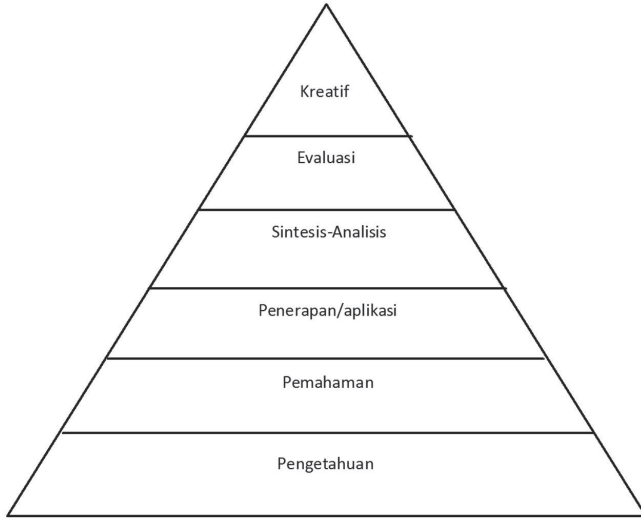
Perbedaan antara tingkat berpikir atau level kognitif dengan tingkat kesukaran materi ajar juga perlu mendapat perhatian kita sebagai pendidik. Ketika buku itu menyarankan

kan agar pendidikan diarahkan ke pengembangan berpikir tingkat tinggi, beberapa penanggap bertanya bukankah HOT (*high order thinking*) hanya cocok untuk anak-anak SMA dan tidak cocok untuk anak SD? Ada juga yang minta contoh konkret, bagaimana mengembangkan berpikir tingkat tinggi untuk anak SD di pedesaan, yang sarannya serba terbatas? Kesan saya, si penanya beranggapan berpikir tingkat tinggi hanya cocok untuk sekolah yang memiliki sarana berteknologi canggih dan itupun di tingkat SMA.

Yang menjadi incaran pembelajaran adalah pengembangan tingkat berpikir atau level kognitif dalam taksonomi Bloom. Lazimnya yang disebut HOT mulai dari analisis-sintesis, evaluasi, dan kreativitas. Jadi pendidikan didorong untuk mengembangkan kemampuan anak dalam berpikir analisis, melakukan evaluasi terhadap apa yang dilihat dan dilakukan, serta memecahkan masalah secara kreatif. Nah, salah satu pertanyaan yang masuk ke email saya: apakah anak SD sudah dapat berpikir tingkat tinggi?

Sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat gambar berikut ini.





TAKSONOMI BLOOM

Antara level berpikir dan tingkat kesulitan materi ajar adalah dua hal yang berbeda. Ada materi ajar dengan tingkat kesulitan tinggi tetapi sebenarnya pada level berpikir rendah. Pada masa lalu, ada topik “peta buta” dalam mata pelajaran IPS. Siswa diberikan gambar peta, tetapi tidak ada keterangan sama sekali. Siswa diminta menyebutkan nama kota, nama gunung, nama sungai, lama laut yang ada pada peta itu. Sulit sekali karena harus menghafal banyak hal. Namun proses pembelajaran itu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat rendah (LOT = *low order thinking*), karena hanya terbatas pada kemampuan mengingat dan paling tinggi level pemahaman.

Contoh lain adalah perhitungan dalam Matematika, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dengan angka-angka yang banyak. Sangat mungkin soal-soal seperti itu sangat sulit diselesaikan,

tetapi sebenarnya pada level kognitif yang rendah karena jika mengacu pada taksonomi Bloom hanya sampai level penerapan (aplikasi). Nah, seringkali kita mengira soal-soal seperti peta buta dan perkalian dengan angka-angka banyak itu mengembangkan level berpikir yang tinggi, karena sulit. Padahal yang sulit belum tentu memerlukan berpikir tingkat tinggi, sebaliknya berpikir tingkat tinggi tidak selalu menyangkut hal-hal yang sulit.

Lantas, seperti apa contoh level berpikir tinggi tetapi tidak sulit? Mari kita tanyakan kepada anak SD: Mengapa pada waktu hujan air sungai menjadiberwarna coklat? Atau tunjukkan air yang dituangkan dalam gelas dan di piring, kemudian tanyakan mana yang lebih cepat menguap? Contoh lain, tanyakan kepada anak SD jalan mana yang harus dilewati dari rumah ke sekolah, agar jaraknya paling pendek? Ketiganya termasuk soal yang mudah, tetapi memerlukan level kognitif tinggi. Siswa harus membandingkan dan menggandengkan beberapa fenomena, sehingga memerlukan kemampuan berpikir analisis dan evaluasi.

Untuk menemukan jawaban jawaban terhadap pertanyaan di atas, siswa harus melakukan analisis. Air berwarna coklat karena mengandung lumpur. Dari mana asalnya lumpur? Dari tanah yang dibawa air hujan. Permukaan air di piring lebih luas, sehingga lebih cepat terjadi penguapan. Untuk menemukan jalan yang terpendek dari rumah ke sekolah, siswa harus membanding-bandingkan berbagai jalur yang ada. Menghitungnya tidak sulit, tetapi harus membandingkan satu jalur dengan yang lainnya.

Untuk memudahkan, topik atau soal yang diawali dengan katasanya “apa”, “dimana”, biasanya tergolong pada LOT, sedangkan topik atau soal yang diawali dengan kata “mengapa”, dan “bagaimana” biasanya termasuk dalam

kategori HOT. Soal-soal seperti itu yang biasanya muncul pada tes PISA maupun TIMMS dan seringkali anak-anak kita kesulitan menjawab, karena tidak terbiasa dengan soal-soal HOT walaupun tingkat kesulitannya tidak tinggi.

Jurusan vs Prodi

Beberapa rekan dosen yang ikut bedah buku mempertanyakan ungkapan saya bahwa program studi di perguruan tinggi harus dipikirkan. Mereka mengatakan, penjurusan didasarkan pada bidang ilmu yang sudah mapan sampai saat ini. Tampaknya, kita masih belum dapat membedakan makna “jurusan” dan “program studi”. Jurusan adalah unit sumber pemelihara dan pengembang keilmuan. Sedangkan program studi adalah layanan perkuliahan untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan keperluan lapangan.

Dapat saja jurusan “membawahi” program studi, jika memang isi perkuliahan berada di kawasan keilmuan jurusan tertentu. Juga mungkin isi perkuliahan campuran dari keilmuan beberapa studi, sehingga program studi seperti itu tidak cocok menjadi “bawahan” jurusan tertentu. Jika tidak ada lagi keperluan untuk menghasilkan lulusan, dapat saja jurusan tidak memiliki program studi dan fokus kepada pengembangan ilmu dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi sebenarnya jurusan dan program studi merupakan dua entitas yang berbeda. Interseksi antara keduanya hanya karena kebetulan apa yang dipelajari di program studi itu sama atau ada kemiripan dengan apa yang dikaji di jurusan.

Nah, bukankah pola pekerjaan sekarang menjadi sangat lentur dan hubungan antara bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan semakin longgar? Teman dosen mengatakan, tidak sampai 50% alumninya bekerja sesuai

dengan program studi yang ditempuh. Beberapa instansi besar, seperti perbankan, ketika menerima karyawan tidak lagi mensyaratkan lulusan program studi tertentu. Yang penting lulus tes, nanti setelah mengikuti pelatihan akan diketahui bidang pekerjaan yang sesuai dengan potensinya. Ketika sudah bekerja, karier karyawan seringkali juga bagaikan spiral yang meliuk ke berbagai bidang yang berbeda-beda.

Ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaan ternyata juga terjadi pada lulusan SMK. Seorang kawan yang melakukan studi pelacakan lulusan sebuah SMK, mengatakan, ternyata hanya sekitar 35% lulusannya yang bekerja sesuai dengan paket keahlian yang dipelajari. Padahal SMK tersebut termasuk SMK Rujukan dengan kualitas sangat baik. Sangat mungkin lulusan bekerja pada bidang lain tersebut bukan karena tidak memiliki keterampilan yang memadai, tetapi pekerjaan itulah yang tersedia ketika yang bersangkutan lulus. Dan yang menarik mereka merasa kerasan menekuni pekerjaan itu.

Nah, jika keadaan sudah seperti itu, apakah penjurusan atau program studi atau paket keahlian yang sangat spesifik cocok untuk pola pekerjaan saat ini? Apakah banyaknya lulusan yang bekerja pada bidang yang tidak sesuai bukan suatu pemborosan energi, waktu dan biaya? Oleh karena itu sudah saatnya dipikirkan apakah pola program studi di perguruan tinggi dan pola paket keahlian di SMK masih cocok untuk diterapkan? Atau sudah saatnya disesuaikan dengan pola pekerjaan yang sangat lentur?

Sekolah Internasional

Dorongan saya agar sekolah kita secara bertahap “*go international*” juga mengundang pro dan kontra. Beberapa

email ke saya mempertanyakan alasannya. Penanya juga menyebutkan, bukankah Mahkamah Konstitusi telah membatalkan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), sehingga jika itu diteruskan berarti melawan hukum? Tampaknya kita sulit membedakan antara konsep dan implementasi. Yang salah pada tataran konsep atau tataran pelaksanaan?

Ketika era keterbukaan sudah dimulai, tenaga kerja bebas berlalu lalang melintas negara. Pemilik perusahaan juga bebas berubah setiap saat, melintasi batas negara. Pada era seperti itu pastilah pekerjaan menerapkan standar internasional dan itulah yang saat ini dihadapi oleh lulusan sekolah maupun universitas. Mereka harus bekerja sama dan bersaing dengan rekannya yang alumni sekolah dan universitas berbagai negara. Nah, apakah dengan begitu kita akan tetap bertahan dengan “standar lokal?”

Bahwa RSBI memunculkan dampak negatif, misalnya menjadi mahal dan memunculkan “kelas eksklusif”, dampak itulah yang harus diminimalkan. Bukan mengatakan konsep RSBI salah. Ibarat ada tikus di lumbung padi, mari kita basmi tikusnya dan bukan dibakar lumbungnya.

Kalau kita jujur, toh sampai sekarang sekolah semacam RSBI tetap tumbuh subur di bumi Indonesia, dengan berbagai macam label. Ada yang menyebut international school, ada yang menyebut sekolah plus dengan menerapkan kurikulum asing, bahkan ada yang secara terang-terangan menyebut “sekolah asing di Indonesia”. Sekolah-sekolah seperti itu pada umumnya mahal dan diminati oleh masyarakat kalangan atas.

Nah, bagaimana dengan masyarakat kalangan bawah yang punya anak berbakat? Itulah perlukan beberapa sekolah negeri *go internasional* tetapi didukung oleh anggaran

pemerintah. Ada ungkapan “anak orang kaya bersekolah di sekolah yang bagus, menjadi pandai, mendapat pekerjaan yang bagus sehingga kaya seperti orangtuanya” dan “anak orang miskin bersekolah di sekolah yang jelek, menjadi tidak pandai, mendapat pekerjaan yang kurang baik, akhirnya miskin seperti orangtuanya.” Sudah saatnya ungkapan itu harus dipotong, sehingga anak orang miskin juga punya peluang bersekolah di sekolah yang baik, menjadi pandai, mendapat pekerjaan yang hebat dan akhirnya kaya.

Semoga. ◆



Tentang Penulis

Profesor Muchlas Samani lulus pendidikan S3 dengan predikat *Cum Laude* di Universitas Negeri Jakarta Tahun 1991. Sebelumnya menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), S2 di Universitas Negeri Yogyakarta, serta Akta Mengajar V dengan predikat khusus karena memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif 4,0. Aktif mengikuti berbagai pelatihan, *workshop*, serta seminar baik di dalam maupun di luar negeri.

Saat ini bekerja sebagai guru besar Universitas Negeri Surabaya dan menjadi konsultan pada USAID. Dipercaya menjadi Ketua Tim Perencanaan dan Pengembangan IKIP Surabaya Tahun 1994-1997, Sekretaris Program Pascasar-

jana IKIP Surabaya Tahun 1997-1998, Pembantu Rektor Bidang Kerja sama Unesa Tahun 2006-2007, Direktur Ketentagaan Ditjen Dikti Kemdikbud Tahun 2007-2010, dan Rektor Unesa masa bakti 2010 - 2014.

Pernah menjadi konsultan *Asian Development Bank* Tahun 1998-2000 dan melahirkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), konsultan *World Bank* Tahun 2001-2003 dan melahirkan konsep *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dan Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*). Pada tahun 2006-2007 menjadi Ketua Tim Sertifikasi Guru Nasional dan ketika menjadi Direktur Ketentagaan Ditjen Dikti melahirkan beasiswa luar negeri bagi dosen untuk menempuh S2/S3 di negara maju maupun *postdoc* bagi yang sudah bergelar S3. Program itulah yang sekarang menjelma menjadi Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) dan *Scheme for Academic Mobility and Exchange* (SAME)

Semenjak purnatugas sebagai rektor, Muchlas Samani kembali ke dunia akademik dengan melakukan serangkaian penelitian, mengikuti seminar, dan menulis buku. Tahun 2014-2015 melakukan penelitian tentang Model Pembelajaran untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis, Kreativitas dan Pemecahan Masalah. Saat ini sedang melakukan penelitian tentang Model Pendidikan Guru Sains dan Teknologi di Era Digital dan untuk itu selama Oktober 2016 menjadi *visiting scholar* di *Institut Technik und Bildung-Universitat Bremen* di Jerman dengan berpartner dengan Prof Michael Gessler dan Dr. Pekka Kamarainen. Saat itu sempat diundang untuk *workshop Enhancing Teaching through Innovative Pedagogies and Technologies* bersama dengan Prof Linda Price di *Heriot Watt University Edinburgh*. Pada 31 Agustus-3 September 2016 bertugas

ke Korea Selatan untuk memelajari pendidikan vokasi di *Korea Research Institute for Vocational Education and Training* (KRIVET). Terhitung sejak 1 Agustus 2016 ditunjuk sebagai Editorial Advisory Board dari *International Journal for Research in Vocational Education and Training* (IJRVET) yang bermarkas di Jerman.

Beberapa paper yang dihasilkan antara lain: (1) *Rethinking Education in the 21st Century: An Indonesia Case*, dipresentasikan pada *ASAIHL International Conference* di NTU Singapura, 3-4 Desember 2014, (2) *Local Wisdom as A Basis of Character Education*, dipresentasikan pada *ASAIHL International Conference* di Isfahan Iran, 22-24 Mei 2015, (3) *Teaching-Learning Strategy for Developing Critical Thinking and Creativity for Engineering Student Teachers*, dipresentasikan pada *TVET International Conference* di Bremen University Jerman, 2-4 September 2015, (4) *Instructional Model to Improve Problem Solving, Creativity and Team Working Skills for Student Teacher*, dipresentasikan pada *UPI International Conference of Technical and Vocational Education and Training* di Bandung, 15-16 November 2016. Tanggal 19 November 2016 diundang menjadi *keynote speech* pada *International Conference on Transformative Education and Educational Leadership* di Unimed, Medan.

Beberapa buku yang pernah ditulis di antaranya: (1) *Pendidikan Karakter: Konsep dan Model*, 2011, (2) “Pendidikan untuk Kehidupan” di dalam buku *Mengatasi Masalah Narkoba dengan Welas Asih*, 2011, (3) *Profesionalisasi Pendidikan*, 2012, (4) *Rasa, Karsa dan Cipta dalam Kata*, 2014, (5) *Strategi Belajar Berpikir Kreatif*, sebagai editor, 2015, (6) *Berpikir Tingkat Tinggi: Problem Solving*, 2016. Ketika mengakhiri tugas sebagai Rektor Unesa Tahun 2014

menerbitkan buku *Mohon Maaf, Masih Compang-camping*, yang mendapat banyak tanggapan dari pembacanya.

Muchlas Samani juga aktif di kegiatan sosial, di antaranya membina Yayasan Taman Baca Rumah Kita, tempat anak-anak keluarga kurang mampu di Kelurahan Tenggilis Mejoyo untuk belajar secara gratis. Aktif menuliskan pengalaman dan gagasannya di blog pribadi: muchlassamani.blogspot.com. ◆